PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MATARAM

WWW.MATARAMKOTA.GO.ID

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 tahap III yang memuat analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta kebijakan umum dan program pembangunan daerah, yang dimaksudkan sebagai pelaksana dan tujuan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah *Kota Mataram Tahun 2016-2021* (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 9 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun *2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* Kota Mataram Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah Rencana Pembangunan Daerah yang bersifat strategis untuk periode lima tahunan karena merupakan komitmen bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.
5. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat P-RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dilakukan perubahan karena adanya perubahan yang mendasar dan sisa masa berlaku RPJMD lebih dari 3 (tiga) tahun.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode Tahun 2016-2021.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX PENUTUP

(2) Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
   a. *Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa* proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. *Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa* substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis *ekonomi, konflik sosial budaya*, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan tidak mendasar yang bersifat *parsial dan/ atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak* mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *menjadi pedoman dalam menyusun* Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

(5) Pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD Tahun 2019, 2020 dan 2021.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal **23 Oktober 2019**
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal **23 Oktober 2019**
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (**87**/2019)

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... Daftar Isi-1

I Pendahuluan ..... **Bab 1-1**

1.1. Latar Belakang ..... Bab 1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... Bab 1-7
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... Bab 1-10
1.4. Maksud dan Tujuan ..... Bab 1-22
1.5. Sistematika Penulisan ..... Bab 1-23

II Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... **Bab 2-1**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... Bab 2-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... Bab 2-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ..... Bab 2-16
2.1.3 Kawasan Rawan Ancaman Bencana ..... Bab 2-20
2.1.4 Kondisi Demografis ..... Bab 2-21
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... Bab 2-27
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... Bab 2-27
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... Bab 2-37
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... Bab 2-37
2.3. Aspek Pelayanan Umum ..... Bab 2-45
2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib ..... Bab 2-45
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... Bab 2-82
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... Bab 2-82
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ..... Bab 2-84
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ..... Bab 2-85
2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia ..... Bab 2-87
2.4.5 Pencapaian *Suistainable Development Goals* (SDGs) ..... Bab 2-89

III Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ..... Bab 3-1

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2011-2016 ..... Bab 3-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015 ..... Bab 3-25
3.3. Kerangka Pendanaan ..... Bab 3-30

IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah ..... Bab 4-1

4.1. Permasalahan Pembangunan ..... Bab 4-1
4.2. Isu Strategis ..... Bab 4-13

V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ..... Bab 5-1

5.1. Visi ..... Bab 5-1
5.2. Misi ..... Bab 5-2
5.3. Tujuan dan Sasaran ..... Bab 5-3

VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah ..... Bab 6-1

VII Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah ..... Bab 7-1

7.1. Program Mendesak ..... Bab 7-1

7.2. Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan ..... Bab 7-4

VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..... Bab 8-1

8.1. Indikator Kinerja Daerah ..... Bab 8-1

IX Penutup ..... Bab 9-1

BAB 1
PENDAHULUAN

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Mataram untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Mataram tahun 2011-2031 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Kota Administratif Mataram yang pada saat itu berada dibawah wilayah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II pada tanggal 31 Desember 1993 yang selanjutnya ditetapkan menjadi hari jadi Kota Mataram. Peningkatan status tersebut karena Kota Administratif Mataram dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, dan juga menggambarkan mengenai peningkatan potensi wilayah dan kemampuannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk menyusun rencana pembangunan yang bersinergi menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus berkaitan, baik dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun berdasarkan undang-undang tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan telah terpilih dan dilantiknya Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram masa bakti periode 2016-2021, pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52.676 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 12 Februari 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.52.677 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 12 Februari 2016, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran tahapan Pembangunan lima tahun Ketiga dari Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025, dengan Visi Kota Mataram Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025”, selanjutnya RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 menjadi RPJMD tahap kedua dari kepemimpinan Kepala Daerah periode sebelumnya, sehingga pilihan yang tepat adalah *“Melanjutkan Kepemimpinan*” dalam bingkai perubahan untuk penyempurnaan, bukan memulainya dari meniadakan yang sudah mampu dicapai, dan Visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” yang diterjemahkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Mataram.

Penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 jika dirunut berdasarkan proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

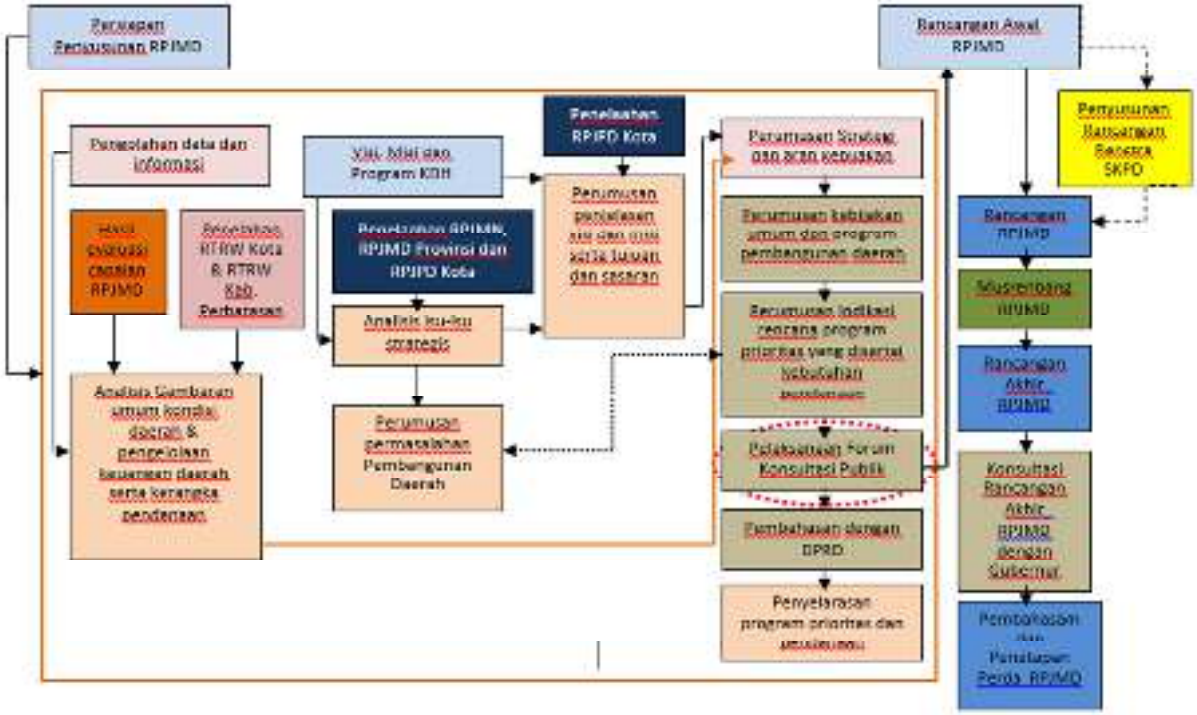

Gambar 1.1. **Proses Penyusunan RPJMD Kota Mataram**

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;
5. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;
7. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Mataram melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram tahun 2016-2021. Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan Kota Mataram sesuai dokumen rencana jangka menengah periode tahun 2016-2021, terdapat perubahan kondisi kebijakan nasional yang mempengaruhi tatanan kewenangan urusan pemerintahan serta pencapaian target kinerja pembangunan terhadap indikator-indikator kinerja utama pemerintah yang telah ditentukan serta kondisi darurat dan luar biasa yang mempengaruhi jalannya roda pembangunan. Dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan nasional terutama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan amanat pelaksanaan dari ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempengaruhi tata laksana kewenangan urusan daerah baik pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun pemerintah Pusat. Regulasi tersebut mengatur kriteria Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dengan variabel umum dan teknis yang memperhitungkan indikator-indikator karakteristik daerah dan beban tugas utama terhadap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang kemudian dituangkan dalam regulasi daerah berupa Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. Perubahan kebijakan ini disusul oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk “segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.” Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dan penyesuaian terhadap susunan Perangkat Daerah di Kota Mataram sebagai pelaksana pembangunan sesuai peraturan perundangan yang berlaku tersebut.
2. Menurut Pasal 342 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan lampirannya, perubahan RPJMD dapat dilakukan antara lain apabila terjadi perubahan yang mendasar yang dalam hal ini adanya

perubahan kebijakan nasional seperti yang dijelaskan pada poin 1 (satu) di atas dengan sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.

3. Belum terakomodirnya peninjauan terhadap kebijakan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyesuaian terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan tujuan agar pembangunan daerah dan kebijakannnya berintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Terjadinya Bencana Alam berupa gempa bumi beruntun yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurang lebih 2 (dua) bulan sejak tanggal 29 Juli 2018. Deretan gempa dengan epicentrum sebagian besar berada di utara, barat laut hingga timur laut Pulau Lombok ini memiliki kekuatan penghancur yang cukup besar sehingga juga menyebabkan kerusakan hingga Kota Mataram. Kerusakan yang diakibatkan gempa bumi tersebut telah berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana. Dalam rangka penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, telah dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu-Pasna) oleh BNPB dengan melibatkan Kementerian/Lembaga sektor terdampak dan Pemerintah Daerah Kota Mataram beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdampak. Bencana gempa bumi ini telah mengakibatkan total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.1.092.316.169.601**.**

Perubahan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 juga dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk membantu merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana, dan program yang akan atau sudah ditetapkan, serta untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dari setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat diatasi. Hasil KLHS RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 dengan Visi "**Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya"** menunjukkan Kota Mataram belum mampu mencapai target secara nasional terhadap 17 (tujuh belas) indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dilaksanakan dan menjadi wewenang Kota yaitu:

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
3. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan;
4. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi;
5. Angka Kematian Ibu (AKI);
6. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup;
7. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun;

8. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
9. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal;
10. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,
11. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang;
12. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang,
13. Persentase sampah perkotaan yang tertangani;
14. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur;
15. Laju pertumbuhan PDB per kapita;
16. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
17. Mengembangkan, lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Dengan demikian, dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, diperlukan skenario yang menjadi konsep pengembangan Kota Mataram di masa yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Kota Mataram dalam pencapaian target TPB terhadap gagasan alternatif arah kebijakan untuk masa depan. Adapun skenario arah kebijakan yang direkomendasikan oleh KLHS meliputi:

a. Alternatif skenario dengan upaya tambahan bagi indikator-indikator TPB yang belum mencapai target RPJMN 2019, baik untuk indikator-indikator yang sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan. Alternatif ini merekomendasikan evaluasi efektifitas program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencapaian indikator dan evaluasi indikasi biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
b. Alternatif skenario tanpa upaya tambahan untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator yang telah mencapai target nasional. Beberapa alternatif skenario Kota Mataram tanpa upaya tambahan, yaitu dengan mempertahankan program dan kegiatan untuk pelaksanaan seluruh TPB yang sudah mencapai target nasional (*Business as Usual*); ataupun dengan mempertahankan program dan kegiatan untuk indikator TPB yang sudah mencapai target nasional, berdasarkan skala prioritas.
c. Alternatif skenario pencapaian TPB melalui perhitungan selisih antara target yang akan dicapai dengan kondisi faktual Kota Mataram saat ini. Skenario pencapaian dilakukan melalui sintesa gambaran umum dan hasil analisis pencapaian Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target yang bersifat strategis bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mataram. Acuan pencapaian target mengacu pada Target/Sasaran SDGs serta Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 yang merupakan landasan pencapaian SDGs pada level nasional. Pada indikator tersebut diatas, dilakukan analisis pencapaian 3 tahun terakhir

yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018 serta dihitung rata-rata capaian 3 tahun tersebut. Dari rata-rata tersebut kemudian dibandingkan dengan target Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 untuk mengetahui selisih seberapa besar yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Mataram tahun 2019-2021.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan lampirannya;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
36. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025.
37. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram 2011-2031.
38. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
39. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

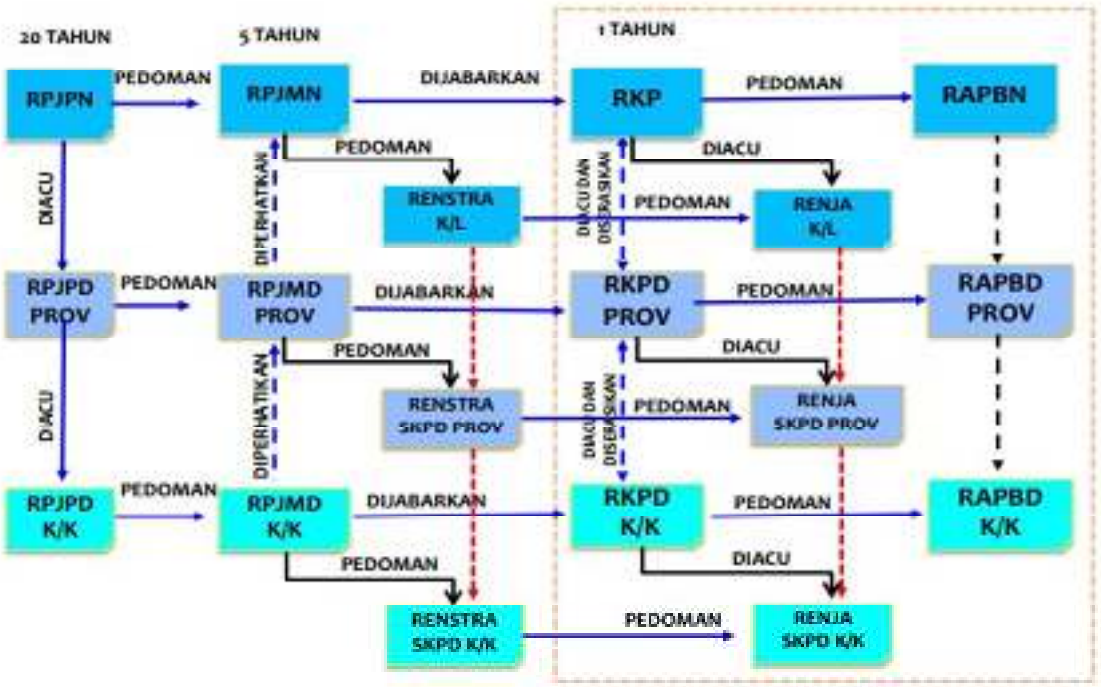

Gambar 1.2. **Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/ Daerah**

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Mataram dengan RTRW Kota Mataram

Kota Mataram merupakan wilayah administratif yang pembentukannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531). Setelah pemekaran wilayah yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D), telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pola pemanfaatan ruang, oleh karena itu perlu adanya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal.

Pemerintah Kota Mataram berwenang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya dan

pembangunan di Kota Mataram serta penyelaras kebijakan dengan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Mataram.

Dengan melihat potensi wilayah dan isu strategis baik yang bersifat internal seperti permasalahan maupun faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan barbagai kondisi regional serta untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang berkembang, maka tujuan penataan ruang wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 adalah mewujudkan Kota sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri, serta Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan yang berarti harus:

1. mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

2. RPJMD Kota Mataram dengan RPJPD Kota Mataram

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dan keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Mataram periode 2016-2021, juga berpedoman RPJPD Kota Mataram 2005-2025. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

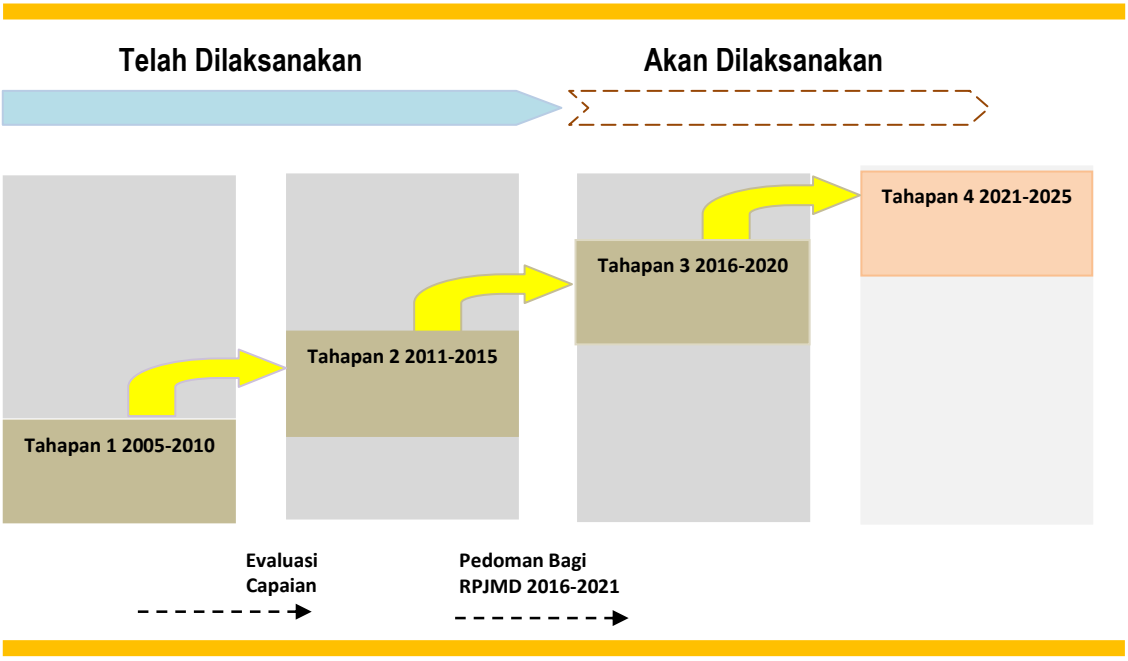

Gambar 1.3. **Tahapan RPJPD Kota Mataram**

3. RPJMD Kota Mataram dengan RPJMN

Penelaahan terhadap RPJMN dimaksudkan untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional. Adapun matriks hubungan antara Arah Kebijakan Nasional (Nawacita Presiden Tahun 2014-2019).

Tabel 1. 1
Matriks Hubungan Antara Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan Nawacita Presiden Tahun 2014-2019

Misi RPJMD Kota Mataram 2016-2021	Nawacita Presiden 2014-2019
MISI I Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun Dan Damai	**Cita 1** :Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara **Cita 8** :Melakukan revolusi karakter bangsa **Cita 9** :Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
MISI II Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar Dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka	**Cita 5** :Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Misi RPJMD Kota Mataram 2016-2021		Nawacita Presiden 2014-2019
	Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing	
MISI III	Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera	**Cita 6** :Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. **Cita 7** :Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik
MISI IV	Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan	**Cita 3** :Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
MISI V	Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	**Cita 2** :Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya **Cita 4** :Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

4. RPJMD Kota Mataram dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penelaahan terhadap dokumen RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan agar perencanaan pembangunan Kota Mataram tahun 2016-2021 memiliki keterpaduan dengan pemerintah daerah provinsi yang memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap pembangunan daerah di Kota Mataram. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikaji adalah RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2019-2023. Penelaahan atas pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat juga didasarkan pada RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025. Kesesuaian Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang tingkat Provinsi, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Kesesuaian Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang Provinsi NTB

Misi RPJMD Kota Mataram 2016-2021	Misi RPJMD NTB 2019-2023	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Arah Pembangunan Provinsi NTB 2018-2023
MISI I Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun Dan Damai	**Misi 6 :** NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	**Sapok 1** Terwujudnya perkehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib, dan harmoni	**Misi 1** Mewujudkan masyarakat Beriman, Bermoral, Berbudaya, dan Berkesadaran Hukum
MISI II Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar Dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing	**Misi 3:** NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	**Sapok 2:** Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin meningkat termasuk peran perempuan dalam pembangunan **Sapok 5:** Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat	**Misi 2** Mewujudkan Masyarakat Sejahtera
MISI III Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera	**Misi 4:** NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	**Sapok 12:** Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan **Sapok 13:** Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif	**Misi 3** Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan **Misi 4** Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah

Misi RPJMD Kota Mataram 2016-2021	Misi RPJMD NTB 2019-2023	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Arah Pembangunan Provinsi NTB 2018-2023
MISI IV Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan	**Misi 1 :** NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah **Misi 4 :** NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	**Sapok 7 :** Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi	**Misi 5** Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
MISI V Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	**Misi 2 :** NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	**Sapok 4:** Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai prinsip prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	**Misi 3** Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan

5. RPJMD Kota Mataram dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019

Penelaahan dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat dimaksudkan agar perencanaan pembangunan Kota Mataram tahun 2016-2021 memiliki keterpaduan dengan pemerintah daerah Kabupaten lain yang berbatasan langsung dan memiliki keterkaitan serta pengaruh terhadap pembangunan daerah di Kota Mataram. RPJMD Kabupaten Lombok Barat yang dikaji adalah periode 2014-2019. Namun mengingat periode pembangunan jangka menengah Lombok Barat akan berakhir pada 2019, maka selanjutnya penelaahan atas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat didasarkan pada RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025. Kesesuaian Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan panjang Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Kesesuaian Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Lombok Barat

Misi RPJMD Kota Mataram 2016-2021		Misi RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019
MISI I	Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun Dan Damai	Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang dimiliki untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat)
MISI II	Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar Dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)
MISI III	Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera	Meningkatkan kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)
MISI IV	Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan	Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)
MISI V	Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang memiliki Spirit serta Etos Kerja untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berpestasi)

6. RPJMD Kota Mataram dengan KLHS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan lampirannya, penelaahan KLHS terhadap RPJMD dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan jangka menengah.

7. RPJMD Kota Mataram dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 85 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang pada pokoknya mengamanatkan Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi Perangkat Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

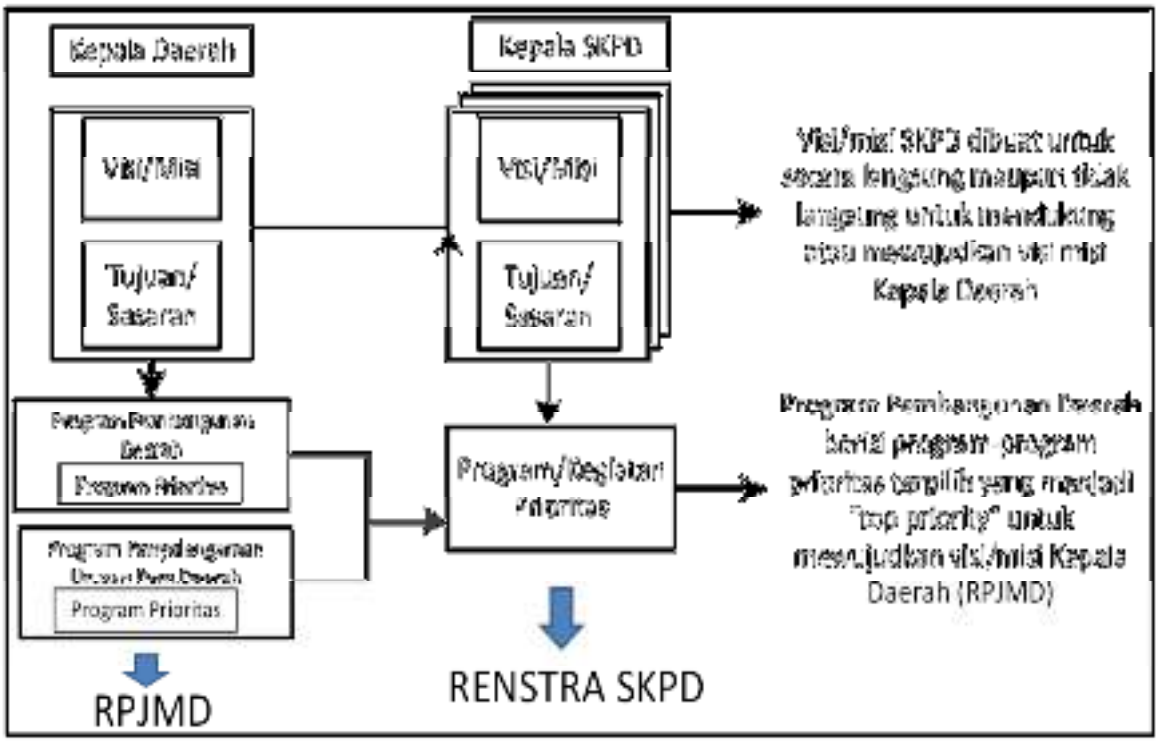

Gambar 1.4. **Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah**

8. RPJMD Kota Mataram dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Mataram yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama Musrenbang atau yang dikenal dengan MPBM Kota Mataram yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Mataram, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

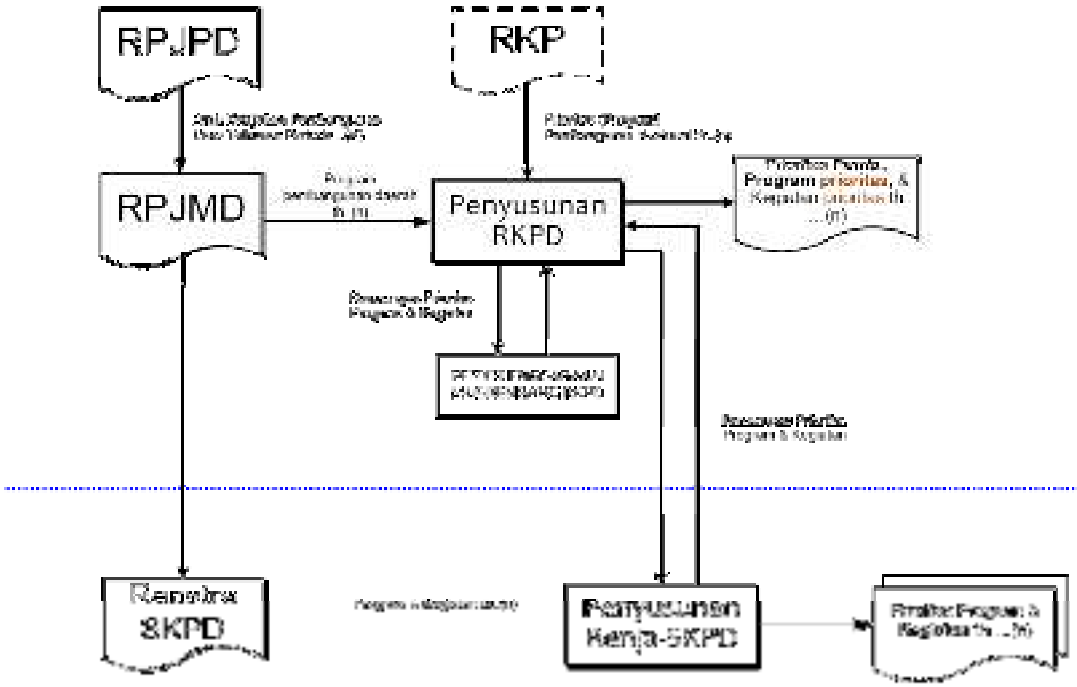

Gambar 1.5. **Bagan Alir Hubungan Antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah**

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

9. RPJMD Kota Mataram dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kota di sekitar Kota Mataram, yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Skema hubungan antara RPJMD Kota Mataram 2016-2021 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.

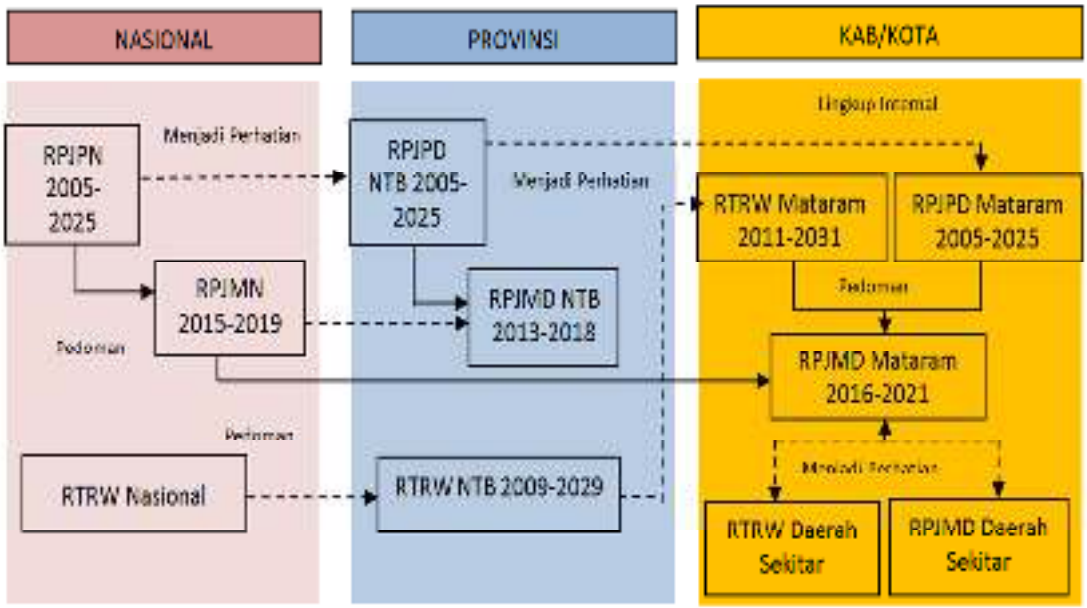

Gambar 1.6. **Hubungan Antara RPJMD Kota Mataram Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penyusunan RPJMD Kota Mataram berpedoman pada RTRW Kota Mataram yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW Kota Mataram, juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi NTB dan Kabupaten sekitarnya, guna tercipta sinkronisasi dan

sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/ kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dan perubahannya dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Mataram sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Walikota terpilih masa bakti 2016-2021 selaras dengan perkembangan kebijakan nasional, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

2. Tujuan

a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2016-2021;
b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
c. Menerjemahkan Visi dan Misi Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025;
d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
e. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Mataram periode 2016-2021.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Perubahan RPJMD Kota Mataram ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan lampirannya, terdiri dari 9 (sembilan) Bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX PENUTUP

BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup *Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan*, dan *Aspek Daya Saing* dengan indikator makro, sebagai berikut:

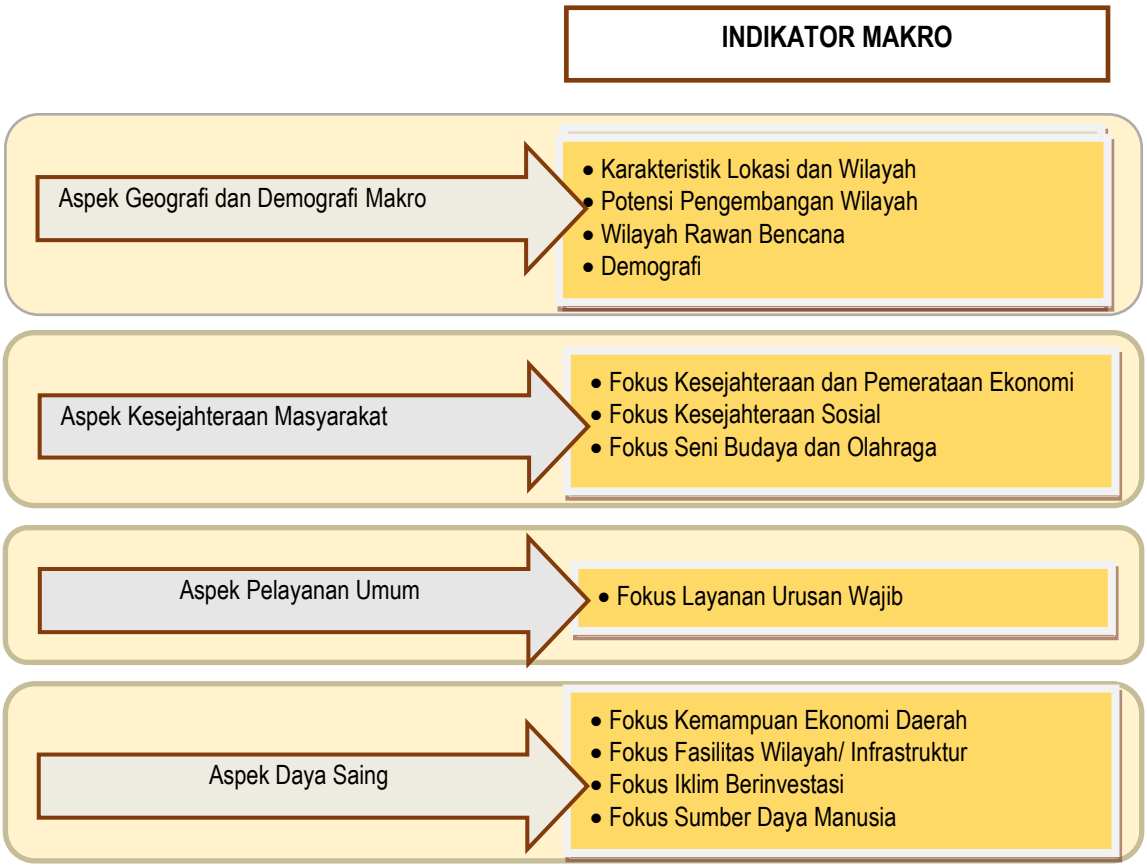

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 Km2 (6.130 Ha) dan 56,80 Km2 perairan laut serta garis pantai sepanjang 9 km. Luas wilayah Kota Mataram tersebut hanya 0,30 persen

dari luas Provinsi NTB secara keseluruhan yaitu 20.153,15 Km², sehingga menjadikan Kota Mataram sebagai kota dengan wilayah terkecil dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB.

Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah kecamatan, 50 kelurahan dan 325 lingkungan, dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Selaparang dengan luas 10,77 km² dan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah 9,46 km², sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
Ampenan	10	55	9,46	15,43
Cakranegara	10	73	9,67	15,77
Sekarbela	5	36	10,32	16,84
Mataram	9	55	10,76	17,55
Selaparang	9	61	10,77	17,57
Sandubaya	7	45	10,32	16,84
Jumlah	**50**	**325**	**61,30**	**100,00**

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Secara lebih rinci, luas wilayah Kota Mataram menurut kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Mataram menurut Kecamatan dan Kelurahan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
1.	Kecamatan Ampenan	Ampenan Selatan	0,84
		Ampenan Tengah	0,59
		Ampenan Utara	2,49
		Banjar	0,41
		Bintaro	0,82
		Dayan Peken	0,54
		Kebon Sari	0,58
		Pejarakan Karya	0,74
		Pajeruk	0,85
		Taman Sari	1,61
	Luas Kecamatan Ampenan		**9,46**

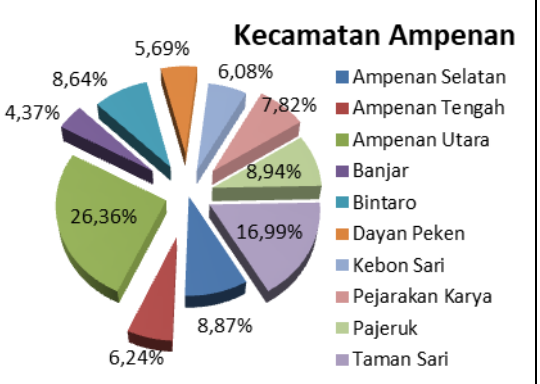

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
2.	Kecamatan Cakranegara	Cakranegara Barat	0,51
		Cilinaya	1,29
		Sapta Marga	0,86
		Cakranegara Timur	0,67
		Mayura	1,02
		Cakranegara Selatan	0,73
		Cakranegara Selatan Baru	0,56
		Cakranegara Utara	1,29
		Karang Taliwang	0,62
		Sayangsayang	2,12
	Luas Kecamatan Cakranegara		**9,67**

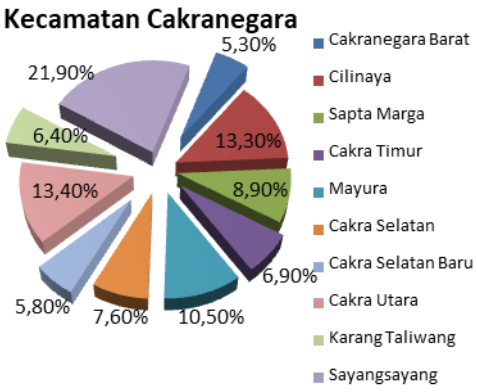

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
3.	Kecamatan Mataram	Pejanggik	1,03
		Mataram Timur	1,24
		Pagesangan	1,96
		Pagesangan Barat	0,75
		Pagesangan Timur	1,10
		Pagutan Barat	0,91
		Pagutan	1,86
		Pagutan Timur	1,03
		Punia	0,88
	Luas Kecamatan Mataram		**10,76**

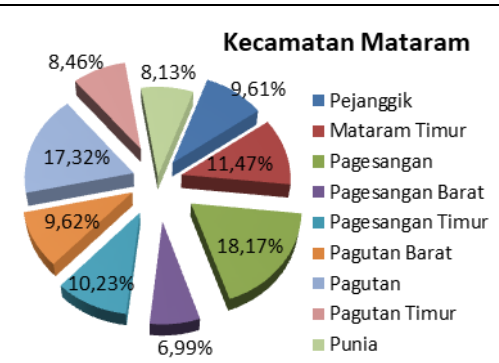

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
4.	Kecamatan Sandubaya	Selagalas	2,99
		Bertais	1,04
		Mandalika	1,00
		Babakan	1,10
		Turida	1,97
		Dasan Cermen	1,58
		Abian Tubuh Baru	0,64
	Luas Kecamatan Sandubaya		**10,32**

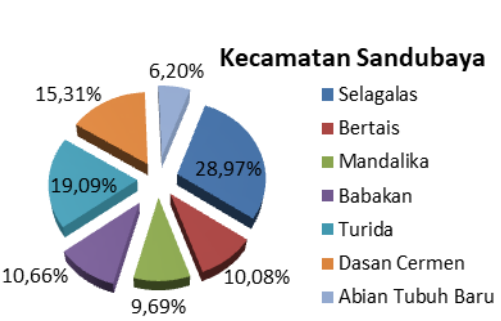

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
5.	Kecamatan Sekarbela	Kekalik Jaya	1,35
		Tanjung Karang Permai	0,68
		Tanjung Karang	2,57
		Karang Pule	1,07
		Jempong Baru	4,65
	Luas Kecamatan Sekarbela		**10,32**

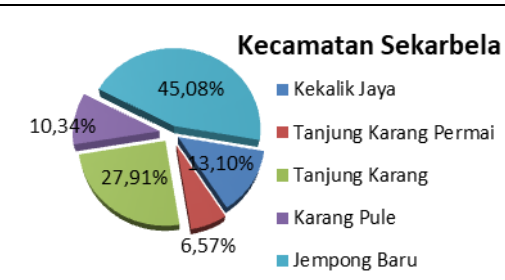

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
6.	Kecamatan Selaparang	Rembiga	3,15
		Karang Baru	2,37
		Monjok Timur	0,37
		Monjok	1,35
		Monjok Barat	0,50
		Mataram Barat	0,69
		Gomong	0,39
		Dasan Agung	0,79
		Dasan Agung Baru	1,16
	Luas Kecamatan Selaparang		**10,77**

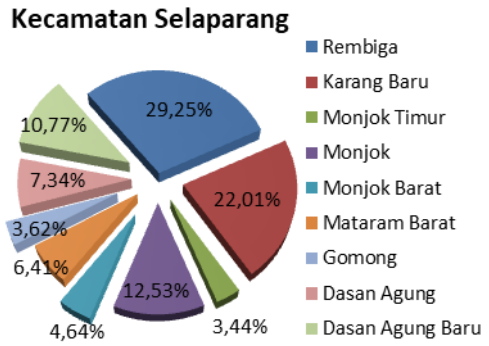

Luas Kota Mataram	**61,30 km²**

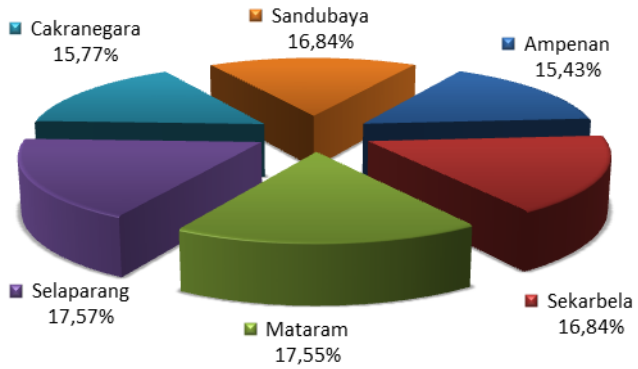

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, batas-batas wilayah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Barat : Selat Lombok

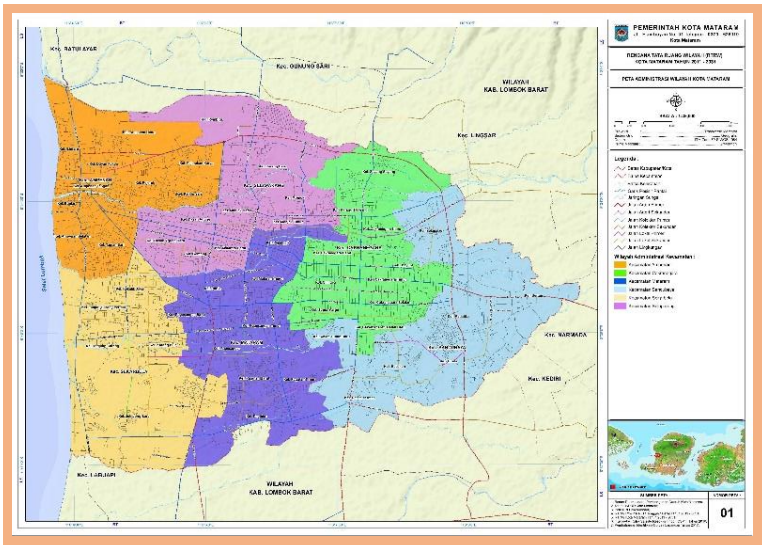

Gambar 2.1. **Peta Wilayah Administrasi Kota Mataram**

2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Mataram terletak pada ujung sebelah Barat Pulau Lombok dan secara astronomis terletak pada posisi 116°04' dan 116°10' Bujur Timur dan 08°33' - 08°38' Lintang Selatan.

Gambar 2.2. **Lokasi Kota Mataram dalam Peta Provinsi NTB**

3) Topografi

Topografi Kota Mataram dibedakan menjadi datar-landai yang berada di bagian barat serta bergelombang di bagian timur. Secara umum Kota Mataram berada pada ketinggian ratarata 0 - 75 m dpl dengan selang ketinggian 9 km. Ketinggan wilayah yang berada di pesisir pantai, yaitu di Kecamatan (Kecamatan Ampenan dan Sekarbela) kurang dari 15 m dpl, sedangkan di bagian timur (Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya) memiliki ketinggian ratarata 40 - 80 m dpl.

Tabel 2.3
Ketinggian Wilayah Kota Mataram Tahun 2018

No	Kecamatan	Ketinggian	
		Meter dpl	Persentase
1	Ampenan	4 – 14	15,43
2	Sekarbela	5 – 9	16,84
3	Mataram	11 – 26	17,56
4	Selaparang	11 – 27	17,56
5	Cakranegara	16 – 50	15,77
6	Sandubaya	50 – 75	16,84
Total		**0 – 75**	**100,00**

Sumber: Kota Mataram dalam Angka Tahun 2018

Kemiringan 0-8% berada di Kecamatan Ampenan, Sekarbela, dan Mataram. Sedangkan kemiringan 10-15% berada di Kecamatan Cakranegara, Selaparang, dan Sandubaya. Variasi kemiringan lereng wilayah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Kemiringan Wilayah Kota Mataram Tahun 2018

No	Kecamatan	Kelas Kemiringan (%)			
		Datar (0 -2)	Bergelombang (2-15)	Curam (14 – 40)	Sangat Curam (>40)
1	Ampenan	730	216	-	-
2	Sekarbela	325	707	-	-
3	Mataram	794	282	-	-
4	Selaparang	488	589	-	-
5	Cakranegara	508	459	-	-
6	Sandubaya	371	656	5	-
Total		**3.216**	**2.909**	**5**	**0**
Persentase		**52,40 %**	**47,50 %**	**0,10%**	**0,00%**

Sumber: Kota Mataram dalam Angka Tahun 2018

Data yang disajikan pada Tabel 3.3 diatas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kemiringan lereng 0 – 2%, merupakan daerah datar, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas daerah ± 3.216 Ha atau 52,40% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Mataram yaitu seluas 794 Ha atau 24,68 % dari luas daerah dengan kemiringan 0 – 2%.
2. Kemiringan lereng 2 - 15%, merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas daerah ± 2,909 Ha atau 47,50% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Sekarbela yaitu seluas 707 Ha atau 21,98 % dari luas daerah dengan kemiringan 2 - 15%.

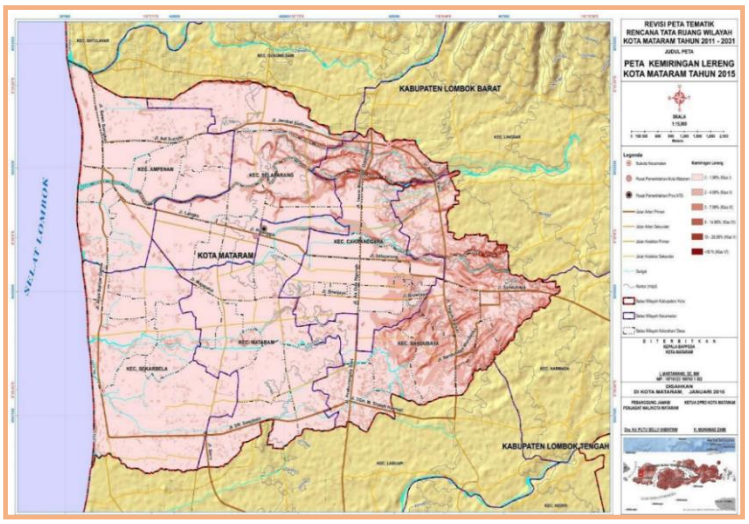

Gambar 2.3. **Peta Kemiringan Lereng Kota Mataram**

4) Geologi dan Jenis Tanah

Formasi batuan di Kota Mataram terdiri dari batuan gunungapi, batuan sedimen, serta batuan terobosan yang umurnya berkisar dari jaman tersier sampai kuarter. Formasi bantuan yang terbentuk adalah:

1. Formasi Kalipalung (TQp) dengan anggota Selayar (TQs), menghasilkan jenis batuan breksi gampingan dan lava, batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan sisipan tipis karbon.
2. Formasi Kalibabak (TQb) menghasil jenis batuan breksi dan lava.
3. Formasi Lekopiko (Qvl) menghasilkan jenis batuan tuff berbatu apung, breksi lahar, lava.

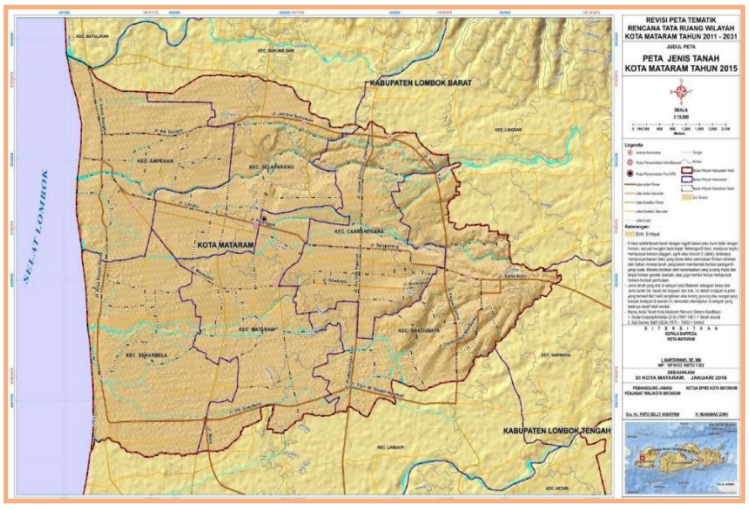

Gambar 2.4. **Peta Jenis Tanah Kota Mataram**

Jenis batuan mempengaruhi struktur tanah, yaitu Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, pecahan koral dan endapan pasir yang tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di daerah muara sungai. Adapun jenis tanah di Kota Mataram termasuk jenis tanah entisol.

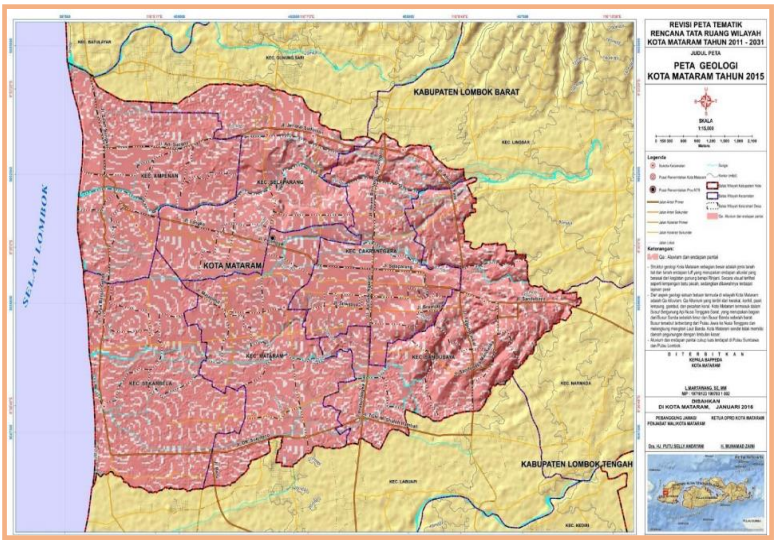

Gambar 2.5. **Peta Geologi Kota Mataram**

5) Hidrologi

Karakteristik hidrologi di Kota Mataram ditandai dengan keberadaan daerah aliran langka di bagian utara dan tengah yang berpotensi sebagai air tanah (akuifer) yang cukup besar. Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayangsayang, dan Kecamatan Mataram memiliki kedalaman akuifer 5-7 m. Sedangkan Kelurahan Monjok dan Kelurahan Dasan Agung bagian utara memiliki kedalaman air tanah hingga 15 m. Disamping potensi akuifer, Kota Mataram mensuplai kebutuhan air bersih dari mata air Sarasuta, Ranget, dan Saraswata di Kecamatan Narmada (Kabupaten Lombok barat).

Titik-titik mata air tersebar di Kelurahan Pejeruk, Karang Baru, Sayangsayang, Cakranegara Utara, Dasan Cermen, Babakan, Mandalika, dan Pagesangan Tengah dengan jumlah keseluruhan sekitar 13 titik. Kota Mataram dialiri empat sungai besar yang berfungsi sebagai drainase alam, yaitu Sungai Jangkok (86 km dengan luas 1.712,12 Ha), Sungai Ancar (21 km dengan luas 858,47 Ha), Sungai Brenyok (42 km dengan luas 2.277,55 Ha), dan Sungai Midang (26 km dengan luas 562,47 Ha). Hulu sungai-sungai tersebut berada di sekitar lereng Gunung Rinjani dan bermuara di Selat Lombok.

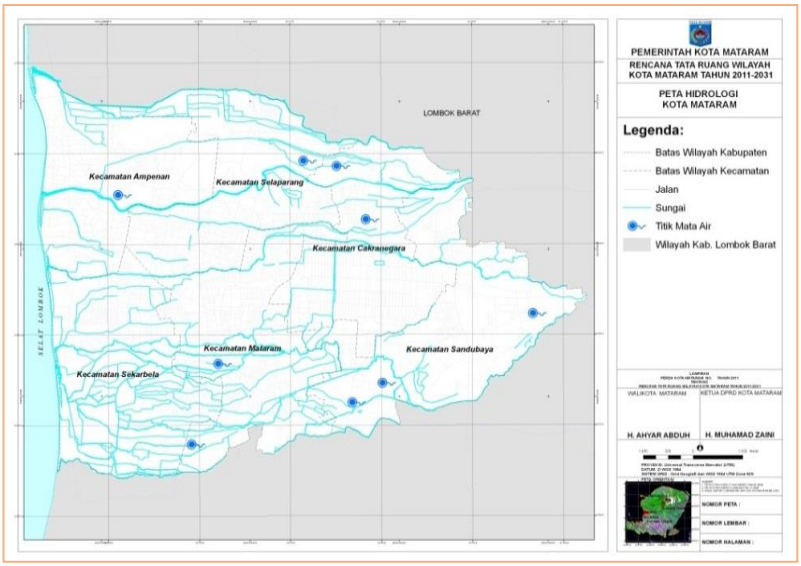

Gambar 2.6. **Peta Hidrologi Kota Mataram**

6) Klimatologi

Kota Mataram sebagaimana kota-kota lain di Indonesia merupakan wilayah yang memiliki iklim tropis, sehingga secara umum tidak ada perbedaan iklim yang terjadi di setiap tahunnya. Kondisi klimatologi Tahun 2011-2017, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.5
Suhu, Tekanan dan Kelembaban Tahun 2011-2017

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Temperatur Rata-rata: ▪ Maks ▪ Min	 °C °C	 31,42 22,75	 30,54 22,48	 26,62 21,03	 31,6 22,5	 22,25 31,95	 32,3 23,4	 31.7 22,5
Tekanan Udara		1.009,5	1.10,52	1.010,67	1.010,6	1.007,2	1.005,5	1.005,5
Kelembaban	%	81,75	87,17	82,75	82,83	82,83	84	83
Curah Hujan	mm	220,25	133,33	174,92	156,39	171,55	236,2	218,8
Penyinaran Matahari	%	68	74	66	73	77	69	67

Sumber: BMKG dan BPS Kota Mataram, 2018

7) Penggunaan Lahan

Pola guna lahan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan. Pola pertumbuhan dan perkembangan guna lahan yang terjadi berkembang secara linier, konsentrik dan parsial.

Perkembangan guna lahan kota mataram secara linier terjadi karena perkembangan guna lahan mengikuti pola jaringan jalan yang ada, antara lain seperti: Perkembangan guna lahan

pada poros jalan utama yos sudarso – jalan langko – jalan pejanggik – sandubaya (ampenan – mataram – cakranegara), sedangkan perkembangan guna lahan secara konsentrik yang ditunjang oleh pola jaringan jalan yang berbentuk grid tersebar di kawasan cakranegara dan sekitarnya. Selain itu juga terdapat pola perkembangan guna lahan yang berkembang secara parsial seperti yang terjadi pada kelurahan rembiga, sayang-sayang di bagian utara kota dan kawasan jempong baru, pagutan dan pusat permukiman di kawasan bertais.

Dalam perkembangan selanjutnya pola perkembangan guna lahan baik secara linier, konsentrik dan parsial tersebut terjadi penyatuan-penyatuan guna lahan yang ada sehingga terbentuklah kawasan terbangun yang telah berkembang saat ini.

Penggunaan lahan di Kota Mataram meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung.

a. Kawasan Budidaya

   Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Mataram, meliputi:

   - Kawasan perumahan
   - Kawasan perdagangan dan jasa
   - Kawasan perkantoran
   - Kawasan peruntukan industri
   - Kawasan pariwisata
   - Kawasan ruang evakuasi bencana
   - Kawasan pendidikan
   - Kawasan kesehatan
   - Kawasan peribadatan
   - Kawasan pertahanan negara
   - Kawasan pertanian

b. Kawasan Lindung

   Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan. Jenis kawasan Lindung yang terdapat di Kota Mataram terdiri dari:

   - Kawaan Perlindungan Setempat
   - Kawasan Lindung Geologi
   - Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   - Kawasan Cagar Budaya
   - Kawasan Rawan Ancaman Bencana

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, disebutkan bahwa pola ruang wilayah di Kota Mataram terdiri dari pengelolaan Kawasan Lindung dan pengembangan Kawasan Budidaya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pola Ruang Wilayah Kota Mataram

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Uraian	Keterangan
1	**Pengembangan Kawasan Lindung**	**Kawasan perlindungan setempat**	• **kawasan sempadan pantai**; dengan arahan penyebaran Sepanjang sekitar 9 km pesisir barat di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela, ditetapkan paling rendah 100 (seratus) meter dihitung dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat secara proporsional sesuai bentuk, letak dan kondisi fisik pantai di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela. • **kawasan sempadan sungai**; dengan arahan penyebaran pada Sungai-sungai besar yaitu: Sungai Midang/Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Unus, dan Sungai Brenyok dengan ketentuan penetapan garis sempadan sungai paling rendah 3 (meter) pada sungai bertanggul dan paling rendah 10 (sepuluh) meter pada sungai tidak bertanggul.
		Kawasan Lindung Geologi	• berupa sempadan mata air/lingkok sebagai perlindungan terhadap air tanah dilakukan di seluruh wilayah Kota.
		Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	• **RTH Publik,** meliputi: ○ **Hutan Kota**, dengan arahan penyebaran yaitu: *Kecamatan Ampenan:* Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Penjarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari. *Kecamatan Sekarbela:* Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Tanjung Karang Permai *Kecamatan Mataram:* Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia *Kecamatan Selaparang:* Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Rembiga *Kecamatan Cakranegara:* Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Mayura, Kelurahan Sapta Marga dan Kelurahan Sayang-Sayang *Kecamatan Sandubaya:* Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Bertais, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Turida

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Uraian	Keterangan
			○ **Taman-taman/lapangan kota hingga taman/lapngan lingkungan,** dengan arahan penyebaran di seluruh Kota Mataram, kecuali di Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Punia, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, dan Kelurahan Bertais. ○ **Sabuk Hijau**, dengan arahan penyebaran di kawasan perbatasan Kota. ○ **Taman Jalan,** dengan arahan penyebaran di jalur hijau jalan pada jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. ○ pemakaman, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, sabuk hijau, kawasan penyangga pada kawasan peruntukan industri sebagai RTH dengan fungsi khusus • **RTH Privat,** dapat dikontribusi melalui taman pekarangan, taman atap dan/atau taman/hutan vertikal pada kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan serta kawasan peribadatan.
		Kawasan Cagar Budaya	**Kawasan Cagar Budaya**, dengan arahan penyebaran yaitu: a. kawasan Taman Mayura di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara; b. kawasan Pura Meru di Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara; c. kawasan Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara; d. kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; e. kawasan Makam Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela; dan f. kawasan Makam Bintaro di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan.
		Kawasan rawan ancaman bencana	• **kawasan rawan banjir**; dengan arahan penyebaran yaitu: Kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok dan Sungai Unus. • **kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai**; dengan arahan penyebaran di kawasan sepanjang wilayah pesisir Kota. • **kawasan rawan gempa bumi**; dengan arahan penyebaran di seluruh wilayah Kota.
2	**Pengembangan Kawasan Budidaya**	**Kawasan perumahan**	• **kawasan perumahan berkepadatan tinggi**; dengan arahan penyebaran yaitu: *Kecamatan Ampenan:* Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari. *Kecamatan Sekarbela:* Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya *Kecamatan Mataram* Kelurahan Mataram Timur,Kelurahan Pagesangan, Kelurahan

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Uraian	Keterangan
			Pagesangan Barat, Kelurahan Pejanggik, dan Kelurahan Punia *Kecamatan Selaparang:* Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok,Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Rembiga *Kecamatan Cakranegara:* Kelurahan Cakranegara Barat dan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru *Kecamatan Sandubaya:* Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, dan Kelurahan Turida • **kawasan perumahan berkepadatan sedang**; dengan arahan penyebaran pada kawasan pinggiran Kota dan kawasan pengembangan baru selain di kelurahan yang disebutkan pada pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi. • **kawasan perumahan berkepadatan rendah**; dengan arahan penyebaran pada kawasan pinggiran Kota dan kawasan pengembangan baru selain di kelurahan yang disebutkan pada pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi.
		Kawasan perdagangan dan jasa	**kawasan perdagangan dan jasa**; dengan arahan penyebaran di seluruh wilayah Kota.
		Kawasan perkantoran	• **kawasan perkantoran pemerintah**; dengan arahan penyebaran: *Kecamatan Ampenan:* Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Banjar, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Taman Sari *Kecamatan Sekarbela:* Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Kekalik Jaya dan Kelurahan Tanjung Karang *Kecamatan Mataram:* Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia *Kecamatan Selaparang:* Kelurahan Dasan Agung, Kel. Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kel. Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kel. Monjok Barat, Kel. Monjok Timur, dan Kel. Rembiga *Kecamatan Cakranegara:* Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Sayang Sayang *Kecamatan Sandubaya:* Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, dan Kelurahan Turida. • **Kawasan perkantoran swasta;** dengan arahan penyebaran pada kawasan perkantoran pemerintah serta kawasan perdagangan dan jasa.
		Kawasan Peruntukan Industri	**kawasan peruntukan industri**; dengan arahan penyebaran: *Kecamatan Ampenan:* Kelurahan Ampenan Utara *Kecamatan Sekarbela:* Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Tanjung Karang Permai *Kecamatan Selaparang:* Kelurahan Monjok *Kecamatan Mataram:* Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan *Kecamatan Cakranegara:* Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, dan Kelurahan Sayang Sayang *Kecamatan Sandubaya:* Kelurahan Babakan,Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais dan Kelurahan Turida. Kawasan peruntukan industri rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kota.

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Uraian	Keterangan
		Kawasan Pariwisata	• **kawasan pariwisata budaya**; dengan arahan penyebaran: pada kawasan cagar budaya. • **kawasan pariwisata buatan;** dengan arahan penyebaran: ○ wisata dengan konsep MICE berbasis lingkungan dikembangkan pada kawasan eks Bandar Udara Selaparang Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; ○ wisata belanja dan pusat kerajinan dikembangkan pada pusat perdagangan dan jasa di Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram; Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara; ○ wisata rekreasi dikembangkan pada taman-taman di seluruh Kota; ○ wisata kuliner dikembangkan di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.
		Kawasan Ruang Evakuasi Bencana	**Kawasan Ruang Evakuasi Bencana,** dengan arahan penyebaran: Pada ruang-ruang terbuka, bangunan perkantoran dan bangunan pendidikan, bangunan kesehatan dan bangunan peribadatan yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana serta memungkinkan untuk menampung korban bencana.
		Kawasan Pendidikan	• **kawasan pendidikan dasar dan pendidikan menengah,** dengan arahan penyebaran: di seluruh wilayah Kota. • **kawasan pendidikan tinggi,** dengan arahan penyebaran: *Kecamatan Sekarbela:* Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya; *Kecamatan Mataram:* Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Barat; *Kecamatan Selaparang:* Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, dan Kelurahan Mataram Barat; *Kecamatan Sandubaya:* Kelurahan Cilinaya dan Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Turida.
		Kawasan Kesehatan	**Kawasan kesehatan,** dengan arahan penyebaran: *Kecamatan Sekarbela:* Kelurahan Kekalik Jaya; *Kecamatan Mataram:* Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Punia *Kecamatan Sandubaya:* Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Selagalas.
		Kawasan Peribadatan	**Kawasan peribadatan,** dengan arahan penyebaran: di seluruh wilayah Kota dengan pusat pengembangan berada pada: a. Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) di Kelurahan Gomong dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara; b. Gereja di Kelurahan Banjar dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Barat dan Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram; dan Kelurahan Mayura dan Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara; c. Pura di Kelurahan Punia dan Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram; Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur dan Kelurahan

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Uraian	Keterangan
			Mayura Kecamatan Cakranegara; dan d. Vihara di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.
		Kawasan Pertahanan Negara	**Kawasan pertahanan negara,** dengan arah penyebaran: *Kecamatan Ampenan:* Kelurahan Ampenan Selatan *Kecamatan Mataram:* Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pejanggik *Kecamatan Selaparang:* Kelurahan Rembiga *Kecamatan Cakranegara:* Kelurahan Sapta Marga *Kecamatan Sandubaya:* Kelurahan Abian Tubuh Baru
		Kawasan Pertanian	**Kawasan pertanian**, dengan arahan penyebaran: *Kecamatan Ampenan:* Kelurahan Ampenan Utara; *Kecamatan Sekarbela:* Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Tanjung Karang; *Kecamatan Mataram:* Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, dan Kelurahan Pagutan Timur; *Kecamatan Selaparang:* Kelurahan Karang Baru dan Kelurahan Rembiga; *Kecamatan Cakranegara*: Kelurahan Sayang Sayang; *Kecamatan Sandubaya:* Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Turida;

Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram 2011-2031

Pola guna lahan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan. Pola pertumbuhan dan perkembangan guna lahan yang terjadi berkembang secara linier, konsentrik dan parsial. Perkembangan guna lahan kota mataram secara linier terjadi karena perkembangan guna lahan mengikuti pola jaringan jalan yang ada, antara lain seperti: Perkembangan guna lahan pada poros jalan utama yos sudarso – jalan langko – jalan pejanggik – sandubaya (ampenan – mataram –cakranegara), sedangkan perkembangan guna lahan secara konsentrik yang ditunjang oleh pola jaringan jalan yang berbentuk grid tersebar di kawasan cakranegara dan sekitarnya. Selain itu juga terdapat pola perkembangan guna lahan yang berkembang secara parsial seperti yang terjadi pada kelurahan rembiga, sayang-sayang di bagian utara kota dan kawasan jempong baru, pagutan dan pusat permukiman di kawasan bertais.

Selama periode 2011 sampai dengan 2017, persentase luasan kawasan terbangun cenderung lebih besar dibandingkan dengan luasan kawasan non terbangun. Persentase luasan kawasan terbangun berkisar antara 50% sampai dengan 52%, sedangkan persentase luasan kawasan non terbangun berkisar antara 47% sampai dengan 49%. Perkembangan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun di Kota Mataram sebagian besar untuk fungsi permukiman/perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan perkantoran, sebagaimana Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Penggunaan Lahan Menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha)
Tahun 2011 - 2017

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perumahan	2.338,56	2.352,18	2.405,23	2,414.48	2.426,64	2.431,99	2.438,70
2	Lapangan Olahraga	46,10	46,10	46,10	46,10	46.10	46.10	46,10
3	Kuburan	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64
4	Perkantoran	115,36	115,45	115,45	115,45	116.13	116.13	116,94
5	Pendidikan	146,50	151,82	151,82	151,82	152,47	152,47	152,47
6	Kesehatan	20,95	23,37	23,37	23,37	23.62	23,90	23,90
7	Ibadah	63,33	63,33	63,33	63,33	63.33	63,33	63,33
8	Jasa	0	0,26	0,26	0,38	0,38	0,38	0,38
9	Pasar/Terminal	67,35	68,35	68,35	68,35	68.35	68,35	68,35
10	Pertokoan/SPBU	97,80	101,98	102.78	104.57	104.94	106,17	106,69
11	Warung/ Rumah Makan	0,40	1,06	1,55	1,56	1,56	1,56	1,56
12	Hotel	18,91	18,91	18,91	18,91	19.23	19,23	19.23
13	Pergudangan	50,60	50,60	52,24	52,24	52.40	52,40	54,07
14	Industri dan Jasa	51,75	51,75	51,75	51,75	51.75	51,75	51,75
15	Taman Kota	6,07	6,07	6,07	6,07	6.07	6,07	6,07
16	Tanah Diperuntukan	125,32	125,82	125,88	129.88	129.88	129,88	129,88
17	Tanah Pertanian	2.847,47	2.819,42	2.763,49	2,748.22	2.733.62	2.726,88	2.717,05
18	Tanah Tidak Diusahakan	81,89	81,89	81,89	81.89	81.89	81,89	81,89
Kota Mataram		**6.130,00**	**6.130,00**	**6.130,00**	**6.130,00**	**6.130,00**	**6.130,00**	**6.130,00**

Sumber: BPS Kota Mataram dan BPN Kota Mataram, 2018

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok, maka Kota Mataram memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

1. Pusat Pemerintahan Provinsi NTB sekaligus pusat Pemerintahan Kota Mataram;
2. Simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di Provinsi NTB;
3. Pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
4. Pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
5. Daya tarik terhadap kota-kota daerah sekitar(*hinterland*) secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya; dan
6. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

Secara kewilayahan Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031, dibagi menjadi 3 (tiga) Pusat Pelayanan Kota (PPK). PPK

merupakan pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada Kawasan Koridor AMC yang bertujuan untuk melayani kegiatan eksternal wilayah secara regional dan nasional, terdiri atas:

1. Pusat Pelayanan Ampenan ditetapkan di Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Banjar dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pendukung pariwisata;
2. Pusat Pelayanan Mataram ditetapkan di Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Gomong, Kelurahan Punia dan Mataram Timur dengan fungsi sebagai pusat perkantoran dan pelayanan umum;
3. Pusat Pelayanan Cakranegara ditetapkan di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Sapta Marga, Kelurahan Bertais, Kelurahan Mandalika dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta industri pergudangan.

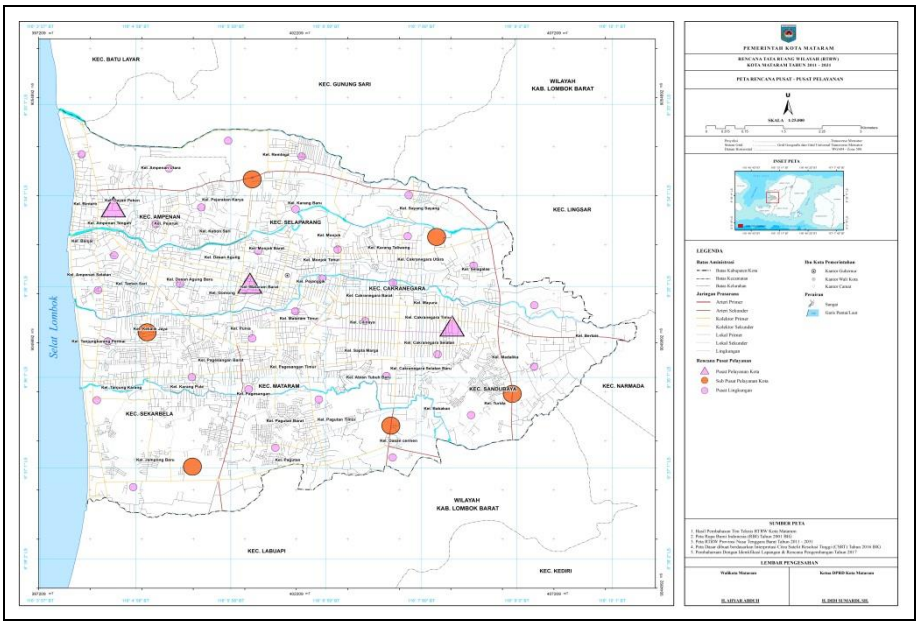

Gambar 2.7. **Peta Rencana Pusat Pelayanan Kota (PPK)**

Selain itu, Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis kota yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, meliputi:

1. Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, sebagaimana gambar 2.8, terdiri atas:
   a. Kawasan eks Bandara Selaparang - Udayana di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Pejarakan

Karya Kecamatan Ampenan sebagai pariwisata konvensi dengan konsep MICE berbasis lingkungan dan wisata kuliner;

b. Kawasan Loang Baloq-Mapak, meliputi Makam Loang Baloq, Pantai Tanjung Karang-Mapak, Taman Air Loang Baloq di Kel. Tanjung Karang dan Kel. Jempong Baru Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata alam, religi dan buatan;
c. Kawasan Kota Tepian Air, meliputi kawasan pesisir Pantai Ampenan dan sempadan Sungai Jangkok di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata alam dan buatan;
d. Kawasan Mas Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram; serta Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata belanja;
e. Kawasan Sayang Sayang – Karang Taliwang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara sebagai kawasan pariwisata kuliner;
f. Pusat-pusat perdagangan di dalam Koridor AMC di Kecamatan Ampenan meliputi Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Ampenan Selatan; serta Kecamatan Cakranegara meliputi Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur dan Kelurahan Cakranegara Selatan;
g. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika sebagai kawasan peruntukan industri, pergudangan dan peti kemas; dan
h. Kawasan Koridor Sriwijaya – Brawijaya sebagai kawasan perdagangan dan jasa komersial.

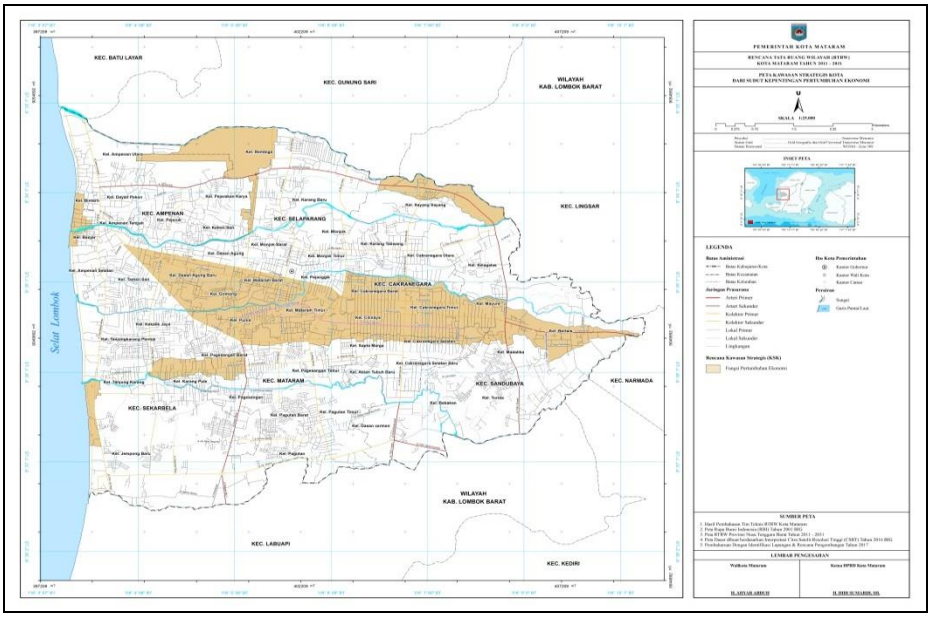

Gambar 2.8. **Peta KSK dari sudut Kepentingan Ekonomi**

2. Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya, sebagaimana gambar 2.9, terdiri atas:
   a. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan;
   b. Kawasan Bintaro dan Sekitarnya di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan;
   c. Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara;
   d. Kawasan Islamic Centre (Masjid Hubbul Wathan - Masjid Attaqwa) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram;
   e. Kawasan Mayura - Meru di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara.

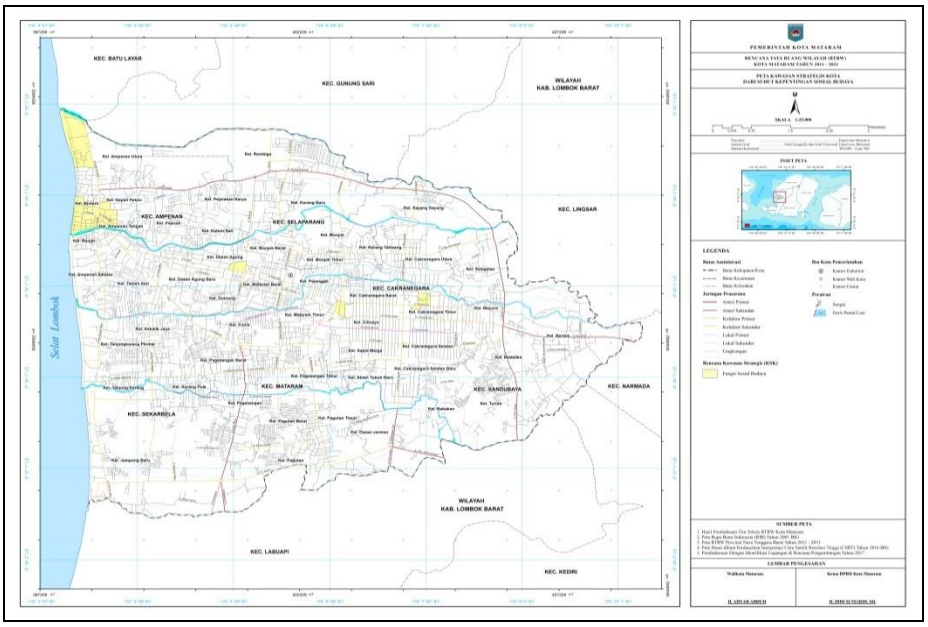

Gambar 2.9. **Peta KSK dari sudut Kepentingan Sosial Budaya**

3. Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, sebagaimana gambar 2.10 terdiri atas:
   a. kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;
   b. kawasan sepanjang sempadan pantai di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan; serta Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
   c. kawasan hutan kota dan taman kota di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Banjar, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Penjarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Mataram Timur,

Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik Kelurahan Punia Kecamatan Mataram; Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Mayura, Kelurahan Sapta Marga Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Bertais, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya.

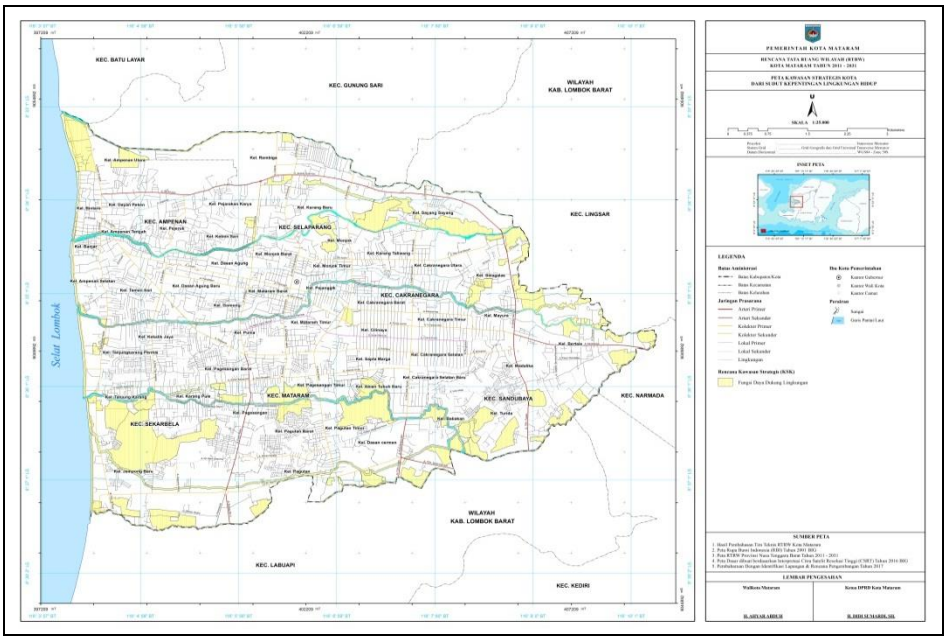

Gambar 2.10. **Peta KSK dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

2.1.3 Kawasan Rawan Ancaman Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Secara umum Kota Mataram memiliki potensi untuk terkena bencana, khususnya bencana alam, yaitu:

1. Banjir

   Kota Mataram merupakan salah satu daerah hilir dari 4 (empat) sungai besar dari sistem DAS Dodokan dan posisinya berada pada ketinggian yang relatif rendah (0-75 meter dpl) dengan kemiringan relatif datar-landai. Kondisi ini berpotensi untuk terkena bencana banjir dan genangan. Kondisi fisik yang rawan bencana ini ditambah lagi dengan kurangnya area resapan di dalam kota dan kondisi drainase yang belum optimal. Adapun lokasi banjir dan genangan di Kota Mataram meliputi kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus.

2. Gelombang Pasang/Tsunami dan Abrasi Pantai

   Bagian barat pesisir Kota Mataram merupakan wilayah-wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Selat Lombok. Adapun abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak yang terus menerus. Pesisir pantai Kota Mataram sebagain besar tidak dilengkapi dengan penahan gelombang. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya instrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram. Wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai adalah kawasan di sepanjang wilayah pesisir Kota yang meliputi Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru.

3. Gempa Bumi

   Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi. Kondisi tektonik di wilayah Kota Mataram masuk jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Eurasia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial. Selain ini terdapat juga ancaman dari utara berupa patahan busur belakang. Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya adalah sekitar 50 km. Kawasan rawan gempa bumi di Kota Mataram mencakup seluruh wilayah Kota.

2.1.4 Kondisi Demografis

Demografi mejelaskan tentang ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Secara khusus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan serta merupakan salah satu modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian pembangunan. Jumlah, komposisi

dan distribusi penduduk adalah sebagian dari masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

Tingginya tingkat migrasi penduduk Kota Mataram menjadikan jumlah penduduk Kota Mataram terus meningkat setiap tahunnya, dimana kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi, hal ini juga turut menjadi penyebab tingginya migrasi penduduk ke Kota Mataram.

a. Jumlah Penduduk

Kota Mataram merupakan daerah otonom dengan luas wilayah terkecil di Provinsi NTB, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif besar. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk tahun 2017 mengalami peningkatan 9.195 jiwa dari tahun 2016. Gambaran komposisi jumlah penduduk Kota Mataram tahun 2011 hingga tahun 2017 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Grafik 2.1

Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2017

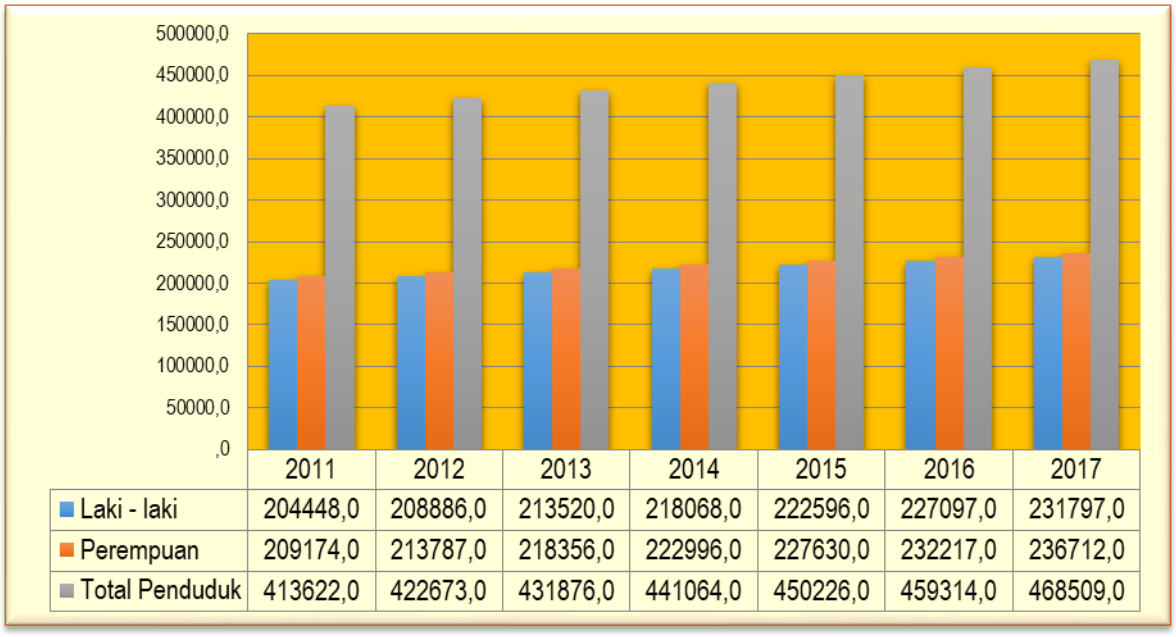

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laki - laki	204448,0	208886,0	213520,0	218068,0	222596,0	227097,0	231797,0
Perempuan	209174,0	213787,0	218356,0	222996,0	227630,0	232217,0	236712,0
Total Penduduk	413622,0	422673,0	431876,0	441064,0	450226,0	459314,0	468509,0

Sumber : BPS Kota Mataram, 2018

b. Pertumbuhan Penduduk

Tingginya tingkat migrasi penduduk ke Kota Mataram menjadikan jumlah penduduk Kota Mataram terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebab tingginya migrasi penduduk ke Kota Mataram adalah kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, PKN, KSP, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa.

Adapun gambaran pertumbuhan penduduk tahun 2014-2017 dirinci per Kecamatan, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.8
Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2014-2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Pertumbuhan (%)
		2014	2015	
1	Ampenan	86.052	87.746	1.97
2	Sekarbela	62.508	64.946	3,90
3	Mataram	81.450	83.479	2.49
4	Selaparang	74.513	74.795	0,38
5	Cakranegara	66.516	66.983	0,70
6	Sandubaya	70.025	72.277	3,22
Jumlah Total		**441.064**	**450.226**	**2,08**

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Tabel 2.9
Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Pertumbuhan (%)
		2016	2017	
1	Ampenan	89.421	91.099	1,88
2	Sekarbela	67.431	69.989	3,79
3	Mataram	85.491	87.527	2,38
4	Selaparang	75.027	75.235	0,28
5	Cakranegara	67.395	67.791	0,59
6	Sandubaya	74.549	76.868	3,11
Jumlah Total		**459.314**	**468.509**	**2,00**

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Pada tahun 2017 penyebaran penduduk di Kota Mataram masih terkonsentrasi di Kecamatan Ampenan. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 ke tahun 2017 maka Kecamatan Sekarbela memiliki pertumbuhan penduduk yang paling tinggi dibanding dengan kecamatan lainnya. Kepadatan penduduk dari tahun 2013 sampai tahun 2017 tertinggi berada pada Kecamatan Ampenan dimana pada tahun 2017 kepadatan penduduknya sebesar 9.630 jiwa/km. Sedangkan Kecamatan Sekarbela memiliki kepadatan

penduduk yang paling rendah yaitu 6.782 jiwa/km pada tahun 2017. Kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 2011-2017, sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km²)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ampenan	9,46	79.367	82.585	84.324	86.052	87.746	8.390	8.730	8.914	9.096	9.275
2	Sekarbela	10,32	53.946	57.792	60.123	62.508	64.946	5.227	5.600	5.826	6.057	6.293
3	Mataram	10,76	73.921	77.397	79.420	81.450	83.479	6.870	7.193	7.381	7.570	7.758
4	Selaparang	10,77	73.222	73.806	74.181	74.513	74.795	6.799	6.853	6.888	6.919	6.945
5	Cakranegara	9,67	64.771	65.488	66.026	66.516	66.983	6.698	6.772	6.828	6.879	6.927
6	Sandubaya	10,32	61.683	65.605	67.802	70.025	72.277	5.977	6.357	6.570	6.785	7.004
Jumlah/Total		**61,30**	**413.662**	**422.673**	**431.876**	**441.064**	**450.226**	**6.749**	**6.895**	**7.045**	**7.195**	**7.345**

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Tabel 2.11
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km²)	
			2016	2017	2016	2017
1	Ampenan	9,46	89.421	91.099	9.453	9.630
2	Sekarbela	10,32	67.431	69.989	6.534	6.782
3	Mataram	10,76	85.491	87.527	7.945	8.134
4	Selaparang	10,77	75.027	75.235	6.966	6.986
5	Cakranegara	9,67	67.395	67.791	6.966	7.010
6	Sandubaya	10,32	74.549	76.868	7.224	7.448
Jumlah/Total		**61,30**	**459.314**	**468.509**	**7.493**	**7.643**

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

c. Struktur dan Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kota Mataram Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 menurut kelompok umur terbanyak pada kelompok umur 20-24 dan komposisi penduduk terkecil pada kelompok umur 70 - 74 tahun.

Adapun jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Tahun 2011-2015

Kelompok Umur	Laki-laki					Perempuan				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
0 – 4	20.783	21.027	21.216	21.347	21.386	19.589	19.924	20.209	20.428	20.561
5 – 9	18.495	18.857	19.307	19.760	20.216	17.731	18.118	18.540	18.988	19.447
10 – 14	18.302	18.493	18.662	18.861	19.144	17.370	17.561	17.756	17.990	18.286
15 – 19	21.061	21.569	22.063	22.487	22.856	22.172	22.358	22.552	22.767	22.993
20 – 24	27.377	28.046	28.789	29.523	30.221	26.266	26.402	26.491	26.582	26.665
25 – 29	17.654	17.859	18.097	18.394	18.748	18.985	19.132	19.245	19.352	19.493
30 – 34	16.347	16.508	16.673	16.852	17.019	18.161	18.604	19.021	19.384	19.635
35 – 39	14.519	14.811	15.090	15.312	15.546	15.541	16.007	16.463	16.925	17.415
40 – 44	13.207	13.663	14.121	14.541	14.914	13.864	14.437	15.014	15.578	16.109
45 – 49	10.617	10.973	11.362	11.762	12.171	10.904	11.348	11.813	12.306	12.817
50 – 54	8.374	8.660	8.947	9.246	9.575	8.395	8.787	9.160	9.541	9.950
55 – 59	6.612	6.944	7.287	7.615	7.924	6.514	6.940	7.398	7.853	8.267
60 – 64	4.309	4.480	4.680	4.891	5.114	4.665	4.843	5.039	5.290	5.612
65 – 69	3.018	3.130	3.258	3.408	3.586	3.477	3.629	3.803	3.985	4.161
70 – 74	1.963	2.016	2.069	2.121	2.173	2.555	2.630	2.700	2.775	2.862
75 +	1.810	1.850	1.899	1.948	2.003	2.985	3.067	3.152	3.252	3.357
Jumlah	**204.448**	**208.886**	**213.520**	**218.068**	**222.596**	**209.174**	**213.787**	**218.356**	**222.996**	**227.630**

Sumber: BPS Kota Mataram, Tahun 2015

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan	
	2016	2017	2016	2017
0 – 4	21.441	21.508	20.633	20.688
5 – 9	20.544	20.825	19.878	20.206
10 – 14	19.473	19.880	18.625	19.013
15 – 19	23.169	23.439	23.230	23.457
20 – 24	30.950	31.721	26.792	26.947
25 – 29	19.166	19.664	19.607	19.714
30 – 34	17.233	17.447	19.869	20.008
35 – 39	15.689	15.860	17.824	18.247
40 – 44	15.278	15.604	16.645	17.129
45 – 49	12.607	13.058	13.349	13.897
50 – 54	9.888	10.238	10.348	10.767
55 – 59	8.234	8.531	8.709	9.111
60 – 64	5.380	5.663	5.933	6.319
65 – 69	3.711	3.869	4.335	4.503
70 – 74	2.265	2.358	2.968	3.107

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan	
	2016	2017	2016	2017
75 +	2.069	2.132	3.472	3.599
Jumlah	**227.097**	**231.797**	**232.217**	**236.712**

Sumber: BPS Kota Mataram, Tahun 2018

Jika disusun dalam struktur piramida, penduduk Kota Mataram termasuk dalam Piramida Penduduk Muda yaitu kondisi penduduk yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat dimana angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.

Hal ini tergambar dalam piramida penduduk berikut, dimana jumlah penduduk kelompok usia 20-24 tahun lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

Gambar 2.6
Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017

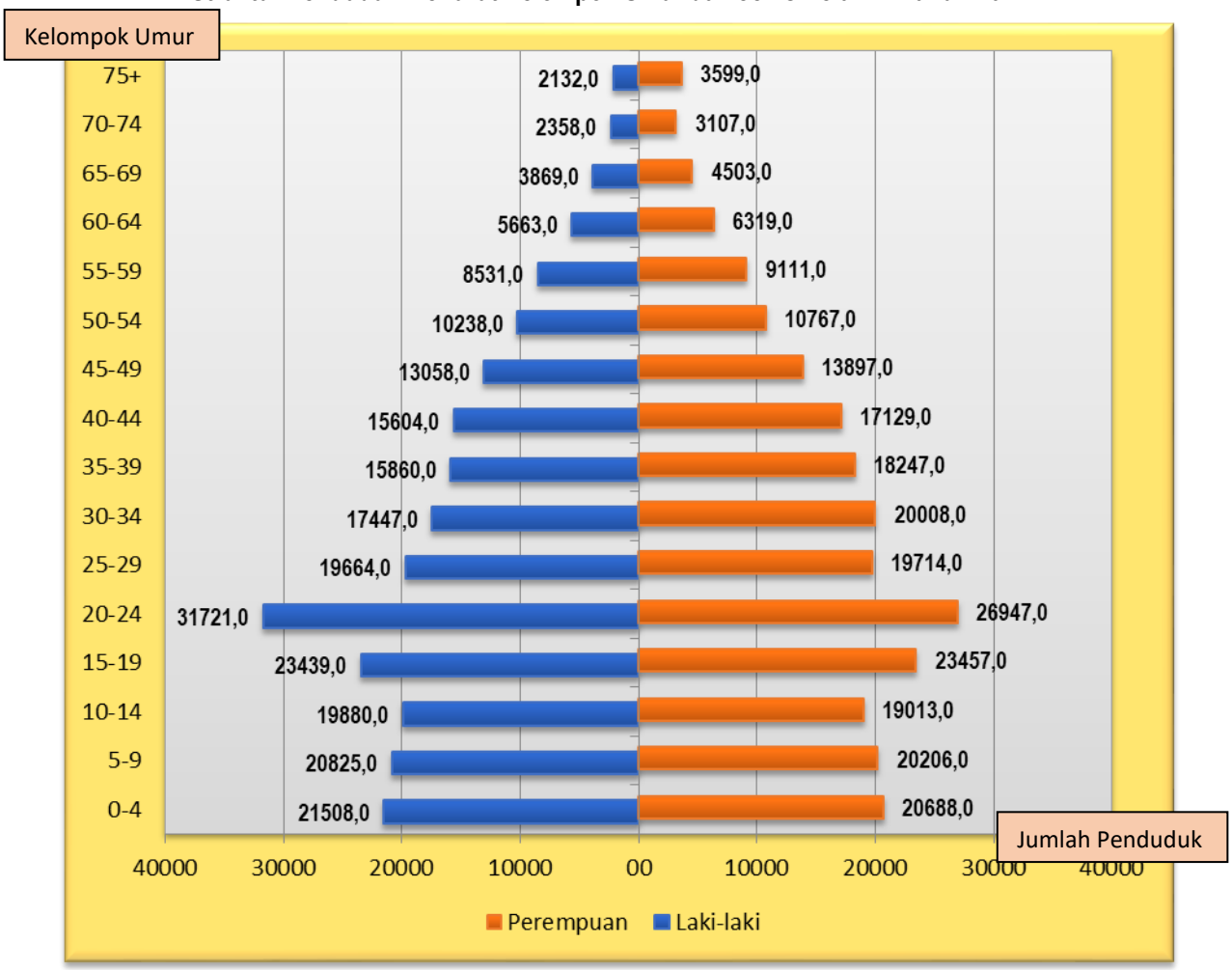

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram pada tahun 2017 masuk dalam transisi demografi yang menguntungkan karena proporsi penduduk terbesar adalah usia produktif

yang berusia 15-64 tahun. Kondisi ini disebut menguntungkan karena berpeluang menciptakan kesejahteraan bila penduduk produktif tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Proporsi penduduk wanita yang lebih besar dan tingginya penduduk usia produktif perlu diantisipasi oleh pemerintah dengan kebijakan pembangunan daerah yang *pro gender* dan *pro job*.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan Masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: (1) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan sosial, dan (3) aspek kesejahteraan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja pada masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat Kota Mataram adalah sebagai berikut:

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Mataram. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi yang dilihat melalui **Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita** dan **Indeks Gini**, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

   PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu. Besaran PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi.

   Dengan kata lain PDRB merupakan indikator untuk mengatur sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki guna menciptakan nilai tambah bagi sektor perekonomiannya.

   Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu

wilayah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh laju PDRB berdasarkan harga konstan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat inflasi yang cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika (USD).

Gambaran peningkatan PDRB Kota Mataram, selama kurun waktu tahun 2011-2015 pada saat penyusunan RPJMD 2016-2021 baik ADHB maupun ADHK tergambar sebagai berikut:

Grafik 2.2
Grafik PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2011- 2015 (ribu Rp.)

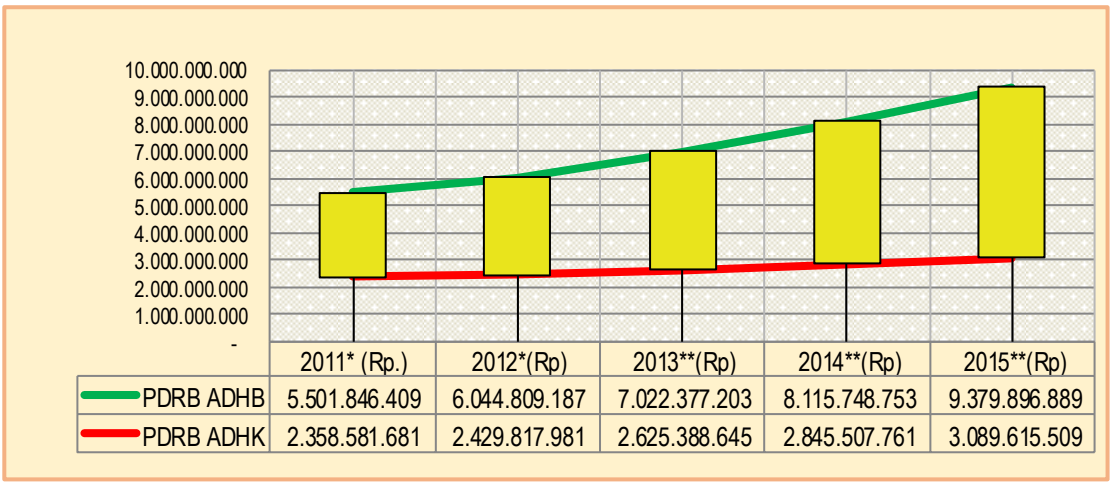

	2011* (Rp.)	2012*(Rp)	2013**(Rp)	2014**(Rp)	2015**(Rp)
PDRB ADHB	5.501.846.409	6.044.809.187	7.022.377.203	8.115.748.753	9.379.896.889
PDRB ADHK	2.358.581.681	2.429.817.981	2.625.388.645	2.845.507.761	3.089.615.509

*angka sementara, **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Mataram,2015

Sedangkan gambaran peningkatan PDRB Kota Mataram selama kurun waktu tahun 2013-2017 baik ADHB maupun ADHK saat ini tergambar dari grafik berikut ini:

Grafik 2.3
Grafik PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2016- 2017

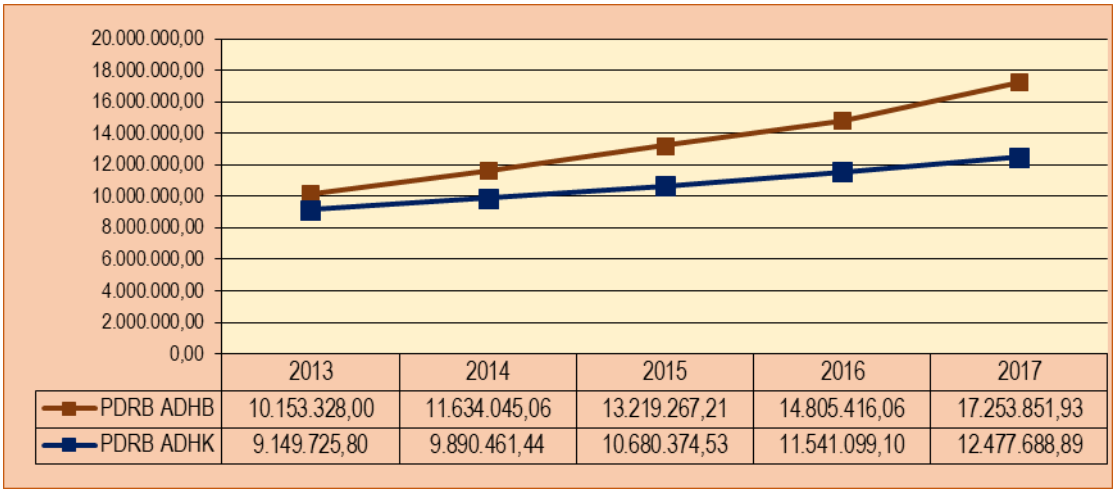

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Dengan ditetapkannya Kota Mataram sebagai PKN dalam RTRW Nasional yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta sebagai KSP dalam RTRW Provinsi NTB, sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kontribusi kategori usaha perdagangan besar dan eceran yang terus menjadi *leading business* bagi perekonomian di Kota Mataram baik pada PDRB ADHB maupun ADHK selama kurun waktu 4 (*empat*) tahun.

Secara lebih rinci kontribusi masing-masing kategori usaha terhadap pembentukan PDRB ADHB tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB
Tahun 2011- 2015 Kota Mataram

Kategori	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	368.593	4,63	422.315	4.63	439.860	4.33	473.149	4.07	525.151	3.97
B	Pertambangan dan Penggalian	796.097	0,01	825,29	0.01	847,72	0.01	886,39	0.01	925.119	0.01
C	Industri Pengolahan	837.494	10,52	959.824	10.52	1.014.983	10.00	1.073.886	9.23	1.191.105	9.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,36	0,08	7,40	0.08	6,62	0.07	9,27	0.08	10,66	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,71	0,21	19,45	0.21	21,65	0.21	25,41	0.22	28,64	0.22
F	Konstruksi	808.038	10,15	925.799	10.15	1.012.736	9.97	1.169.123	10.05	1.356.604	10.25
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.532.487	19,25	1,756.291	19.25	1.979.155	19.49	2.318.528	19.92	2.644.473	19.97
H	Transportasi dan Pergudangan	488.803	6,14	559.877	6.14	613.382	6.04	696.942	5.99	805.031	6.08
I	Penyediaan Akomodasi	116.230	1,46	132.903	1.46	164.864	1.62	207.263	1.78	241.723	1.83

Kategori	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Makan Minum										
J	Informasi dan Komunikasi	540.549	6,79	619.251	6.79	672.264	6.62	738.756	6.35	797.340	6.02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	727.632	9,14	833.762	9.14	983.414	9.69	1.133.622	9.74	1.304.843	9.86
L	Real Estate	381.330	4,79	436.719	4.79	515.242	5.07	603.709	5.19	685.043	5.17
M,N	Jasa Perusahaan	32.639	0,41	37.518	0.41	43.691	0.43	50.917	0.44	57.499	0.43
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib	706.934	8,88	810.022	8.88	884.831	8.71	1.077.077	9.25	1.231.853	9.30
P	Jasa Pendidikan	648.023	8,14	742.306	8.14	848.664	8.36	979.782	8.42	1.121.322	8.47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	370.185	4,65	424.528	4.65	467.736	4.61	531.507	4.57	605.822	4.58
R,S,T,U	Jasa lainnya	379.738	4,77	435.516	4.77	483.373	4.76	548.854	4.72	631.181	4.77
PDRB		7.962.562	100	9.124.323	100.00	10.153.328	100.00	11.638.705	100.00	13.239.239	100.00

*angka sementara, **angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Tabel 2.15

Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB

Tahun 2016 - 2017 Kota Mataram

Kategori	Lapangan Usaha	2016**)		2017**)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	549.567	3,64	584.382	3,39
B	Pertambangan dan Penggalian	1.510	0,01	1.725	0,01
C	Industri Pengolahan	1.159.775	7,68	1.254.752	7,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20.387	0,14	25.881	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.203	0,20	34.507	0,20
F	Konstruksi	1.502.264	9,95	1.687.110	9,78
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.114.136	20,62	3.603.536	20,89
H	Transportasi dan Pergudangan	876.202	5,80	981.112	5,69
I	Penyediaan Akomodas i dan Makan Minum	318.292		395.078	2,29
J	Informasi dan Komunikasi	894.607	2,11	995.848	5,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.594.296	5,92	1.924.881	11,16
L	Real Estate	846.084	10,56	1.021.840	5,92
M,N	Jasa Perusahaan	71.118	5,60	85.033	0,49

Kategori	Lapangan Usaha	2016**)		2017**)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.452.816	9,62	1.629.396	9,44
P	Jasa Pendidikan	1.314.329	8,70	1.541.146	8,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	678.173	4,49	768.094	4,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	705.277	4,67	804.091	4,66
PDRB		**15.101.754**	**100,00**	**17.253.852**	**100,00**

*angka sementara, **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Kategori usaha perdagangan besar dan eceran mendominasi terhadap pembentukan PDRB ADHK. Penyumbang PDRB ADHK terbesar kedua adalah kategori usaha konstruksi, diikuti oleh kategori usaha jasa keuangan dan asuransi. Secara lebih rinci kontribusi masing-masing kategori usaha terhadap capaian PDRB ADHK tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK
Tahun 2011- 2015 Kota Mataram

Kategori	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	376.427	4,81	408.019	4.81	414.558	4.53	425.833	4.31	440.169	4.12
B	Pertambangan dan Penggalian	782.592	0,01	793,79	0.01	796,25	0.01	798,48	0.01	800,28	0.01
C	Industri Pengolahan	873.373	11,16	945.566	11.16	989.286	10.81	1.043.343	10.55	1.104.769	10.34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.043	0,09	8,00	0.09	8,47	0.09	11,77	0.12	11,87	0.11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.651	0,20	17,12	0.20	18,05	0.20	19,63	0.20	21,11	0.20
F	Konstruksi	845.982	10,81	916.572	10.81	995.672	10.88	1.089.464	11.02	1.187.298	11.12
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.469.709	18,78	1.592.159	18.78	1,751,855	19.15	1.914.487	19.36	2.070.187	19.38
H	Transportasi dan Pergudangan	496,163	6,34	537.461	6.34	568.777	6.22	609.406	6.16	660.864	6.19
I	Penyediaan Akomodasi dan	108.780	1,39	117.772	1.39	131.903	1.44	144.229	1.46	156.270	1.46

Kategori	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Makan Minum										
J	Informasi dan Komunikasi	559.553	7,15	605.851	7.15	659.590	7.21	718,228	7.26	782.078	7.32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	668.334	8,54	723.754	8.54	805.101	8.80	873.544	8.83	971.222	9.09
L	Real Estate	358.427	4.58	388.158	4.58	430.390	4.70	469.857	4.75	511.533	4.79
M,N	Jasa Perusahaan	32.868	0,42	35.816	0.42	39.293	0.43	42,64	0.43	46.121	0.43
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sos Wajib	634.682	8,11	687.058	8.11	711.655	7.78	749.088	7.57	780.999	7.31
P	Jasa Pendidikan	603.378	7,71	653.691	7.71	712.654	7.79	780.000	7.89	849.810	7.96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	381.122	4,87	412.944	4.87	448.251	4.90	489.400	4.95	532.370	4.98
R, S, T, U	Jasa lainnya	392.861	5,02	425.286	5.02	463.413	5.06	508.688	5.14	553.300	5.18
PDRB		7.825.144	100	8.476.038	100.00	9,149,725	100.00	9.890.430	100.00	10,680,788	100.00

*angka sementara, **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Tabel 2.17
Nilai dan Distibusi Persentase PDRB Kota Mataram ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2017

Kategori	Lapangan Usaha	2016**)		2017**)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	442.876	3,84	449.199	3,60
B	Pertambangan dan Penggalian	1.154	0,01	1.247	0,01
C	Industri Pengolahan	1.135.776	9,84	1.186.958	9,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.312	0,15	18.716	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.083	0,20	24.955	0,20
F	Konstruksi	1.296.336	11,23	1.410.486	11,30
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.302.343	19,95	2.537.155	20,33
H	Transportasi dan Pergudangan	685.854	5,94	723.509	5,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	176.747	1,53	197.716	1,58
J	Informasi dan Komunikasi	850.716	7,37	927.363	7,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.074.001	9,31	1.200.506	9,62
L	Real Estate	568.144	4,92	629.903	5,05
M,N	Jasa Perusahaan	50.783	0,44	56.178	0,45
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	813.434	7,05	842.103	6,75

Kategori	Lapangan Usaha	2016**)		2017**)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
P	Jasa Pendidikan	931.649	8,07	1.017.549	8,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	580.616	5,03	631.547	5,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	607.237	5,26	661.673	5,30
PDRB		**11.541.660**	**100,00**	**12.477.688**	**100,00**

** Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kota Mataram menurut lapangan usaha dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok sektor yaitu: kelompok kategori usaha *primer* terdiri dari kategori usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori usaha pertambangan dan penggalian; kelompok kategori usaha *sekunder* terdiri dari kategori usaha industri pengolahan, kategori usaha pengadaan listrik dan gas, kategori usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur serta kategori usaha konstruksi; dan kelompok kategori usaha *tersier* terdiri dari kategori usaha perdagangan besar dan eceran, kategori usaha transportasi dan pergudangan, kategori usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori usaha informasi dan komunikasi, kategori usaha jasa keuangan dan asuransi, kategori usaha real estate, kategori usaha jasa perusahaan, kategori usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kategori usaha jasa pendidikan, kategori usaha jasa kesehatan, kegiatan sosial serta kategori usaha jasa lainnya.

Grafik 2.4
PDRB ADHK Kota Mataram Menurut Kelompok Kategori Usaha
Tahun 2011-2017 (Rp. 000)

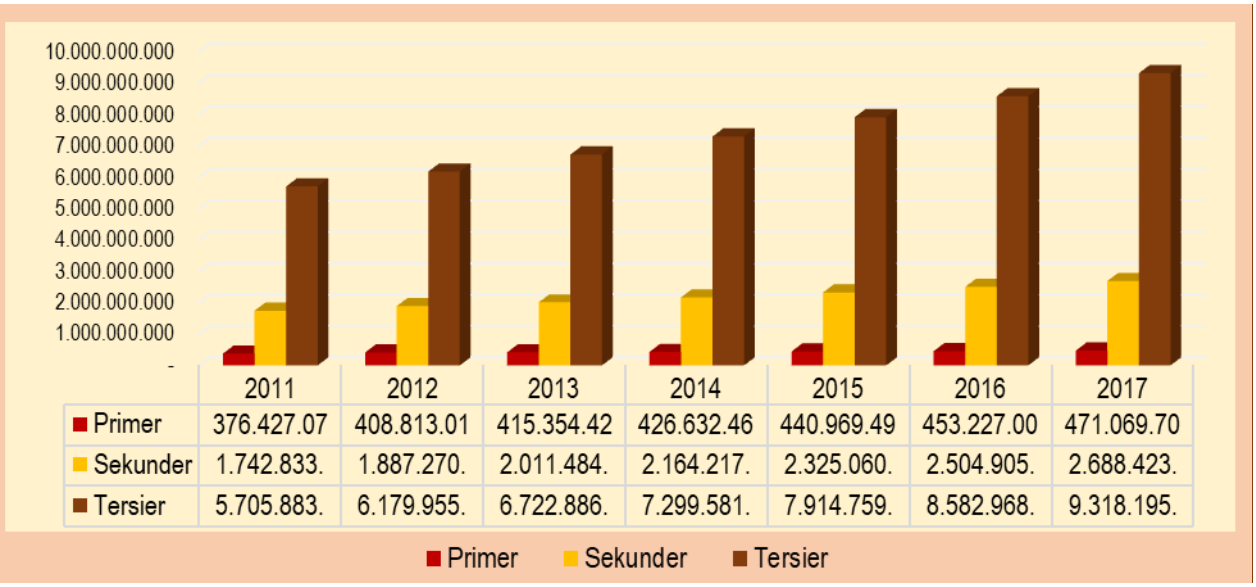

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Primer	376.427.07	408.813.01	415.354.42	426.632.46	440.969.49	453.227.00	471.069.70
Sekunder	1.742.833.	1.887.270.	2.011.484.	2.164.217.	2.325.060.	2.504.905.	2.688.423.
Tersier	5.705.883.	6.179.955.	6.722.886.	7.299.581.	7.914.759.	8.582.968.	9.318.195.

Sumber: BPS Kota Mataram , 2018

Struktur perekonomian di setiap kecamatan di Kota Mataram secara umum memiliki kesamaan dimana kelompok kategori usaha *tersier* lebih dominan dibandingkan dengan kelompok kategori usaha *primer* ataupun *sekunder*.

2. Laju Inflasi

Laju Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan persentase perubahan dari indeks harga konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang dicerminkan oleh perkembangan laju indeks harga implisit (IHI). Secara agregat indeks harga implisit menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup.

Inflasi Kota Mataram pada tahun 2011-2017 mengalami pasang surut, namun secara umum inflasi pada tahun 2012 lebih rendah daripada tahun 2011. Inflasi pada tahun 2013 yang dikarenakan shock terhadap dampak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak menyebabkan inflasi yang tertinggi dengan angka mencapai 9,27 persen. Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2011-2017, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.5
Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2011-2017

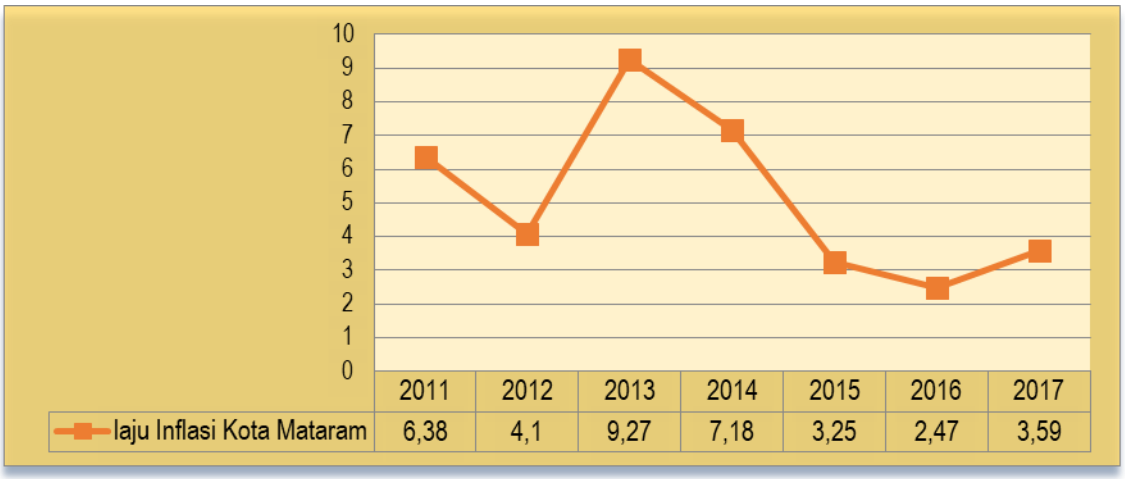

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
laju Inflasi Kota Mataram	6,38	4,1	9,27	7,18	3,25	2,47	3,59

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa inflasi yang terjadi di Kota Mataram pada periode Tahun 2011-2017 termasuk dalam golongan inflasi ringan yaitu kurang dari 10 persen per tahun. Dengan pola yang hampir sama, perbandingan inflasi Kota Mataram dengan inflasi Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2011-2017, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.6
Laju Inflasi Kota Mataram terhadap Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2011-2017

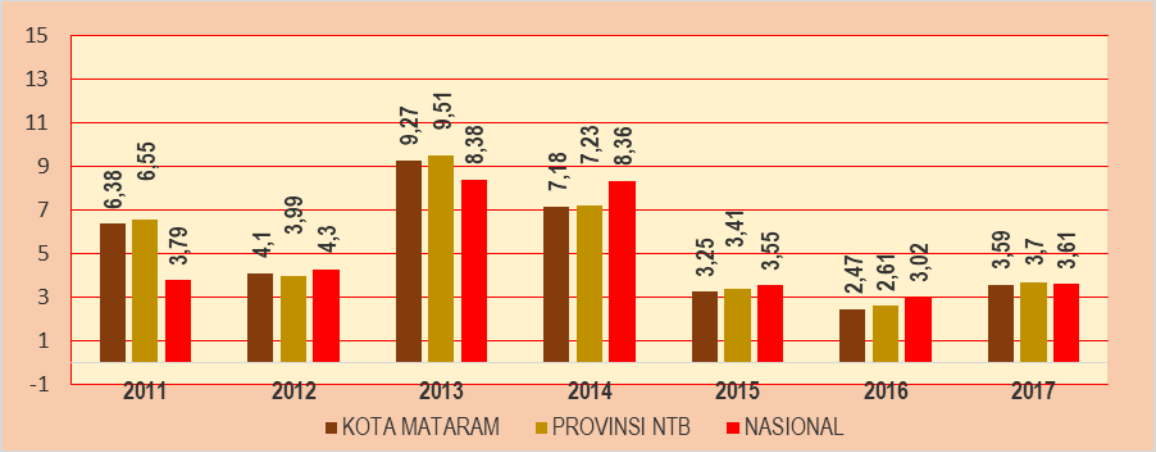

Sumber: BPS Kota Mataram, BPS Provinsi NTB dan BPS, Data Diolah 2018

3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dan sebaliknya PDRB per kapita yang rendah mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang kurang berkembang. Nilai PDRB Per kapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi Per Kapita penduduk suatu daerah.

Lebih jelas untuk perkembangan PDRB per kapita Kota Mataram Tahun 2011-2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.7
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Mataram Tahun 2011-2017

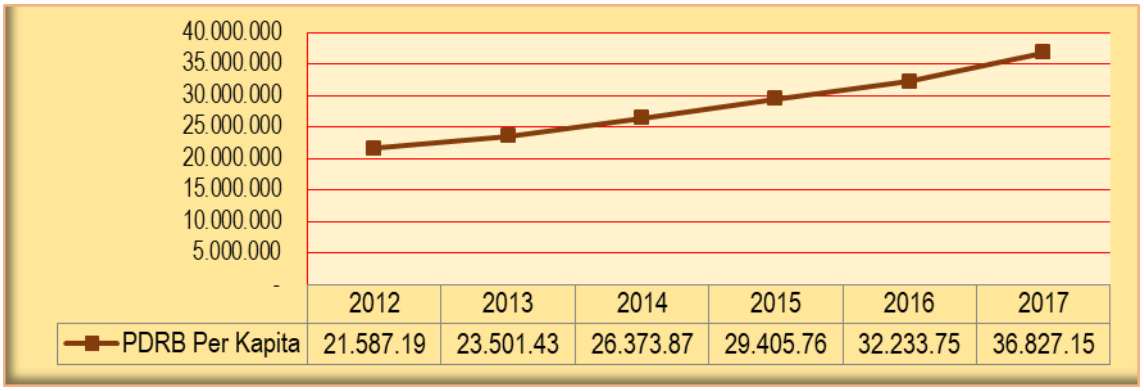

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Per Kapita	21.587.19	23.501.43	26.373.87	29.405.76	32.233.75	36.827.15

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

4. Indeks Gini

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variable tertentu dengan distibusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria, seperti berikut:

- GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 0,4 < GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang
- GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Grafik 2.8
Indeks Gini Kota Mataram Tahun 2016-2018

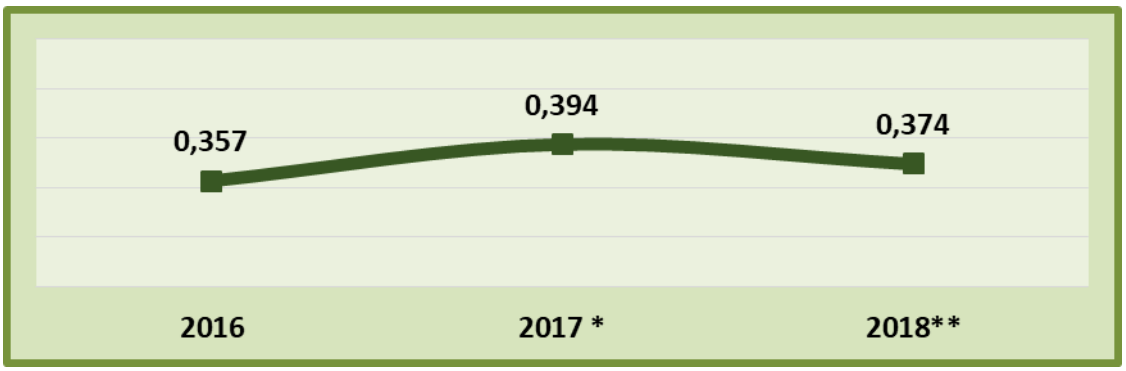

Sumber: BPS Kota Mataram, Data diolah Bappeda Kota Mataram, 2018

Dari Grafik diatas dapat diartikan bahwa Indeks Gini tahun 2016-2018 ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di Kota Mataram tergolong rendah.

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penduduk miskin bukan dilihat hanya karena faktor pendapatan yang rendah, tapi juga karena kapabilitas (tingkat pendidikan dan kesehatan.

Kriteria penduduk miskin yang masih memerlukan bantuan khusus secara intensif, bahkan sepanjang hidup, yaitu: penyandang disabilitas berat, penduduk lanjut usia, dan penduduk yang buta huruf. Gambaran garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sebagaimana Grafik 2.9 berikut:

Grafik 2.9

Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Mataram Tahun 2011-2017

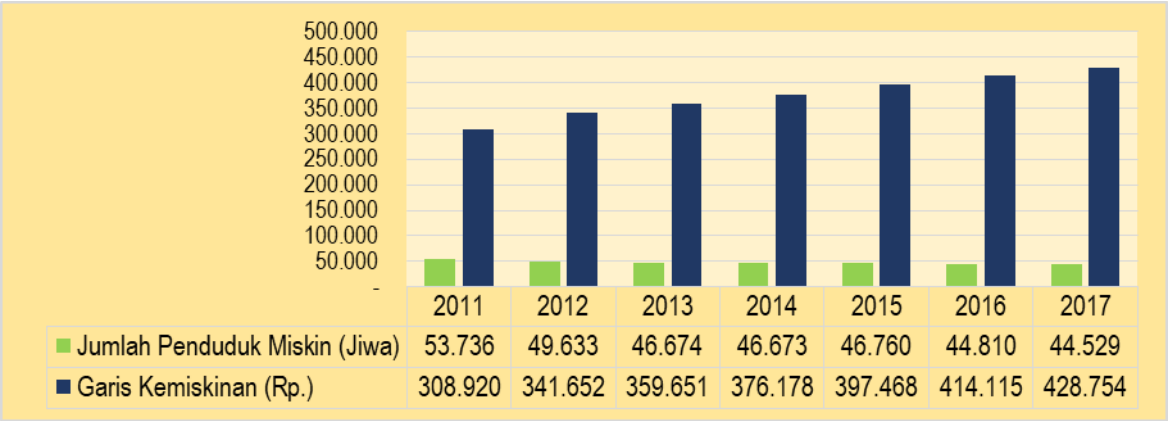

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	53.736	49.633	46.674	46.673	46.760	44.810	44.529
Garis Kemiskinan (Rp.)	308.920	341.652	359.651	376.178	397.468	414.115	428.754

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ditetapkan dua strategi yaitu: pertama: Strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan kedua, Strategi pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin melalui berbagai bentuk subsidi dari pemerintah. Beberapa program pokok, antara lain: penyediaan bantuan dalam bentuk pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan; penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi, penyediaan pendampingan bagi keluarga miskin untuk pengembangan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif; serta Pengembangan sistem perlindungan sosial.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis kinerja atas fokus Kesejahteraan Sosial dilakukan terhadap indikator Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup dan Rasio Penduduk yang Bekerja, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), yang disusun dari tiga aspek yaitu, kesehatan dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); pendidikan dengan dimensi pengetahuan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta ekonomi dengan dimensi standar hidup layak melalui indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Ketiga dimensi ini mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

Pada tahun 2010, *United Nations Development Programme* (UNDP) melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK) diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita serta penghitungan rata-rata indeks diubah dari aritmatik menjadi geometrik. Namun, Indonesia baru menggunakan metode ini pada tahun 2014, dan dua indikator dalam penghitungan IPM yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Usia Harapan Hidup juga menjadi indikator Fokus Kesejahteraan Sosial.

IPM Kota Mataram pada tahun 2017 adalah 77,84; dimana capaian IPM tersebut termasuk dalam klasifikasi **Tinggi** (70 ≤ IPM < 80) dan meningkat menjadi 78,28 pada tahun 2018.

Angka IPM Kota Mataram tersebut berada diatas angka IPM Provinsi NTB yaitu 66,58 dan IPM Indonesia yaitu 70,81. Gambaran angka IPM Kota Mataram terhadap IPM Provinsi NTB dan IPM Indonesia tahun 2013-2017 seperti pada Grafik berikut:

Tabel 2.18
Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2011-2017

Tahun	IPM	Laju (%)
2011	73,50	1,42
2012	74,22	0,98
2013	75,22	1,35
2014	75,93	0,94
2015	76,37	0,58
2016	77,20	1,08
2017	77,84	0,83

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Jika dibandingkan dengan angka Provinsi dan Nasional, maka IPM Kota Mataram tahun 2017 yaitu 77,84 berada diatas IPM Provinsi NTB yang besarnya 66,58 dan IPM Nasional sebesar 70,81. Begitu pula dengan IPM Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi NTB, maka IPM Kota Mataram menduduki peringkat pertama sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.10
IPM Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2014-2016

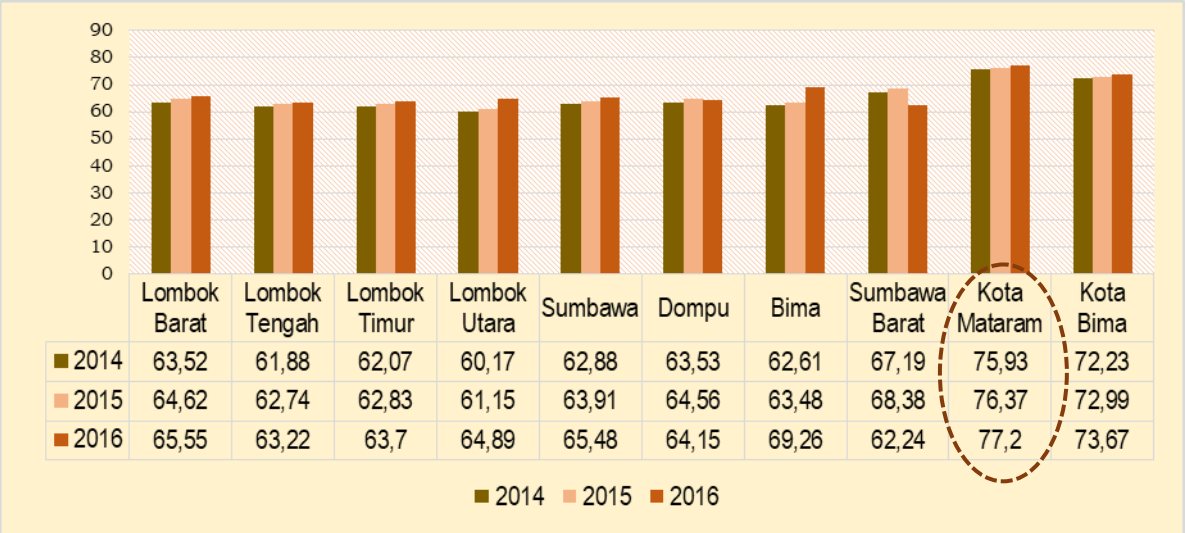

	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Lombok Utara	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Kota Mataram	Kota Bima
2014	63,52	61,88	62,07	60,17	62,88	63,53	62,61	67,19	75,93	72,23
2015	64,62	62,74	62,83	61,15	63,91	64,56	63,48	68,38	76,37	72,99
2016	65,55	63,22	63,7	64,89	65,48	64,15	69,26	62,24	77,2	73,67

Sumber: BPS Kota Mataram, 2017

Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram juga menjadi indikator Fokus Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup secara rata-rata sangat ditentukan oleh tingkat kelangsungan hidup penduduk sejak umur muda, yaitu sejak masa bayi dan dibawah usia lima tahun (balita). Adalah penting untuk melihat dan mengkaji perkembangan dari tingkat kelangsungan hidup tersebut. Perkembangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup penduduk Kota Mataram meningkat. Apabila AHH rendah maka harus diikuti dengan dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Guna melihat ukuran capaian Angka Harapan Hidup (AHH) suatu wilayah, maka perlu dilihat AHH ideal. AHH penduduk yang ideal adalah 85 tahun, sementara AHH terendah adalah 25 tahun.

Selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2017 AHH penduduk Kota Mataram semakin meningkat, artinya kualitas kesehatan mayarakat meningkat seiring dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Namun demikian, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang bersifat komprehensif dan lintas sektor harus terus di lakukan agar derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di masa depan.

Adapun capaian kualitas kesehatan masyarakat Kota Mataram yang terukur dari AHH dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram Tahun 2011-2017

Tahun	Angka Harapan Hidup	Pertumbuhan (Point)
2011	69,45	-
2012	69,73	0,28
2013	70,03	0,30
2014	70,18	0,15
2015	70,43	0,25
2016	70,70	0,27
2017	70,98	0,28

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa tahun 2017 HLS di Kota Mataram telah mencapai 15,51 tahun, hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak di masa mendatang adalah 15,51 tahun (setara dengan pendidikan Diploma III). Secara lebih jelas, perkembangan harapan lama sekolah di Kota Mataram terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Mataram

Tahun	HLS	Pertumbuhan (point)
2011	14,61	-
2012	14,77	0,16
2013	14,82	0.45
2014	15,27	0,45
2015	15,28	0,01
2016	15,50	0,22
2017	15,51	0,01

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Dari tahun ke tahun terlihat perkembangan HLS penduduk Kota Mataram. Peningkatan partisipasi anak sekolah mendorong meningkatnya harapan lama sekolah.

c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS penduduk berusia 25 tahun keatas.

RLS penduduk Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan semakin sadarnya masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Pada tahun 2011, RLS selama 8,47 tahun, tahun 2017 RLS meningkat signifikan menjadi 9,32. Artinya rata-rata penduduk Kota Mataram bersekolah selama 9,32 tahun atau setingkat dengan kelas 10 (1 SMA). Dengan demikian wajib belajar 9 tahun di Kota Mataram sudah dapat dilampaui, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.11
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Mataram

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

d. Pengeluaran Per kapita

Menggambarkan kualitas kehidupan manusia dari sisi ekonomi, standar hidup layak diindikasikan oleh komponen Pengeluaran per Kapita. Semakin tinggi tingkat pendapatan berarti semakin tinggi kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan pendapatan rumah tangga yang tinggi, maka alokasi biaya untuk investasi kesehatan dan pendidikan akan menjadi lebih tinggi sehingga pada gilirannya berperan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di wilayahnya. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Mataram tahun 2011-2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.12
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita
Kota Mataram Tahun 2011-2017 (dalam ribu Rp.)

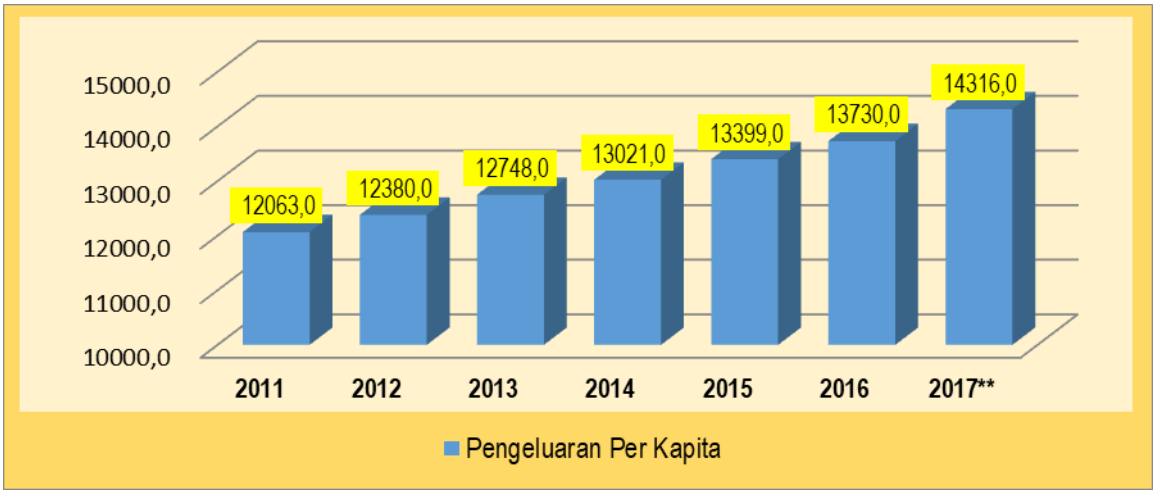

Sumber: BPS Kota Mataram,2018

2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat dilihat dengan menggunakan indikator yaitu APK dan APM.

APK adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C), tanpa memperhitungkan umur terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai. Sedangkan APM adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan tertentu (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C) terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai.

Berikut gambaran perkembangan APK dan APM di Kota Mataram pada tahun 2011-2017:

Tabel 2.21
APM dan APK untuk SD/Setara, SMP/Setara dan SMA/Setara
Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2017

No	Uraian	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**							
	- SD/MI/Paket A	98,14	97,42	101,35	110,4	105,27	111,25	102,91
	- SMP/MTs/Paket B	90,00	104,92	96,82	106,65	114,19	111,3	99,93
	- SMA/SMK/Paket C	73,56	89,42	84,63	92,16	116,96	111,35	96,96

No	Uraian	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2	**Angka Partisipasi Murni (APM)**							
	- SD/MI/Paket A	93,44	97,42	95,91	98,91	99,00	100,49	97,97
	- SMP/MTs/Paket B	77,28	76,73	77,82	83,19	79,01	89,19	93,65
	- SMA/SMK/Paket C	68,08	73,79	64,67	67,01	79,97	87,90	70,47

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B mencapai lebih dari 100% dimana hal ini disebabkan karena terdapat murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah yang telah ditetapkan atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar Kota Mataram. Sementara optimalisasi pencapaian APM dilakukan melalui mekanisme Biaya Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin atau tidak mampu.

3. Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Mataram terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki dan menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja.

Terjadinya penurunan TPAK tidak serta merta diartikan sebagai minimnya kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan ketenagakerjaan, tetapi lebih kepada pola penghitungan yang digunakan, dimana penghitungan TPAK didasarkan atas jumlah angkatan kerja berbanding jumlah penduduk usia kerja sehingga dapat dijelaskan bahwa angkatan kerja berdasarkan kelompok umur yaitu umur 15-24 tahun (kelompok usia sekolah) dan umur 65 ke atas (kelompok purna bakti/pensiun) lebih banyak masuk ke kelompok bukan angkatan kerja. Dengan demikian terjadi penurunan rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yang berimplikasi pada berfluktuasinya angka TPAK.

Grafik 2.13
Perkembangan Angka Indikator Ketenagakerjaan Kota Mataram 2011-2017

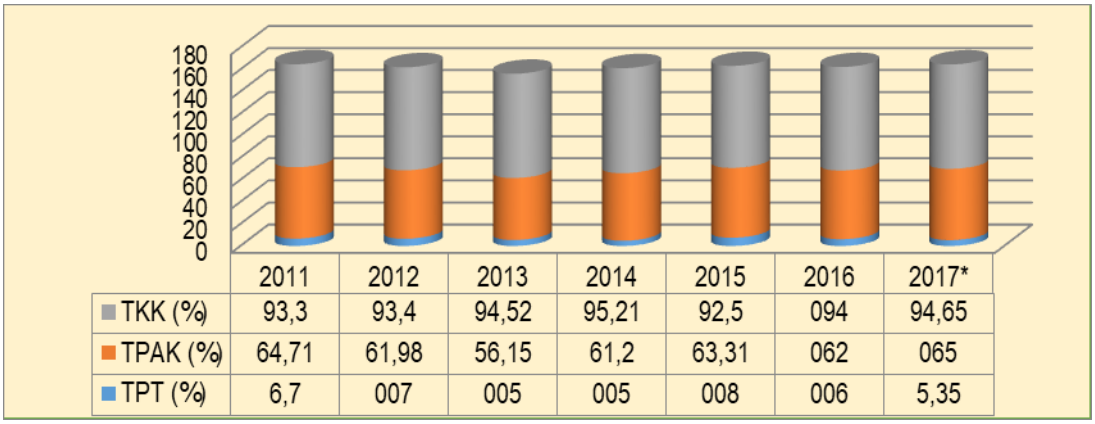

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
TKK (%)	93,3	93,4	94,52	95,21	92,5	094	94,65
TPAK (%)	64,71	61,98	56,15	61,2	63,31	062	065
TPT (%)	6,7	007	005	005	008	006	5,35

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini paling tinggi yang dikeluarkan oleh BPK adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan bebas dari salah saji material. Pemerintah Kota Mataram telah berhasil meraih opini WTP selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu tahun 2014-2017.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Jumlah grup/sanggar kesenian di Kota Mataram pada tahun 2011-2017, terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.22
Rasio Grup Kesenian/Sanggar Kesenian Tahun 2011 – 2017

No	Uraian	Jumlah						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Grup/Sanggar Kesenian	377	377	206	206	153	165	138
2	Jumlah Penduduk	413.622	422.673	431.876	441.064	450.226	459.314	468.509
Rasio Sanggar Kesenian per 10.000 penduduk		9,12	8,92	4,75	4,68	3,40	3,60	3,00

Sumber: BPS Kota Mataram dan Dinas Pendidikan, 2018

Sementara itu kondisi jumlah klub olahraga dan lapangan olah raga yang ada di Kota Mataram menunjang peningkatan prestasi di event olahraga baik tingkat nasional maupun internasional. Rasio klub olahraga di Kota Mataram tahun 2011-2017, sebagaimana tabel terlampir:

Tabel 2.23
Rasio Klub Olahraga Tahun 2011 – 2017

No	Uraian	Jumlah						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Klub Olahraga	59	60	71	71	71	71	98
2	Jumlah Penduduk	413.622	422.673	431.876	441.064	450.226	459.314	468.509
Rasio Klub Olahraga per 10.000 penduduk		1,42	1,41	1,64	1,60	1,57	1,54	2,1

Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram, 2018

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Penyelenggaraan aspek pelayanan umum Kota Mataram mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan pada awal penyusunan RPJMD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, meliputi Urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Ketenagakerjaan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman modal; Kebudayaan; Kepemudaan dan Olahraga;

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika; serta Perpustakaan.

Adapun, Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi (1) ***Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar***, terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, dan Sosial; (2) ***Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar***, terdiri dari: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan. Berikut diuraikan masing-masing Urusan Pemerintah Wajib, sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan dan berkontribusi dalam pembentukan indikator pembangunan manusia. Untuk itu, sarana dan prasarana pendidikan perlu diperhatikan untuk mencapai kualitas dan kuantitas pendidikan yang memadai.

Gambaran statistik sekolah, guru dan murid di Kota Mataram tahun 2012 - 2017 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.24
Statistik Sekolah, Guru dan Murid di Kota Mataram Tahun 2012 – 2017

No	Uraian		Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Sekolah**							
1.1	TK & RA		117	117	117	125	123	149
1.2	SD & MI		183	184	187	184	186	186
1.3	SMP & MTs		59	59	61	59	58	60
2	**Guru**							
2.1	TK & RA		484	497	639	639	764	741
2.2	SD & MI		2.291	2.237	2.461	2.452	2.507	2.357

No	Uraian		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.3	SMP & MTs	1.279	1.262	1.746	1.697	1.711	1.692
3	**Murid**						
3.1	TK & RA	5.266	5.245	6.383	6.383	6.861	8.839
3.2	SD & MI	43.823	43.638	47.211	45.596	48.788	47.330
3.3	SMP & MTs	19.045	19.745	24.027	23.890	23.785	23.037

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan di Kota Mataram dapat dilihat dari indikator berikut ini, antara lain:

- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

  APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. APS di Kota Mataram pada kelompok umur 7-12 tahun pada kurun waktu 2013-2017 sudah mencapai diatas 98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk umur sekolah dasar telah menikmati Pendidikan Dasar. Demikian pula pada kelompok umur 13-15 tahun, APS berfluktuatif dimana pada tahun 2017 APS kelompok umum 13-15 tahun mencapai 100 persen. Untuk kelompok umur 16 – 18 tahun, APS berkisar antara 79,20 persen sampai dengan 85,38 persen.

  Perkembangan APS Kota Mataram tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	APS 7-12 tahun (SD/MI)	98,07	99,09	98,87	99,14	98,64
2	APS 13-15 tahun (SMP/MTs)	97,14	100	98,59	93,38	97,76
3	APS 16-18 tahun (SMU/MA)	82,57	85,11	80,86	85,38	79,20

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

- **Rasio Guru/Murid**

  Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio jumlah guru terhadap murid se Kota Mataram tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Rasio Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	**TK/RA**					
	Jumlah Guru	497	639	639	764	741
	Jumlah Murid	5.245	6.383	6.383	6.861	8.839
	Rasio	10,55	9,98	9,98	8,98	11,92
2	**SD/MI**					
	Jumlah Guru	2.237	2.461	2.452	2.507	2.357
	Jumlah Murid	43.638	47.211	45.596	48.788	47.330
	Rasio	19,51	20,16	20,35	20,25	20,08
3	**SMP/MTs**					
	Jumlah Guru	1.262	1.746	1.697	1.711	1.692
	Jumlah Murid	19.745	24.027	23.890	23.785	23.037
	Rasio	15,64	13,76	14,08	13,90	13,62

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Gambaran pelayanan kesehatan di kota Mataram dijabarkan melalui indikator, antara lain sebagai berikut:

- **Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita**

  Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

  Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi dan balita. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya perhitungan terhadap rasio posyandu dan jumlah balita sebagai upaya dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan kesehatan ibu dan anak sejak dalam kandungan serta pemenuhan gizinya. Rasio antara posyandu dan balita yang terdata di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.27
Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Mataram Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu	340	343	346	348	349	
2	Jumlah Balita	40.951	41.425	41.775	41.947	42.073	42.196
Rasio		**8,30**	**8,28**	**8,28**	**8.29**	**8,30**	**8,30**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, BPS Kota Mataram dan data diolah Bappeda, 2018

- **Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)**

  Perkembangan rasio jumlah Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu (Pustu) terhadap jumlah penduduk di Kota Mataram sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 2.28
Jumlah Puskesmas dan Pustu di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	11	11	11	11	11
2	Jumlah Puskesmas Keliling	12	21	21	21	21
3	Jumlah Pustu	18	18	20	18	16
	Sub Jumlah	41	50	52	50	48
4	Jumlah Penduduk	431.876	441.064	450.226	459.314	468.509
Rasio		**0,094**	**0,113**	**0.115**	**0,109**	**0.102**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram 2018, BPS Kota Mataram dan data diolah Bappeda, 2018

Perkembangan jumlah puskesmas dan pustu menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29
Jumlah Puskesmas dan Pustu Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas		Jumlah Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Ampenan	91.099	2	0.021	3	0.032
2	Mataram	87.527	1	0.011	2	0,022
3	Cakranegara	67.791	1	0.014	3	0.044
4	Sekarbela	69.989	2	0.028	1	0.014
5	Selaparang	75.235	3	0.039	4	0,053
6	Sandubaya	76.868	2	0.026	3	0.039

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram 2018, BPS Kota Mataram dan data diolah Bappeda, 2018

- **Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Perkembangan jumlah dan rasio rumah sakit di Kota Mataram periode tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah RS Negeri	5	5	5	6	5
2	Jumlah RS Swasta	5	6	6	7	9
3	Jumlah RS Jiwa	1	1	1	1	1
4	Jumlah RS Bersalin	7	7	7	1	3
	Sub Jumlah	**18**	**19**	**19**	**21**	**18**
5	Jumlah Penduduk	431.876	441.064	450.226	459.314	468.509
Rasio		**0,042**	**0,042**	**0,043**	**0.042**	**0,045**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, BPS Kota Mataram dan data diolah Bappeda, 2018

- **Rasio Dokter per Satuan Penduduk**

Perhitungan Rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Kota Mataram menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter terhadap jumlah penduduk yang ada. Dalam standar sistem pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, idealnya adalah 40 orang dokter melayani maksimal 100.000 penduduk. Perkembangan jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di Kota Mataram selama kurun waktu tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31
Jumlah dan Rasio Dokter per Jumlah Penduduk di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokter Umum	28	70	114	176	229
2	Jumlah Dokter Spesialis	37	41	88	203	244
3	Jumlah Dokter Gigi	12	9	34	22	21
	Sub Jumlah	**77**	**120**	**236**	**401**	**494**
4	Jumlah Penduduk	431.876	441.064	450.226	459.314	468.509
Rasio		**0,16**	**0,17**	**0,27**	**0.52**	**0,87**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, BPS Kota Mataram dan data diolah Bappeda, 2018

Sementara perkembangan jumlah dokter menurut kecamatan di Kota Mataram, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.32
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Ampenan	89.421	58	0,65
2	Mataram	85.491	95	1,11
3	Cakranegara	67.395	54	0,80
4	Sekarbela	67.431	24	0,36
5	Selaparang	75.027	45	0,60
6	Sandubaya	74.549	125	1,68

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, BPS Kota Mataram dan data diolah Bappeda, 2018

- **Cakupan Balita Gizi Buruk**

Gizi buruk atau malnutrisi adalah keadaan kekurangan energy dan protein (KEP) tingkat berat yang diakibatkan oleh kurangnya konsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama. Gizi buruk biasanya terjadi pada anak balita dan ditampakkan oleh membusungnya perut (busung lapar). Gizi buruk dapat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan anak juga kecerdasan anak.

Berikut gambaran jumlah Balita gizi buruk dan penderita gizi buruk yang mendapat penanganan di Kota Mataram pada tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.33
Jumlah Balita Gizi Buruk dan Penderita Gizi Buruk di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	42	47	47	42	42
2	Jumlah Penderita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	42	47	47	42	42
Persentase (%)		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram dan BPS Kota Mataram, 2018

- **Cakupan Puskesmas**

Gambaran cakupan Puskesmas terhadap jumlah kecamatan di Kota Mataram pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.34
Cakupan Puskesmas di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	11	11	11	11	11
2	Jumlah Kecamatan	6	6	6	6	6
Persentase (%)		**183**	**183**	**183**	**183**	**183**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram dan BPS Kota Mataram, 2018

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat.

Gambaran pelayanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Mataram dijabarkan sebagai berikut:

- **Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik**

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya peresentase tingkat kerusakan, terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, sedang rusak, rusak, dan rusak berat.

Secara lebih lengkap, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram selama tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.35
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	256.453	277.212	147.923	211.959	286.251
2	Panjang Jalan Seluruhnya (km)	319.715	333.918	347.188	379.733	400.063
3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	80,21	83,02	42,61	55,82	71,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, dan BPS Kota Mataram, 2018

- **Cakupan Layanan Air Bersih**

Salah satu kriteria rumah layak huni dan komponen layanan dasar masyarakat adalah rumah tinggal yang sekurang-kurangnya mempunyai akses layanan air bersih.
Cakupan layanan air bersih di Kota Mataram tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.36
Cakupan Layanan Air Bersih di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	41,54	68,24	67,54	70,48	64,67

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2017

- **Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)**

  Salah satu instrumen untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan nasional dengan daerah adalah instrument penataan ruang. Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang mutlak dibutuhkan dalam rangka menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi, serta mewujudkan tata ruang Kota Mataram yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

  IMB merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Jumlah IMB yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 1.349 ijin, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 614 ijin. Menurunnya ijin yang diterbitkan memberikan gambaran bahwa dari ijin yang diusulkan terdapat ijin yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Gambaran pelayanan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dapat dilihat pada indikator berikut, antara lain:

- **Lingkungan Permukiman Kumuh**

  Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor: 647/IV/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Mataram Periode 2015-2020, data luas kawasan kumuh di Kota Mataram adalah seluas 803,39 Ha atau 13.11 persen dari luas wilayah Kota Mataram dengan rincian sebagai berikut:

  1. Kecamatan Ampenan dengan luas kumuh 257.95 Ha;
  2. Kecamatan Sekarbela dengan luas kumuh 132.05 Ha;
  3. Kecamatan Mataram dengan luas kumuh 106.65 Ha;
  4. Kecamatan Selaparang dengan luas kumuh 100.40 Ha;
  5. Kecamatan Cakranegara dengan luas kumuh 73.07 Ha;
  6. Kecamatan Sandubaya dengan luas kumuh 133.27 Ha.

- **Rumah Layak huni**

  Penanganan terhadap masalah rumah tidak layak huni dilakukan dengan memberikan stimulan perbaikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui beberapa pihak baik itu SKPD Kota Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Pusat, PNPM Mandiri Perkotaan, BAZNAS Kota Mataram dan Pihak Peduli Lainnya. Pada tahun 2014 jumlah penanganan mengalami penurunan karena Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat menganggap penanganan RTLH hampir tuntas, sehingga kontribusi penanganan diluar Pemerintah Kota Mataram berkurang, sehingga Persentase rumah layak huni pada tahun 2015 telah mencapai 98,13%. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan yang meliputi struktur bangunan, menjamin kesehatan penghuninya yang meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi, dan memenuhi kecukupan minimum luas bangunannya.

  Rasio rumah layak huni di Kota Mataram tahun 2014-2016 diperoleh dari perhitungan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37
Rasio Rumah Layak Huni di Kota Mataram Tahun 2014-2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah Rumah Layak Huni	99.518	94.248	96.267	99.320
2	Jumlah Penduduk	441.064	450.226	459.319	468.509
	Rasio	**0.22**	**0.21**	**0.21**	**0.21**

* Data Sementara
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2018

- **Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

  RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air. Pengembangan kawasan RTH adalah minimal 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat dengan tutupan vegetasi.

  Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha membutuhkan 20 persen RTH publik setara dengan luas 460,86 Ha (1.226 km2). Saat ini RTH Publik Kota Mataram mencapai 12,50 persen atau seluas 765,57 Ha meningkat 0,02 persen dari tahun 2013, dimana penambahan RTH yang

relatif kecil ini berasal dari penambahan RTH Jalur pada beberapa jalan-jalan baru. Adapun Rasio ruang terbuka hijau di Kota Mataram Tahun 2011-2017 sebagai berikut:

Tabel 2.38
Rasio RTH di Kota Mataram Tahun 2013 – 2017

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	12,48	12,50	12,50	1,8	1,8

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kota Mataram memiliki karakteristik heterogenitas dari sisi agama, ras, suku dan golongan yang berpeluang untuk terjadinya konflik, sehingga upaya preventif dalam mengantisipasi konflik dan sejenisnya dilakukan melalui komunikasi, koordinasi dan sosialisasi yang intensif dengan unsur Kepolisian, TNI, lembaga adat dan kemasyarakatan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah.

Selain itu, Kota Mataram merupakan salah satu Kota/Kabupaten di Provinsi NTB yang termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, beberapa jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram antara lain: Longsor, genangan, banjir, gelombang pasang dan tsunami, abrasi pantai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta konflik sosial. Potensi bencana ini tentu dipengaruhi oleh kondisi geografis, tofografi, geologis, klimatologi, demografi dan faktor tektonik wilayah NTB dan Indonesia umumnya.

Gambaran umum indikator Urusan Wajib Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.39
Indikator Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umun dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Mataram Tahun 2013 – 2017

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Penanganan Konflik	kasus	4	2	2	5	4
2	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	73	75	73	77	80
3	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kegiatan	1	1	1	1	1
4	Jumlah Tower Peringatan Dini Tsunami	Unit	1	1	1	1	1
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	82,50	83,25	91,20	91,70	92,20

Sumber: Bakesbangpol, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD Kota Mataram, 2018

- **Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk**

  Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

  Rasio jumlah Polisi Pamong Praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah Polisi Pamong Praja maka akan semakin besar ketersediaan Polisi Pamong Praja yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.40
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	84	109	113	153	151
2	Jumlah penduduk	431.876	441.064	450.226	459.314	468.509
Jumlah Polisi PP per 10.000 penduduk		**1,95**	**2,47**	**2,51**	**3,33**	**3,22**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2018

- **Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk**

  Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah Linmas maka akan semakin besar ketersediaan Linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2.41
Jumlah Linmas per 10.000 penduduk di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Linmas	-	186	186	186	325
2	Jumlah Penduduk	431.876	441.064	450.226	459.314	468.509
Jumlah Linmas per 10.000 penduduk		**-**	**4.22**	**4.13**	**4,05**	**6,94**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2018

6. Sosial

Perkembangan Kota Mataram sebagai kota urban dengan karakteristik heterogenitas-nya dihadapkan pada permasalahan sosial kemasyarakatan yang makin beragam. Daya tarik Kota Mataram yang berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi masyarakat menjadikan permasalahan sosial terus meningkat. Selain urbanisasi, dinamika pertumbuhan penduduk dengan rata-rata 2 persen setiap tahunnya menjadi faktor yang mempengaruhi makin beragamnya permasalahan sosial kemasyarakatan, antara lain penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak terlantar, fakir miskin dan penyakit sosial lainnya.

Gambaran umum pelaksanaan Urusan wajib sosial di Kota Mataram dapat dilihat dari indikator sebagai berikut, antara lain:

- **Sarana sosial**

  Perkembangan jumlah sarana sosial di Kota Mataram tahun 2013-2017 meliputi panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.41
Jumlah Sarana Sosial di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah panti asuhan	15	15	15	14	18
2	Jumlah panti jompo	1	1	1	1	1
3	Jumlah panti rehabilitasi	1	1	1	1	1

Sumber: BPS Kota Mataram, Dinas Sosial Kota Mataram, 2018

Penangangan Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial didalam Panti merupakan kewenangan dari Provinsi NTB sedangkan penanganan di Luar Panti diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kota Mataram sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Didaerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018, jumlah LKS di Kota Mataram sebanyak 63 LKS yang berfungsi mendukung penyelenggaran kesejahteraan sosial di luar panti di Kota Mataram yang sebagian besar LKS tersebut terdiri dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Kesejahjeteraan Lanjut Usia (LKSU), LKS bidang rehabilitasi Korban Nafza dan ODHA, serta LKS yang memberikan pendampingan terhadap Penyandang HIV/AIDS, dan Disabilitas.

- **Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

  Untuk indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial PMKS, pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS serta pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial

Ekonomi (PRSE). Data penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Mataram tahun 2011-2015, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.42
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Mataram Tahun 2013-2017 (Orang)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	46.939	47.032	47.331	42.266	42.513

Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram, 2018

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara peningkatan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Bahkan, pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan wajib ketenagakerjaan di Kota Mataram sebagai berikut, antara lain:

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

  Dalam upaya pengukuran pencapaian tingkat ketersediaan lapangan kerja di Kota Mataram diperlukan adanya indikator kinerja ketenagakerjaan yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan yang mampu dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Salah satunya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari definisinya, TPAK sebagai salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Berikut, gambaran TPAK di Kota Mataram Tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 2.43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	56,15	61,20	63,31	62,26	61,33

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Peningkatan TPAK Kota Mataram didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa serta sektor industri kreatif.

- **Tingkat Kesempatan Kerja**

  Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dapat memberikan gambaran peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Komponen penghitungan TKK meliputi jumlah penduduk berkerja berbanding jumlah angkatan kerja. Penurunan angka TKK dimaksud bukan semata-mata menunjukkan ketidak berhasilan pencapaian kinerja ketenagakerjaan akan tetapi lebih pada makin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Mataram.

  Posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa menjadi penyumbang tingginya jumlah angkatan kerja tersebut. Sedangkan dilihat dari sisi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perijinan dan penanaman modal sejalan dengan upaya optimalisasi kinerja ketenagakerjaan. Salah satunya melalui persyaratan pemenuhan ijin investasi dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (ijin usaha fasilitas) diharuskan untuk memprioritaskan pada perekrutan atau pemanfaatan tenaga kerja lokal yang ada di Kota Mataram. Upaya ini dimaksudkan dalam rangka meminimalisir tingkat pengangguran dan lebih penting lagi sebagai upaya optimalisasi tingkat penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan. Berikut, gambaran TKK di Kota Mataram Tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 2.44
Tingkat Kesempatan Kerja di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	94,52	95,21	92,50	93,83	94,65

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio sebesar 98 (kurang dari 100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.

Untuk memberikan peran perempuan dalam kemajuan Kota dengan memberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dengan menargetkan proporsi peserta Musrenbang/Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) sebesar 30 persen adalah peserta dari unsur perempuan, membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan anak, serta meningkatkan ruang ekspresi perempuan melalui peningkatan frekuensi acara berbasis gender bernilai kebangsaan.

Gambaran Umum indikator pelaksanaan Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Mataram sebagai berikut, antara lain:

- **Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Berikut, gambaran IPG di Kota Mataram Tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 2.45
Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	90,48	92,13	92,35	93,40	92,40

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, 2018

- **Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan**

Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan adalah proporsi penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Gambaran

AMH Perempuan dan Angka Buta Huruf Perempuan di Kota Mataram Tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel 2.46
Angka Melek Huruf Perempuan di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Melek Huruf Perempuan	90,01	90,03	90,35	89,65	87,03
2	Angka Buta Huruf Perempuan	9,52	7,87	7,65	7,60	12,97

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

3. Pangan

Pencapaian indikator kinerja utama Urusan Wajib Pangan yaitu meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan.

Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dan kelompok pangan utama, dengan skor maksimal sebesar 100. Selain itu skor PPH juga berfungsi sebagai instrument untuk mengevaluasi konsumsi pangan di suatu wilayah, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan wilayah ke depan. Gambaran Skor PPH di Kota Mataram Tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 2.47
Skor Pola Pangan Harapan di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Skor Pola Pangan Harapan	77,20	80,80	82,13	85,02	87,90

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, 2018

4. Pertanahan

Dalam Urusan Wajib Pertanahan, indikator penilaian difokuskan pada Tanah yang dibebaskan dan pengurusan sertifikat tanah PRONA. Tanah yang dibebaskan pada tahun 2013 seluas 53.903 m², selanjutnya pada tahun 2014 seluas 6.096 m², pada tahun 2015 seluas 30.895 m², dan pada tahun 2016 seluas 145 m². Sedangkan pengurusan sertifikat tanah PRONA di Kota Mataram pada tahun 2014 sebanyak 350 bidang, tahun 2015 sebanyak 724 bidang, tahun 2016 sebanyak 1.800 bidang dan pada tahun 2017 sebanyak 5.250 bidang.

5. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsinya yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Dasar dan prinsip pengelolaannya adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup di Kota Mataram sebagai berikut, antara laini:

- **Volume Sampah yang Tertangani**

Penanganan sampah yang dilakukan adalah dengan sistem penanganan persampahan yang berbasis penanganan sampah disumber sampah, hal ini dilaksanakan karena masing-masing lingkungan yang berada di Kota Mataram telah diberikan sarana pengangkutan sampah berupa kendaraan roda tiga sebagai alat angkut sampah dari sumber sampah atau rumah tangga. Volume sampah yang tertangani di Kota Mataram tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 2.48
Volume Sampah yang Tertangani di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Volume Sampah yang Tertangani (m^3/tahun)	303.581,45	381.376,5	357.714,6	527.060	491.030,85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2018

- **Kawasan Resapan Air**

Kawasan resapan air di Kota Mataram pada tahun 2014 mengalami peningkatan 4,2% dari tahun 2014 sebesar 75,65% menjadi 79,85% pada tahun 2015. Kawasan resapan air ini didukung oleh ketersediaan sumur-sumur resapan. Jumlah Sumur Resapan mengalami peningkatan sebesar 39 titik pada tahun 2015 dari 8 titik pada tahun 2014. Sumur resapan dibangun di Tujuh lingkungan, antara lain: Lingkungan Arong Arong dan Lingkungan Darul Hikmah Kelurahan Dasan Agung, Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga, Lingkungan Kebun Jeruk, Pejeruk Perluasan, Pejeruk Baru Kelurahan Pejeruk dan Lingkungan Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari. Masing-masing dengan diameter 1,2 meter dan kedalaman 3 meter.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut, antara lain:

- **Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk**

  Program *e*-KTP secara nasional telah memberikan kemudahan pendataan kepastian validasi data, sehingga tidak ada penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu. Optimalisasi pelayanan kependudukan dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana pendukung dan peralatan *e*-KTP. Adapun gambaran persentase penduduk ber-KTP di Kota Mataram tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 2.49
Rasio Penduduk ber KTP di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP	256.569	260.164	271.833	279.230	297.365
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	294.215	285.000	285.688	292.321	304.985
Persentase		**86,06**	**87,20**	**91,29**	**95,15**	**95,52**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2018

- **Rasio Bayi Berakte Kelahiran**

  Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi pada tahun yang sama. Gambaran umum rasio bayi berakte kelahiran di Kota Mataram tahun 2013-2015, sebagai berikut:

Tabel 2.50
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Mataram Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah bayi ber-akte kelahiran	6.719	8.004	3.522	6.719
2	Jumlah bayi	9.046	8.811	9.381	9.046
Rasio		**0.74**	**0.91**	**0.42**	**0.74**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram,2018

- **Rasio Pasangan Berakte Nikah**

  Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah pasangan yang telah menikah. Gambaran umum rasio pasangan berakte nikah di Kota Mataram tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 2.51

Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	445	463	571	102.078	100.192
2	Jumlah keseluruh pasangan nikah	127.331	112.427	117.105	207.981	193.314
Rasio		**0,004**	**0,003**	**0,004**	**0,005**	**0,50**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2018

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, indikator penilaian difokuskan pada persentase PKK Aktif dan Persentase Posyandu Aktif. Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Mataram, sebagai berikut:

- **Persentase PKK Aktif**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat menuju dari bawah terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Gambaran tentang persentase PKK Aktif di Kota Mataram tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 2.52

Persentase PKK Aktif di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PKK Aktif	57	57	57	57	57
2	Jumlah PKK	57	57	57	57	57
Persentase		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Setda Kota Mataram, 2018

- **Persentase Posyandu Aktif**

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Adapun gambaran persentase Posyandu aktif di Kota Mataram tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 2.53

Persentase Posyandu Aktif di Kota Mataram Tahun 2014-2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu Aktif	346	348	348	348
2	Jumlah Posyandu	346	348	348	348
Persentase		**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Setda Kota Mataram, 2018

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga tercapai penduduk tumbuh seimbang dengan tujuan terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Keberhasilan Program Keluarga Berencana didukung oleh pola pemberdayaan masyarakat yang tepat dan komitmen semua pihak dalam memahami pentingnya Program Keluarga Berencana.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Mataram sebagai berikut, antara lain:

- **Jumlah Keluarga Sejahtera**

Progress positif dalam peningkatan jumlah keluarga sejahtera di Kota Mataram sebagai dampak meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia.

Tabel 2.54

Jumlah Keluarga Sejahtera di Kota Mataram Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Keluarga Sejahtera (jiwa)	76.254	77.335	78.141	78.950	78.950	106.495	106.495

Sumber: Kota Mataram Dalam Angka, 2019

- **Rasio Akseptor KB**

Data rasio akseptor KB di Kota Mataram dalam kurun waktu tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.55

Rasio Akseptor KB di Kota Mataram Tahun 2011-2015

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Akseptor KB	67,34	75,00	76,08	76,71	77,13

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mataram, 2018

9. Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah. Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan di Kota Mataram adalah Rasio Ijin Trayek, Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum dan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, sebagai berikut:

Tabel 2.56

Indikator Pelaksanaan Urusan Perhubungan di Kota Mataram Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Ijin Trayek	0,12	0,12	0,12	0,13	N/A
2	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (orang)	652.905	643.119	522.442	532.323	N/A
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	17.297	17.302	17.010	17.307	13.803

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2018

10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika perlu untuk diselaraskan dengan arah pembangunan nasional bidang komunikasi dan informatika yaitu perlu adanya upaya pembinaan dan pengembangan kebijakan komunikasi daerah, pengelolaan dan penyediaan informasi melalui media publik. Sampai dengan tahun 2017, dalam mendukung kemudahan akses informasi baik di lingkungan internal maupun eksternal Pemerintah Kota Mataram, yaitu berupa pemasangan jaringan wifi, pemasangan peralatan dan jaringan pengamanan CCTV.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika sebagai berikut, antara lain:

- **Pemasangan Jaringan Wifi:**

  Pemasangan Wifi dilakukan di beberapa tempat yaitu OPD, Kecamatan, Kelurahan, Sekretariat dan dilokasi Area publik, jaringan tersebut, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram dengan lokasi pemasangan antara lain:

Tabel 2.57

Jaringan Wifi di Kota Mataram

No.	Lokasi	Bandwith
1	Taman Udayana Kota Mataram	3 titik
2	Taman Selagalas Kota Mataram	1 titik
3	Taman Sangkareang Kota Mataram	1 titik
4	Pantai Ampenan	2 titik
5	Kantor Camat se Kota Mataram	6 titik
6	Kantor Lurah se Kota Mataram	50 titik
7	Radio Suara Kota Mataram	1 titik
8	Pendopo Walikota Mataram	2 titik
9	Pos Polisi Taman Udayana	1 titik
10	OPD dan Sekertariat Kota Mataram	45 titik
11	PPID	1 titik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2018

- **Pemasangan peralatan dan jaringan Pengamanan CCTV**

  Pemasangan CCTV di beberapa titik lokasi wilayah Kota Mataram, dipergunakan untuk pemantauan keamanan wilayah, terdiri dari pemantauan kemacetan arus lalu lintas dan pemantauan persampahan di lingkup Kota Mataram. Jumlah titik lokasi pemasangan CCTV untuk tahun 2017 sebanyak 7 (lima) titik yaitu:
  - di kawasan TPST Lawata Dasan Agung Baru Kota Mataram (Persampahan)
  - di kawasan TPS Karang Medain di jalan Kamboja Kota Mataram (Persampahan)
  - di kawasan TPS DR. Soetomo Gg. Bentoel Kota Mataram (Persampahan)
  - di kawasan AA.Gde Ngurah (Kemacetan Lalu Lintas)
  - di kawasan Jl. Pejanggik Depan SMP 1 Mataram (Kemacetan Lalu Lintas)
  - di kawasan lingkup gedung Sekertariat daerah Kota Mataram (Pemantauan Keamanan)
  - di kawasan lingkup gedung Pendopo walikota Mataram (Pemantauan Keamanan)

- **Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**

  Fungsi terbentuknya KIM yaitu Sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat, sbg wahana interkasi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, antara masyrakat/anggota KIM dengan pemerintah, dan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi, Dimana pada tahun 2017 Kelompok Informasi Masyarakat Mentaram (KIM2) di 6 Kecamatan Kota Mataram telah di bina dan diberdayakan dengan memberikan pelatihan2/Bimtek jurnalistik.

Upaya lainnya dalam mendukung pengembangan jaringan dan sistem informasi, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi melalui pelatihan TIK, serta untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Pelatihan aplikasi *e-Commerce* yang dimiliki kota Mataram lewat subdomain *http://www.ecommerce.mataramkota.go.id* .

Adapun bentuk inovasi percepatan pelayanan Penanganan Gawat Darurat Pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan Kementrian Kominfo melakukan penyatuan semua nomor informasi gawat darurat yang selama ini masih beragam menjadi satu nomor tunggal panggilan darurat (single emergency number) 112, aplikasi Lapor, SMS *Gateway*, pengaduan lewat website dan aplikasi mataramku lapor. Direncanakan ini menjadi awal untuk rencana Program Kota Pintar (Smart City) terutama dalam rangka memberikan perbaikan dalam pelayanan publik.

Sebagai penjabaran Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Walikota Kota Mataram di atur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Perwal tersebut telah melingkupi peran serta seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dan PPID pembantu yang telah ditetapkan tersebut telah menjalankan tugasnya untuk memberikan, serta melayani permintaan informasi publik, terkecuali informasi publik yang dikecualikan.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan yang dianggap penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia dalam kaitannya mendukung usaha kecil dan menengah. Koperasi adalah sebuah kata yang tidak asing untuk didengar bagi masyarakat Indonesia karena mencerminkan budaya bangsa yang gotong royong dan tolong menolong.

Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan jumlah wirausaha baru. Sebagaimana difinisi dari wirausahawan itu sendiri yaitu seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Dalam perkembanganya, pertumbuhan WUB di Kota Mataram pada tahun 2016 sebesar 5.288, data ini adalah data akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 terdapat penambahan wirausaha baru mencapai angka sebesar 3.158 WUB dalam rangka memenuhi target wirausaha baru sebesar 10.000 WUB sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Provinsi NTB. Keberhasilan tersebut tentunya tidak

terlepas dari upaya startegis yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya, peningkatan kemampuan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan dan penguatan kelembagaan koperasi.

Selain itu juga, peran koperasi menjadi prioritas perhatian dalam upaya peningkatan iklim usaha yang kondusif di Kota Mataram serta daya dukungnya dalam penciptaan WUB. Pada tahun anggaran 2017 terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif sejumlah 2 unit koperasi yaitu dari 396 unit koperasi tahun 2016 menjadi 398 unit koperasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 21/Per/M.KUMKM/IX/2015 tanggal 08 Oktober Tahun 2015 tentang pemeringkatan koperasi, beberapa upaya strategis dalam rangka peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitas. Dari jumlah koperasi aktif yang ada, secara berkesinambungan dilakukan penilaian kinerja dalam rangka penetapkan koperasi yang berkualitas. Dasar penetapan kinerja koperasi dilakukan melalui Pemeringkatan Koperasi yang berdasarkan hasil pengklasifikasian/penilaian yang dilakukan ditetapkan 124 koperasi berkualitas pada tahun 2017.

12. Penanaman Modal

Penanaman Modal dalam suatu Negara maupun daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan investasi dapat meningkatkan PAD secara langsung yang dapat dibelanjakan untuk program pembangunan. Selain itu, besarnya investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terkait dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Dari sisi peran pemerintah, harus mengupayakan pembenahan terhadap peningkatan pelayanan secara prima dalam menunjang iklim berinvestasi.

Peranan investasi (I) dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram begitu krusial, berkontribusi sebesar 38.69% terhadap PDRB Kota Mataram pada tahun 2017. Hal ini juga bisa dilihat dari terus meningkatnya nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB dari Rp. 5,050 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 6,68 Triliun pada tahun 2017. Laju pertumbuhan investasi juga mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir, yaitu tumbuh sebesar. Banyaknya investor yang menanamkan investasinya di Kota Mataram tidak lepas dari daya tarik Kota Mataram sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, hiburan (entertainment) dan perbelanjaan (shopping centre). Hal ini juga didukung oleh penetapan Kota Mataram dalam RTRW Nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan konsep MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions), dan pada RTRW Provinsi NTB sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Proses perijinan yang semakin mudah dengan tenggat waktu yang semakin cepat juga menjadi daya tarik investor menanamkan modalnya di Kota Mataram. Rata-rata, proses penyelesaian ijin investasi tepat waktu sudah mencapai lebih dari 98%. Ini artinya bahwa ada kepastian (certainty) dalam menjalankan

bisnis di Kota Mataram. Selain itu, lama pengurusan berbagai ijin di Kota Mataram lebih singkat.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan kualitas sumber daya pemuda, organisasi pemuda merupakan tujuan strategis dalam upaya menciptakan SDM Kota Mataram yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu berdaya saing.

- **Jumlah Organisasi Pemuda**

  Capaian indiaktor kinerja utama kepemudaan dan olahraga dilakukan dengan mengoptimalkan wadah organisasi yang ada yaitu organisasi kepemudaan meliputi organisasi kepemudaan pada tahun 2017 sebanyak 71 buah yang terdiri dari 11 organisasi kepemudaan yang berada di sekolah, dan 60 organisasi kepemudaan yang berada di luar sekolah.

- **Jumlah Organisasi Keolahragaan**

  Jenis olahraga di Kota Mataram pada tahun 2017 adalah sebanyak 50 jenis olahraga, dimana yang telah memiliki kepengurusan cabang olahraga sebanyak 30 cabang dan 20 cabang kepengurusannya belum terbentuk di Kota Mataram, angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2011.

- **Jumlah Kegiatan Kepemudaan**

  Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan di Kota Mataram pada tahun 2017 sebanyak 5 jenis yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan Pelajar dan Kepemudaan, Pembinaan Paskibraka, Musabaqah Pelajar Kota Mataram (MTQ, MFQ/MHQ, MSQ dan MKQ), Pelaksanaan Tadarus Al-Qur'an Pelajar dan Guru Pembina Imtaq, Pertukaran Pemuda Antar Daerah dan Lawatan Sejarah Pelajar.

- **Jumlah Kegiatan Olahraga**

  Kegiatan keolahragaan di Kota Mataram pada tahun 2017 adalah sebanyak 8 kali secara rutin dilakukan setiap tahun, antara lain Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pendidikan Indonesia (LPI), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi Olahraga Unggulan Daerah (KOUD), dan Pekan Olahraga Antar Satuan Pendidikan.

- **Jumlah Lapangan Olahraga**

  Dalam mendukung pembinaan olahraga di Kota Mataram, terdapat sarana pendudkung kegiatan olahraga yang sebagian besar berada di sekolah-sekolah di Kota Mataram yaitu pada tahun 2017 terdapat 43 lapangan olahraga berupa lapangan basket, lapangan volley dan lain-lain.

Selain itu, Pembinaan olahraga professional di luar sekolah dengan keberadaan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan prestasi atlet Kota Mataram terutama dalam menghadapi event olahraga regional dan nasional. Untuk mendukung capaian prestasi atlet Pemerintah Kota Mataram telah memberikan bantuan stimulus baik kepada atlet maupun pelatih masing-masing Cabang Olahraga (Cabor).

14. Statistik

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan atau perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data atau informasi statistik. Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Data dan informasi statistik untuk menunjang proses perencanaan pembangunan yang tersedia di Kota Mataram pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.58
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Statistik Daerah	2 Dokumen	- Daerah Dalam Angka - Kecamatan dalam Angka

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2018

15. Persandian

Urusan Wajib Persandian di Kota Mataram pada tahun 2017 telah melakukan pengamanan terhadap informasi daerah melalui Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dan dokumen pengamanan informasi yang berklasifikasi. Adapun prosentase pengamanan informasi daerah pada tahun 2017 sebesar 100 persen.

16. Kebudayaan

Sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dengan keberagaman budaya tetap peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai-nilai kebudayaan dan keragaman budaya.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan di Kota Mataram sebagai berikut, antara lain:

- **Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

  Wujud penyelenggaran festival seni dan budaya di Kota Mataram antara lain adalah pergelaran, pameran, festival dan lomba. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.

- **Jumlah Sanggar Seni dan Budaya**

  Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Mataram pada tahun 2017 adalah sebanyak 203 sanggar yang tersebar di seluruh kecamatan. Sanggar seni yang ada berupa sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman, peresean, cupak gerantang, hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni, terdapat beberapa komunitas seni yang dikembangkan oleh komunitas muda dalam mengembangkan seni akustik, keroncong, dan sebagainya.

- **Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**

  Keberadaan bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan pendataan ulang sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota.

  Jumlah situs di Kota Mataram sampai dengan saat ini sebanyak 4 situs, yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4 situs tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang Sayang.

17. Perpustakaan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan yang bertujuan melaksanakan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan di Kota Mataram sebagai berikut, antara lain:

- **Tenaga Pengelola Perpustakaan**

  Untuk dapat memberdayakan fungsi Perpustakaan sebagai pengelola informasi dan sumber informasi dengan menyediakan koleksi bahan pustaka secara fungsional dibutuhkan koleksi

bahan pustaka, sarana dan prasarana dan tenaga pengelola yang sesuai dengan bidangnya. Di samping itu, keberadaan tenaga pengelola perpustakaan adalah faktor pendukung yang dominan.

- **Jumlah Perpustakaan dan Cakupan Layanannya**

  Disamping memberdayakan fungsi perpustakaan, dilakukan pembinaan perpustakaan pada sekolah-sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA, Rumah Ibadah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 18 Perpustakaan sekolah-sekolah dan 12 Taman Bacaan Masyarakat. Dari segi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Kota Mataram sejumlah 22.348 orang.

18. Kearsipan

Arsip adalah suatu tanda bukti, dokumen atau warkat yang bertalian dengan bukti keterangan suatu keluarga, perusahaan, masyarakat atau bangsa. Kearsipan adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan arsip-arsip baik arsip dinas maupun arsip pribadi dari mulai penerimaan, pencatatan, pengiriman, penyingkiran maupun pemusnahan surat menyurat atau berbagai macam warkat lainnya.

Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan selama tahun 2017 antara lain program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah melalui pengadaan sarana pengolahan, penyimpanan arsip dan penataan dokumen/arsip daerah. Selain itu untuk menunjang ketertiban penyelenggaraan kegiatan kearsipan, berpedoman pada Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan.

C. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

Gambaran umum indikator Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut, antara lain:

- **Tingkat konsumsi ikan**

  Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram menghasilkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan ketersediaan ikan di pasaran, dimana peningkatan produksi perikanan tangkap ditunjang adanya penyediaan sarana dan prasarana perikanan seperti motor tempel, kapal motor, pukat kantong, jaring insang, jaring angkat dan pancing. Tingkat konsumsi ikan masyarakat

mengalami peningkatan sebesar 4,40 kg/kapita/Thn. Dari tingkat konsumsi sebesar 31,50 kg/kapita/thn tahun 2016 menjadi 35,54 kg/kapita/thn 2017.

- **Produksi perikanan tangkap**

  Dari sisi kinerja produksi perikanan tangkap tidak mengalami kenaikan masih tetap di angka 1.328,70 ton baik tahun 2016 maupun tahun 2017.

- **Produksi perikanan budidaya air tawar**

  Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan ketersediaan ikan di pasaran. Dari sisi kinerja produksi perikanan budidaya air tawar terjadi penurunan sebesar 340,839 ton yaitu sebesar 380,93 ton tahun 2016 menjadi 378,932 ton tahun 2017. Penurunan tersebut dikarenakan lahan yang mulai menyempit.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal dengan mengembangkan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal; meningkatkan manajemen pengelolaan pariwisata dan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam.

Penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua Ampenan serta kawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di Kota Mataram, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota Mataram serta didukung dengan reaksi positif swasta terhadap pembangunan hotel dan restoran. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan kepariwisataan. Pada tahun 2017, tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sebesar 73.800 orang wisatawan dari total jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 sebesar 623.835 orang wisatawan menjadi 697.635 orang wisatawan

Upaya peningkatan tingkat kunjungan wisatawan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis Paket dan Paket Wisata Unggulan yaitu pelaksanaan Festival Mentaram.

3. Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

Gambaran umum indikator Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian sebagai berikut, antara lain:

- **Luas Lahan Pertanian**

  Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersebar di 6 Kecamatan. Ketersediaan jumlah areal pengembangan pertanian antar kecamatan satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan dan perbedaan luas kawasan. Saat ini Kecamatan Sandubaya memiliki sebaran lahan pertanian tertinggi dibandingkan Kecamatan lainnya seluas 603,96 Ha, dan Kecamatan Ampenan dengan sebaran terendah seluas 173,41 Ha.

- **Produktivitas Rata-Rata Padi dan Kedelai**

  Produktifitas rata-rata padi pada tahun 2016 dengan realisasi sebesar 65,75 kw/Ha telah terjadi penurunan sebesar 4,21 Kw/Ha pada tahun 2017 menjadi 61,54 Kw/Ha. Sedangkan produktifitas rata-rata kedelai pada tahun 2016 dengan realisasi sebesar 12,50 kw/Ha telah terjadi penurunan sebesar 3,80 Kw/Ha pada tahun 2017 menjadi 8,70 Kw/Ha. Penurunan produktifitas rata-rata padi dan kedelai ini karena faktor klimatologi, juga pengaruh faktor-faktor lainnya seperti hama dan penyakit tanaman yang muncul akibat perubahan iklim dan pola tanam serta kerusakan saluran irigasi pertanian.

- **Capaian Layanan Penyuluhan**

  Meningkatnya intensitas kunjungan penyuluh ke kelompok binaan dalam rangka pembinaan dan perluasan informasi teknologi pertanian terbaru menjadi salah satu penyebab meningkatnya cakupan bina kelompok tani yaitu 311 kelompok tani pada tahun 2017 yang diikuti dengan meningkatnya cakupan layanan penyuluhan sebesar 90 persen.

4. Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan usaha.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesatbilan harga di Kota Mataram dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi serta perkembangan komoditas strategis di kota mataram pada 4 (empat) pasar tradisional serta melalui koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram berkontribusi positif dalam pengendalian inflasi.

Salah satu rekomendasi TPID Kota mataram terkait dengan keberadaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai bentuk nyata upaya Pemerintah Kota Mataram dalam memberikan informasi secara luas ke masyarakat mengenai kondisi harga bahan pangan strategis di 6 (enam) pasar besar diantaranya pasar Kebon Roek, Pasar Pagesangan, Pasar Mandalika dan Pasar Cakranegara berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas inflasi di Kota Mataram. Melalui perluasan informasi harga dimaksud meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan harga bahan pangan strategis yang terjadi

sehingga meminimalisir terjadinya kekhawatiran di masyarakat terkait ketersediaan stok bahan pangan.

Terkait dengan intervensi terhadap kelompok pedagang informal atau yang lebih dikenal dengan Pedagang Kali Lima (PKL), Pemerintah Kota Mataram telah melakukan penataan terhadap titik-titk PKL yang ada. Adapun jumlah lokasi titik PKL yang telah diintervensi sampai dengan pada tahun 2017 adalah sejumlah 29 titik, bertambah 3 titik dari tahun 2016 yang jumlah 26 titik dimana dilakukan intervensi di PKL di Jalan Tambora, Lingkungan Sindu Timur dan Pasar Sayang sayang. Penataan titik PKL dimaksud untuk lebih memperindah dan mempercantik wajah Kota Mataram, dimana selama ini permasalahan keberadaan PKL di Kota Mataram cenderung dikonotasikan menimbulkan kekumuhan.

Disamping dilakukan penataan lapak, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pembinaan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan dengan pemberian bantuan perlengkapan berupa tenda, gerobak dan coldbox secara bertahap kepada PKL di berbagai titik.

5. Industri

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Kategori Industri Pengolahan merupakan kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Segala bentuk perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Kelompok usaha Industri Pengolahan Atas Dasar Harga (ADH) Konstan 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp. 65,7 milyar lebih dari Rp.1,1 trilyun lebih pada tahun 2016 menjadi Rp.1,17 trilyun lebih tahun 2017.

Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota Mataram di tahun 2017 melaksanakan berbagai upaya, antara lain: melakukan pembinaan IKM serta kemampuan teknologi industri, memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku IKM serta bantuan peralatan dan Pengembangan Ekonomi Produktif, Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta.

Pemerintah Kota Mataram secara intensif telah melakukan upaya peningkatan klaster unggulan di sentra-sentra industri. Penanganan secara intensif dimaksudkan dalam rangka percepatan peningkatan daya saing industri dari berbagai aspek secara menyeluruh.

Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan berbagai upaya, antara lain: Meningkatkan cakupan potensi unggulan daerah pada masing-masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi; Meningkatkan penyelenggaraan serta keikutsertaan dalam event-event sebagai sarana pemasaran hasil produksi unggulan daerah; Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan kondusivitas wilayah.

Dari berbagai upaya tersebut, perkembangan jumlah IKM tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah IKM Formal meningkat sejumlah 166 IKM dari 2.083 unit usaha tahun 2016 menjadi 2.249 unit usaha di tahun 2017. Kondisi yang sama terjadi pada perkembangan jumlah IKM Non Formal, dimana meningkat sejumlah 643 unit IKM dari 1.717 unit usaha tahun 2016 menjadi 2.360 unit usaha tahun 2017.

6. Ketransmigrasian

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down , melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA). Pelaksanaan program transmigrasi di Kota Mataram pada tahun 2017 tercatat bahwa tidak ada calon transmigran yang ditempatkan ke luar daerah sesuai target sebesar 25 orang, mengingat Kota Mataram tidak memperoleh kuota dari pemerintah pusat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas Tenaga Kerja Kota Mataram pada tahun 2017 adalah sosialisasi terkait ketransamigrasian.

D. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan untuk mendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui:

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Tujuan dan Sasaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan adalah : Meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat kelurahan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; Meningkatnya supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasai Manusia dan kepastian hukum serta rasa keadilan; Meningkatnya Penyusunan dan

penyempurnaan produk-produk hukum daerah, meningkatnya kualitas aparat penegak hukum dan meningkatnya pelayanan, bantuan hukum serta budaya tertib hukum guna mendukung kesadaran hukum masyarakat; Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta meningkatnya pengembangan sumber–sumber penerimaan asli daerah; Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta meningkatnya toleransi dan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Gambaran umum indikator Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan sebagai berikut, antara lain:

Tabel 2.59
Realisasi Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		+/-
			2016	2017	
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan : A. BPK B. Inspektorat Kota Mataram	 % %	 93% 84%	 94% 92%	 1% 8%
2	Persentase pengembalian temuan keuangan hasil pemeriksaan : A. BPK B. Inspektorat Kota Mataram	 % %	 91% 66%	 92% 72%	 1% 6%
3	Persentase hasil Evaluasi SAKIP yang nilainya baik (SAKIP SKPD yang mendapat nilai minimal B)	%	70%	61%	-9%
4	Persentase Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP	%	100%	100%	-
5	Level Maturitas SPIP	-	Level 2	Level 3	+1 level

Sumber: Inspektorat Kota Mataram, 2018

3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan adalah Dalam rangka meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance)" melalui penyediaan dokumen perencanaan yang akurat dan berkualitas, penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penyediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan yang valid dan kerkualitas, pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan melalui urutan pilihan dan penggunaan sumber daya secara tepat.

Ruang lingkup urusan perencanaan pembangunan meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan efektif. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perencanaan pembangunan juga disusun dengan mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi dan lembaga masyarakat lainnya dalam proses perencanaan.

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data dan informasi perencanaan pembangunan yang tersedia pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60

Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram	6 Dokumen	RKPD, P-RKPD, KUA, PPAS, KUPA dan PPASP
2	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	1 Dokumen	LKj

Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2018

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar–benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya

Tujuan dan Sasaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kota Mataram adalah dalam rangka meningkatkan Efektifitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Prosedur dan meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan,

tercapainya tertib administrasi pengelolaan Aset Daerah Sesuai Prosedur, tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah

- **Realisasi PAD**

  Tingkat perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dimana terjadi peningkatan sebesar 34,17% atau Rp.98.542.306.943,51 dari Rp.288.415.925.929,00 pada TA. 2016 menjadi Rp. 386.958.232.873,50 pada TA. 2017.

- **Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah**

  Indikator yang tidak kalah pentingnya adalah indikator tingkat kemandirian daerah yang dapat dilihat dari persentase PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2017 persentase yang dicapai sebesar 22,94% meningkat dibandingkan anggaran perubahan tahun 2016 dengan persentase 20,6% dan anggaran murni 2016 dengan persentase 19,47%. Peningkatan persentase PAD terhadap total pendapatan daerah tersebut sebagai hasil dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang signifikan dan menjadi strategi prioritas untuk dikembangkan dan disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya.

5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

Pencapaian kinerja bidang kepegawaian dan pengembangan SDM diarahkan untuk pencapaian Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing, Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas, dan Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

- **Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eselon**

  Terkait dengan persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat sesuai eselon, sampai tahun 2016, pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sebanyak 54 orang, terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak 5 orang, diklatpim tingkat III sebanyak 19 orang, dan diklatpim tingkat IV sebanyak 30 orang. Sedangkan pada tahun 2017, pejabat struktural yang mengikuti diklatpim sebanyak 41 orang, yang terdiri dari diklatpim tingkat III sebanyak 10 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 31 orang.

- **Jumlah pelanggaran disiplin PNS**

  Melihat perbandingan pada tahun 2011-2015, kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat berfluktuasi dari 9 kasus pada tahun 2011 menjadi 11 kasus pada tahun 2012, menjadi 8 kasus pada tahun 2013, menjadi 10 kasus tahun 2014 serta 10 kasus Tahun 2015. Sedangkan dilihat dari jumlah kasus yang diadukan baik kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat maupun kasus ijin/cerai PNS mengalami peningkatan/penurunan yang didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu sebanyak 9 kasus pada

tahun 2011, sebanyak 11 kasus pada tahun 2012, sebanyak 28 kasus pada tahun 2013, sebanyak 24 kasus tahun 2014 dan sebanyak 10 kasus tahun 2015.

Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama rasio pelanggaran disiplin PNS tercapai 100% dari target kasus 12 dapat ditekan hingga hanya 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat pada tahun 2015. Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan tindak pelanggaran disiplin PNS.

6. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan Urusan Wajib Fungsi Penunjang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM kelitbangan serta penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan, Penguatan kapasitas kelembagaan dalam membantu perumuasan dan perancangan kebijakan strategis daerah yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, pembinaan pelaksanaan dan penguatan serta pengembangan inovasi daerah, penguatan kebijakan penyelenggraan inovasi daerah, optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil kelitbangan oleh pemangku kepentingan dan peningkatan sinergitas, jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Ekonomi Makro Daerah

Selama kurun waktu 2013-2017, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan baik dalam nominal (ADH Berlaku) maupun riil (ADH Konstan) sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga.

Demikian juga halnya dengan nilai konsumsi rumah tangga ADH Konstan, pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang signifikan Untuk lebih jelasnya, perkembangan nilai konsumsi rumah tangga dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.61
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Mataram Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (miliar Rp)	7.531,98	8.312,24	8.888,74	9.520,07	10.225,97
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	6.819,76	7.202,16	7.474,26	7.692,32	7.965,15
Proporsi terhadap PDRB (% ADHK)	74,53	72,82	69.99	66.69	63.90
Pertumbuhan (persen)	5,28	5,61	3.78	2.92	3.55

Sumber: BPS Kota Mataram 2018, Bappeda Kota Mataram

B. Keuangan Daerah

APBD Kota Mataram TA. 2017 sebesar Rp.1.424.284.858.133,21 dengan tingkat capaian realisasi sebesar Rp.1.424.072.893.722,50 atau sebesar 99,98 persen.
Realisasi PAD pada TA. 2017 mencapai Rp. 386.958.232.873,50 atau 105,29 persen dari target sebesar Rp. 367.503.589.415,00.
Dana Perimbangan pada TA. 2017 sebesar Rp.970.292.218.566,00 dengan realisasi mencapai Rp.941.446.451.427,00 atau 97,03 persen.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA. 2017 sebesar Rp. 16.570.200.000,00 dan terealisasi sebesar 100,42 persen atau sebesar Rp. 16.500.000.000,00.

Kinerja pendapatan daerah dapat diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah. Indikator ini dihitung dari persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total

Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah maka akan diketahui seberapa besar lokal taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Grafik 2.14.
Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2011 - 2015

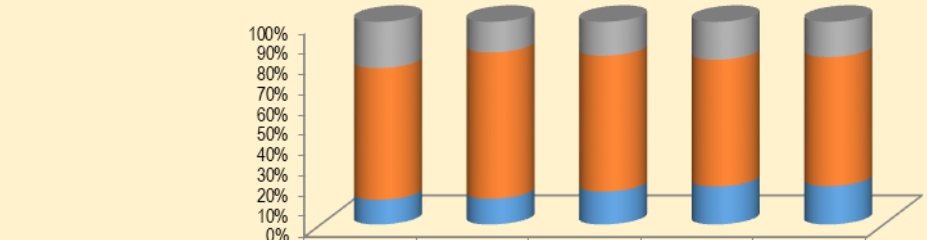

	2011	2012	2013	2014	2015
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	023	015	017	019	017
DANA PERIMBANGAN	065	072	067	063	064
PENDAPATAN ASLI DAERAH	012	013	016	019	019

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Berdasarkan Grafik di atas terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah meningkat cukup signifikan, bahkan kontribusi PAD yang pada tahun 2011 hanya sebesar 12,12% menjadi 18,93% pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah meningkat relatif pesat dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram.

Sesuai amanat amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30 persen dari belanja daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran Belanja Modal mendekati 30 persen pada APBD periode 2011-2015. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Mataram untuk memperhatikan alokasi anggaran pada belanja investasi yang produktif.

Untuk rasio terhadap total belanja daerah, Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Realisasi Belanja Modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Mataram dari tahun 2011-2015 terlihat pada Grafik berikut:

Grafik 2.15
Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja daerah (%)

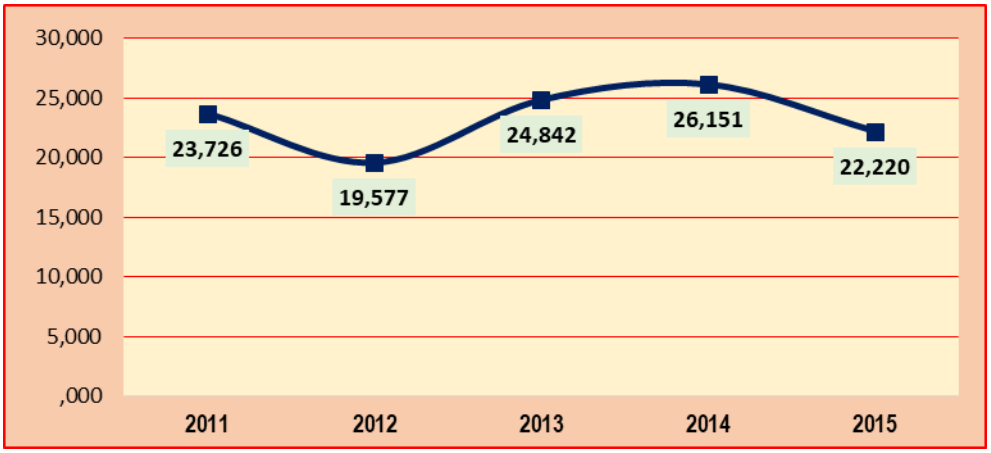

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Kemampuan suatu daerah utuk dapat bersaing dalam pembangunan juga diukur dari ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Kota Mataram tidak dapat dilepaskan dari kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antar wilayah yang sangat tinggi di Kota Mataram. Selain itu salah satu instrument untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan nasional dengan daerah adalah instrument penataan ruang. Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang mutlak dibutuhkan dalam rangka menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi, serta mewujudkan tata ruang Kota Mataram yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

Perkembangan perekonomian Kota Mataram juga dapat dilihat dari perkembangan kategori usaha Perbankan dan Asuransi, dimana kegiatan perbankan merupakan penunjang semua kegiatan perekonomian masyarakat baik melalui simpanan maupun kredit yang tersalurkan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat pada perkembangan kategori usaha akomodasi dan konsumsi, yang menandakan kegiatan ekonomi masyarakat semakin berkembang.

Aspek daya saing daerah juga dilihat dari aspek aksesibilitas air bersih kepada masyarakat, ditandai oleh tingkat kelayakan hidup masyarakat pada suatu daerah, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.62
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Kota Mataram
Dalam Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2013-2016

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	**PERHUBUNGAN**					
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	-	-	10,09	
1.2.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ barang	643.119	522.442	532.323	
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	643.119	522.442	532.323	
2	**PENATAAN RUANG**					
2.1.	Luas wilayah produktif	ha	2.763,49	2.748,21	2.733,62	
2.2.	Luas wilayah industri	ha	51,75	51,75	51,75	51,75
2.3.	Luas wilayah kebanjiran	-	-	-	-	-
2.4.	Luas wilayah kekeringan	-	-	-	-	-
2.5.	Tanah Peruntukan	Ha	129,88	129,88	129,88	129,88
3	**OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**					
3.1.	Jenis dan jumlah umum pemerintah dan swasta	kantor	24	28	29	
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	kantor	11	11	12	
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	restoran	206	211	242	258
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Unit	Hotel Bintang: 13 Hotel Non Bintang: 79	Hotel Bintang: 19 Hotel Non Bintang: 96	Hotel Bintang: 21 Hotel Non Bintang: 102	Hotel Bintang: 27, Hotel Non Bintang: 111
4	**LINGKUNGAN HIDUP**					
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	69,70	68,24	67,34	

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Ukuran lain yang dapat menggambarkan perekonomian wilayah adalah besarnya investasi swasta yang masuk (PMA dan PMDN). Dalam era otonomi daerah, persaingan investor asing cenderung semakin ketat. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan investasi di daerahnya tidak hanya yang berskala besar seperti dilakukan oleh PMA atau PMDN, namun investasi yang dilakukan masyarakat menengah ke bawah juga sangat penting karena dengan bertambahnya investasi diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga nantinya masalah pengangguran dapat teratasi.

Berdasarkan analisis PDRB Kota Mataram menurut Pengeluaran dijelaskan bahwa aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen PMTB. Dari difinisinya, PMTB menggambarkan adanya proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. PMTB disebut sebagai brutto karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya. Mengacu pada hasil penghitungan PMTB yang dilakukan, perkembangan investasi di Kota Mataram menunjukan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 tercatat peningkatan PMTB sebesar Rp.627.657.668.000 dari Rp.3.138.288.340,000 pada tahun 2014 menjadi Rp.3.765.946.008.000.

Peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan mengindikasikan iklim keamanan yang kondusif, serta peran aktif semua pihak dalam meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya di Kota Mataram. Besarnya nilai investasi yang masuk juga memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian Kota Mataram.

Bidang usaha investasi yang telah ada saat ini antara lain:

- Jasa Telekomunikasi Seluler,
- Perdagangan (ekport-import),
- Jasa rekreasi wisata,
- Jasa konsultansi pengembangan bisnis dan manajemen,
- Biro perjalanan wisata, dan,
- Jasa penyediaan gedung perkantoran dan pusat bisnis.

Adapun perkembangan aspek daya saing daerah Kota Mataram dalam Fokus Iklim Berinvestasi dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 2.63

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Kota Mataram dalam Fokus Iklim Berinvestasi Tahun 2013-2017

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN						
Angka kriminalitas	kasus	-	1.282	1.143	1.177	1.182
Jumlah demo	Kali/tahun	24	21	18		
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	macam	Pajak: 10; Retribusi 16	Pajak: 10; Retribusi 16	Pajak: 10; Retribusi 16	Pajak: 10; Retribusi 16	Pajak: 10; Retribusi 16
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	jenis	9 Perda	9 Perda	9 Perda	9 Perda	9 Perda
Lama proses perijinan:						
- IMB	Hari	30	30	30	20	20
- PIMB	Hari	30	30	14	14	14
- ILOK	Hari	30	30	30	20	20

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
- SITU MB	Hari	30	30	14	7	7
- HO	Hari	30	30	14	7	7
- SIUP	Hari	7	7	3	2	2
- TDP	Hari	7	7	3	2	2
- TDG	Hari	7	7	7	7	7
- TDI/IUI dan Perluasan	Hari	7	7	7	7	7
- IUJK	Hari	14	14	7	7	7
- Ijin Hotel	Hari	14	14	14	7	7
- Ijin Rumah Makan	Hari	14	14	14	7	7
- Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Hari	14	14	14	7	7
- Ijin Usaha Jasa Pariwisata	Hari	14	14	14	7	7
- Ijin Sewa Lahan	Hari	7	7	30	30	30

Sumber: DPMPTSP, BKD, BPS Kota Mataram, 2018

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Mataram juga merupakan aset dalam kemampuan daya saing. Kota Mataram menjadi pusat pendidikan dan pengembangan karir karena fasilitas pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi sudah tersedia secara memadai, pusat kegiatan pemerintahan terutama tingkat nasional, provinsi dan Kota, serta pusat kegiatan bisnis dan keuangan.

Tingkat pendidikan tenaga kerja yang lulus strata satu atau lebih menjadi salah satu tolok ukur kualitas tenaga kerja. Begitu pula dengan rasio ketergantungan yang dapat mengukur besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Mataram dengan membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Mataram dengan membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Sehingga kebijakan dan program perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan. Rasio ketergantungan penduduk Kota Mataram tahun 2015 dan 2017, sebagaimana Tabel berikut:

Grafik 2.16
Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram Tahun 2015

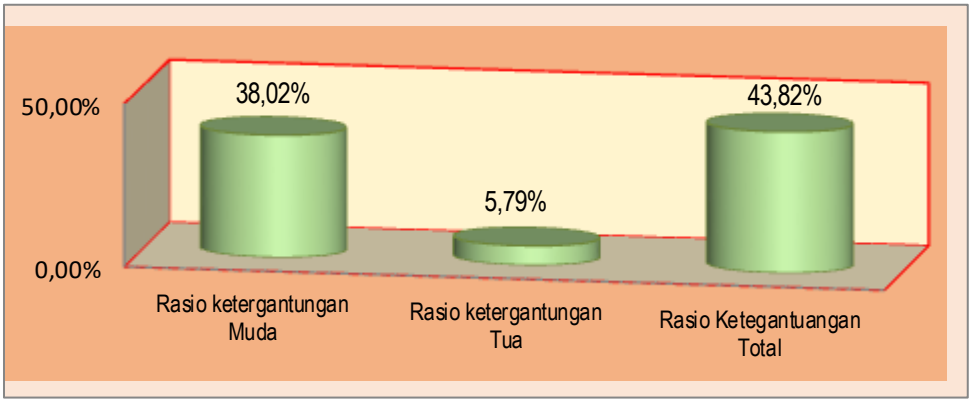

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Grafik 2.17
Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram Tahun 2017

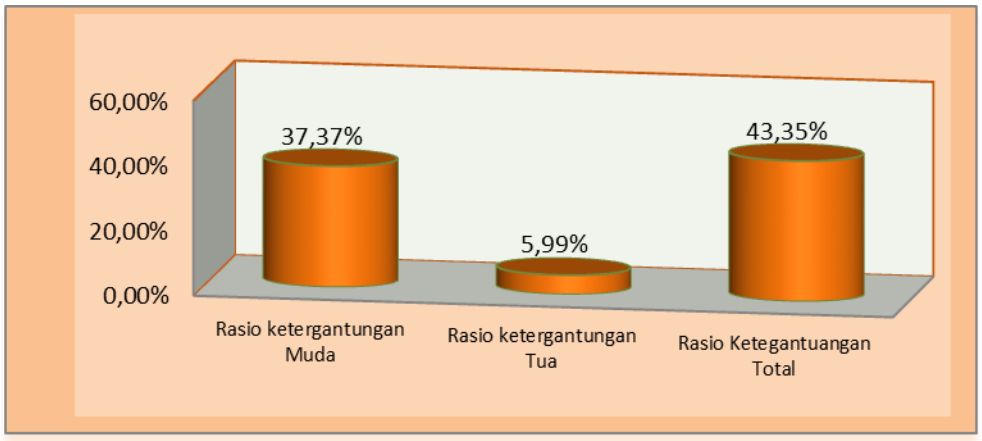

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk tahun 2015 sebesar 43,83 persen, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Mataram yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar ± 44 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 38,04 persen dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 5,79 persen.

Sementara pada tahun 2017, terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk sebesar 43,35 persen menurun 0,83 persen dari tahun 2015 dengan rincian rasio ketergantungan muda sebesar 37,37 persen dan ketergantungan usia tua sebesar 5,99 persen.

Di lain pihak, dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar, akan meningkatkan rasio ketergantungan yang berarti bahwa akan semakin diperlukan juga lapangan pekerjaan di Kota Mataram sebagai bentuk antisipasi dari hal tersebut.

Adapun perkembangan aspek daya saing daerah Kota Mataram dalam Fokus Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 2.64
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Kota Mataram dalam Fokus Sumber Daya Manusia Tahun 2011 - 2017

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	**KETENAGAKERJAAN**								
1.1.	Persentase lulusan S1	%	9,10	15,58	8,02	11,53	9,90	14,18	8,78
1.2.	Persentase ketergantungan	%	44,79	44,76	44,77	44,04	43,82	43,58	43,35

2.4.5. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam mencapai target SDGs yang paling utama adalah karena nilai-nilai yang terkandung di dalam SDGs sejalan dengan fokus kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen ini juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah Pusat dalam kesepakatan pada *Transforming Our World:The 2030 Agenda for Sustainable Development* guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. Adapun capaian indikator SDGs di Kota Mataram pada tahun 2017 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.65
Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Mataram Tahun 2017

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
TUJUAN I : MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DIMANAPUN					
Target 1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS/Susenas, BDT	%	9,55	Semua OPD
1.2.2*	Penduduk Miskin	BDT	Orang	44.530	Semua OPD

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS) / P BPJS	BPS	%	PM	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/ PSJSN-K	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	%	PM	Dinas Ketenagakerjaan
	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/ PSJSN-K	BPS	%	PM	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas / P DMMR	Dinas Sosial	%	18,95	Dinas Sosial
	Jumlah Populasi Penyandang Disabilitas / JPPD	Dinas Sosial	Orang	932	Dinas Sosial
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial	KPM	10,064	Dinas Sosial
1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro					
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan/P Salifaskes	BPS/Susenas	%	100	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap / PIDL	BKKBN / BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia	%	PM	Dinas Kesehatan
	Persentase Balita yang pernah mendapatkan imunisasi menurut jenis imunisasi	BPS	%	64,27	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin /CPR-SC	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia	%	68,05	Dinas Kesehatan
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML	BPS/Susenas	%	40,64	Dinas Kesehatan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	BPS/Susenas	%	88,9	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
	layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/ PLSL				
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan / P RTKP	BPS/Susenas	%	PM	Dinas Perumahan Rakyat
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/sederajat / APM SD	BPS/Susenas	%	97,97	Dinas Pendidikan Kota Mataram
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/sederajat / APM SMA	BPS/Susenas	%	93,65	Dinas Pendidikan Kota Mataram
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/sederajat / APM SMP	BPS/Susenas	%	70,47	Dinas Pendidikan Kota Mataram
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahira / PKAL	BPS/Susenas	%	92,46	
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN / PSPU	BPS/Susenas	%	PM	Dinas ESDM
1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana					
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	BPBD	lokasi	PM	BPBD
1.5.1.(e)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	BPBD	resiko	PM	BPBD
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	DIBI/ JITUPASNA	Rupiah	PM	BPBD
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	BPBD	dokumen	PM	BPBD
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Bappeda	%	PM	Semua OPD
TUJUAN II: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN					
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.					
2.1.1*	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan	BPS	%	1,93	DKP
2.1.1.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	BPS	%	PM	Dinas Kesehatan
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita /PKG AB (5)	Dinas Kesehatan	%	7,6	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan sekala pengalaman kerawanan pangan	BPS/susenas	%	PM	Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	BPS/susenas	%	PM	Dinas Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Dinas Kesehatan	%	PM	
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.					
2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
2.2.1(a)	Prevalansi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
'2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan	DKP		PM	Dinas Ketahanan Pangan
	Skor PPH (Point)			PM	
	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)			PM	
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Data nilai tambah pertanian, BPS/Sakernas		PM	Dinas Pertaian
TUJUAN III: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA					
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	AKI se-Nusa Tenggara, Maluku, Papua Tahun 2015	Orang	PM	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	BPS/susenas	%	100	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
3.1.2(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahunyang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS/susenas	%	97,24	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.					
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	PM	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	PM	Dinas Kesehatan
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	PM	Dinas Kesehatan
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	PM	Dinas Kesehatan
3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
3.3.5(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan		PM	Dinas Kesehatan
3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis	Dinas Kesehatan (Survei Mikro Filaria Rate/MFR), BPS		PM	Dinas Kesehatan
3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	PM	Dinas Kesehatan
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalansi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Kepolisian, Dinas Kesehatan	Orang	PM	
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	PM	Dinas Kesehatan
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yangmembahayakan.					
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitas medis	Dinas Kesehatan, BNN	Orang	PM	Dinas Kesehatan, BNN
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Dinas Sosial	Orang	5	Dinas Sosial
3.5.1.(c)	Jumlah Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Dinas sosial, BNN	Orang	PM	Dinas sosial, BNN
3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Dinas Sosial	Lembaga	2	Dinas Sosial
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	PM	BNN
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.					
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas		Orang	PM	Kepolisian
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memilki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	BP2KB	%	PM	BP2KB
3.7.1(a)	Angka pemakaian konstrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	BP2KB	%	PM	BP2KB
3.7.1(b)	Jumlah PUS pesrta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (pesrta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang samadan dinyatakan dalam persentase	BP2KB	%	PM	BP2KB

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	BP2KB	%	PM	BP2KB
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)	BP2KB		PM	Dinas Kesehatan
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang					
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	BPS/susenas	%	PM	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	BPS/susenas	%	PM	Dinas Kesehatan
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan, BPJS	%	PM	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/susenas	%	PM	Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan abat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan		PM	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4: MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA					
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif					
4.1.1*	Proporsi anak-anak/anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam : (i) membaca dan (ii) matematika	Dinas Pendidikan	%	PM	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	56,06	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs Berakreditas minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	45	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA Berakreditas minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	35	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	BPS/susenas	%	112,97	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	BPS/susenas	%	111,58	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS/susenas	%	174,16	Dinas Pendidikan Kota Mataram

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/susenas	%	9,45	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.					
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	BPS/susenas	%	44,87	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.					
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS/susenas	%	174,16	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS/susenas, Kementerian Riset	%	PM	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.4 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.					
4.4.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	BPS/susenas, Dinas Pendidikan	%	80,6	Dinas Pendidikan Kota Mataram
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Sederajat		%	80,44	Dinas Pendidikan Kota Mataram
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/Sederajat		%	128,79	Dinas Pendidikan Kota Mataram
	Rasio Angka Partisifasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-laki di PT (%)	BPS/susenas	%	PM	Dinas Pendidikan Kota Mataram
4.5 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.					
4.5.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/susenas	%	92,75	Dinas Pendidikan Kota Mataram
TUJUAN 5: MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN					
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun					
5.1.1	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan				
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.					
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	BPS/Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)	%	PM	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial	%	12	Dinas Sosial

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
5.2.2*	Proporsiperempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	BPS melalui SPHPN	%	PM	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	BPS melalui SPHPN	%	PM	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.					
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	BPS/susenas	%	12,76	BPS
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum sebelum umur 18 tahun.		%	'27,43	BPS
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BP2KB	%	PM	BP2KB
5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BPS melalui SDKI atau BPS melalui SP dan SUPAS	%	2,16	BP2KB
5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS/susenas	%	96,96	Dinas Pendidikan Kota Mataram
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur		%	PM	BP2KB
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.					
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.		%	PM	
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.					
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	KPU		PM	KPU

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPD dan DPR)		%	PM	KPU
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat Parlemen daerah (DPRD Kota Mataram)		%	PM	KPU
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pemerintah daerah		%	PM	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKD, BPS melalui Sakernas	%	PM	BKD, BPS melalui Sakernas
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.					
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkaithubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	BPS melalui SDKI	%	PM	BP2KB
5.6.1(a)	Unmet needKB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KByang tidak terpenuhi).	BP2KB	%	PM	BP2KB
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BP2KB	%	PM	BP2KB
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Bag. Hukum, B2KB, Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	PM	Bag. Hukum, BP2KB, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.					
5.a.1	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan	BPS	%	PM	BPN
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	BPS	%	PM	BPN

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan,khususnyateknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.					
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS melalui Susenas		77,87	Dinas Perhubungan
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.					
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan	OPD	39	DP3AP2KB Prov. NTB
TUJUAN 6: MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA					
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS melalui Susenas	%	40,64	Dinas PUPR
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PU	%	PM	Dinas PUPR
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	BPS melalui Susenas	%	87,83	Dinas PUPR
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	BPS : Susenas (Modul Kesehatan dan Perumahan)	%	PM	Dinas Kesehatan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	BPS melalui Susenas	%	88,9	Dinas Kesehatan
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	BPS : Susenas (Modul Kesehatan dan Perumahan)	Desa/ Kelurahan	PM	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat	Kab/Kota	PM	Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.					

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		Kab/Kota	PM	Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.					
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Dinas LH		PM	Dinas LHK
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas LH		PM	Dinas LHK
6.5.Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.					
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas LH		PM	
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Dinas PUPR	Stasiun	PM	Dinas LHK
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas PUPR	Kegiatan	PM	Dinas PUPR
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Dinas LH	DAS	PM	Dinas PUPR
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas LH	Hektar	PM	Dinas LHK
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas PUPR	Kegiatan	PM	Dinas PUPR
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Dinas LH	DAS	PM	Dinas LHK
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dinas LH	DAS	PM	Dinas LHK
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.					

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas LH	Danau	PM	Dinas LHK
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas LH	Danau	PM	Dinas LHK
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas LH	Danau	PM	Dinas LHK
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas LH	Hektar	PM	Dinas LHK
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas LH	DAS	PM	Dinas LHK
TUJUAN 7: MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA.					
7.1 Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau andal dan modern					
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	BPS	%	PM	Dinas LHK
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	BPS	kwh	PM	Dinas LHK
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	BPS	%	PM	Dinas LHK
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS melalui Susenas, Pusdatin Kementerian ESDM	%	PM	Dinas LHK
TUJUAN 8: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA					
8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang					
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	%	5,95	BPS
8.1.1. (a)	PDRB per kapita	BPS	Rupiah	26.615,20	BPS
8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya					
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS melalui Sakernas	%	0,702	BPS
8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan					
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS melalui Sakernas	%	11,19	Dinas Tenaga Kerja
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS melalui Sakernas	%	88,81	Dinas Tenaga Kerja
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS melalui Sakernas	%	2,74	Dinas Tenaga Kerja

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
8.4 : Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan productif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untukpekerjaan yang sama nilainya					
	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS melalui Sakernas	Rupiah	PM	Dinas Tenaga Kerja
	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS melalui Sakernas dan sensus penduduk	%	5,35	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase setengah pengangguran	BPS melalui Sakernas dan sensus penduduk	%	PM	Dinas Tenaga Kerja
8.8 : Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					
8.8.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	Orang	PM	Dinas Pariwisata
8.8.2.(a)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS melalui Susenas	Orang	PM	Dinas Pariwisata
8.9 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keunagan bagi semua					
8.9.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	BI/LKPBU, OJK, BPS	Bank/ ATM	PM	BI
8.9.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS/Statistik Potensi Desa (Podes)	Km	PM	BI
8.9.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak	BI/OJK	Dermaga	PM	BI/OJK
TUJUAN 9: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI					
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua					
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Pelabuhan Penyeberangan	PM	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan	Pelabuhan	PM	Dinas Perhubungan
9.2 : Mempromosikan industraliasisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang					
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	BPS : Survei Industri Besar dan Sedang dan Survei Makro dan Kecil	%	10,15	BPS

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	BPS	%	7,30	BPS
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan					
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB		%	PM	BPS
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk		Orang	PM	BPS
9.C. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020					
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS melalui Susenas	%	63	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS melalui Susenas	%	43,11	Dinas Komunikasi dan Informatika
TUJUAN 10: MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA					
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional					
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS melalui Susenas, TNP2K, Dinas Sosial		0,394	BPS
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS melalui Susenas	%	9,55	BPS
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	BPS : Potensi Desa (PODES)	Kabupaten	PM	DUKCAPIL NTB
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	DPMPD DUKCAPIL	Desa	PM	DPMPD DUKCAPIL NTB
	Jumlah desa tertinggal	BPS	%	PM	
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMPD DUKCAPIL	Desa	PM	DPMPD DUKCAPIL NTB
	Jumlah Desa Mandiri	DPMPD DUKCAPIL	Desa	PM	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS melalui Susenas	%	PM	
10.2 : Pada Tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya					
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	BPS melalui Susenas	%	PM	

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
10.3 : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakann dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut					
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS:IDI	%	PM	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Kebijakan	PM	
10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar					
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS, BPS/Sakernas	%	PM	Dinas Tenaga Kerja
	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS, BPS/Sakernas	Orang	PM	Dinas Tenaga Kerja
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.					
10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	BPNP2TKI	Dokumen	PM	Dinas Tenaga Kerja
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
11.1 Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan					
11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS melalui Susenas	%	PM	
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).		Kota	PM	
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Biro Pemerintahan	Kota	PM	
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.					
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	BPS melalui Susenas Modul	%	3	
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.					
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas PUPR	Kota	PM	

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas PUPR	Metropolitan	PM	
11.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.		Institusi	PM	
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.	Dinas PUPR	Lembaga	PM	Dinas PUPR
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.					
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas PUPR	Kota	PM	Dinas PUPR
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.					
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Orang	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB(IRBI).		%	PM	
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.		Desa/ Kelurahan	PM	
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Sirine	PM	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.			PM	
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.					
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LH		PM	Dinas LHK
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas PUPR		PM	Dinas PUPR
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.					
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PUPR	Kota	PM	Dinas PUPR
11.7.2.(a)	Persentase rumah tangga yang pernah menjadi korban kejahatan yang melaporkan ke polisi.	BPS melalui Susenas	%	PM	Kepolisian

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030					
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)		PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana(PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dokumen	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN					
12.1 : Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.					
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwinsprogram.	Dinas LH : Laporan Tahunan PROPER		PM	Dinas LHK
12.2 : Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.					
12.2.1	Jejak material (material footprint).	Dinas LH : Laporan Tahunan PROPER		PM	Dinas LHK
12.3 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.					
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.			PM	
12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.					
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas LH : Laporan Tahunan PROPER	Perusahaan	PM	Dinas LHK
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas LH		PM	Dinas LHK
12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.					
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas LH		PM	Dinas LHK
12.6 : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.					

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LH		PM	Dinas LHK
12.8 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.					
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas LH		PM	Dinas LHK
TUJUAN 13: MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA					
13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
13.1.1*	Dokumen strategipengurangan risiko bencana(PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD		PM	BPBD
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD		PM	BPBD
TUJUAN 14: MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
14.5 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.					
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas LH	Ha	PM	Dinas LH
	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP	Ha	PM	DKP
14.6 : Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.					
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	DKP	%	PM	DKP
14.b : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.					
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DKP	Orang	PM	DKP
TUJUAN 15: MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURINAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.					
15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.					
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LH		PM	Dinas LHK
15.2 : Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.					

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas LH	Ha	PM	Dinas LHK
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas LH		PM	Dinas LHK
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas LH	kph	PM	Dinas LHK
15.3 : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.					
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LH	%	PM	Dinas LHK
TUJUAN 16: MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN.					
TARGET 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.					
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kepolisian	Orang	PM	Kepolisian
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kepolisian	Orang	PM	Kepolisian
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)	%	0,20	Kepolisian
	Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Kepolisian	Orang	PM	Kepolisian
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Kepolisian	%	PM	Kepolisian
	Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Kepolisian	Orang	PM	Kepolisian
TARGET 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak					
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)		PM	Dinas Sosial, Kepolisian
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Kota Mataram	Anak	P=4, L=8	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan anak
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kepolisian	Anak	PM	Kepolisian

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
TARGET 16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasinal dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua					
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS : Susenas	%	0,20	Kepolisian
	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Kepolisian	Orang	PM	Kepolisian
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Kementerian Hukum dan HAM		PM	
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	MA		PM	Bagian Hukum
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan HAM		PM	Kepolisian
TARGET 16.5 : secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya					
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS		PM	KPK
TARGET 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntable, dan transparan di semua tingkat.					
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD		PM	BKD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK		PM	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BKD		PM	BKD
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	BPKAD, LPSE		PM	
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BKD		PM	BKD

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI		PM	
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	KPU	%	12,5	KPU
	DPR	KPU	%	PM	KPU
	DPRD Provinsi NTB	KPU		PM	KPU
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	PM	BKD
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS : IDI	%	PM	
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS : IDI	%	PM	
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS : IDI	%	PM	
TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS : Susenas	%	83,76	
16.9.1.(b)	Persentase anak usia 0-17 Tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dan kabupaten/kota di Provinsi NTB	BPS : Susenas	%	92,46	
TARGET 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.					
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komisi Nasional HAM		PM	
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.			PM	
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.			PM	
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Badan Publik Pusat (Nasional), sebagai sumber data Komisi Informasi Pusat (KIP)		PM	

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan		PM	
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)		PM	
TARGET 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.					
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Hasil pemantauan dan kajian komnas perempuan		PM	
TUJUAN 17: MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
TARGET 17.1 : Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	BPS	%	11,42	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda, BPKAD		PM	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bapenda, BPKAD		PM	
TARGET 17.3 : Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.					
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadapPDB.	BNP2TKI, BI		PM	
TARGET 17.6 : Meningkatkan kerjasama Utara-selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.					
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Dinas Perhubungan		PM	
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	BPS		PM	
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Perhubungan		PM	

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
TARGET 17.8 : Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi					
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS : Susenas	%	43,11	
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Perhubungan		PM	
TARGET 17.9: Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, selatan-selatan dan Triangular.					
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Bappeda		PM	
TARGET 17.11 : Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.					
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	8,90	
TARGET 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.					
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bag. Ekonomi, BKD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perum. Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas LHK, DPMPTSP		PM	
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perum. Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP		PM	
TARGET 17.18: pada tahun 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan tepat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.					
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS		PM	
17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	BPS		PM	
TARGET 17.19: Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS		PM	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	BPS		PM	
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS		PM	
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS		PM	
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS		PM	

BAB 3

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memasuki babak baru dengan mulai diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada tahun 2015 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengamanahkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual.

Manfaat bagi pemerintah, antara lain untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dengan menggunakan informasi yang lebih luas dan lebih riil, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. dengan basis akrual memungkinkan Pemerintah untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas.

Momen ini sangat tepat dengan penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021. Diharapkan dengan data keuangan yang akrual akan lebih menggambarkan keadaan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah secara lebih proporsional dan komprehensif. Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya (2011-2015), serta beberapa proyeksi kedepan yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang.

3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2011-2015

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki unsur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah

meliputi pendapatan asil daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah; Belanja Daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung, sedangkan Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD. Pendapatan daerah mencakup: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan, meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Pendapatan Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram periode waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, sehingga pemerintah Kota Mataram berupaya maksimal menggali potensi penerimaan daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan target pendapatan yang optimis dari tahun ke tahun. Perkembangan target pendapatan daerah periode tahun 2011-2015, sebagaimana Tabel dan Grafik berikut:

Tabel 3.1.
Target Pendapatan Tahun 2011 s/d 2015

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertum buhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
PENDAPATAN DAERAH	**648.862.491.019**	**721.899.242.989**	**864.905.445.373**	**1.055.390.821.016**	**1.211.783.220.894**	**14,40**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.514.511.410	78.841.707.800	124.957.834.100	160.495.316.854	215.599.750.389	26,96
Pendapatan Pajak Daerah	31.358.436.000	39.572.230.000	71.550.000.000	83.080.000.000	92.655.000.000	22,42
Hasil Retribusi Daerah	15.541.640.000	15.738.962.000	17.824.074.100	17.918.498.500	19.873.500.000	5,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.498.891.250	4.640.515.800	4.640.000.000	7.366.394.354	12.400.826.389	25,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.115.544.160	18.890.000.000	30.943.760.000	52.130.424.000	90.670.424.000	42,14
DANA PERIMBANGAN	429.934.640.378	530.572.582.907	580.130.769.628	681.209.075.681	768.786.761.000	13,44
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	37.566.129.378	55.241.728.907	44.741.156.628	64.324.774.681	63.672.014.000	9,49
Dana Alokasi Umum	366.882.411.000	445.894.174.000	500.043.553.000	564.661.391.000	593.930.707.000	11,23
Dana Alokasi Khusus	25.486.100.000	29.436.680.000	35.346.060.000	52.222.910.000	111.184.040.000	28,87

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertum buhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	158.413.339.231	112.484.952.282	159.816.841.645	213.686.428.481	227.396.709.505	5,01
Pendapatan Hibah	-	-	5.000.000.000	20.000.000.000	9.000.000.000	17,59
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya	34.442.996.431	32.040.253.282	43.617.605.165	64.634.697.481	76.775.311.505	16,84
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	107.438.542.800	63.662.899.000	98.967.436.480	121.519.931.000	130.989.598.000	-1,83
Bantuan Keuangan Prov. atau Pemda Lainnya	16.531.800.000	16.531.800.000	12.231.800.000	7.531.800.000	10.631.800.000	-17,10
Pendapatan Lainnya	0	250.000.000	0	0	0,00	-

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Grafik 3.1.
Target Pendapatan Tahun 2011 s/d 2015 (Milyar Rupiah)

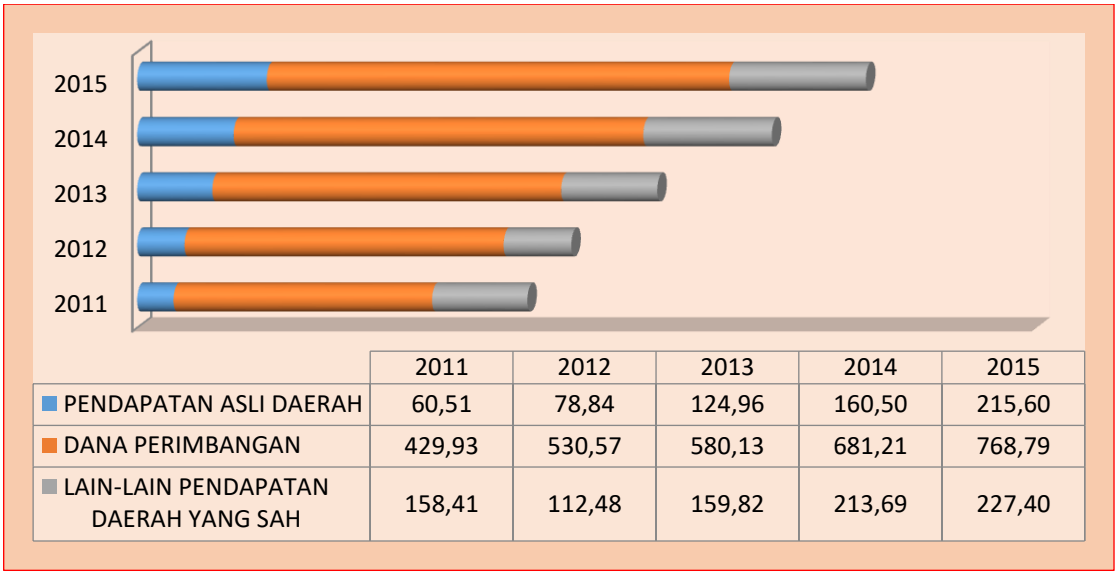

	2011	2012	2013	2014	2015
PENDAPATAN ASLI DAERAH	60,51	78,84	124,96	160,50	215,60
DANA PERIMBANGAN	429,93	530,57	580,13	681,21	768,79
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	158,41	112,48	159,82	213,69	227,40

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Target yang optimis ini tentu dibarengi dengan upaya dan kerja keras pemerintah Kota Mataram untuk merealisasikannya. Dan keberhasilan upaya tersebut dapat dilihat dari pencapaian pendapatan daerah yang realisasinya secara umum selalui melampaui target dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015, hal ini dapat dilihatpada tabel dan Grafik dibawah ini:

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan
Tahun 2011 s/d 2015

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
PENDAPATAN DAERAH	**679.040.672.703**	**755.234.455.557**	**865.839.838.812**	**1.083.110.566.585**	**1.188.895.261.113**	**12,96**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**82.300.211.074**	**95.877.364.968**	**139.877.149.932**	**202.584.643.687**	**225.076.428.194**	**21,64**
Pendapatan Pajak Daerah	43.141.033.812	45.596.900.874	79.374.881.763	91.749.599.728	96.844.712.693	16,67
Hasil Retribusi Daerah	14.048.627.262	16.825.136.532	20.251.127.302	20.956.352.907	18.247.789.512	5,49
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.012.566.423	4.642.764.448	2.759.307.095	8.041.386.510	6.219.928.163	-9,96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.097.983.577	28.812.563.114	37.491.833.772	81.837.304.542	103.763.997.826	32,18
DANA PERIMBANGAN	**441.594.386.630**	**544.998.107.529**	**580.925.364.432**	**677.658.718.414**	**757.189.767.596**	**12,48**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.225.875.630	69.667.253.529	45.535.751.432	60.774.417.414	52.075.020.596	-3,82
Dana Alokasi Umum	366.882.411.000	445.894.174.000	500.043.553.000	564.661.391.000	593.930.707.000	11,23
Dana Alokasi Khusus	25.486.100.000	29.436.680.000	35.346.060.000	52.222.910.000	111.184.040.000	28,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**155.146.074.999**	**114.358.983.060**	**145.037.324.448**	**202.867.204.484**	**206.629.065.324**	**3,95**
Pendapatan Hibah	-	0,00	0	11.000.000.000	8.778.000.000	37,34
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya	31.968.822.624	35.655.984.060	37.042.319.448	72.418.554.484	66.809.067.324	13,63
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	107.406.052.375	63.662.999.000	97.256.605.000	119.413.450.000	130.989.598.000	-1,69
Bantuan Keuangan Prov. atau Pemda Lainnya	15.771.200.000	15.000.000.000	10.700.000.000	0	0	-22,66
Pendapatan Lainnya	0	40.000.000	38.400.000,00	35.200.000,00	52.400.000,00	29,89

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015.

Grafik 3.2.
Realisasi Pendapatan Tahun 2011 s/d 2015

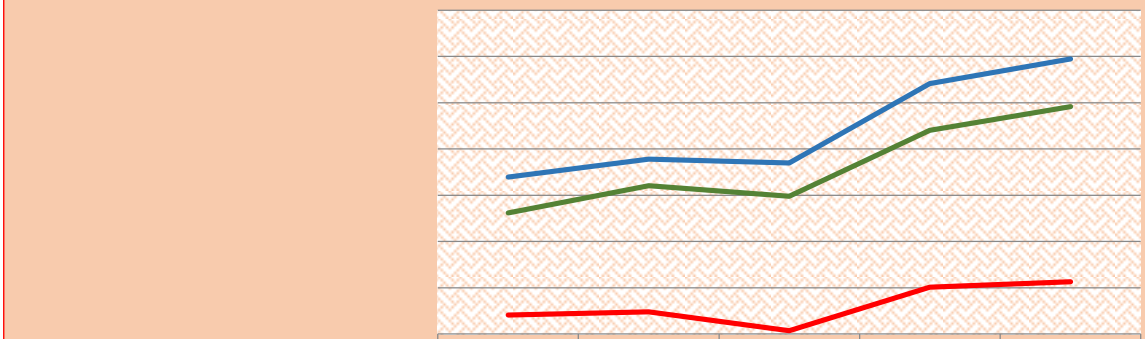

	2011	2012	2013	2014	2015
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	155,15	114,36	145,04	202,87	206,63
DANA PERIMBANGAN	441,59	545,00	580,93	677,66	757,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH	82,30	95,88	13,99	202,58	225,08

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015.

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Grafik 3.2 terlihat realisasi pendapatan Pemerintah Kota Mataram terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. ini dapat menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah dalam maksimalisasi potensi dan sumber pendapatan. Pendapatan daerah tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar Rp.509.854.588.410,69 yaitu dari Rp.679.040.672.702,- tahun 2011 menjadi Rp.1.188.895.261.113,40 tahun 2015. Komponen pendapatan daerah yang meningkat secara signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,64% per tahun dalam kurun waktu 2011-2015. Peningkatan ini tentu relatif signifikan dan dapat menggambarkan kemampuan daerah yang semakin kuat dalam mengisi *fiscal gap* yang ada.

Bila pendapatan daerah dirinci berdasarkan sumber pendapatan, terlihat bahwa komponen Dana Perimbangan masih memberikan konstribusi terbesar pada pendapatan agregat Kota Mataram. namun dapat dilihat juga bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta mempunyai proporsi cukup besar dalam komposisi pendapatan daerah dibandingkan kota/kabupaten lain di Indonesia yang rata-rata persentasenya sebesar sepuluh persen.Dengan menggunakan data keuangan tahun 2011-2015, terlihat kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota Mataram sebagai berikut:

Grafik 3.3.
Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2011 - 2015 (%)

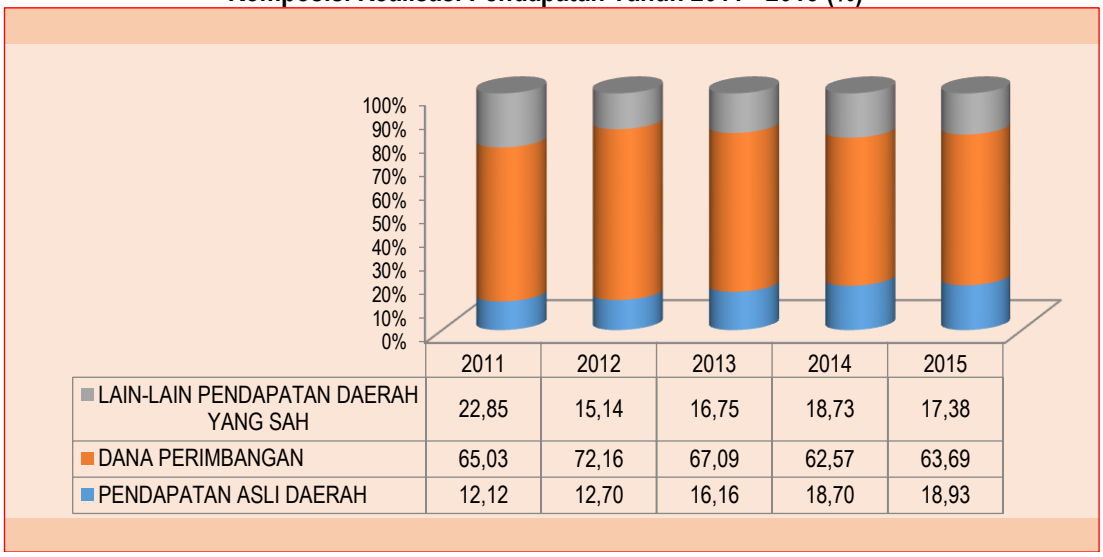

	2011	2012	2013	2014	2015
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22,85	15,14	16,75	18,73	17,38
DANA PERIMBANGAN	65,03	72,16	67,09	62,57	63,69
PENDAPATAN ASLI DAERAH	12,12	12,70	16,16	18,70	18,93

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Berdasarkan Grafik 3.3. tahun 2011-2015 komposisi realisasi terhadap total pendapatan menunjukkan bahwa secara rata-rata proporsi Dana Transfer 66,11%, Pendapatan Asli Daerah 15,72% dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 18,17%. Bila dicermati setiap tahun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat cukup signifikan, bahkan kontribusi PAD yang pada tahun 2011 hanya sebesar 12,12% menjadi 18,93% pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah meningkat relatif pesat dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja pendapatan daerah dapat diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

PAD merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan keuangan dan upaya peningkatan kemandirian daerah. Realisasi PAD Kota Mataram menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik,hal ini tergambardari data realisasi PAD tahun 2011-2015 yang selalu melampaui target yang ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Prosentase Realisasi PAD Kota MataramTahun 2011-2015

URAIAN	CAPAIAN REALISASI PAD (%)					RATA-RATA
	2011	2012	2013	2014	2015	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.00	121.61	111.94	126.23	104.40	120.03
Pendapatan Pajak Daerah	137.57	115.22	110.94	110.44	104.52	115.74
Hasil Retribusi Daerah	90.39	106.90	113.62	117.00	91.82	103.94
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	143.26	100.05	59.47	109.16	50.16	92.42
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	198.68	152.53	121.16	156.98	114.44	148.76

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

- **Pendapatan Pajak Daerah**

  Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, ditargetkan sebesar Rp.**318.215.666.000,00** dengan realisasi sebesar Rp.**356.707.128.869,84** atau sebesar **112,10** persen seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2011 – 2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	31.358.436.000,00	43.141.033.812,00	137,57	11.782.597.812,00
2012	39.572.230.000,00	45.596.900.874,00	115,22	6.024.670.874,00
2013	71.550.000.000,00	79.374.881.763,00	110,94	7.824.881.763,00
2014	83.080.000.000,00	91.749.599.728,00	110,44	8.669.599.728,00
2015	92.655.000.000,00	96.844.712.692,84	104,52	4.189.712.692,84
Jumlah	**318.215.666.000,00**	**356.707.128.869,84**	**112,10**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**115,74**	

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Setiap tahun realisasi pajak daerah Kota Mataram selalu melampaui target, dengan rata-rata persentase pencapaian per tahun sebesar 115,74%, dengan kata lain realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan rata-rata sebesar 15,74% per tahun.

- **Hasil Retribusi Daerah**

Obyek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum (Perda Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011), Retribusi Jasa Usaha (Perda Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011) dan Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011). Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, ditargetkan sebesar Rp. **86.896.674.600,00** dengan realisasi sebesar Rp. **90.337.033.514,00** atau sebesar **103,96** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2011 - 2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	15.541.640.000,00	14.048.627.262,00	90,39	(1.493.012.738,00)
2012	15.738.962.000,00	16.825.136.532,00	106,90	1.086.174.532,00
2013	17.824.074.100,00	20.251.127.301,00	113,62	2.427.053.201,00
2014	17.918.498.500,00	20.964.352.907,00	117,00	3.045.854.407,00
2015	19.873.500.000,00	18.247.789.512,00	91,82	(1.625.710.488,00)
Jumlah	**86.896.674.600,00**	**90.337.033.514,00**	**103,96**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**103,95**	

Sumber : BPKAD Kota Mataram,2015

Hampir setiap tahun realisasi retribusi daerah Kota Mataram melampaui target, dengan rata-rata persentase pencapaian per tahun sebesar 103,95%, dengan kata lain realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan rata-rata sebesar 3,95 % per tahun.

- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. BPR NTB Mataram, Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank NTB dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang. Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, ditargetkan sebesar Rp.**32.546.627.793,00** dengan realisasi sebesar Rp.**26.675.952.639,00** atau sebesar **81,96** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.6.
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	3.498.891.250,00	5.012.566.423,00	143,26	1.513.675.173,00
2012	4.640.515.800,00	4.642.764.448,00	100,05	2.248.648,00
2013	4.640.000.000,00	2.759.307.095,00	59,47	(1.880.692.905,00)
2014	7.366.394.354,00	8.041.386.510,00	109,16	674.992.156,00
2015	12.400.826.389,00	6.219.928.163,00	50,16	(6.180.898.226,00)
Jumlah	**32.546.627.793,00**	**26.675.952.639,00**	**81,96**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**92,42**	

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2011-2015 pencapaian targetnya rata-rata sebesar 92,42% per tahun.

- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Dana Kapitasi, dan Pendapatan BLUD.Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, ditargetkan sebesar Rp.**202.750.152.160,00** dengan realisasi sebesar Rp.**272.000.048.842,00** atau sebesar **134,16** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	10.115.544.160,00	20.097.983.577,00	198,68	9.982.439.417,00
2012	18.890.000.000,00	28.812.563.114,00	152,53	9.922.563.114,00
2013	30.943.760.000,00	37.491.833.771,00	121,16	6.548.073.771,00
2014	52.130.424.000,00	81.833.670.554,00	156,98	29.703.246.554,00
2015	90.670.424.000,00	103.763.997.826,00	114,44	13.093.573.826,00
Jumlah	**202.750.152.160,00**	**272.000.048.842,00**	**134,16**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**148,76**	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Setiap tahun realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Mataram selalu melampaui target, dengan rata-rata persentase pencapaian per tahun sebesar 148,76%, dengan kata lain realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan rata-rata sebesar 48,76% per tahun.

b) Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus adalah Dana Perimbangan yang merupakan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Ketergantungan pemerintah Kota Mataram terhadap dana perimbangan ini masih relatif tinggi mengingat selama kurun waktu 2011-2015 Kota Mataram membiayai pembangunan daerah secara rata-rata menggunakan PAD sebesar 15,72%, Dana Perimbangan sebesar 66,11%, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 18,17%. Rincian dari target dan realisasi dana perimbangan adalah sebagai berikut :

- **Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

  Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp.**265.545.803.594,00** dengan realisasi sebesar Rp.**277.267.950.135,00** atau sebesar **104,41** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.8.
Target Dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	37.566.129.378,00	49.225.875.630,00	131,04	11.659.746.252,00
2012	55.241.728.907,00	69.667.253.529,00	126,11	14.425.524.622,00
2013	44.741.156.628,00	45.535.751.432,00	101,78	794.594.804,00
2014	64.324.774.681,00	60.764.048.948,00	94,46	(3.560.725.733,00)
2015	63.672.014.000,00	52.075.020.596,00	81,79	(11.596.993.404,00)
Jumlah	**265.545.803.594,00**	**277.267.950.135,00**	**104,41**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**107,04**	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Rata-rata persentase pencapaian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak per tahun sebesar 107,04%, dengan kata lain realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan rata-rata sebesar 7,04% per tahun.

- **Dana Alokasi Umum**

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp.**2.471.412.236.000,00** dengan realisasi sebesar Rp.**2.471.412.236.000,00** atau sebesar **100,00** persen seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.9.
Target Dan Realisasi Dana Alokasi Umum
Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	366.882.411.000,00	366.882.411.000,00	100,00	-
2012	445.894.174.000,00	445.894.174.000,00	100,00	-
2013	500.043.553.000,00	500.043.553.000,00	100,00	-
2014	564.661.391.000,00	564.661.391.000,00	100,00	-
2015	593.930.707.000,00	593.930.707.000,00	100,00	-
Jumlah	**2.471.412.236.000,00**	**2.471.412.236.000,00**	**100,00**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**100,00**	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Untuk Dana Alokasi Umum periode 2011-2015 peningkatan targetnya rata-rata sebesar 12,95% per tahun, dan peningkatan realisasinya rata-rata sebesar 15,53% per tahun

- **Dana Alokasi Khusus**

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp.**253.675.790.000,00** dengan realisasi sebesar Rp.**253.675.790.000,00** atau sebesar **100,00** persen seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.10.
Target dan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	25.486.100.000,00	25.486.100.000,00	100,00	-
2012	29.436.680.000,00	29.436.680.000,00	100,00	-
2013	35.346.060.000,00	35.346.060.000,00	100,00	-
2014	52.222.910.000,00	52.222.910.000,00	100,00	-
2015	111.184.040.000,00	111.184.040.000,00	100,00	-
Jumlah	**253.675.790.000,00**	**253.675.790.000,00**	**100,00**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**100,00**	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Untuk Dana Alokasi Khusus periode 2011-2015 peningkatan targetnya rata-rata sebesar 22,83% per tahun, dan peningkatan realisasinya rata-rata sebesar 27,77% per tahun.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan lainnya adalah komponen dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan yang sah adalah dengan melakukan pendekatan terutama dengan pihak pemerintah Provinsi NTB dan upaya untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil Pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Target dan realisasi Pendapatan Kota Mataram yang bersumber dari Lain-lain pendapatan yang sah dirinci sebagai berikut:

- **Pendapatan Hibah**

  Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015,Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. **34.000.000.000,00**dengan realisasi sebesar Rp.**19.778.000.000,00** atau sebesar **58,17** persen seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.11.
Target dan realisasi Pendapatan Hibah Periode 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	0	0	0,00	-
2012	0	0	0,00	-
2013	5.000.000.000	0	0,00	(5.000.000.000,00)
2014	20.000.000.000	11.000.000.000	55,00	(9.000.000.000,00)
2015	9.000.000.000	8.778.000.000,00	97,53	(222.000.000,00)
Jumlah	**34.000.000.000,00**	**19.778.000.000,00**	**58,17**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**50,84**	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Pendapatan Hibah yang ditargetkan pada TA. 2013-2015 adalah Hibah Air Minum bagi Masyarakat Miskin yang merupakan dana bersumber dari APBN serta bantuan dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui *AusAid* bekerjasama dengan PDAM Giri Menang.

- **Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015,Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp.**251.510.863.863,93** dengan realisasi sebesar Rp.**243.894.747.938,56** atau sebesar **96,97** persen seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.12.
Target Dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	34.442.996.431,00	31.968.822.623,00	92,82	(2.474.173.808,00)
2012	32.040.253.282,00	35.655.984.060,00	111,28	3.615.730.778,00
2013	43.617.605.165,00	37.042.319.448,00	84,93	(6.575.285.717,00)
2014	64.634.697.481,00	72.418.554.484,00	112,04	7.783.857.003,00
2015	76.775.311.504,93	66.809.067.323,56	87,02	(9.966.244.181,37)
Jumlah	**251.510.863.863,93**	**243.894.747.938,56**	**96,97**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**97,62**	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

- **Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015,Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp.**522.578.407.280,00** dengan realisasi sebesar Rp.**518.728.704.375,00** atau sebesar **99,26** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.13.
Target Dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	107.438.542.800,00	107.406.052.375,00	99,97	(32.490.425,00)
2012	63.662.899.000,00	63.662.999.000,00	100,00	100.000,00
2013	98.967.436.480,00	97.256.605.000,00	98,27	(1.710.831.480,00)
2014	121.519.931.000,00	119.413.450.000,00	98,27	(2.106.481.000,00)
2015	130.989.598.000,00	130.989.598.000,00	100,00	-
Jumlah	**522.578.407.280,00**	**518.728.704.375,00**	**99,26**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**99,30**	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Untuk Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus periode 2011-2015 peningkatan targetnya rata-rata sebesar 11,52% per tahun, dan peningkatan realisasinya rata-rata sebesar 11,61% per tahun.

- **Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**

  Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp.**63.459.000.000,00** dengan realisasi sebesar Rp.**41.471.200.000,00** atau sebesar **65,35** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.14.
Target Dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah LainnyaTahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	16.531.800.000,00	15.771.200.000,00	95,40	(760.600.000,00)
2012	16.531.800.000,00	15.000.000.000,00	90,73	(1.531.800.000,00)
2013	12.231.800.000,00	10.700.000.000,00	87,48	(1.531.800.000,00)
2014	7.531.800.000,00	0,00	0,00	(7.531.800.000,00)
2015	10.631.800.000,00	0,00	0,00	(10.631.800.000,00)
Jumlah	**63.459.000.000,00**	**41.471.200.000,00**	**65,35**	
Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun			**54,72**	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Hal ini terlihat pada tahun 2014, dimana Bantuan Keuangan yang direncanakan tidak dapat direalisasikan pada tahun 2014 dan 2015.

- **Pendapatan Lainnya**

  Pendapatan Lainnya berupaBantuan Dana Operasional CMS-Kasda dari PT Bank NTB.Target dan realisasi Pendapatan Lainnyaperiode 2011-2015 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15.
Target Dan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	0	0	0,00	-
2012	250.000.000	40.000.000	16,00	(210.000.000,00)
2013	0	38.400.000	-	38.400.000,00
2014	0	35.200.000	-	35.200.000,00
2015	0	52.400.000	-	52.400.000,00
Jumlah	**250.000.000,00**	**166.000.000,00**	**66,40**	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Sebagai bentuk komitmen PT. Bank NTB untuk operasional CMS-Kasda di BPKAD Kota Mataram, telah dialokasikan dana dukungan setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan CMS-Kasda Pemerintah Kota Mataram.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun anggaran 2011-2015 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yaitu transparan, efektif, efisien, dan disusun dengan pendekatan kinerja untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam menggali sumber-sumber pendapatan sehingga realisasi pendapatan daerah selalu melampaui target yang ditetapkan juga menjadi salah satu dasar pemerintah Kota Mataram untuk membiayai pembangunan, sehingga target belanja yang ditetapkan setiap tahunnya selalu meningkat secara signifikan. Anggaran Belanja Kota Mataram periode tahun 2011-2015, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16.
Anggaran Belanja Daerah Kota Mataram
Tahun 2011-2015

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
BELANJA	**731.636.969.179**	**810.748.789.576**	**1.022.456.440.541**	**1.177.199.809.961**	**1.295.437.591.385**	**13,18**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**402.259.721.525**	**473.844.497.878**	**538.538.293.459**	**589.494.959.692**	**657.253.939.435**	**11,52**
Belanja Pegawai	367.969.525.144	426.835.076.202	484.028.071.029	539.560.313.692	595.737.687.201	11,33
Belanja Hibah	9.684.251.000	24.582.707.601	25.573.197.430	24.218.986.000	33.454.425.802	21,62
Belanja Bantuan Sosial	20.903.415.000	20.400.100.000	27.634.425.000	24.215.660.000	23.500.807.652	1,64
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	0	0	0	0,00	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./ Kabup./Kota dan Pemdes	2.258.800.000	0	0	0	912.798.780,00	-
Belanja Tidak Terduga	1.443.730.381	2.026.614.075	1.302.600.000	1.500.000.000	3.648.220.000	11,31
BELANJA LANGSUNG	**329.377.247.654**	**336.904.291.697**	**483.918.147.081**	**587.704.850.268**	**638.183.651.950**	**14,55**
Belanja Pegawai	46.521.009.935	57.026.089.602	70.756.743.858	71.447.082.600	85.294.058.779	13,76
Belanja Barang dan Jasa	109.265.270.321	121.161.855.634	159.159.416.419	208.411.606.059	265.047.268.211	19,67
Belanja Modal	173.590.967.398	158.716.346.460	254.001.986.803	307.846.161.609	287.842.324.960	9,67

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Mataram periode 2011-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun disebabkan semakin besarnya kebutuhan daerah seiring majunya perkembangan Kota Mataram yang sangat pesat sehingga peranan pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan melalui pengeluaran atau belanja pemerintah harus lebih besar pula.

Sesuai amanat amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30 persen dari belanja daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran Belanja Modal mendekati 30 persen pada APBD periode 2011-2015. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Mataram untuk memperhatikan alokasi anggaran pada belanja investasi yang produktif. Komposisi Belanja Langsung Pemerintah Kota Mataram selama periode 2011-2015, sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik 3.4.
Komposisi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2011-2015

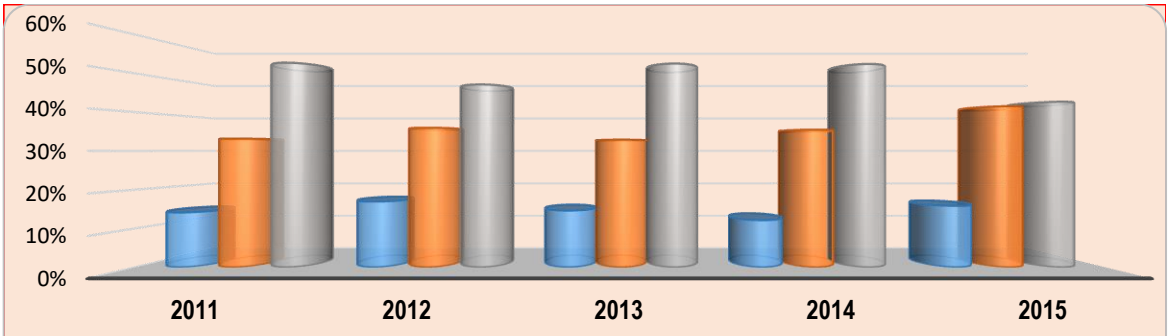

	2011	2012	2013	2014	2015
Belanja Pegawai	14%	17%	15%	12%	16%
Belanja Barang Jasa	33%	36%	33%	35%	42%
Belanja Modal	53%	47%	52%	52%	43%

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015.

Untuk rasio terhadap total belanja daerah, Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Mataram dari tahun 2011-2015 berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan meningkat, sebagaimana terlihat pada Tabel dan Grafik berikut:

Tabel 3.17.
Anggaran Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Belanja Modal	23,73	19,58	24,84	26,15	22,22
Rasio Belanja Pegawai	56,65	58,39	51,89	49,79	49,58

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Grafik 3.5.
Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja daerah (%)

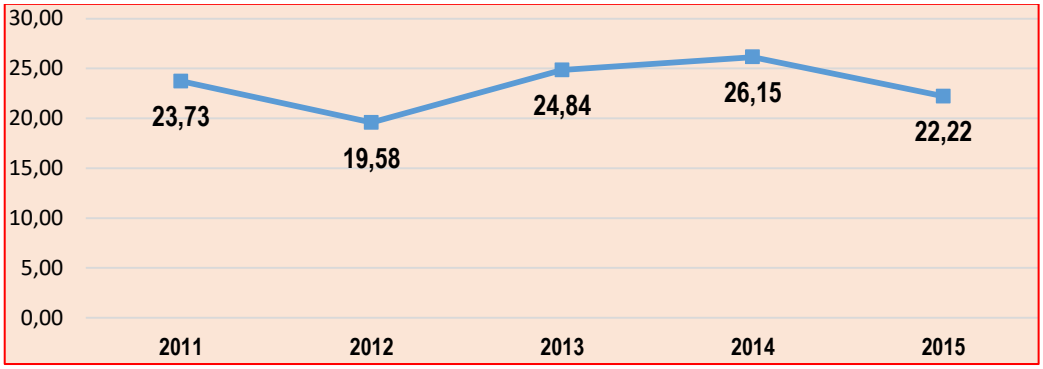

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Belanja Pegawai adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung. Perkembangan proporsi belanja pegawai (pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) terhadap total belanja daerah berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan menurun, sebagaimana terlihat pada Grafik berikut:

Grafik 3.6.
Proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja daerah (%)

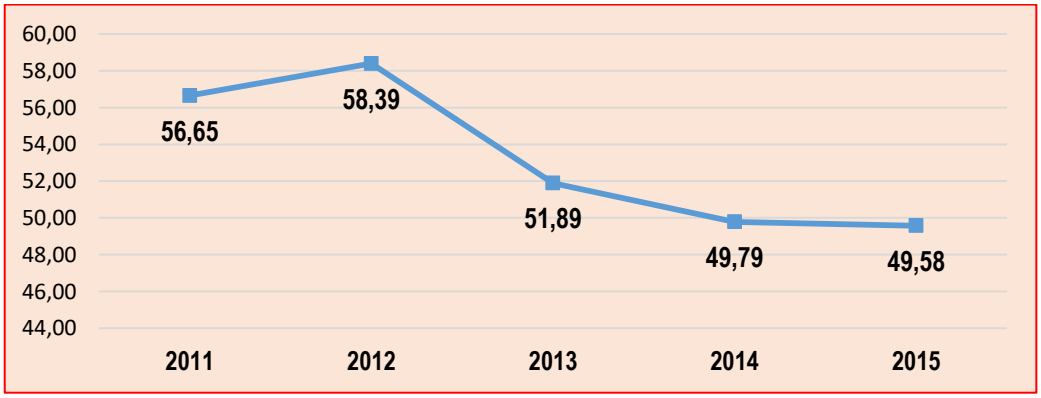

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Selama periode 2011-2015 komposisi Belanja Langsung dibanding Belanja Tidak Langsung relatif meningkat, hal ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kota Mataram pada belanja yang produktif dan terkait langsung dengan masyarakat.

Grafik 3.7.
Komposisi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2011-2015 (%)

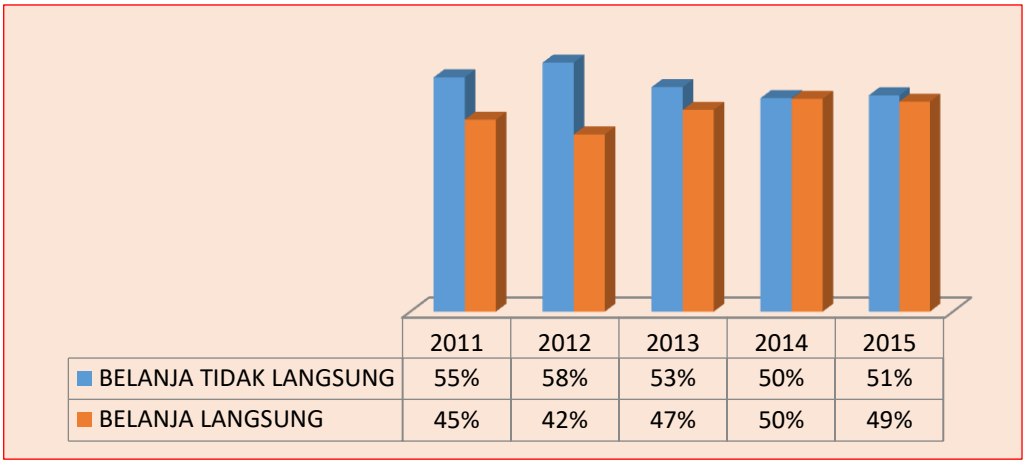

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Dari grafik di atas, terlihat Belanja Langsung mengalami peningkatan persentase dari tahun ke tahun dalam komposisi Belanja Daerah periode 2011-2015. Hal ini dapat menjadi indikasi kebijakan anggaran Pemerintah Kota Mataram yang berpihak pada belanja publik atau belanja yang langsung dipergunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Untuk lebih rinci Realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.18.
Realisasi Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan %
	2011	2012	2013	2014	2015	
BELANJA	731.636.969.179	810.748.789.576	1.022.456.440.541	1.177.199.809.961	1.295.437.591.385	13,18
BELANJA TIDAK LANGSUNG	402.259.721.525	473.844.497.878	538.538.293.459	589.494.959.692	657.253.939.435	11,52
Belanja Pegawai	367.969.525.144	426.835.076.202	484.028.071.029	539.560.313.692	595.737.687.201	11,33
Belanja Hibah	9.684.251.000	24.582.707.601	25.573.197.430	24.218.986.000	33.454.425.802	21,62
Belanja Bantuan Sosial	20.903.415.000	20.400.100.000	27.634.425.000	24.215.660.000	23.500.807.652	1,64
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan %
	2011	2012	2013	2014	2015	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kabup./Kota dan Pemdes	2.258.800.000	0	0	0	912.798.780,00	-
Belanja Tidak Terduga	1.443.730.381	2.026.614.075	1.302.600.000	1.500.000.000	3.648.220.000	11,31
BELANJA LANGSUNG	329.377.247.654	336.904.291.697	483.918.147.081	587.704.850.268	638.183.651.950	14,55
Belanja Pegawai	46.521.009.935	57.026.089.602	70.756.743.858	71.447.082.600	85.294.058.779	13,76
Belanja Barang dan Jasa	109.265.270.321	121.161.855.634	159.159.416.419	208.411.606.059	265.047.268.211	19,67
Belanja Modal	173.590.967.398	158.716.346.460	254.001.986.803	307.846.161.609	287.842.324.960	9,67

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan daerah periode 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.19.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2011-2015

URAIAN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
- Anggaran	83.774.478.159	91.599.546.587	163.800.995.168	139.868.988.944	101.214.370.490
- Realisasi	83.774.478.159	91.599.546.587	103.800.995.168	79.868.988.944	101.214.370.490
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
- Anggaran	1.000.000.000	2.750.000.000	13.560.000.000	18.060.000.000	17.560.000.000
- Realisasi	1.000.000.000	2.750.000.000	0	17.330.000.000	17.500.000.000
PEMBIAYAAN NETTO					
- Anggaran	82.774.478.159	88.849.546.587	157.550.995.168	121.808.988.944	83.654.370.490
- Realisasi	82.774.478.159	88.849.546.587	97.550.995.168	62.538.988.944	83.714.370.490

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan periode tersebut diutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

- **Realisasi SILPA**

  Realisasi SILPA periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20.
Sisa Lebih Pembiayaan DaerahTahun 2011-2015

URAIAN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	91.599.546.587	103.800.995.168	79.868.988.944	101.287.750.045	83.961.117.271,01

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015.

- **Target dan Realisasi Surplus/Defisit**

  Surplus/Defisit merupakan selisih positif/negatif antara pendapatan dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran. Selama periode 2011-2015 Kota Mataram defisit hanya pada tahun 2013 sedangkan tahun lainnya anggaran selalu surplus. Target dan realisasi Surplus/defisit Kota Mataram periode 2011-2015, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.21.
Surplus/Defisit APBD Kota MataramTahun 2011-2015

SURPLUS/ DEFISIT	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Anggaran	(82.774.478.159)	(88.849.546.587)	(157.550.995.168)	(121.808.988.944)	(87.961.190.440)
Realisasi	8.825.068.427	14.951.448.581	(17.682.006.223)	38.748.761.100	246.746.780,21

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

3.1.2 Neraca Daerah

Terdapat beberapa manfaat yang bisa diambil dari tersusunnya Neraca Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah, yaitu karakteristik aset daerah akan mudah dipahami oleh publik. Yang dimaksud dengan karakteristik aset adalah status aset, produktifitas aset, umur ekonomis aset, management aset daerah, kontribusi aset pada PAD, sistem dan nilai penyusutan aset dan manfaat lainnya. Kedua, kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dievaluasi secara periodik.

Salah satu cara untuk melihat kinerja keuangan daerah adalah dengan melihat laporan perubahan keuangan daerah (khususnya Neraca Keuangan Daerah) dari tahun ketahun, apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Perubahan di sisi aktiva dapat terlihat pada aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan dan aktiva lainnya. Bila perkembangan aset-aset tersebut adalah positif, maka kinerja pemerintah daerah dari sisi keuangan adalah positif juga. Dan sebaliknya, bila perkembangan utang jangka pendek dan

jangka panjang mengalami kenaikan terus menerus dan tidak diimbangi dengan kemampuan mengembalikannya, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah buruk. Artinya dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengelola kegiatan ekonomi daerah dan lainnya tidak efektif dan tidak produktif, sehingga tidak mampu dikembalikan.

Belanja modal yang dilakukan Pemerintah Daerah akan terekam dengan baik pada Neraca Keuangan Daerah. Pada sisi belanja APBD terdapat belanja modal yang secara otomatis harus masuk pada sisi aset, sekaligus juga nilai penyusutan yang diperlakukan pada aset-aset tersebut harus tercatat pula pada Neraca Keuangan Daerah. Artinya dengan sistem ini, tidak terjadi lagi pembelian aset (belanja modal) yang tidak tercatat di Neraca Daerah. Bahkan aset-aset yang merupakan hasil pelimpahan pemerintah pusat, provinsi atau aset proyek lainnya yang diserahkan kedaerah tercatat dengan baik pada Neraca Keuangan Daerah. Demikian juga berbagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada berbagai lembaga produktif yang ada di masyarakat (seperti BUMD) harus terekam pada Neraca Daerah, tidak dihapus begitu saja pada setiap akhir tahun anggaran.

Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Mataram tahun 2011-2015 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 3.22.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota MataramTahun 2011-2015

NO URUT	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan %
1	**ASET**						
1 . 1	ASET LANCAR						
1 . 1 . 1	Kas	92,033	104,738	81,711	107,939	85,751	-4,41
1 . 1 . 2	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
1 . 1 . 3	Piutang	3,813	4,457	44,186	57,224	62,522	33,90
1 . 1 . 4	Piutang Lain-lain	10,500	15,335	33,633	5,239	18,771	-95,98
1 . 1 . 5	Persediaan	7,833	6,790	7,691	8,945	8,455	1,14
1 . 1 . 7	R/K Pusat	-	-	-	-		
	Penyisihan Piutang				(29,691)	(36,417)	118,47
	JUMLAH ASET LANCAR	114,179	131,320	167,222	149,657	139,080	3,80
1 . 2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1 . 2 . 1	Investasi Non Permanen	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,00
1 . 2 . 2	Investasi Permanen	45,462	84,713	84,088	98,069	119,508	19,45
	Penyisihan Investasi Jangka Panjang				(0,411)	(0,411)	100,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	45,873	85,124	84,499	98,069	119,508	19,29
1 . 3	ASET TETAP						
1 . 3 . 1	Tanah	362,279	785,101	817,443	838,911	877,656	16,20
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin	228,941	250,743	275,556	333,469	376,846	11,64

NO URUT	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan %
1 . 3 . 3	Gedung dan Bangunan	433,679	522,866	569,216	655,143	820,599	14,62
1 . 3 . 4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	280,045	317,268	357,335	401,942	501,810	13,49
1 . 3 . 5	Aset Tetap Lainnya	23,271	22,750	25,102	32,466	41,639	12,95
1 . 3 . 6	Konstruksi dalam Pengerjaan	20,927	9,446	15,528	4,229	0,478	-283,64
1 . 3 . 7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	(999,822)	100,00
	JUMLAH ASET TETAP	1.349,142	1.908,175	2.060,180	2.266,160	1.619,205	1,45
1 . 4	DANA CADANGAN						
1 . 4 . 1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
1 . 5	ASET LAINNYA					-	
1 . 5 . 1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-		
1 . 5 . 2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1,390	0,852	-	0,012	0,055	38,24
1 . 5 . 3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	27,586	231,129	231,129	231,129	231,129	22,02
1 . 5 . 4	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	0,465	0,754	69,18
1 . 5 . 5	Aset Lain-lain	13,701	36,509	64,854	58,418	35,771	7,96
1 . 5 . 6	Amortisasi Aset Tak Berwujud					(0,115)	100,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	42,678	268,490	295,982	290,024	267,594	20,74
	JUMLAH ASET	**1.551,872**	**2.393,110**	**2.607,883**	**2.803,909**	2.145,388	**4,92**
2	**KEWAJIBAN**						
2 . 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2 . 1 . 1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,423	0,935	1,729	6,725	1,487	-44,32
2 . 1 . 2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2 . 1 . 3	Utang Pajak	-	-	-	-	-	0,00
2 . 1 . 4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	0,030	-	100,00
2 . 1 . 5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	0,00
2 . 1 . 6	Utang Jangka Pendek Lainnya	6,208	6,550	13,124	33,927	46,333	35,85
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,631	7,485	14,852	40,682	47,820	34,86
2 . 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						0,00
2 . 2 . 1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0,00
2 . 2 . 2	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	0,00
2 . 2 . 3	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	0,052	0,023	0,005	0,047	-72,69

NO URUT	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan %
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,052	0,023	0,005	0,047	-72,69
	JUMLAH KEWAJIBAN	**6,631**	**7,536**	**14,875**	**40,687**	**47,867**	34,95
3	**EKUITAS DANA**						0,00
3 . 1	EKUITAS DANA LANCAR						0,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	91,600	103,801	79,869	101,214	83,961	-4,42
3 . 1 . 2	Cadangan untuk Piutang	14,313	19,792	77,819	32,773	38,413	-5,13
3 . 1 . 3	Cadangan untuk Persediaan	7,833	6,790	7,691	8,945	8,035	-0,24
3 . 1 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(6,208)	(6,550)	(13,124)	(33,957)	(47,579)	36,32
3 . 1 . 5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,010	0,003	0,114	-	-	-62,81
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	107,548	123,835	152,369	108,975	82,831	-9,88
3 . 2	EKUITAS DANA INVESTASI						
3 . 2 . 1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	45,873	85,124	84,499	98,069	119,508	19,29
3 . 2 . 2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.349,142	1.908,175	2.060,180	2.266,160	1.619,205	1,45
3 . 2 . 3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	42,678	268,490	295,982	290,024	267,594	20,74
3 . 2 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	-	(0,052)	(0,023)	(0,005)	(0,047)	-72,69
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1.437,693	2.261,738	2.440,639	2.654,247	2.006,260	4,88
3 . 3	EKUITAS DANA CADANGAN						
3 . 3 . 1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
3 . 4	KOREKSI EKUITAS						
3 . 4 . 1	Koreksi Ekuitas					91,261	100,00
	JUMLAH KOREKSI EKUITAS					91,261	100,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	**1.545,241**	**2.385,573**	**2.593,008**	**2.763,222**	**2.097,521**	4,41
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.551,872**	**2.393,110**	**2.607,883**	**2.803,909**	**2.145,388**	**4,92**

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Pada tahun 2015, Kota Mataram memiliki aset senilai Rp. 2,1 trilyun, dengan tingkat pertumbuhan 4,92 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2015 mencapai Rp.1,61 trilyun dan rata-rata tumbuh 1.45 persen per tahun. Aset tetap ini meliputi 75,47 persen dari seluruh aset pemerintah Kota Mataram.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2015 adalah sebesarRp. 47,86 milyar. Dari tahun 2011 hingga 2015, jumlah kewajiban relatif meningkat, hal ini dikarenakan begitu pesatnya pembangunan di Kota Mataram yang menuntut adanya kebijakan-kebijakan yang diikuti timbulnya kewajiban. Misalnya kewajiban yang timbul dari utang pembebasan tanah yang diperuntukkan untuk penambahan ruas jalan.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Nilai ekuitas dana Kota Mataram Tahun 2015 mencapai Rp.2,09 trilyun, dan mengalami pertumbuhan dari 2011-2015 dengan rata-rata 4,41 persen.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Mataram mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar *(current ratio)* karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kota Mataram menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Mataram setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3.23.
Analisis Rasio Keuangan Kota Mataram Tahun 2011-2015 (%)

NO	URAIAN	Rasio Keuangan (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio lancar (*current ratio*)	1721,89	1754,47	1125,89	367,87	290,84
2	Rasio quick (*quick ratio*)	1603,76	1663,76	1074,10	345,88	273,16
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,43	0,31	0,57	1,45	2,23

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Mataram adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Mataram relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik. Diantara penyebab dari kapabilitas keuangan tersebut adalah karena Kota Mataram termasuk pemerintah daerah yang mampu mengumpulkan PAD dalam jumlah yang relatif besar persentasenya dalam proporsi pendapatan daerah.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN 2011-2015

Untuk memperoleh gambaran pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mataram, perlu dilakukan kajian kembali beberapa tahun ke belakang sehingga akan diketahui kondisi eksisting dan kinerja pengelolaan daerah lima tahun sebelumnya untuk menjadi dasar pengelolaan keuangan lima tahun kedepan. Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Fokus utama pengelolaan pendapatan daerah Kota Mataram periode 2011-2015 adalah meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi besarnya kesenjangan fiskal *(fiscal gap)* yang timbul karena adanya selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah melalui penggalian sumber daya yang ada dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat miskin dan dunia usaha.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram periode 2011-2015 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran yang berkenaan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Dana Perimbangan.

Optimalisasi Pendapatan Daerah selama tahun 2011-2015 melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan secara konsisten,antara lain:

1. Intensifikasi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yaitu :
   a. Sosialisasi melalui media masa dan elektronik kepada Wajib Pajak;
   b. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah pengelola keuangan daerah;
   c. Restrukturisasi kelembagaan pengelola pendapatan daerah dan perijinan;
   d. Inventarisir wajib pajak yang belum terdaftar sehingga data potensi menjadi lebih akurat;
   e. Memperkuat proses pemungutan dengan menyusun Perda terkait, mengubah tarif retribusi, efisiensi administrasi, penyederhanaan administrasi dan efisiensi pemungutan;
   f. Pemanfaatan teknologi informasi sehingga proses pemungutan pajak akan lebih efektif dan efisien serta data menjadi lebih valid dan up to date;
   g. Mengintensifkan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi; dan
   h. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insentif sebagai upaya untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satunya melalui Gebyar PBB.

2. Ekstensifikasi potensi pendapatan daerah:
   a. Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut penambahan dan perluasan obyek pajaknya daerah/retribusi daerah;
   b. Menyusun produk hukum daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
   c. Melakukan ekstensifikasi PAD dengan mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan, mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, dan memperbaiki basis data objek, dan menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan rutin setiap triwulan.

3. Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam perhitungan lokasi Dana Perimbangan.
c. Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan: penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan APBD Kabupaten/Kota.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Pemerintah Kota Mataram selalu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Selama periode tahun 2011-2015, kebijakan umum belanja Kota Mataram memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada kebijakan yang *Pro Poor* (Pro Kemiskinan), Pro *Job* (Pro Pekerjaan), *Pro Growth* (Pro Pertumbuhan), dan *Pro* Environment (Pro Lingkungan).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha dan aparatur menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
3. Pengembangan kebijakan belanja/pengeluaran yang diarahkan untuk menciptakan peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal dan penciptaan wirausaha baru, yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan berbasis standar pelayanan perkotaan (SPP).
5. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi pengelolaan keuangan, serta peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah.

6. Kebijakan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan publik baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat.
7. Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan berbasis IT dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang melayani, bersih, dan akuntabel.

Adapun arah kebijakan Belanja Daerah, 2011-2015 adalah:

1. Memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku.
2. Efisiensi Belanja Langsung untuk kegiatan rutin yang meliputi belanja pemanfaatan listrik, air, telepon, pemeliharaan gedung/kendaraan dinas/sarana dan prasarana kantor dan perjalanan dinas serta efisiensi pengadaan sarana dan prasarana kantor.
3. Diarahkan pada belanja-belanja kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram periode 2011 - 2015 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan Belanja Langsung untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah sesuai kemampuan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kota Mataram periode tahun 2011-2015 diarahkan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bantuan sosial (Bansos) yang digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang secara selektif;
3. Belanja hibah yang digunakan untuk pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
4. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

5. Belanja bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus (pendidikan) dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Belanja Langsung Kota Mataram periode 2011-2015 diarahkan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan digunakan untuk:
   - Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menunjang pelaksanaan tiga Program Unggulan Pemerintah Kota Mataram.
   - Mendanai program dan kegiatan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
   - Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irgasi, air bersih, sanitasi, transportasi darat, lingkungan hidup, kependudukan, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.
   - Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT).

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman. Namun selama tahun 2011-2015 Pemerintah Kota Mataram belum pernah melakukan pinjaman untuk menutup defisitnya.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaanpembiayaan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan *Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)* tahun sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Giri Menang; penyertaan modal pada PT Bank NTB; PT. BPR NTB Mataram dan PT. Jamkrida NTB.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki untuk pelaksanaan pembangunan perlu direncanakan Kebijakan anggaran yang akan menjadi acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3.24.
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Mataram

No	Uraian	Data Tahun Dasar (2014-2016)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target 2016	
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**506.848.621.240,50**	**532.875.067.509,00**	**634.213.931.703,34**	10,43
1	Belanja Gaji dan tunjangan	349.836.998.712,50	380.334.853.564,00	421.992.836.852,34	8,95
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	150.157.272.640,00	144.005.667.070,00	202.205.313.300,00	12,26
3	Belanja Penerimaan Lainnya Anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.453.800.000,00	3.923.880.000,00	3.976.800.000,00	19,40
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.942.900.000,00	4.011.250.000,00	5.257.982.126,00	12,71
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	457.649.888,00	599.416.875,00	780.999.425,00	23,45
B.	**Belanja Langsung**	**29.183.690.462,00**	**37.952.898.103,00**	**42.757.865.276,00**	24,11
1	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	19.969.247.715,00	29.699.884.466,00	31.631.334.431,00	19,43
2	Belanja Premi Asuransi	652.847.032,00	81.810.028,00	439.762.000,00	-308,30
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.561.595.715,00	8.171.203.609,00	10.686.768.845,00	9,38
C.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**	**0**	**0**	-
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	-
2.	Pembayaran pokok utang	0	0	0	-
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	**536.032.311.702,50**	**570.827.965.612,00**	**676.971.796.979,34**	11,95

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Pertumbuhan tertinggi belanja prioritas utama untuk belanja tidak langsung Kota Mataram selama periode 2012-2016 berasal dari Belanja Penerimaan Lainnya Anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Insentif Pemungutan Pajak Daerah masing masing mencapai 19,40 persen, 23,45 persen dan 12,71 persen. Sedangkan untuk belanja langsung pertumbuhan paling tinggi berasal dari belanja Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) sebesar 19,43 persen.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang dan evaluasi realisasi pada tahun 2016-2017. Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama menggunakan data realisasi keuangan tahun 2014-2015 dan 2016-2017 serta data target tahun 2016 dan 2018. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Proyeksi pendapatan

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama tahun 2011-2015 dan target TA. 2016 serta berdasarkan asumsi-asumsi lain yang dirasa dapat mempengaruhi perkiraan pendapatan daerah kedepan.

Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 1,328 Trilyun dan diproyeksikan sampai pada akhir periode RPJMD 2016-2021. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan bersifat indikatif karena faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya bisa mengalami perubahan. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Adapun proyeksi awal pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.25
Proyeksi Pendapatan Daerah (Milyar Rp)

URAIAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH	**1.328,57**	**1,463.26**	**1,613.02**	**1,778.57**	**1,961.97**	**2,166.25**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**273,60**	**301.39**	**332.93**	**367.72**	**406.45**	**450.63**
Pendapatan Pajak Daerah	118,58	136,00	153,70	170,4	189,10	209,30
Hasil Retribusi Daerah	19,71	18,47	19,23	20,02	20,85	21,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,4	6,85	7,33	7,84	8,39	8,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128,5	140.07	152.67	169.46	188.11	210.68
DANA PERIMBANGAN	**810,52**	**902,13**	**1.004,10**	**1.117,59**	**1.243,91**	**1.384,51**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	58,11	57,53	56,97	56,41	55,86	55,31
Dana Alokasi Umum	609,02	666,75	729,95	799,15	874,9	957,84
Dana Alokasi Khusus	143,4	182,96	233,44	297,84	380,01	484,86
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**244,45**	**259,74**	**275,99**	**293,26**	**311,61**	**331,11**
Pendapatan Hibah	9	10,03	11,17	12,45	13,87	15,45
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan PEMDA Lainnya	60,91	66,37	72,33	78,82	85,89	93,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	131,93	130,34	128,76	127,19	125,65	124,13
Bantuan Keuangan Prov. atau Pemda Lainnya	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Lainnya	42,6	61,3	88,2	126,91	182,62	262,76

Sumber : BPKAD dan Dispenda Kota Mataram, 2015

Peninjauan kembali kondisi keuangan daerah didasarkan pada capaian realisasi yang telah tercatat pada tahun anggaran yang telah dilaksanakan, yakni tahun anggaran 2016 dan 2017. Adapun realisasi Pendapatan Daerah dalam pada tahun 2016-2017 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.26
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah (Milyar Rp)

URAIAN	TAHUN					
	2016			2017		
	Target RPJMD	Target APBD	Realisasi	Target RPJMD	Target APBD	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	**1.328,57**	**1.357,81**	**1.396,39**	**1,463.26**	**1.424,29**	**1.424,07**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**273,60**	**279,68**	**288,42**	**301.39**	**367,50**	**386,96**
Pendapatan Pajak Daerah	118,58	121,49	124,42	136,00	142,10	144,87
Hasil Retribusi Daerah	19,71	20,17	18.34	18,47	22.00	17,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,4	6,4	7,26	6,85	7,74	8,19

URAIAN	TAHUN					
	2016			2017		
	Target RPJMD	Target APBD	Realisasi	Target RPJMD	Target APBD	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128,5	131,62	138,41	140.07	195,67	216,50
DANA PERIMBANGAN	**810,52**	**948,54**	**981,71**	**902,13**	**970,29**	**941,45**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	58,11	79,92	110,97	57,53	116,12	103,35
Dana Alokasi Umum	609,02	520,80	609,02	666,75	598,31	598,31
Dana Alokasi Khusus	143,4	347,83	261,72	182,96	255,85	239,78
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**244,45**	**129,58**	**126,27**	**259,74**	**86,49**	**95,67**
Pendapatan Hibah	9,00	14,81	14,81	10,03	9,00	9,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya	60,91	68,36	68,36	66,37	69.99	79,10
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	131,93	0	0	130,34	0	0
Bantuan Keuangan Prov. atau Pemda Lainnya	0	3,43	0,43	0	0	0
Pendapatan Lainnya	42,6	42,65	42,67	61,3	7,50	7,57

Sumber : BPKAD dan Dispenda Kota Mataram, 2015 dan BKD Kota Mataram, 2018

Realisasi Pendapatan tahun 2016-2017 selanjutnya menjadi dasar rasionalisasi proyeksi pendapatan untuk sisa tahun anggaran sampai dengan akhir masa periode RPJMD. Adapun proyeksi pendapatan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Proyeksi Pendapatan Daerah (Milyar Rp)

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH	**1.437,78**	**1.415,51**	**1.456,68**	**1.474,21**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**354,69**	**339,93**	**371,68**	**384,21**
Pendapatan Pajak Daerah	144,50	156,20	160.80	167,30
Hasil Retribusi Daerah	22,16	22,34	21,88	22,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,19	8,19	10,79	11,29
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	179,82	153,20	178,20	183.,20
DANA PERIMBANGAN	**905,09**	**901,39**	**911,00**	**914,00**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	101,75	73,19	84,00	84,00
Dana Alokasi Umum	598,32	632,75	632,00	640,00
Dana Alokasi Khusus	205,03	195,45	195,00	190,00

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**177,99**	**174,18**	**174,00**	**176,00**
Pendapatan Hibah	59,45	52,98	52,00	52,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya	80,00	88,21	90,00	92,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	32,99	32,00	32,00
Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemda Lainnya	538,53	0	0	0
Pendapatan Lainnya	38,00	0	0	0

Sumber : BKD Kota Mataram, 2018

Grafik 3.8.
Proyeksi Target Pendapatan Daerah (milyar Rupiah)

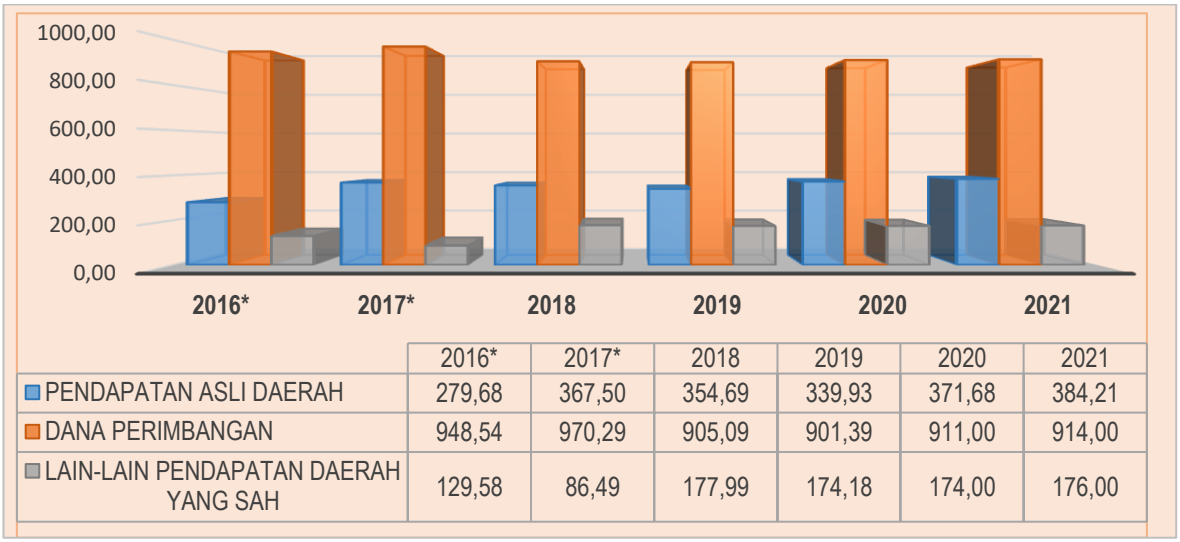

	2016*	2017*	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN ASLI DAERAH	279,68	367,50	354,69	339,93	371,68	384,21
DANA PERIMBANGAN	948,54	970,29	905,09	901,39	911,00	914,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	129,58	86,49	177,99	174,18	174,00	176,00

2016 dan 2017* merupakan nilai APBD*
Sumber : BKD Kota Mataram, 2018

2. Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama

Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2016-2017 diproyeksikan cenderung meningkat, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.26.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016-2017 (juta Rp)

No	Uraian	TAHUN			
		Target 2016**	Dianggarkan 2016	Target 2017	Dianggarkan 2017
A.	**Belanja Tidak Langsung**	634.21	566.36	698.37	**503.92**
1	Belanja Gaji dan tunjangan	421.99	404.03	459.74	377.07
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	202.21	151.60	226.99	114.99

No	Uraian	TAHUN			
		Target 2016**	Dianggarkan 2016	Target 2017	Dianggarkan 2017
3	Belanja Penerimaan Lainnya Anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.98	4.13	4.75	4.46
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.26	6.02	5.93	6.82
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	781	0.58	0.96	0.58
6	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pem Desa Lainnya				
7	Belanja tidak Terduga				
B.	**Belanja Langsung**	42.76	81.4	49.91	**90.95**
1	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	31.63	72.99	37.78	81.22
2	Belanja Premi Asuransi	0.44	0.64	0.44	0.58
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.69	7.77	11.69	9.14
C.	**Pengeluaran Pembiayaan**	-		-	
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-		-	
2.	Pembayaran pokok utang	-		-	
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	**676.97**	**647.76**	**748.27**	**594.87**

Sumber : BPKAD dan Dispenda Kota Mataram, 2015 dan BKD Kota Mataram, 2018

Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2018-2021 diproyeksikan cenderung meningkat, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.27.

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2018-2021 (juta Rp)

No	Uraian	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**528.28**	**537.80**	**547.55**	**557.55**
1	Belanja Gaji dan tunjangan	380.66	390.18	399.93	409.93
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	129.14	129.14	129.14	129.14
3	Belanja Penerimaan Lainnya Anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.21	4.46	4.46	4.46
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	6.29	6.82	6.82	6.82
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0.57	0.58	0.58	0.58
6	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya	0.91	0.91	0.91	0.91
7	Belanja tidak Terduga	6.50	6.50	6.50	6.50

No	Uraian	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
B.	**Belanja Langsung**	**59.14**	**66.08**	**73.83**	**82.50**
1	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	52.93	59.14	66.07	73.82
2	Belanja Premi Asuransi	0.42	0.47	0.53	0.59
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.80	6.48	7.24	8.08
C.	**Pengeluaran Pembiayaan**	-	-	-	-
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2.	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	**587.43**	**604.68**	**622.19**	**640.85**

Total Belanja Wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp 679,97 juta di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 1,123 milyar lebih di tahun 2021. Belanja Tidak Langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total Belanja Wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.

Grafik 3.9.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama (Juta Rp)

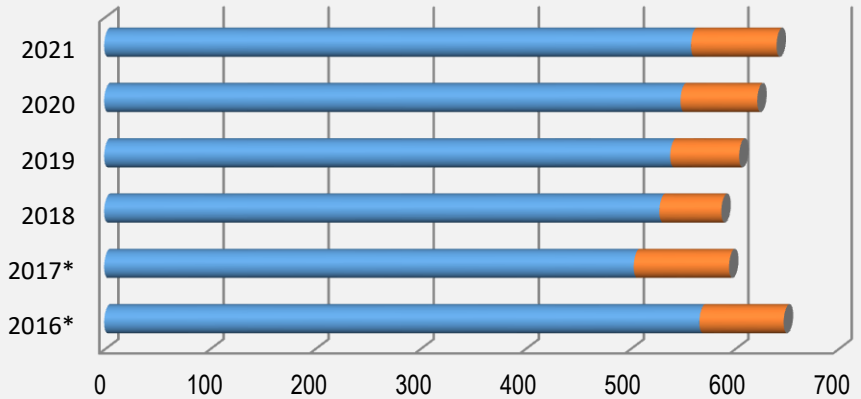

	2016*	2017*	2018	2019	2020	2021
Belanja Tidak Langsung	566,36	503,92	528,28	538,60	548,35	558,35
Belanja Langsung	81,4	90,95	59,14	66,08	73,83	82,50
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0

Sumber : BKD Kota Mataram, 2018, proyeksi

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu mendatang (2016-2021), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Mataram diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu tahun 2011-2015 pencapaian pendapatan daerah target rata-rata sebesar 102% daya serap anggaran pada belanja daerah maupun rata-rata mampu menyerap 90% anggaran

Berdasarkan data SILPA tahun dasar 2011-2015 SILPA akan terjadi diskenariokan sebesar 9,5% dari total APBD pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasikan diatas 9,5%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.27.
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Mataram (Milyar Rp)

No.	URAIAN	Tahun			
		2016	realisasi	2017	realisasi
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.328,57**	**1.357,81**	**1,463.26**	**1.424,29**
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-
3	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	134,80		151,43	121,34
	Total Kapasitas Kemampuan Keuangan daerah	**1.463,37**		**1.614,69**	**1.545,62**

No.	URAIAN	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.437,78**	**1.415,51**	**1.456,68**	**1.474,21**
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-		-
3	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	102,05	25,0	25,0	25,0
	Total Kapasitas Kemampuan Keuangan daerah	**1.539,83**	**1.440,51**	**1.481,68**	**1.499,22**

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Grafik 3.10.
Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Mataram (Milyar Rp)

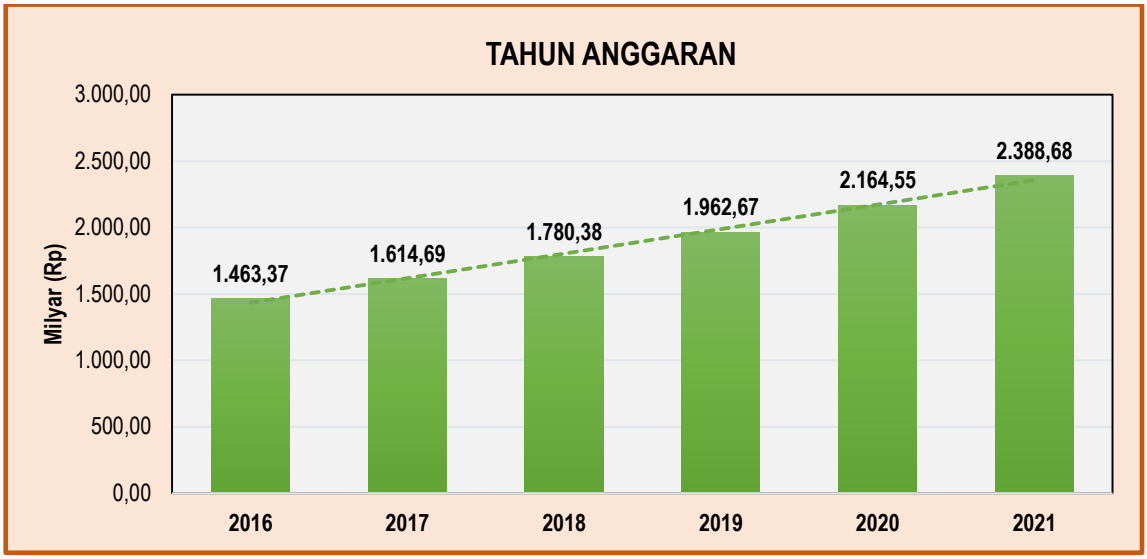

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berkaitan dengan hal tesebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.28
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas
Tahun Anggaran 2016-2021
(dalam juta rupiah)

No.	Jenis Dana	ALOKASI											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	**Prioritas I**	**46,3**	**677,0**	**46,6**	**748,3**	**46,9**	**827,6**	**47,3**	**915,8**	**47,7**	**1014,1**	**48,3**	**1123,6**
	Belanja Tidak Langsung	43,3	634,2	43,5	698,4	43,6	769,2	43,8	847,5	44,0	934,0	44,3	1029,6
	Belanja Langsung	2,9	42,8	3,1	49,9	3,3	58,4	3,5	68,3	3,8	80,1	4,0	94,0
	Pengeluaran Pembiayaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Prioritas II**	**49,6**	**725,8**	**51,1**	**838.59**	**51,2**	**946,84**	**51,1**	**1.066,70**	**50,9**	**1.198,64**	**50,5**	**1.348,31**
3	**Prioritas III**	**2,8**	**40,3**	**2,3**	**36,4**	**1,9**	**33,4**	**1,6**	**31,1**	**1,4**	**29,5**	**1,2**	**28,4**
	Belanja Hibah	1,3	19,0	0,9	15,2	0,7	12,2	0,5	9,8	0,4	7,8	0,3	6,3
	Belanja Bantuan Sosial	1,3	18,3	1,1	18,0	1,0	17,7	0,9	17,3	0,8	17,0	0,7	16,7
	Belanja Bantuan Keuangan	0,1	0,9	0,1	1,2	0,1	1,6	0,1	2,0	0,1	2,6	0,1	3,4
	Belanja Tidak Terduga	0,1	2,1	0,1	2,1	0,1	2,1	0,1	2,0	0,1	2,0	0,1	2,0
	Total		**1.463,4**		**1.623,29**		**1.807,84**		**2.013,60**		**2.242,24**		**2.500,31**

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini yang disajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas, dan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kota Mataram, adalah sebagai berikut:

a. cakupan masalah yang luas;
b. permasalahan cenderung meningkat di masa mendatang dan berdampak negatif;
c. memerlukan upaya penanganan yang konsisten serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat Kota Mataram secara umum adalah membangun masyarakat yang beriman dan berbudaya, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pengembangan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur perkotaan berbasis tata ruang, pengelolan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Rumusan permasalahan selanjutnya dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Pemetaan permasalahan pembangunan daerah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel T-B.35 Buku Permendagri 86/2017 hal 124) sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Masyarakat yang Beriman dan Berbudaya**	• Kota Mataram masih memiliki potensi konflik sebagai konsekuensi kemajemukan dan karateristik heterogenitas penduduk sehingga kejadian-kejadian konflik horisontal antar wilayah lingkungan masih ditemukan. • Rentannya nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya kriminalitas, Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya. • Nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra serta kearifan lokal belum dilestarikan dan diaktualisasikan dalam pembangunan secara optimal. • Sarana dan prasarana pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya belum optimal.	• Linmas di lingkungan mayoritas tidak efektif/tidak aktif • Masih adanya kejadian gangguan kamtibmas (penyakit masyarakat dan kriminalitas) yang tidak tertangani • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor kejadian gangguan kamtibmas • kegiatan siskamling dan sarana poskamling tidak merata/tidak berfungsi • kurangnya aktifitas postif bagi remaja • semakin maraknya pedagang liar di perempatan dan perumahan • Masih terdapat kejadian konflik horizontal/antar warga • masalah pekat (miras) menjadi salah satu pemicu konflik antar warga • Kurangnya kegiatan pembauran di masyarakat • kurangnya kedewasaan berpolitik yang menyebabkan perbedaan pandangan politik dapat menjadi pemicu konflik antar warga • kurang maksimalnya identifikasi potensi konflik • penyelesaian konflik tidak bersifat berkelanjutan • belum maksimalnya penanganan aparat pemerintahan pada taraf pencegahan • nilai-nilai budaya lokal dan budaya bangsa yang mulai ditinggalkan • penanganan dan penyelesaian konflik yang tidak menyentuh akar permasalahan • Pembangunan yang belum mempertimbangkan potensi bencana • Masih banyak masyarakat yan tidak mengetahui tata cara mitigasi dan penyelamatan diri bencana yang benar • kurangnya edukasi kebencanaan dari pemerintah/lembaga resmi • banyak situs sejarah/budaya yang belum terdokumentasikan dengan baik • masih ada masyarakat yang tidak familiar dengan tradisi, adat istiadat dan budaya lokal • nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sudah mulai luntur dan ditinggalkan • kurangnya interaksi antar masyarakat, lebih tertarik berinterkasi melalui media sosial • lemahnya mental masyarakat dalam ketaatan terhadap peraturan • kurangnya pengenalan tradisi, budaya lokal dan nilai-nilai bangsa sejak usia dini/sekolah • kurang terlihatnya identitas dan karakter budaya Kota Mataram dalam pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
2	**Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**	• Di bidang pendidikan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: i) belum meratanya kualitas pendidikan dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan pendidikan; ii) penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan; iii) belum optimalnya penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan masyarakat. • Di Bidang Kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: i) status kesehatan penduduk miskin masih rendah; ii) beban ganda penyakit, dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular sehingga terjadi beban ganda pada waktu yang bersamaan; iii) kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah; iv) terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata; v) perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat; vi) kinerja pelayanan kesehatan yang rendah; vii) rendahnya kondisi kesehatan lingkungan; dan. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang • Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup tinggi, hal ini disebabkan antara lain: i) jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang belum maksimal; ii) sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal; iii) kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif; iv) pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum berjalan seperti yang diharapkan;	• kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum merata masih berpusat di tengah kota • penyebaran guru dan tenaga pengajar yang berkualitas tidak merata, hanya berpusat di sekolah sekolah favorit • Sistem zonasi belum efektif karena penyebaran sarana dan prasarana sekolah serta guru tenega pendidik tidak merata • Belum terakomodirnya pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan • lemahnya sistem pengawasan kualitas pendidikan dan kompetensi guru • lemahnya pendidikan karakter termasuk pendidikan seks usia dini • belum optimalnya kualitas pelayanan puskesmas • pada umumnya puskesmas bermasalah dengan sistem pelayanan yang kurang efektif dan efisien • masih rendahnya Pemerataan pelayanan kesehatan, serta kurangnya tenaga yang profesional dan informatif • kurang kenyamanan dan kebersihan puskesmas • Kenyamanan atas pelayanan terhadap pengguna BPJS masih kurang maksimal • sistem pelayanan administrasi belum efektif dan efisien • kurangnya penyuluhan kesehatan dan kebersihan lingkungan • fasilitas kurang memadai terutama untuk anak dan ibu melahirkan • sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman asuransi kepada masyarakat masih kurang • pelayanan terhadap masyarakat miskin krang optimal • belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kota Mataram • kurangnya kenyamanan dan kebersihan fasilitas rumah sakit • keterbatasan kuantitas tenaga medis dan secara kualitas kurang informatif, ramah serta profesional • belum optimalnya jasa layanan kesehatan lansia, ibu dan anak • pelayanan kesehatan masih belum efektif dan efisien serta kurangnya tenaga medis • pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan belum optimal • cakupan penggunaan jaminan kesehatan belum memadai • terbatasnya layanan rujukan rumah sakit • berkurangnya jenis layanan kesehatan yang tersedia • pelayanan kurang fleksible, efektif, tidak efisien dan kurang transparansi • masih ada kejadian KDRT • kurangnya pemahaman serta minimnya fasilitas ramah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		serta v) keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) belum terkoordinasi dengan baik. • Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menjadi salah satu masalah yang dihadapi Kota Mataram sehingga menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk yang tidak berimbang antar wilayah sehingga memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan pelayanan sosial, kesehatan pendidikan, infrastruktur dan lainnya	anak dan keterlibatan laki laki perlindungan perempuan anak dan kesetaraan gender • kurang sosialisasi dan pemberdayaan tentang peran perempuan dalam pembangunan dan politik • kurangnya perlindungan dan kepedulian dalam keluarga dan masyarakat atas kegiatan remaja dan kesejahteraan anak • masih minimnya kelembagaan yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan • belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan perempuan dalam bentuk susunan organisasi • rendahnya pemahaman mengenai keorganisasian perempuan • masih tingginya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke polisi atau diselesaikan secara hukum beresiko pada kejadian berulang • hambatan internal keluarga dan masyarakat terhadap dogma perempuan dan kepemimpinan oleh agama tertentu terhadap peran perempuan dalam pemerintahan • keterlibatan perempuan masih sedikit dalam politik • bias gender, kurangnya penghargaan atas prestasi perempuan, peranperempuan dianggap hanya sebagai pelengkap/pemenuhan kuota • ruang gerak perempuan untuk berorganisasi masih minim • banyak terjadi pernikahan di bawah umur akibat kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan • masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak dan ancaman kesehatan akibat orang terdekat • kurangnya kegiatan bagi pemuda terutama dalam menyalurkan minat dan bakat yang positif serta menstimulasi peran pemuda dalam kegiatan lingkungan/masyarakat • masih banyak kepala lingkungan yang kurang bersosialisasi kepada warganya sebagai tokoh masyarakat sehingga warga tidak mengenal kepala lingkungannya sendiri • masih banyak kepala lingkungan pasif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dan tidak memiliki program yang jelas • lemahnya SDM kepala lingkungan sebagai pengampu pemberdayaan masyarakat di lingkungan • belum optimalnya wadah kelembagaan pemberdayaan masyarakat • banyak lembaga pemberdayaan masyarakat yang tidak aktif • kurangnya sarana-prasarana yang mendukung kegiatan pembauran dan pemberdayaan masyarakat dan pemuda terutama di tingkat lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	**Pengembangan Ekonomi Lokal**	• Permasalahan pengembangan usaha dan perijinan, antara lain: belum terjalinnya pola kemitraan dalam upaya pengembangan usaha; terbatasnya akses (Wirausaha Baru) WuB terhadap sumber pemodalan usaha; belum optimalnya regulasi yang mendukung kearah pengembangan PTSP; belum tersedianya profil dan informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh investor; belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perijinan yang ada; serta belum optimalnya pengawasan, pengendalian dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). • Nilai ekpor komoditas ataupun produk unggulan Kota Mataram belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kondisi ini tidak terlepas dari kualitas mutu komoditas atau produk yang belum memenuhi stadar internasional; masih minimnya standar, desain dan kualitas mutu produk yang dihasilkan; serta lemahnya daya saing produk-produk lokal dari sisi akses pasar baik lokal, regional maupun internasional. Selain itu juga belum adanya jalinan kerjasama perdagangan dengan negara importir berkontribusi terhadap perkembangan nilai ekpor serta perluasan jenis komoditas atau produk yang dapat diserap pasar. • Permasalahan dalam bidang pariwisata yaitu belum sinerginya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Provinsi NTB dengan RIPARDA Pemerintah Kota Mataram sebagai acuan perencanaan sektor kepariwisataan • Dalam bidang ketahanan pangan, permasalahan yang adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya memperbaiki sistem budidaya tanaman, penanganan pasca panen, pengolahan pangan dan penanganan distribusi; serta belum optimalnya diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya,	• rendahnya pengembangan kluster industri berbasis potensi lokal • perlunya kontrol yang lebih optimal terhadap harga bahan2 pokok di pasaran oleh stakeholder terkait secara continue/berkelanjutan • fasum/fasus penunjang pariwisata dirasakan masih kurang • keamanan, kebersihan dan kenyamanan kurang memadai • kurang efektifnya promosi pariwisata • kurangnya kapasitas SDM pengelola pariwisata • Kota Mataram belum memiliki Identitas kepariwisataan memiliki nilai jual yang baik • tidak berfungsinya kelompok sadar wisata yang telah terbentuk di setiap kelurahan • rendahnya kemampuan wirausaha masyarakat • kebijakan ekonomi belum mendorong produktifitas ekonomi kecil, baru sebatas bantuan yang sering tidak tepat sasaran • kurangnya pengelolaan koperasi agar mampu bersaing dengan badan usaha keuangan lainnya dan kurang memperhatikan fungsi utama dari pembentukan koperasi • masih rendahnya daya saing UMKM terhadap ritel modern • belum optimalnya penataan bagi UMKM/PKL • Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat belum tercermin dalam kebijakan ijin mendirikan Ruko yang ternyata juga tidak sejalan dengan kebutuhan ruko itu sendiri • gangguan kondusifitas mempengaruhi iklim investasi • Kurang tersedianya/kurang merata distribusi beberapa kebutuhan pokok di pasaran • regulasi yang kurang mendukung berkembangnya industri kecil/menengah serta lokasi usaha yang terus berkurang • randahnya pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi koperasi • bunga pinjaman koperasi tergolong tinggi • lemahnya permodalan koperasi • lemahnya kapasitas pengelola koperasi • lemahnya pemasaran barang oleh koperasi • lemahnya akses permodalan bagi IKM dan UMKM • lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap pengembangan ekonomi lokal • rendahnya perlindungan harga produk pertanian • angka pengangguran masih tinggi • minimnya difersifikasi lapangan pekerjaan • daya saing pencari kerja yang relatif rendah • keterbatasan akses informasi bursa kerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		kelembagaan dan budaya lokal. • Secara umum permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Kota Mataram, antara lain: Tingginya jumlah Angkatan Kerja, Relatif rendahnya kualitas tenaga kerja, Tidak meratanya penyebaran tenaga kerja, Masih terbatasnya kesempatan kerja, serta Pengangguran.	• rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dibandingkan pendatang • masih ada masyarakat mendapat upah di bawah UMR/UMK • masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja • belum optimalnya perogram-program pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan bagi calon tenaga kerja
4	**Kemiskinan**	• Kemiskinan di wilayah Kota Mataram disebabkan antara lain oleh perkembangan kota yang semakin pesat tercermin dari pesatnya perluasan wilayah kota, tingginya tingkat urbanisasi, meningkatnya perkembangan ekonomi yang ditandai adanya konsentrasi berbagai macam kegiatan ekonomi, terutama industri, jasa dan perdagangan dalam skala besar. • Data kemiskinan Kota Mataram menunjukkan penurunan angka kemiskinan pada kisaran 0,2-1,6 persen setiap tahunnya, dimana angka kemiskinan Kota Mataram saat ini mencapai 10,06% dari jumlah penduduk. Terjadinya pelambatan penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh masyarakat sangat miskin yaitu penduduk dengan kondisi kemiskinan yang sudah kronik, yang masih sulit untuk dientaskan. • Tingginya kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu 64.2%, namun memiliki akses yang lemah terhadap pasar kerja dan sektor produktif sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kota Mataram.	• belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) • Masih ada PMKS yang belum dapat menjalankan kehidupan normal di masyarakat • keberadaan PMKS berpotensi sebagai gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat • masyarakat miskin masih ada yang belum mendapatkan haknya atas bantuan sosial • lemahnya basis data dan informasi kemiskinan yang akurat sehingga bantuan tidak meratadan tidak tepat sasaran • masih ada indikasi KKN dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin • sebagian besar petani penggarap yang ada di wilayah kota mataram dalam keadaan miskin • masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur warga miskin yang tetap hidup miskin setelah pernikahan • masih banyak warga miskin yang tidak terakses kepada alat kontrasepsi • kurangnya keahlian pada kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan pekerjaan atau mata pencaharian yang layak • lemahnya pendataan terhadap PMKS secara akurat • masih tingginya kesenjangan ekonomi • lemahnya mentalitas masyarakat untuk keluar dari status miskin • rendahnya cakupan akses kontrasepsi kepada masyarakat miskin menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks terkait pendidikan, keamanan lingkungan dan sebagainya
5	**Infrastruktur Perkotaan berbasis Tata Ruang**	• Semakin bertambahnya kawasan permukiman menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan air bersih, dimana cakupan air bersih pada tahun 2015 baru mencapai 67,34%. • Berkembangnya Kota Mataram yang diikuti dengan perkembangan kawasan permukiman menuntut dibangunnya jalan-jalan baru sebagai akses bagi masyarakat serta tuntutan	• belum meratanya kondisi jalan lingkungan • pemenuhan kualitas dan umur teknis jalan belum optimal • bongkar pasang jalan akibat perbaikan kabel • pemeliharaan sarana prasarana rambu, marka dan penerangan jalan belum maksimal • penyalahgunaan bahu dan badan jalan untuk parkir liar dan PKL • Penyalahgunaan trotoar untuk parkir liar dan PKL • kepemilikan lahan RTLH yang akan diintervensi • data RTLH belum memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		pemenuhan kondisi jalan dalam kondisi baik, dimana proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik baru mencapai 87,21% pada tahun 2015. • Masih adanya genangan air pada beberapa lokasi, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (a) Banjir kiriman yang berasal dari daerah hulu yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di Kota Mataram, (b). Penutupan saluran yang tidak mengikuti petunjuk teknis dari instansi terkait (c). Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase dengan tidak membuang sampah ke saluran masih rendah • Luas kawasan kumuh yang mencapai 803,39 ha, yang salah satu indikatornya adalah kepadatan bangunan • Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan. • Masih kurangnya pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas • Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan serta kawasan permukiman	• ketaatan terhadap peraturan penggunaan lahan • kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghindari perilaku hidup kumuh • Tdk ada SPAL di lingkungan kumuh • kualitas angkutan publik kurang memadai • tidak ada transportasi massal • tidak berfungsinya bis Trans Mataram dengan semestinya • parkir sembarangan akibat jumlah kendaraan pribadi yang sangat banyak • belum berjalannya rekayasa lalu lintas terutama untuk mengatasi kemacetan akibat antar jemput anak sekolah • Rute/jalur transportasi umum (angkot/bemo) yang tidak jelas • Parkir sembarangan terutama bagi kendaraan antar emput anak sekolah menyebabkan gangguan dan kemacetan lalu lintas • rendahnya kesararan masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas • masih tingginya perilaku masyarakat membuang sampah di sungai/kali/drainase/selokan • kurang kinerja pemeliharaan drainase terutama untuk pengerukan dan pembersihan sampah yang menyumbat saluran • sistem drainase Kota Mataram yang tidak terintegrasi dan belum tertata dengan baik belum dapat menanggulangi permasalahan banjir musiman (saat musim hujan) • masih ada masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran drainase • ketaatan terhadap aturan RTRW masih rendah • kurangnya fasilitas umum yang memadai dan inkluisf • pembangunan infrastruktur terkesan sembarangan tanpa perencanaan yang baik
6	**Lingkungan Hidup**	• Kota Mataram tergolong Kota yang cukup padat, dengan jumlah penduduk 450.226 jiwa dan kepadatan sebesar 7.345 jiwa/km dapat berimplikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan. • Banjir merupakan bencana yang rentan terjadi di Kota Mataram. Banjir yang terjadi merupakan luapan air sungai yang sudah tidak dapat mengalirkan air dari hulu ke hilir. Hal tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya berkurangnya daerah resapan, debit sungai dari wilayah hulu yang melebihi kapasitas sungai dan terjadinya penyempitan lebar	• pengetahuan yang rendah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode 3R • Belum optimalnya fungsi Bank Sampah • Sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai • TPA masih bergantung pada daerah lain • kinerja truk pengangkut sampah kurang optimal • kurang optmimalnya kinerja pengelolaan persampahan lingkungan • Tidak ada regulasi pengelolaan sampah yang baik • kurangnya kesadaran pengelolaan sampah dan limbah industri kecil menengah • penataan ruang kota yang belum ramah lingkungan hidup dan belum respon isu perubahan iklim • kurangnya RTH • alih fungsi lahan yang tidak terkendali

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		sungai yang disebabkan pemanfaatan sempadan sungai sebagai tempat berdirinya bangunan. • belum optimalnya pelayanan persampahan. Volume sampah di Kota Mataram secara signifikan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga di wilayah pemukiman baru, serta kawasan perdagangan dan jasa yang tumbuh secara merata di wilayah kota. Menurut data tahun 2016, volume sampah mencapai 1.444 m^3/hari dan yang mampu diangkut 1.039 m^3/hari (71,59%) yang menyebabkan polusi udara dan pencemaran lingkungan. • kemampuan dan keterbatasan sarana prasarana serta perilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat • Keterbatasan lahan yang difungsikan sebagai RTH, dimana luasan RTH baru mencapai 12,5% dari 30% yang disyaratkan.	
7	**Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum**	• Kualitas pelayanan publik masih belum optimal yang disebabkan antara lain kurangnya sarana prasarana, SDM maupun prosedur pelayanan publik. • Masih kurangnya ruang/media aspirasi masyarakat terhadap pembangunan. • Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. • Belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasikan antar unit kerja melalui jaringan komunikasi antar Perangkat Daerah.	• belum optimalnya pelayanan kependudukan • partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal • profesionalitasdan prinsip 3S pelayanan publik belum memadai • kebersihan tempat pelayanan masih perlu ditingkatkan • pengelolaan pelayanan pengaduan pelayanan belum memadai • masih rendahnya kapasitas dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas • masih ada praktik KKN menggunakan kenalan atau orang dalam • belum optimalnya keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat • belum meratanya akses dan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi infomasi • infrastruktur dan sarana prasarana informasi publik yang disediakan pemerintah belum memadai • masih rendahnya ketersediaan data yang akurat dan update

Permasalahan pembangunan Kota Mataram ditinjau dari analisis permasalahan utama pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari permasalahan pembangunan di daerah dapat dilihat dari capaian Indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Mataram terhadap target nasional. Permasalahan Pencapaian tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target. Secara rinci dijabarkan dalam Tabel 4.2.
2. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Indikator-indikator ini merupakan indikator kinerja non prioritas yang tidak memenuhi kriteria permasalahan pembangunan jangka menengah kota mataram.
3. Indikator TPB tidak ada data pendukung.

Tabel. 4.2
Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Mataram yang belum mencapai Target

NO	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	ANALISIS AKAR PERMASALAHAN KLHS
1	2	3	4
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	• Masih rendahnya persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	• Daya dukung lahan untuk penyediaan layanan air bersih di Kota Mataram memiliki luasan paling kecil sebesar 44.7 hektar atau sekitar 0.7% dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kota Mataram • Semakin bertambahnya kawasan permukiman menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan air bersih
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	• Masih ada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	• perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat • Tdk ada SPAL di lingkungan kumuh • Pengelolaan sanitasi lingkungan yang belum memadai • Sistem drainase buruk • Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman
3	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	• Masih tingginya luas kawasan permukiman kumuh	• Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan serta kawasan permukiman
4	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	• Rendahnya ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana	• Belum adanya data indeks bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi di Kota Mataram
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	• Belum meratanya akses dan mutu serta kualitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan • Masih ada perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan/atau tidak	• beban ganda penyakit, dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular sehingga terjadi beban ganda pada waktu yang bersamaan

NO	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	ANALISIS AKAR PERMASALAHAN KLHS
1	2	3	4
		ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih • status kesehatan penduduk miskin masih rendah	• kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah • terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata • perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat • kinerja pelayanan kesehatan yang rendah • rendahnya kondisi kesehatan lingkungan • Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	• Prevelensi gizi buruk masih tinggi di angka 7,6%	• Puskesmas yang terakreditasi masih rendah • Belum meratanya akses dan mutu serta kualitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan
7	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	• Masih rendahnya proporsi sekolah SD/MI dan SMP/MI berakreditasi minimal B. • APK PAUD masih rendah • Masih rendahnya Proporsi guru bersertifikasi • penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan	• Belum meratanya kualitas pendidikan dan fasilitas/sarana penunjang pendidikan belum memadai
8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	• Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	• Pengelolaan sanitasi lingkungan yang belum memadai • Sistem drainase buruk • Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman
9	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	• Pengelolaan limbah B3 pada usaha industri dan kesehatan belum optimal	• Belum adanya kelembagaan khusus yang menangani pengelolaan limbah • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah domestic rumah tangga
10	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	• Masih ada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	• masih terdapat rumah tangga yang menggunakan atap rumahnya berupa Bambu/ Kayu/ Sirap/ Jerami/ Ijuk/ Daun/ Rumbia/ Lainnya • Masih tingginya luas permukiman rumah kumuh tidak layak huni • Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman

NO	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	ANALISIS AKAR PERMASALAHAN KLHS
1	2	3	4
11	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	• Penataan ruang kota yang belum ramah lingkungan hidup dan belum respon isu perubahan iklim • Kurangnya RTH • Alih fungsi lahan yang tidak terkendali	• ketaatan terhadap aturan RTRW masih rendah • ketaatan terhadap UUPR Nomor 26 Tahun 2007 rendah • Keterbatasan lahan yang difungsikan sebagai RTH
12	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	• Belum optimalnya fungsi Bank Sampah. • Belum adanya kelembagaan khusus yang menangani pengelolaan limbah	• tidak ada *recycle center* skala kota untuk pengolahan sampah terpadu (*reduce, reuse, and recycle*/3R) • pengetahuan yang rendah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode 3R • Belum tersedianya alat pemilah / sarana pemilah sampah • Belum adanya kebijakan pengolahan persampahan dengan daur ulang
13	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	• Kemampuan dan keterbatasan sarana prasarana serta perilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. • Pengetahuan yang rendah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode 3R. • Sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai. • TPA masih bergantung pada daerah lain. • kinerja truk pengangkut sampah kurang optimal. • Tidak ada regulasi pengelolaan sampah yang baik	• Belum meratanya infrastruktur persampahan (TPST, bank sampah, pengangkutan sampah) di wilayah kecamatan secara merata, • Belum optimalnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, • Belum adanya lahan yang dibuat jadi TPA di setiap kecamatan, • kemampuan dan keterbatasan sarana prasarana serta perilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat • kurangnya kesadaran pengelolaan sampah dan limbah industri kecil menengah • kurangnya daya tampung TPA Kebon Kongok
14	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	• Angka pengangguran masih tinggi. • Keterbatasan lapangan kerja • Belum meratanya tingkat penyebaran tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi • Relatif rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja • Relatif rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja	• jumlah angkatan kerja yang banyak • kualitas angkatan kerja yang relatif rendah • persebaran tenaga kerja yang tidak merata • kesempatan kerja masih terbatas
15	Laju pertumbuhan PDB per kapita	• Rendahnya PDB perkapita	• Masih tingginya angka pengangguran • Kurangnya pelatihan untuk UKM atau home industri

NO	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	ANALISIS AKAR PERMASALAHAN KLHS
1	2	3	4
			• Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan • Masih rendah akses UMKM terhadap perbankan • Rendahnya daya saing UMKM • Masih kurangnya bantuan modal buat usaha kecil • Nilai ekpor komoditas ataupun produk unggulan Kota Mataram belum menunjukkan perkembangan yang signifikan • kualitas mutu komoditas atau produk yang belum memenuhi stadar internasional; masih minimnya standar, desain dan kualitas mutu produk yang dihasilkan • lemahnya daya saing produk-produk lokal dari sisi akses pasar baik lokal, regional maupun internasional • belum adanya jalinan kerjasama perdagangan dengan negara importir berkontribusi terhadap perkembangan nilai ekpor serta perluasan jenis komoditas atau produk yang dapat diserap pasar.
16	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	• Masih tingginya kesenjangan ekonomi. • Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram yang melambat	• Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). • Masyarakat miskin masih ada yang belum mendapatkan haknya atas bantuan sosial. • kurangnya keahlian pada kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan pekerjaan/mata pencaharian yang layak.
17	Mengembangkan, lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	• Kinerja OPD dalam pencapaian target pembangunan masih belum optimal • Peningkatan Skor atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum maksimal	• Kualitas pelayanan publik masih belum optimal yang disebabkan antara lain kurangnya sarana prasarana, SDM maupun prosedur pelayanan publik • Kinerja OPD dalam pencapaian target pembangunan belum maksimal • Penyediaan informasi kegiatan dan capaian di semua tingkat OPD belum secara maksimal

Permasalahan pembangunan selanjutnya dipetakan pada tiap urusan untuk mengukur bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam pemenuhan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, tidak semua urusan pemerintahan dapat diprioritaskan atau terkait dengan

sasaran pokok RPJPD dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) disebabkan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi yang berpotensi menjadi permasalahan utama maupun peluang suatu daerah untuk diperhatikan atau disepakati sebagai prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia international, nasional maupun regional yang belum menjadi masalah saat ini namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat atau menjadi potensi daerah yang belum terkelola, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa mendatang. Isu strategis diidentifikasikan dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Berdasarkan lingkupnya, isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Mataram.
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang bersifat aktual, problematik, kekhalayakan dan kelayakan, terdiri dari:
   - RPJPD Kota Mataram 2005-2025
   - RTRW Kota Mataram 2005-2025
   - KLHS RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021

Kriteria isu strategis yang menjadi prioritas penanganan dalam RPJMD, adalah sebagai berikut:

1. Kriteria-1 : memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
2. Kriteria 2 : merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah
3. Kriteria-3 : luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat
4. Kriteria-4 : memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kriteria-5 : kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola
6. Kriteria-6 : prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1. Penelaahan Isu Strategis dari Dinamika Internasional

Penelaahan isu strategis dari dinamika internasional perlu dilakukan untuk dapat melengkapi isu strategis yang mempengaruhi Kota Mataram. Dalam hal ini, Kota Mataram mendapatkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari dua isu internasional yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menjadikan ASEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang memberikan puang terhadap arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil serta aliran modal yang lebih bebas (Kemendag, 2015). Bagi Indonesia, dengan jumlah populasi, luas dan letak geografi serta nilai PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam AEC (ASEAN Economic Community). MEA memiliki empat pilar yang termuat dalam Cetak Biru MEA yang ditetapkan pada Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers (AEM) di Kuala Lumpur, Malaysia bulan Agustus 2006 yaitu:

a. Pasar Tunggal dan Basis Produksi

   Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antarnegara di Asia Tenggara.

b. Kawasan Ekonomi yang Kompetitif

   MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil.

c. Pembangunan Ekonomi yang setara

   Pemerataan pembangunan ekonomi dikembangkan dengan Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki daya saing tinggi serta ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal.

d. Integrasi ke dalam Ekonomi Global

   MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang, yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian,

sisanya berasal dari lima sektor jasa, yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. MEA akan menjadi kesempatan yang baik buat Indonesia serta daerah-daerah produktif karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal itu akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB Indonesia dan PDRB di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Akan tetapi di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini, competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia. Ini, tentu saja, akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Selain itu tantangan utama yang harus dihadapi kesiapan sumber daya manusia. Setiap tahunnya, jumlah kelahiran manusia baru di Indonesia sebanyak 5 juta manusia. Sementara, jumlah siswa SD (Sekolah Dasar) mencapai 30 juta jiwa.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia dan daerah harus menyelesaikan isu-isu yang menjadi penghambat daya saing dalam MEA, yaitu:

a. Ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang
b. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
c. Kualitas dan daya saing produk-produk lokal
d. Ketersediaan modal bagi sektor-sektor ekonomi unggulan
e. Reformasi regulasi dan kebijakan-kebijakan

2. Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG's merupakan agenda pembangunan internasional tahun 2030 yang disahkan pada tanggal 27 September 2015 melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dituangkan dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. SDG's periode 2016-2030 merupakan lanjutan dari komitmen *Millenium Development Goals* (MDG's) dengan target pencapaian yang telah berakhir pada tahun 2015, yaitu: menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan; memberlakuan pendidikan dasar yang universal; mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; memperbaiki kesehatan maternal; memerangi HIV/ AIDS, malaria dan penyakit lainnya; menjamin kesinambungan lingkungan hidup; serta membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Keterkaitan tujuan dan target SDGs 2016-2030 yang disepakati dengan isu strategis di Kota Mataram, sebagaimana berikut:

Tabel. 4.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Tujuan dan Target SDG's
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan
3	Menggalakkan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan semua penduduk di segala usia
4	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7	Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
10	Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
11	Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12	Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
13	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14	Melestarikan sumber daya samudera, laut dan kelautan untuk pembangunan berkelanjutan
15	Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

4.2.2. Penelaahan Isu Strategis dari Kebijakan Pembangunan Nasional.

Sebelum penetapan isu strategis, perlu dilakukan penelaahan terhadap kebijakan pembangunan nasional yang dapat melengkapi isu strategis yang mempengaruhi Kota Mataram, sebagai berikut:

1. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 Nasional yaitu:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut melalui penerapanan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019 tema pembangunan pada wilayan Nusa Tenggara adalah sebagai "pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting*, *Incentive*, *Convetion*, *Exhibition* (MICE); penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, jagung; serta pengembangan industri mangan, dan tembaga."

Isu-isu strategis pembangunan Kota Mataram juga diselaraskan dengan sasaran pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada RPJMN 2015-2019, sebagaimana berikut:

Tabel 4.4
Keselarasan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara dengan Isu Kota Mataram

No	Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	Isu Kota Mataram
1	Pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah	• Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram 0,25%/ tahun dari target 1% per tahun • Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi dan produk unggulan daerah
2	mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah	• Masih tingginya ketimpangan pendapatan antar masyarakat Kota Mataram yang ditandai dengan Indeks Gini di kisaran 0,3-0,4
3	pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang berperan sebagai PKN dan optimalisasi 1 kota sedang sebagai *buffer* urbanisasi	• Masih tingginya luas kawasan permukiman kumuh, dengan luas kawasan kumuh yang mencapai 803,39 Ha • Masih ada RTLH • Masih rendahnya pengguna moda transporrtasi umum • Tidak tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang baik • Penanganan sampah perkotaan yang kurang efektif • Proporsi RTH yang masih rendah

No	Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	Isu Kota Mataram
4	berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	• Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram 0,25%/tahun dari target 1% per tahun • Masih tingginya angka pengangguran • keterbatasan lapangan kerja • belum meratanya tingkat penyebaran tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi • relatif rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja
5	Memperkuat sedikitnya 5 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	-
6	Dikembangkan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara	-
7	Otonomi Daerah	• Masih rendahnya kemandirian daerah • Masih rendahnya proporsi belanja modal terhadap APBD • Lemahnya evaluasi kinerja pelayanan publik
8	Mengurangi Indeks Risiko Bencana	• Rendahnya persentase Kelurahan Tanggap Bencana • Persentase Kelurahan memiliki kelompok tanggap bencana • Tidak tersedianya sistem/mekanisme peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang baik

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Perwujudan komintmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disepakati Negara-negara di dunia sebagai agenda pembangunan global tahun 2030, ditunjukkan dengan ditetapkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diselaraskan dengan TPB. TPB dalam pembangunan nasional bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sasaran nasional yang diselaraskan dengan TPB akan digunakan sebagai pedoman untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional dan Daerah TPB.

Pemerintah Kota Mataram juga berkewajiban untuk melakukan penyelarasan sasaran pembangunan dengan TPB. Penyelarasan Pelaksanaan Pencapaian TPB Global, Nasional dan Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
Keselarasan Tujuan Pembangungan Berkelanjutan, Sasaran Nasional dengan Isu Kota Mataram

No	Tujuan TPB	Sasaran Nasional	Isu Kota Mataram
1	**Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun**	• Menurunkan tingkat kemiskinan • Meningkatkan persentase penduduk peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan • Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar • Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat • Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan • Meningkatnya cakupan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan untuk40% penduduk berpendapatan terbawah • Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah • Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah • Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah • Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah • Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak • Meningkatnya Angka Partisipasi Murni • Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar • Kepemilikan akte lahir untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah • Meningkatnya akses penerangan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah • Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah • Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial • Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial • Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus • Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	• Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram 0,25%/tahun dari target 1% per tahun • Masih rendahnya proporsi peserta jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan • Masih rendahnya penyadang disabilitas dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitas • Masih ada perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan • Masih rendahnya persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan • Masih ada masyarakat miskin yang tidak mengakses alat kontrasepsi • Masih ada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan

No	Tujuan TPB	Sasaran Nasional	Isu Kota Mataram
2	**Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.**	• Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita • Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah bawah 1400 kkal/kapita/hari • Menurunnya prevalensi *stunting* pada anak di bawah dua tahun/baduta • Menurunnya prevalensi *wasting* pada anak balita • Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil • Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif • Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) • Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan	• Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang • Masih ada kasus gizi buruk pada balita
3	**Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.**	• Menurunnya angka kematian ibu • Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan • Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil • Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup • Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi • Menurunnya prevalensi HIV • Menurunnya prevalensi Tuberculosis • Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria • Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta • Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis • Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia =18 tahun • Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi • Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas • Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa • Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti • Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu • Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba • Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas • Menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR) • Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi • Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern • Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun *age specific fertility rate*/ASFR	• Belum meratanya akses dan mutu serta kualitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan • Masih ada perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan/atau tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

No	Tujuan TPB	Sasaran Nasional	Isu Kota Mataram
		• Menurunnya *unmeet need* pelayanan kesehatan • Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
4	**Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.**	• Meningkatnya persentase sekolah berakreditasi minimal B • Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar • Meningkatnya rata-rata lama sekolah • Meningkatnya APK PAUD • Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/sederajat • Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) • Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar yang setara gender • Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/sederajat yang setara gender • .4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender • Meningkatnya angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	• Belum meratanya kualitas pendidikan dan fasilitas/sarana penunjang pendidikan • Belum meratanya kualitas guru • Masih rendahnya proporsi sekolah SD/MI dan SMP/MI berakreditasi minimal B • APK PAUD masih rendah • Masih ada penduduk buta aksara • Masih rendahnya Proporsi guru bersertifikasi • penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan
5	**Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan**	• Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender • Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan • Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif • Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan • Menurunnya ASFR • Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat • Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR • Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif • Menurunnya *unmeet need* • Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern • Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	• Masih ada perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun • Masih ada perempuan yang melahirkan pada usia di bawah 19 tahun • Masih ada kasus KDRT • Masih ada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang tidak terlaporkan
6	**Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.**	• Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak • Meningkatnya kapasitas prasarana air baku • Meningkatnya akses terhadap sanitasi • Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal	• Masih rendahnya persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan • Masih ada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan

No	Tujuan TPB	Sasaran Nasional	Isu Kota Mataram
		• Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/ kota • Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air • Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku • Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah • Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle* • Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) • *Updating* dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatolog • Pembentukan jaringan informasi sumber daya air • Meningkatnya jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki MoU lintas Negara pada tahun 2019 • Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakat (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau • Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air • Meningkatnya kualitas air pada 15 danau • Mengurangi luasan lahan kritis • Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan	• Masih kurangnya upaya pencegahan penurunan kualitas lingkungan hidup
7	**Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua**	• Meningkatnya rasio elektrifikasi • Meningkatnya konsumsi listrik per kapita • Tercapainya jaringan gas 1,1 juta sambungan rumah tangga • Bauran energi terbarukan • Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun)	• Rasio elektrifikasi belum mencapai 100% • Belum ada skema energi terbarukan
8	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua**	• Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun • Pertumbuhan PDB riil per orang • Persentase tenaga kerja formal • Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% • Terciptanya kesempatan kerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja • Menguatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya • Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat	• Masih tingginya angka pengangguran • keterbatasan lapangan kerja • belum meratanya tingkat penyebaran tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi • relatif rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja

No	Tujuan TPB	Sasaran Nasional	Isu Kota Mataram
		• Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB • Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta • Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan	• kurangnya pengembangan potensi pariwisata yang ada • akses layanan keuangan dan modal lebih banyak digunakan untuk tujuan konsumsi
9	**Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi**	• Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km • Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 • Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km • Meningkatnya jumlah bandara menjadi 252 • Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan • Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur • Meningkatnya kontribusi industri manufaktur • Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26%	• Belum maksimalnya fungsi terminal angkutan darat (Mandalika) • Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar untuk investasi
10	**Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.**	• Koefisien Gini • Menurunnya tingkat kemiskinan • Pengentasan jumlah daerah tertinggal • Berkurangnya Desa Tertinggal • Meningkatnya Desa Mandiri • Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal • Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil • Meningkatnya kepesertaan Sistem • Meningkatnya kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran • Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan tenaga migran	• Masih tingginya ketimpangan pendapatan antar masyarakat Kota Mataram yang ditandai dengan Indeks Gini di kisaran 0,3-0,4 • Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram 0,25%/tahun dari target 1% per tahun
11	**Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan**	• Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak • Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman • Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum • Dikembangkannya sistem angkutan rel • Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama • Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) • Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan • Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur • Terwujudnya kota dan kawasan per kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka	• Masih tingginya luas kawasan permukiman kumuh, dengan luas kawasan kumuh yang mencapai 803,39 ha • Masih ada RTLH • Masih rendahnya pengguna moda transporrtasi umum • Tidak tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang baik • Penanganan sampah perkotaan yang kurang efektif • Proprsi RTH masih rendah

No	Tujuan TPB	Sasaran Nasional	Isu Kota Mataram
		• Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% • Meningkatnya *urban resilience* • Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan • Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan • Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana • penyediaan ruang terbuka hijau	
12	**Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan**	• Tersusunnya konsep kebijakan rencana operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya berupa kolaborasi tematik *quick wins program* • Meningkatnya pengelolaan limbah B3 • Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu • Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 • Dikembangkannya produk ramah lingkungan	• Belum ada program quick wins (tematik) dalam produksi dan konsumsi berkelanjutan • Belum ada pengelolaan limbah B3 yang baik • Belum ada pengelolaan sampah terpadu • Belum berjalannnya konsep pengelolaan sampah 3R
13	**Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya**	• Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah • Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	• Rendahnya kesadaran tentang resiko perubahan iklim dan bencana
14	**Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan**	• ketersediaan kebijakan, kerangka hukum, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional • Meningkatnya produksi perikanan tangkap • Bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan • Terkendalinya *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *fishing*	• Belum ada konservasi perairan • Masih rendahnya nilai tambah perikanan tangkap
15	**Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.**	• peningkatan tutupan lahan/hutan • Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi • Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem • Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi • Meningkatnya 10% populasi 25 jenis satwa terancam punah • Meningkatnya persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup • Meningkatnya sistem karantina dan keamanan hayati • Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	• Rendahnya luasan RTH • Rendahnya proporsi tutupan lahan

No	Tujuan TPB	Sasaran Nasional	Isu Kota Mataram
16	**Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua** tingkatan	• terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas. • Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak • Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi • Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin • Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) • Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) • Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) • Meningkatnya penggunaan *E- procurement* terhadap belanja pengadaan • Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik • Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik • Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD • Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan • Meningkatnya Indeks Lembaga Demokrasi • Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil • Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik • Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir • Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran • Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM • Meningkat nya indikator kewajiban mengumum kan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik serta informasi publik • mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi sengketa informasi publik • Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	• Masih tingginya angka kriminalitas • Masih adanya konflik horizontal (antar warga) • Masih besarnya jumlah kasus kejahatan yang tidak terlaporkan • Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif dan Eksekutif • Masih ada anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya belum tercatat • Masih ada anak 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran
17	**Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan**	• Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB • Meningkatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular • Tersedianya jaringan tulang punggung serat optik nasional • 2.3 Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar • Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar • Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet • Menurunnya rata-rata tarif terbobot di negara *Free Trade Agreement* (FTA)	• Masih rendahnya rasio Pajak terhadap PDRB • Kemandirian daerah masih rendah • Masih rendahnya penggunaan jaringan internet dengan bijak • Rendahnya pertumbuhan ekspor • Masih rendahnya kualitas dan kompetensi layanan statistik

No	Tujuan TPB	Sasaran Nasional	Isu Kota Mataram
		• Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas • Tersedianya *dashboard* makroekonomi • Meningkatnya kualitas kerja sama global • Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan • Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU • Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas • Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) statistik yang profesional, integritas, dan amanah 2019 • Meningkatnya kualitas, kuantitas dan penggunaan sarana dan prasarana TIK • Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan	• Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Mengacu pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa "Pelaksanaan Pelayananan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayananan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintahan kabupaten/kota adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Terdapat 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial sebagaimana berikut:

Tabel 4.6
Keselarasan Tujuan Pembangungan Berkelanjutan, Sasaran Nasional dengan Isu Kota Mataram

No	Jenis SPM	Dasar Hukum	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**Bidang Pendidikan**	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	• pendidikan anak usia dini • pendidikan dasar • pendidikan kesetaraan	• standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa • standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Dinas Pendidikan
2	**Bidang Kesehatan**		• pelayanan kesehatan ibu hamil; • pelayanan kesehatan ibu bersalin; • pelayanan kesehatan bayi baru lahir; • pelayanan kesehatan balita; • pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar • pelayanan kesehatan pada usia produktif; • pelayanan kesehatan pada usia lanjut; • pelayanan kesehatan penderita hipertensi; • pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; • pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; • pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan • pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	• standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa • standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya kesehatan • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Dinas Kesehatan, RSUD
3	**Bidang Pekerjaan Umum**		• pemenuhan kebutuhan pokok air minum seharihari • penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	• standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup

No	Jenis SPM	Dasar Hukum	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	**Bidang Perumahan Rakyat**		• penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan • fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	• standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5	**Bidang Sosial**		• rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; • rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; • rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; • rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; • perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	• standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa • standar jumlah dan kualitas personel/ sumber daya manusia • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Dinas Sosial
6	**Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**		• pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; • pelayanan informasi rawan bencana; • pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; • pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan • pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	• standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa • standar jumlah dan kualitas personel/ sumber daya manusia • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Sat Pol PP Bakesbangpol BPBD PMK

Isu terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Mataram dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.7
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Mataram

No	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Isu Kota Mataram
1	**Bidang Pendidikan**	• Pendidikan Anak Usia Dini • Pendidikan Dasar • Pendidikan Kesetaraan	• APK PAUD masih rendah (44,87%) • Masih ada penduduk buta aksara (8,29%) • 27,34% sekolah masih mengalami keterbatasan akses ke fasilitas/sarana penunjang • 49,23% guru belum memiliki sertifikat pendidik • 12,5% guru belum berkualifikasi S1 • 43,43% guru belum bersertifikasi • 49,43% sekolah SD/MI dan SMP/MTs belum berakreditasi minimal B
2	**Bidang Kesehatan**	• Pelayanan kesehatan ibu hamil; • Pelayanan kesehatan ibu bersalin; • Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; • Pelayanan kesehatan balita; • Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar • Pelayanan kesehatan pada usia produktif; • Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; • Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; • Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; • Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; • Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan • Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	• 28,40% penduduk belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan • Tingkat kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih (PHBS) masih 30% • 2,26% perempuan masih melahirkan tidak di fasilitas kesehatan • Angka kematian ibu masih tinggi pada angka 130 per 100.000 kelahiran hidup • Prevelensi gizi buruk masih tinggi di angka 7,6% • Penanganan komplikasi neonatal masih rendah di angka 54,60% • Masih terdapat 32,43% penduduk usia lanjut (+60) yang belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan memadai • Masih tingginya tingkat kejadian (incident rate) DBD di angka 205,74 per 100.000 penduduk • Tingginya kasus HIV (55) dan AIDS (54) • Masih ada kasus penyakit menular (kusta : 12 kasus dan TBC 436 kasus)
3	**Bidang Pekerjaan Umum**	• Pemenuhan kebutuhan pokok air minum seharihari • Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	• Masih rendahnya persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan • Masih ada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan • Sumber mata air bergantung pada mata air baku daerah lain • Keterbatasan lahan untuk penyediaan tempat penampungan limbah • Belum optimalnya pengelolaan pengolahan limbah komunal oleh KSM • Belum adanya kelembagaan khusus yang menangani pengelolaan limbah • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah domestik rumah tangga

No	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Isu Kota Mataram
4	**Bidang Perumahan Rakyat**	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; • Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	• Masih tingginya luas kawasan permukiman kumuh, dengan luas kawasan kumuh yang mencapai 803,39 ha (303 ha data pusat) • Masih ada RTLH (325 unit) • Permasalahan kepemilikan lahan terhadap RTLH yang akan diintervensi • Masyarakat belum familiar dengan desain RISHA
5	**Bidang Sosial**	• Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; • rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; • Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; • Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; • Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	• masih rendahnya penanganan terhadap anak-anak terlantar (5,28%) • Masih belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap para penyandang PMKS (35%) • Masih belum optimalnya penanganan terhadap fakir miskin dan PMKS lainnya (35%)
6	**Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**	• Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; • Pelayanan informasi rawan bencana; • Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; • Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan • Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	• Masih tingginya angka kriminalitas • Masih adanya konflik horizontal (antar warga) • Masih besarnya jumlah kasus kejahatan yang tidak terlaporkan • Rendahnya persentase Kelurahan Tanggap Bencana • Rendahnya Persentase Kelurahan memiliki kelompok tanggap bencana • Tidak tersedianya sistem/mekanisme peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang baik

4.2.3. Penelaahan Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Penelaahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

- **RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018**

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 adalah:

"Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera".

Visi pembangunan tersebut diwujudkan melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1) Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter
2) Mengembangkan budaya dan kearifan lokal
3) Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan
4) Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing
5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah
6) Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang
7) Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penelaahan terhadap isu pembangunan Provinsi NTB tahun 2013-2018 yang dapat melengkapi isu strategis yang mempengaruhi Kota Mataram, sebagaimana berikut:

Tabel 4.8
Keterkaitan Isu Strategis Provinsi NTB dan Isu Kota Mataram

No	Isu Strategis Provinsi NTB	Isu Kota Mataram
1	Pudarnya Jati Diri Daerah	• Masih adanya konflik horizontal (antar warga)
2	Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum	• Masih rendahnya kualitas dan kompetensi layanan statistik • Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan • Lemahnya evaluasi kinerja pelayanan public • Kemandirian daerah masih rendah
3	Partisipasi Politik dan Kamtibmas	• Masih tingginya angka kriminalitas • Masih adanya konflik horizontal (antar warga)
4	Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Masalah Kesos	• Belum meratanya kualitas pendidikan dan fasilitas/sarana penunjang pendidikan • Belum meratanya kualitas guru • Masih rendahnya proporsi sekolah SD/MI dan SMP/MI berakreditasi minimal B • APK PAUD masih rendah • Masih ada penduduk buta aksara • Masih rendahnya Proporsi guru bersertifikasi • Belum meratanya akses dan mutu serta kualitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan
5	Daya Saing Produk Lokal dan Pengangguran	• Lemahnya daya saing produk-produk lokal dari sisi akses pasar baik lokal, regional maupun internasional • Angka Pengangguran masih tinggi
6	Kerjasama dan konektivitas Antar Wilayah	• Belum maksimalnya fungsi terminal angkutan darat (Mandalika) • Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar untuk investasi • Rendahnya penggunaan moda transportasi umum

No	Isu Strategis Provinsi NTB	Isu Kota Mataram
7	Program Iklim dan Bencana Alam	• Rendahnya kesadaran tentang resiko perubahan iklim dan bencana • Rendahnya persentase Kelurahan Tanggap Bencana • Persentase Kelurahan memiliki kelompok tanggap bencana • Tidak tersedianya sistem/mekanisme peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang baik

- **RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023**

  RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap ke-empat dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Visi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah

  "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang",

  dengan misi sebagai berikut :

  1. Mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender yang proporsional;
  2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi;
  3. Mempercepat peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif;
  4. Mempercepat transformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani;
  5. Mempercepat pengelolaan sumberdaya dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan;
  6. Mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sector pariwisata, industrial sector unggulan, serta Kawasan strategis;
  7. Menegakkan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan.

  Penelaahan terhadap isu pembangunan Provinsi NTB tahun 2013-2018 yang dapat melengkapi isu strategis yang mempengaruhi Kota Mataram, sebagaimana berikut:

Tabel 4.9
Keterkaitan Isu Strategis Provinsi NTB dan Isu Kota Mataram

No	Isu Strategis Provinsi NTB	Keterkaitan dengan Isu Kota Mataram
1	**NTB Daerah Rawan Bencana** a. Belum maksimalnya upaya mitigasi bencana b. Terbatasnya sumberdaya untuk Keadaan Darurat Bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	• Rendahnya kesadaran tentang resiko perubahan iklim dan bencana • Rendahnya persentase Kelurahan Tanggap Bencana • Persentase Kelurahan memiliki kelompok tanggap bencana • Tidak tersedianya sistem/mekanisme peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang baik

No	Isu Strategis Provinsi NTB	Keterkaitan dengan Isu Kota Mataram
2	**Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan Belum Optimal** a. Rata-rata lama sekolah masih rendah b. Masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi c. Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri belum sesuai d. Relatif rendahnya nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukan nilai UKG, mutu lulusan melalui nilai UN e. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah f. Cukup tingginya angka buta huruf dewasa g. Akses Pendidikan yang belum merata h. Fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah	• Belum meratanya kualitas pendidikan dan fasilitas/sarana penunjang pendidikan • Belum meratanya kualitas guru • Masih rendahnya proporsi sekolah SD/MI dan SMP/ MI berakreditasi minimal B • APK PAUD masih rendah • Masih ada penduduk buta aksara • Masih rendahnya Proporsi guru bersertifikasi
3	**Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah** a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi c. Tingginya prevalensi kurang gizi dan *stunting* d. Belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar e. Belum meratanya SDM kesehatan antar daerah f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal h. Masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan <21 tahun	• Belum meratanya akses dan mutu serta kualitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan • Masih ada kasus gizi buruk pada balita • Tingkat kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih (PHBS) masih rendah
4	**Tingkat Kemiskinan masih di atas rata-rata nasional** a. Kedalaman kemiskinan masih relatif tinggi b. Angka Setengah Pengangguran yang cukup tinggi c. Koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan belum optimal d. Kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja memiliki pendidikan, keterampilan, serta sikap mental relatif rendah e. Belum meratanya masyarakat miskin mendapatkan jaminan sosial f. Infrastruktur dasar masih terbatas (akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan rumah layak huni) g. Masih ada desa yang masuk dalam kategori rawan pangan	• belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) • masih tingginya kesenjangan ekonomi • lemahnya basis data dan informasi kemiskinan yang akurat sehingga bantuan tidak merata dan tidak tepat sasaran • Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram yang melambat
5	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal** a. Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil b. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	• Masih rendahnya kualitas dan kompetensi layanan statistik

No	Isu Strategis Provinsi NTB	Keterkaitan dengan Isu Kota Mataram
	c. Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal d. Masih relatif rendahnya indeks kepuasan masyarakat e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik f. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal g. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan h. Belum optimalnya proses fasilitasi pengurusan perizinan	• Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan • Lemahnya evaluasi kinerja pelayanan publik • Kemandirian daerah masih rendah
6	**Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal** a. Pembangunan manusia berbasis gender masih di bawah nilai capaian nasional b. Peran serta perempuan dalam politik dan ekonomi masih relatif rendah **c.** Kekerasan kepada perempuan dan anak masih cukup banyak	• masih ada kejadian KDRT • Masih ada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang tidak terlaporkan • Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif dan Eksekutif • Masih ada pernikahan di bawah umur • belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan perempuan dalam bentuk susunan organisasi
7	**Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan** a. Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal b. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan c. Masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor d. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata e. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat f. Masih minimnya akses masyarakat terhadap produk dan pendidikan keuangan g. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah h. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang i. Terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan j. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal k. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal	• Angka Pengangguran masih tinggi • masih rendahnya daya saing UMKM terhadap ritel modern • Rendahnya pertumbuhan ekspor • Masih rendahnya nilai tambah perikanan tangkap
8	**Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal** a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal b. Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal c. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal	• Lemahnya daya saing produk-produk lokal dari sisi akses pasar baik lokal, regional maupun internasional • kebijakan ekonomi belum mendorong produktifitas ekonomi kecil, baru sebatas bantuan yang sering tidak tepat sasaran • Ketersediaan modal bagi sektor-sektor ekonomi unggulan

No	Isu Strategis Provinsi NTB	Keterkaitan dengan Isu Kota Mataram
	d. Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang e. Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal f. Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal	
9	**Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal** a. Indeks Demokrasi masih rendah b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial c. Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplemetasikan dalam kehidupan secara optimal d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi	• Masih tingginya angka kriminalitas • Masih adanya konflik horizontal (antar warga)
10	**Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal** a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun b. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal c. Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut d. Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah	• Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Masih ada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan" • Belum ada pengelolaan limbah B3 yang baik • TPA masih bergantung pada daerah lain • kurang optmimalnya kinerja pengelolaan persampahan lingkungan • Belum optimalnya fungsi Bank Sampah
11	**Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal** a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal b. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai c. Aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata d. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata e. Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal f. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata g. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi	• Belum maksimalnya fungsi terminal angkutan darat (Mandalika) • Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar untuk investasi • Rendahnya penggunaan moda transportasi umum • penyalahgunaan bahu dan badan jalan untuk parkir liar dan PKL • Penyalahgunaan trotoar untuk parkir liar dan PKL • tidak ada transportasi massal • Masih tingginya luas kawasan permukiman kumuh • Masih ada RTLH

2. Penelaahan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 ditetapkan Visi Pembangunan Kota Mataram 2005-2025 adalah:

"Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju, dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025".

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi pembangunan sebagai berikut:

1) Mewujudkan Masyarakat yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral dan Etika.
2) Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum.
3) Mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi dengan IMTAQ.
4) Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dalam menghadapi Era Globalisasi.
5) Mewujudkan Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik.
6) Mewujudkan Pengelolaan Potensi dan Sumber Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.
7) Mewujudkan Pengelolaan Potensi SDA Berdasarkan Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Arah kebijakan RPJPD Kota Mataram tahun 2005-2025 terbagi dalam 4 (empat) tahun periodisasi tahapan pembangunan. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 berada dalam Tahapan pembangunan lima tahun Ketiga (2015-2019).

Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram 2016-2021, penelaahan terhadap kebijakan RPJPD Kota Mataram tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam penetapan isu strategis yang mempengaruhi Kota Mataram, sebagaimana berikut:

Tabel 4.10

Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD Kota Mataram dan Isu RPJMD Kota Mataram

No	Sasaran Pokok dalam RPJPD	Isu dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2021
1	Terwujudnya karakter masyarakat kota Mataram yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan pancasila dan nilai-nilai/norma-norma yang berlaku di masyarakat	Masyarakat yang beriman dan berbudaya
2	Mantapnya budaya lokal yang tercermin dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya guna menguatnya jati diri	
3	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat	Pengembangan Ekonomi Lokal

No	Sasaran Pokok dalam RPJPD	Isu dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2021
4	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam seluruh bidang sosial budaya	Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan Negara	Masyarakat yang beriman dan berbudaya
6	Terciptanya sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan	Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Kemiskinan
7	Tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai	
8	Meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal	
9	Membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan	
10	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan Iptek	
11	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
12	Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa	Pengembangan Ekonomi Lokal
13	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan disegala bidang	Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
14	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	Pengembangan Ekonomi Lokal
15	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif	
16	Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain	Infrastruktur Perkotaan berbasis Tata Ruang
17	Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah	Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum
18	Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi	
19	Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa	
20	Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat	
21	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik	
22	Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya	
23	Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat	
24	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan	

No	Sasaran Pokok dalam RPJPD	Isu dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2021
25	Tersedianya sistem informasi aset daerah secara *actual* dan *online*	
26	Berkembangnya pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan	Pengembangan Ekonomi Lokal
27	Meningkatnya akses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan	Infrastruktur Perkotaan berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 berada dalam pembangunan lima tahunan ketiga. Adapun tujuannya adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang diikuti dengan kesinambungan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan:

- Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata pada seluruh wilayah,
- Terciptanya suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman;
- Tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah,
- Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan;
- Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern;
- Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;
- Terwujudnya penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna
- Tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lahan dan
- Tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan;
- terwujudnya kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai
- Meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal;
- Membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;

- Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek;
- Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa;
- Meningkatnya kesetaraan gender;
- Meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan efektif) serta profesional (*good governance*) yang mampu mendukung pembangunan.
- Terpadunya dukungan sumber daya manusia yang handal, infrastruktur yang modern (dan moda transportasi yang memadai), iklim usaha yang kondusif, serta kelembagaan ekonomi yang efisien, produktif, pemanfaatan dan penerapan teknologi oleh seluruh pelaku ekonomi.
- Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi;
- Meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat,
- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

3. Penelaahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Telaahan terhadap RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 meliputi telaahan Rencana Struktur Ruang Wilayah, Rencana Pola Ruang dan Kawasan Strategis, secara rinci dijabarkan dalam Tabel 4.11.

Rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota.

Rencana pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang bertujuan untuk mendistribusikan peruntukan ruang dalam wilayah Kota, meliputi encana pengelolaan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya.

Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

Tabel 4.11
Penelaahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	**STRUKTUR RUANG WILAYAH**			
1	**Sistem Perkotaan**	Sistem Pusat Kegiatan	Pusat Pelayanan nasional di Kota	Kota dengan fungsi sebagai PKN
		Rencana pusat-pusat pelayanan wilayah Kota	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	• Pusat Pelayanan Ampenan • Pusat Pelayanan Mataram • Pusat Pelayanan Cakranegara
			Subpusat Pelayan Kota (SPPK)	• SPPK I (Kelurahan Rembiga, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Kebon Sari dan Kelurahan Monjok) • SPPK II (Kelurahan Sayang-Sayang, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Cakranegara Utara dan Kelurahan Selagalas) • SPPK III (Kelurahan Turida dan sebagian Kelurahan Mandalika) • SPPK IV (Kelurahan Dasan Cermen dan Kelurahan Abian Tubuh Baru) • SPPK V (Kelurahan Tanjung Karang Permai dan Kelurahan Kekalik Jaya) • SPPK VI (Kelurahan Jempong Baru dan Kelurahan Pagutan)
			Pusat Lingkungan (PL)	tersebar di setiap unit lingkungan
2	**Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi**	Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat	Sistem Jaringan Jalan di Kota	• pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer di bawah kewenangan nasional • pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer (JKP-1) di bawah kewenangan nasional • pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primerdua (JKP-2) di bawah kewenangan provinsi • pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3) di bawah kewenangan provinsi • pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer • pengembangan sistem jaringan jalan kota pada jalan-jalan yang ditetapkan dengan fungsi sekunder dibawah kewenanan Kota • Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	• Peningkatan Pelayanan Terminal Penumpang Regional Tipe A Mandalika Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya • Peningkatan Pelayanan Terminal Penumpang Reional Tipe C Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela • Pengembangan tempat pemberhentian (shelter) pada pusat kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum • Pengembangan angkutan dalam kota dari kawasan permukiman menuju tempat pemberhentian (shelter) • Pengembangan transportasi massal publik atau MRT dalam bentuk BRT, LRT dan/atau HRT di dalam Kota dan lintas wilayah
			Pengembangan Rute/ Trayek Moda Angkutan	• mempertahankan trayek AKAP dan AKDP dengan moda angkutan yang sudah beroperasi saat ini • mengembangkan rute/trayek dan/atau mengatur jadwal untuk angkutan orang dan barang dalam kota dan ke luar kota • mengalihkan rute angkutan transportasi cidomo ke jalan-jalan lokal dan terintegrasi dengan sistem jaringan jalan di Kawasan Mataram Metro/ Mataram Raya • mengembangkan rute angkutan bawah tanah yang terhubung dengan pusat kegiatan perkantoran dan pelayanan umum, serta perdagangan dan jasa
		Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan wisata di Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela	• Mapak - Ampenan - Senggigi - Gili Tramena (PP); • Mapak - Lembar - Sekotong (PP); • Mapak - Sekotong - Benoa (PP); • Mapak - Ampenan - Tanjung Sire (PP); dan • Mapak - Pulau Bali
			Pembangunan dan pengembangan pelabuhan wisata di Kawasan Waterfront City	• Ampenan - Senggigi - Gili Tramena (PP); • Ampenan - Telong-elong (PP); • Ampenan - Tanjung Sire (PP); dan • Ampenan - Pulau Bali (PP).
			Peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana dasar pelabuhan laut	seperti pembangunan dermaga sandar, fasilitas bongkar muat barang, pergudangan tertutup dan terbuka, serta sarana prasarana penunjang lainnya

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	Pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan	Pengembangan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya	a. meningkatkan daya dan jaringan listrik dari sumber pembangkit listrik	di kawasan pengembangan perumahan baru, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan serta kawasan peribadatan
			b. menerapkan teknologi tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan listrik	
			c. meningkatkan kualitas pelayanan PLTD Ampenan dalam menyalurkan tenaga listrik antar sistem	di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela
			d. mengembangkan PLTGU beserta sarana dan prasarana pendukungnya	di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela
			e. mengembangkan sumber-sumber energy baru	• mengembangkan PLTMH pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi sumber daya air yang besar; • mengembangkan PLTGL lintas wilayah pada pesisir pantai di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela; • mengembangkan PLTS di seluruh wilayah Kota melalui penyediaan jaringan listrik solar panel; • mengembangkan teknologi biogas di seluruh Kota; dan • lokasi pengembangan energi baru terbarukan ditentukan berdasarkan studi kelayakan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota
		Rencana pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik	a. Pengembangan SUTT	melewati Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
			b. mengembangkan Gardu Induk skala Kota	di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram,serta Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya;
			c. meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik dan gardu listrik pada kawasan pengembangan baru	

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Rencana pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	a. mengembangkan sistem jaringan listrik dari SUTT dan SUTM menjadi jaringan listrikbawah tanah	
			b. meningkatkan daya dan jaringan listrik dari sumber pembangkit listrik	di kawasan pengembangan perumahan baru, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan
		Rencana pengembangan bahan bakar minyak dan gas	a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan depo bahan bakar minyak dan gas	di seluruh Kota;
			b. merelokasi Terminal Bahan Bakar Minyak	di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela ke luar wilayah Kota
		Pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya		menerapkan teknologi ramah ingkungan.
4	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	Rencana Pengembangan Jaringan Tetap	a. meningkatkan kapasitas terpasang dan jaringan sambungan telepon dari STO ke pelanggan	
			b. peningkatan sambungan telepon umum	kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan kawasan sarana pelayanan umum
			c. peningkatan sambungan telepon rumah	kawasan pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan penduduk yang mempertimbangkan keamanan dan estetika
			d. pemasangan jaringan kabel telepon di bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur Kota lainnya.	

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Rencana Pengembangan Jaringan Bergerak	a. pengaturan sebaran menara telekomunikasi dan BTS terpadu secara kolektif antar operator yang lokasi pengembangannya ditentukan berdasarkan studi kelayakan;	
			b. pengembangan teknologi telematika berbasis teknologi modern di seluruh wilayah Kota;	
			c. peningkatan sistem informasi pembangunan Kota berbasis teknologi internet;	
			d. pengembangan jaringan fiber optik yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur Kota lainnya;	
			e. pengembangan area hotspot pada fasilitasfasilitas umum	
5	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air	Konservasi Sumber Daya Air	a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air; b. pengelolaan kualitas air; c. pengendalian pencemaran air.	
		Pendayagunaan Sumberdaya Air	a. penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan pengembangan air baku	• pemantapan kerjasama terpadu penyediaan air baku antarwilayah melalui SPAM Menang - Mataram; • pemantapan air permukaan meliputi pengembangan kolam retensi untuk mendukung ketersediaan air baku; • pengaturan pemanfaatan air tanah pada wilayah Kota secara berkelanjutan.
			b. Pengembangan sistem jaringan irigasi,	• pelayanan irigasi pada KP2B yang ditetapkan; • pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Pengendalian Daya Rusak Air	a. pengembangan ruang terbuka biru sebagai sistem pengendalian banjir	• normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor Kota; • pengembangan drainase sistem polder dalam bentuk kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang; • membatasi kegiatan fisik dan/atau non fisik di sepanjang sempadan sungai dari hulu hingga hilir wilayah sungai; dan • pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumberdaya air.
			b. pengembangan sistem pengamanan pantai	• pengembangan teknologi pemecah gelombang untuk mengurangi pengaruh energi gelombang dan • abrasi di sepanjang pantai; • pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di pesisir pantai
6	**Pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum kota**	Pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota	a. penambahan jaringan prasarana perpipaan;	
			b. pembuatan sumur dan/atau pompa untuk kegiatan non permukiman yang belum terlayani oleh prasarana perpipaan;	
			c. pencegahan pengambilan air tanah secara berlebihan serta pengaturan pemanfaatan air sungai sebagai salah satu sumber air minum;	
			d. penyediaan air baku yang berasal dari air tanah dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.	

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	**Pengembangan sistem pengelolaan air limbah**	Sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota	a. mendayagunakan dan memelihara IPAL Meninting untuk melayani seluruh wilayah Kota;	
			b. mengembangkan IPAL untuk kegiatan industri	di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya dan lokasi industri yang menghasilkan limbah cair;
			c. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah skala lingkungan secara komunal melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat diseluruh Kota;	
			d. memelihara saluran pembuangan air limbah dari sistem pengelolaan air limbah secara komunal sebelum dialirkan ke IPAL Meninting;	
			e. penanganan air limbah secara ketat pada lingkup kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa dan kesehatan berupa penyediaan instalasi pengolahan air limbah pada masing-masing kawasan.	
		Sistem pembuangan air limbah setempat secara individual dan komunal	a. mengembangkan jaringan air limbah komunal setempat yang dikelola oleh masyarakat dan/atau kerjasama dengan pihak lain;	

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			b. mengembangkan tangki septik dan saluran limbah secara kolektif	pada kawasan permukiman/perumahan berkepadatan tinggi, kawasan sarana pelayanan umum serta perdagangan dan jasa;
			c. penyediaan tangki septik secara individu pada kawasan permukiman/ perumahan berkepadatan sedang dan rendah.	
7	Pengembangan sistem jaringan persampahan	Sistem jaringan persampahan	a. Peningkatan kualitas pelayanan unit TPS yang sudah ada	di Lingkungan Kebon Roek Kelurahan Dayan Peken, Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Lingkungan Bertais Kelurahan Bertais, dan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas;
			b. pengembangan bank sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu berbasis teknologi ramah lingkungan	di Lingkungan Kebon Talo Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan;
			c. pemrosesan akhir sampah melalui TPA lintas Kabupaten/ Kota	di Kebon Kongok Kabupaten Lombok Barat
8	Pengembangan sistem jaringan drainase kota	Sistem jaringan drainase kota beserta bangunan pelengkapnya	a. Sistem jaringan drainase primer yang terintegrasi dengan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;	
			b. Sistem jaringan drainase sekunder dikembangkan pada saluran tepi jalanjalan utama;	
			c. Sistem jaringan drainase tersier berupa saluran tepi jalan dan/atau tengah jalan	di dalam kawasan permukiman yang terhubung dengan sistem jaringan drainase sekunder.

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Upaya pengendalian banjir dan genangan	a. pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah dari hulu-hilir;	di bawah koordinasi BWS untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir di Kota
			b. normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan	dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/saluran, pelebaran sungai/ saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan sungai;
			c. membangun tanggul-tanggul di beberapa sungai yang dekat dengan perumahan penduduk sesuai kondisi setempat;	
			d. membatasi kegiatan budidaya terbangun pada hulu, tengah dan hilir sungai secara ketat;	
			e. menyediakan kolam-kolam retensi, lubang resapan biopori dan RTH	pada kawasan kawasan rawan banjir
9	Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki	Rencana jaringan jalan pejalan kaki di sisi jalan		
		Rencana jaringan jalan pejalan kaki di sisi badan air		
		Rencana jalur sepeda		
10	Rencana jalur evakuasi bencana	Rencana jalur evakuasi bencana	a. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana banjir	di Jalan Saleh Sungkar, Jalan Niaga, Jalan Energi, Jalan Yos Sudarso, Jalan Langko, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Adi Sucipto, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Brawijaya, Jalan Gora II, Jalan AA. Gede Ngurah, Jalan Prabu Rangkasari, Jalan TGH. Lopan, Jalan TGH. Saleh Hambali, Jalan Sultan Salahudin, Jalan Sultan Kaharudin, jalan baru penghubung Jalan Bung Hatta - Gunungsari, jalan baru penghubung Jalan Dakota - Sesela, jalan baru di Sungai Meninting;

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			b. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai yang mengarah ke timur	melalui Jalan Pabean, Jalan Adi Sucipto, Jalan Langko, Jalan Arya Banjar Getas, Jalan Sultan Salahudin, Jalan Sultan Kaharudin, Jalan Dr. Sujono, Jalan TGH. Ali Batu, Jalan Selaparang, Jalan TGH. Faesal dan jalan di pesisir pantai;
			c. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gempa bumi	pada setiap ruas jalan di wilayah Kota.
B.	**RENCANA POLA RUANG**			
1	Pengembangan Kawasan Lindung	a. Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan sempadan pantai ditetapkan paling rendah 100 (seratus) meter dihitung dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat secara proporsional sesuai bentuk, letak dan kondisi fisik pantai di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela	a. peningkatan keanekaragaman jenis tanaman keras sesuai dengan morfologi pesisir; b. pengaturan ruang di kawasan sempadan pantai sebagai area wisata alam dan rekreasi publik tanpa merubah fungsi ekologis kawasan; c. pengaturan penempatan bangunan bangunan perlindungan terhadap bencana gempa bumi dan/atau gelombang pasang/tsunami; dan d. pengembangan untuk selain kegiatan wisata dan rekreasi publik ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan.
			Kawasan sempadan sungai, dilakukan pada Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Brenyok dengan ketentuan penetapan garis sempadan sungai paling rendah 3 (tiga) meter pada sungai bertanggul dan paling rendah 10 (sepuluh) meter pada sungai tidak bertanggul.	a. pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan sungai yang telah dikuasai pemerintah; dan b. kawasan sempadan sungai yang sudah dikuasai pemerintah tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bangunannya dapat dibongkar.
		b. Kawasan Lindung Geologi	sempadanmata air/*lingkok* sebagai perlindungan terhadap air tanah dilakukan di seluruh wilayah Kota	a. penetapan pengaman mata air paling sedikit 200 meter dari tengah mata air; b. pengawasan, pengendalian dan perlindungan mata air dari kegiatan yang merusak fungsi alami mata air; c. penyediaan RTH di sekitar mata air sebagai area resapan dan penyangga.

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		c. Kawasan RTH	RTH Publik, dikontribusi melalui: • hutan kota	Kecamatan Ampenan : Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Penjarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Mataram: Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia Kecamatan Selaparang: Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Rembiga Kecamatan Cakranegara: Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Mayura, Kelurahan Sapta Marga dan Kelurahan Sayang-Sayang KecamatanSandubaya: Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Bertais, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Turida
			• taman-taman/lapangan kota hingga taman/ lapangan lingkungan	di seluruh Kota kecuali di Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Punia, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, dan Kelurahan Bertais;
			• sabuk hijau	diarahkan di kawasan perbatasan Kota
			• taman jalan	berupa jalur hijau jalan pada jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			• pemakaman, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, sabuk hijau, kawasan penyangga	pada kawasan peruntukan industri sebagai RTH dengan fungsi khusus
			RTH Privat, dapat dikontribusi melalui taman pekarangan, taman atap dan/atau taman/hutan vertikal pada kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan serta kawasan peribadatan	a. memanfaatkan RTH Kota sebagai area resapan air; b. penyediaan atribut Kota Hijau pada taman-taman kota; c. pemilihan jenis vegetasi sesuai dengan fungsi dan jenis RTH yang dikembangkan; d. mengembangkan RTH pada kawasan rawan ancaman bencana banjir; e. mengembangkan RTH pada kawasan perbatasan Kota yang berfungsi sebagai sabuk hijau; dan f. mengembangkan jaringan RTH yang terintegrasi dengan RTNH, jalur sepeda dan jaringan jalan pejalan kaki.
		d. Kawasan Cagar Budaya	a. kawasan Taman Mayura di Kelurahan Mayura; b. kawasan Pura Meru di Kelurahan Cakranegara Timur ; c. kawasan Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya; d. kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, dan Kelurahan Taman Sari; e. kawasan Makam Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang f. kawasan Makam Bintaro di Kelurahan Bintaro	a. pendataan potensi pusaka Kota; b. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya yang mengalami kerusakan; c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung secara terpadu di sekitar kawasan cagar budaya.

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		g. Kawasan Rawan Ancaman Bencana	a. kawasan rawan banjir; mencakup kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus. b. kawasan rawan gelombang pasang/ tsunami dan abrasi pantai mencakup kawasan di sepanjang wilayah pesisir Kota; c. kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah Kota	a. penyuluhan kepada masyarakat mengenai adaptasi dan mitigasi bencana; b. pengembangan organisasi masyarakat yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana; c. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat merusak lingkungan; d. pengendalian pada kawasan rawan bencana; dan e. pembentukan jalur-jalur evakuasi serta penetapan kawasan-kawasan darurat sebagai tempat mengungsi korban.
2	Kawasan Budidaya	a. Kawasan Perumahan	a. pengembangan perumahan berkepadatan tinggi	dengan arahan penyebaran yaitu: • Kecamatan Ampenan : Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari • Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya • Kecamatan Mataram: Kelurahan Mataram Timur,Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pejanggik, dan Kelurahan Punia • Kecamatan Selaparang: Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok,Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Rembiga • Kecamatan Cakranegara: Kelurahan Cakranegara Barat dan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru • Kecamatan Sandubaya: Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, dan Kelurahan Turida
			b. pengembangan perumahan berkepadatan sedang dan perumahan berkepadatan rendah	dengan arahan penyebaran pada kawasan pinggiran kota dan kawasan pengembangan baru selain di kelurahan untuk pengembangan perumahan berkepdatan tinggi

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			c. pengembangan Kasiba dan Lisiba pada kawasan yang belum terbangun beserta prasarana pendukungnya	Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
			d. kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum yang ada	di kawasan perumahan dibatasi hingga skala pelayanan kelurahan
			e. merelokasi dan/atau penataan kembali permukiman nelayan	Kecamatan Ampenan: Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar dan Kelurahan Ampenan Selatan; Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru
		b. Kawasan Perdagangan dan Jasa	dikembangkan untuk melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala internasional, nasional, regional dan lokal bagi masyarakat	a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok di Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya; b. penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan perdagangan dan jasa; c. pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang; d. pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri di sekitar Kota; e. penataan kawasan bagi kegiatan sektor informal pada areal taman dan Makam f. Loang Baloq, areal Lapangan Malomba, areal Taman Kota Udayana, areal Taman Kota Selagalas, areal GOR Turida, Jalan Pabean, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Airlangga, Jalan Pemuda, Jalan Panji Tilar Negara, Jalan Bung Karno, Jalan Pejanggik, Jalan Selaparang, Jalan Jayengrana, dan pada areal lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
		c. Kawasan Perkantoran	Dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta	a. Kawasan perkantoran pemerintah dengan arahan penyebaran: • Kecamatan Ampenan: Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Banjar, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Taman Sari • Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Kekalik Jaya dan Kelurahan Tanjung Karang • Kecamatan Mataram: Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				• Kecamatan Selaparang: Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, dan Kelurahan Rembiga • Kecamatan Cakranegara: Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Sayang Sayang • Kecamatan Sandubaya: Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, dan Kelurahan Turida b. Kawasan perkantoran swasta dikembangkan pada kawasan perkantoran pemerintah serta kawasan perdagangan dan jasa
		d. Kawasan Peruntukan Industri	dikembangkan untuk memenuhi kebutuhanruang bagi kegiatan industri non polutan.	a. Kawasan peruntukan industri dikembangkan di: • Kecamatan Ampenan: Kelurahan Ampenan Utara • Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Tanjung Karang Permai • Kecamatan Selaparang: Kelurahan Monjok • Kecamatan Mataram: Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan • Kecamatan Cakranegara: Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, dan Kelurahan Sayang Sayang • Kecamatan Sandubaya: Kelurahan Babakan,Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais dan Kelurahan Turida b. Kawasan peruntukan industri rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kota c. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui: • pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan kemampuan produksi lokal, tenaga kerja lokal dan modal; • pembuatan peta lokasi potensi industri, pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, serta promosi investasi bagi pengembangan industri dan penanggulangan pencemaran industri. • pengembangan infrastruktur penunjang; industri yang bergerak di penyediaan • infrastruktur/utilitas dasar wajib memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan dan lokasinya ditetapkan setelah dilakukan studi kelayakan.

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		e. Kawasan Pariwisata	dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik internasional, nasional, regional dan lokal	dilakukan melalui: a. penataan destinasi pariwisata di Kota; b. mempertahankan budaya lokal dan bangunan bersejarah yang ada untuk mendukung pengembangan pariwisata budaya dan religi sesuai dengan visi Kota; c. pengembangan objek dan atraksi pariwisata baru; d. pemasaran dan promosi pariwisata di Kota melalui sistem informasi pariwisata, penyediaan paket-paket wisata, penyusun kalender pariwisata, pameran, pentas seni, festival budaya, serta acara kepariwisataan lainnya; e. pembangunan infrastuktur pendukung untuk mempermudah jangkauan terhadap destinasi pariwisata; f. menata kegiatan pendukung di Jalan Udayana agar ekosistem lingkungan dapat dipertahankan sesuai fungsi RTH.
			a. Pariwisata budaya	dikembangkan pada kawasan cagar budaya
			b. Pariwisata Buatan	a. wisata dengan konsep MICE berbasis lingkungan dikembangkan pada kawasan eks Bandar Udara Selaparang Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; b. wisata belanja dan pusat kerajinan dikembangkan pada pusat perdagangan dan jasa di Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram; Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara; c. wisata rekreasi dikembangkan pada tamantaman di seluruh Kota; dan d. wisata kuliner dikembangkan di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.
		f. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana	dikembangkan untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/ tsunami dan abrasi pantai, serta bencana gempa bumi	a. Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana dilakukan melalui pemanfaatan ruang-ruang terbuka, bangunan perkantoran dan bangunan pendidikan, bangunan kesehatan dan bangunan peribadatanyang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana serta memungkinkan untuk menampung korban bencana. b. Kawasan ruang evakuasi bencana terintegrasi dengan jalur-jalur evakuasi bencana menurut jenis bencananya

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		g. Kawasan Pendidikan	Kawasan Pendidikan dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	Kawasan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dikembangkan di seluruh wilayah Kota Kawasan pendidikan tinggi dikembangkan di Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram; Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, dan Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cilinaya dan Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya.
		h. Kawasan Kesehatan	dikembangkan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kota dan/atau Provinsi;	di Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Punia Kecamatan Mataram; Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya
		i. Kawasan Peribadatan	dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan	dilakukan di seluruh wilayah Kota dengan pusat pengembangan berada pada: a. Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) di Kelurahan Gomong dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara; b. Gereja di Kelurahan Banjar dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Barat dan Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram; dan Kelurahan Mayura dan Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara; c. Pura di Kelurahan Punia dan Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram; Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur dan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara; d. Vihara di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.
		j. Kawasan Pertahanan Negara	dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan bidang pertahanan negara;	dikembangkan di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan, Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram, Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya.
		k. Kawasan Pertanian	Dikembangkan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertanian dan perikanan di Kota	a. Rencana pengembangan kawasan pertanian dilakukan melalui: • pengembangan lahan pertanian di Kota dalam bentuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang ditetapkan sebagai KP2B;

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				• budidaya tanaman pangan dan/atau hortikultura dikembangkan di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan; Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Tanjung KarangKecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, dan Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram; Kelurahan Karang Baru dan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya; • pemanfataan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dapat bersifat edukatif dan rekreatif. b. Rencana pengembangan kawasan perikanan diarahkan menyatu dengan kawasan pertanian pangan dan/atau hortikultura
C.	**KAWASAN STRATEGIS**			
1	Kawasan Strategis	a. Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kota	Kawasan Mataram Metro/ Mataram Raya	meliputi wilayah administrasi Kota dan 6 (enam) wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kota dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, serta pariwisata
		b. Kawasan Strategis Kota	kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat;	a. Kawasan eks Bandara Selaparang - Udayana di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan sebagai pariwisata konvensi dengan konsep MICE berbasis lingkungan dan wisata kuliner; b. Kawasan Loang Baloq - Mapak, meliputi Makam Loang Baloq, Pantai Tanjung Karang - Mapak, Taman Air Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata alam, religi dan buatan; c. Kawasan Kota Tepian Air, meliputi kawasan pesisir Pantai Ampenan dan kawasan sempadan Sungai Jangkok di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata alam dan buatan; d. Kawasan Mas Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram; serta Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata belanja;

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				e. Kawasan Sayang Sayang – Karang Taliwang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara sebagai kawasan pariwisata kuliner; f. Pusat-pusat perdagangan di dalam Koridor AMC di Kecamatan Ampenan meliputi Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Ampenan Selatan; serta Kecamatan Cakranegara meliputi Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur dan Kelurahan Cakranegara Selatan; g. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika sebagai kawasan peruntukan industri, pergudangan dan peti kemas; dan h. Kawasan Koridor Sriwijaya – Brawijaya sebagai kawasan perdagangan dan jasa komersial.
			kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;	a. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan; b. Kawasan Bintaro dan Sekitarnya di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan; c. Kawasan Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara; d. Kawasan Islamic Centre (Masjid Hubbul Wathan - Masjid Attaqwa) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram; e. Kawasan Mayura - Meru di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara.
			kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	a. kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus; b. kawasan sepanjang sempadan pantai di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan; serta Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela; c. kawasan hutan kota dan taman kota di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Banjar, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Penjarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan

NO.	MUATAN RENCANA	RENCANA PENGEMBANGAN	PENJABARAN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia Kecamatan Mataram; Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Mayura, Kelurahan Sapta Marga dan Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Bertais, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya;

Sumber: Revisi RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Tabel 4.12
Isu-isu Strategis yang mempengaruhi Dinamika Pembangunan Kota Mataram

No.	Dinamika Pembangunan (Kebijakan, Isu Strategis)	Kondisi Saat Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap RTRW
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Global Hub	Belum mengakomodir kebijakan pengembangan transportasi laut	Agenda Nawacita	Perencanaan di dalam kota perlu mempertimbangkan kebutuhan jaringan jalan yang menghubungkan simpul transportasi laut di sepanjang pesisir pantai.
2.	Pengembangan PLTGU	Belum mengakomodir kebijakan nasional yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Agenda Nawacita	Perencanaan di dalam Kota Mataram perlu mempertimbangkan penempatan lokasi PLTGU agar sesuai dengan RTRW tanpa harus mengabaiakan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kebutuhan daya listrik dapat didukung dari penyediaan GI dan pengembangan energi terbarukan.
3.	Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Belum mengakomodir kebijakan pengembangan transportasi laut	Kawasan ekonomi nasional	Skala pelayanan di dalam Kota yang mendukung pengembangan KEK Mandalika.
4.	Mataram Metro	Telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi. Kemudian diadopsi dalam rencana struktur kota yang mempertimbangkan kawasan hinterland-nya serta tingkat skala pelayanan di dalam kota	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi	Perubahan kebijakan dalam pengembangan kawasan karena melibatkan 2 (dua) wilayah otonom yang berbeda
5.	Peningkatan Status Jalan	Status jalan menggunakan ketentuan yang lama	Perubahan menurut SK. Gubernur NTB Nomor 620-351 Tahun 2016	Perubahan fungsi jalan yang mempengaruhi status kewenangan pengelolaan jalan. Termasuk juga perubahan dimensi jalan yang membutuhkan luas lahan tertentu.
6.	Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)	Penetapan kawasan LP2B dalam bentuk areal pertanian hortikultura. Areal pertanian yang ditetapkan di Provinsi tidak sesuai dengan luas lahan pertanian di kota	Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang LP2B	Arahan penetapan lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian hortikultura, dan ini harus didahului dengan kajian yang mendalam. Besarnya lahan yang perlu disiapkan.

No.	Dinamika Pembangunan (Kebijakan, Isu Strategis)	Kondisi Saat Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap RTRW
1	2	3	4	5
7.	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Terdapatnya kawasan permukiman kumuh dengan luas > 300 ha dan diarahkan untuk ditangani dalam bentuk *re- settlement, re-development,* dan peremajaan kawasan, termasuk perbaikan infrastruktur dasar kawasan.	Program 100 - 0-100, Program KOTAKU	Penetapan lokasi-lokasi kawasan permukiman padat kumuh dan upay-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kawasan permukiman kumuh
8.	Penetapan sebagai PKN	Termuat di dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi. Kemudian diacu dalam rencana pusat- pusat pelayanan yang mempengaruhi penempatan fasilitas dan utilitas sesuai dengan skalanya	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Tahun 2008-2028.	Pengaturan penempatan fasilitas dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peran kota. Kota Mataram sebagai simpul kegiatan koleksi dan distribusi barang/jasaprovinsi . Peran Kota Mataram dalam SWP Pulau Lombok adalah sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTB dan Kota Mataram, pusat pelayanan umum skala regional dan nasional, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan simpul utama transportasi darat skala nasional.
9.	Penetapan sebagai Satuan Wilayah Pengembangan Provinsi NTB	Termuat di dalam RTRW Provinsi. Kemudian diacu dalam rencana hirarki kegiatan.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Tahun 2009-2029.	Kota Mataram termasuk dalam Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Pulau Lombok yang berfungsi sebagai pusat pengembanagan agrobisnis berbasis tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan, serta menjadi objek tujuan wisata
10.	Perubahan Kawasan Eks Bandara Sebagai Kawasan Pariwisata MICE berbasis Lingkungan	Bandara masih berfungsi, namun sudah bertahap melakukan pemindahan ke Bandara Praya. Diakomodir di dalam RTRW untuk mendukung pariwisata daerah dan kebutuhan RTH	MoU dengan pihak PT. Angkasa Pura	Pengembangan sebagai kawasan MICE berbasis lingkungan tetap dipertahankan selam belum adanya kesepahaman dengan pihak PT. Angkasa Pura
11.	Peningkatan Pelayanan Bahan Bakar Satu Pulau	PT. Pertamina masih beroperasi dan diakomodir dalam RTRW berupa pengembangan depo bahan bakar minyak dan gas	MoU dengan pihak PT. Pertamina	Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kota Tua dimana depo tersebut berada akan mengganggu fungsi dominan kawasan. Perlunya kajian terhadap pengembangan depo bahan bakar minyak dan gas, misalnya memindahkan lokasi atau mengubah rute pelayanan.

No.	Dinamika Pembangunan (Kebijakan, Isu Strategis)	Kondisi Saat Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap RTRW
1	2	3	4	5
12.	Relokasi beberapa peruntukan	Perubahan fungsi kawasan terbangun menjadi kawasan terbangunan lainnya dan/atau kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun.	Alih fungsi	Penyediaan lahan yang memadai untuk pengembangan fasilitas dan utilitas baru dengan mempertimbangkan kesesuaian ruang dan aktivitas masyarakat, diantaranya relokasi kampung nelayan, relokasi pasar, dan pengembangan baru pusat perkantoran pemerintahan
13.	Aglomerasi Kawasan yang membiaskan Pusat , Sub Pusat, dan Pusat Lingkungan	Pemisahan antara Pusat Kota, Sub Pusat Kota, dan Pusat Lingkungan sesuai dengan skala pelayanan minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat kekotaanya.	Kegiatan sesuai struktur pusat-pusat pelayanan	Pengaturan jenis fasilitas/utilitas sesuai dengan skala pelayanannya, misalnya untuk Pusat Lingkungan tidak memerlukan fasilitas dengan skala kota.
14.	Pemantapan RTH dan Area-Area Resapan	RTH masih 1,71% dan harus memenuhi amanat pemenuhan RTH sebesar 20%.	Mendukung fungsi ekologis kawasan	Penyediaan lahan sebanyak 20% untuk kebutuhan RTH publik yang berfungsi sebagai area-area resapan, dikontribusi dari taman/lapangan, sempadan sungai dan pantai, jalur hijau jalan, *green belt* di perbatasan, peruntukan areal hortikultura. Termasuk penyediaan kolam- kolam retensi

Sumber: Revisi RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

4. Penelaahan Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka keselarasan perencanaan pembangunan Kota Mataram dengan pembangunan daerah lainnya maka dilakukan penelaahan terhadap kebijakan pembangunan Daerah lainnya, dalam hal ini Kabupaten Lombok Barat yang berdampingan dengan Kota Mataram.

Dalam Peraturan Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 ditetapkan Visi Pembangunan yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju"

yang diwujudkan melalui 6 (enam) Misi, sebagai berikut:

1) Meningkatkan kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)

2) Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang memiliki Spirit serta Etos Kerja untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berpestasi)
3) Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang dimiliki untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)
4) Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)
5) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)
6) Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat).

Adapun isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat serta keterkaitan dengan keberadaaan Kota Mataram, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.13
Keterkaitan Isu-isu Strategis Kabupaten Lombok Barat dengan Keberadaan Kota Mataram

No	Isu Strategis Kabupaten Lombok Barat	Keterkaitan dengan Kota Mataram
1	Kualitas pendidikan, kesehatan dan aktualisasi budaya	Keberadaan sarana pendidikan, kesehatan dan budaya menjadi daya Tarik Kota Mataram terhadap Kabupaten Lombok Barat
2	Pemerataan infrastruktur wilayah	Sinergitas pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah
3	Angka kemiskinan dan masalah sosial	Kota Mataram menjadi tujuan bagi pencari kerja dan penduduk miskin yang bekerja tanpa keahlian
4	Reformasi birokrasi dan penegakan hukum	Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
5	Peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah	Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang ada dan investasi daerah
6	Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang ada untuk pemanfaatan bersama.

5. Kondisi Darurat dan Luar Biasa

Bencana gempa bumi beruntun yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Juli 2018 hingga pertengahan September (status masa tanggap darurat bencana berakhir pada 25 Agustus 2018) menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan pada Kota Mataram walaupun bukan merupakan wilayah epicentrum gempa. Kejadian gempa bumi terkuat terjadi pada tanggal 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 7 Magnitudo pada pukul 19.46 Wita. Titik pusat gempa adalah di 8.37 LS,116.48 BT, sekitar 27 km di arah timur laut.

Kedalaman gempa sekitar 15 kilometer. Gempa berikutnya yang mengakibatkan kerusakan cukup besar di Kota Mataram adalah pada tanggal 9 Agustus 2018 pada pukul 13.25 Wita 6.2 Magnitudo berlokasi 8.36 LS - 116.22 BT 27 km Timur Laut Kota Mataram dengan kedalaman 12 km. Dan Pada tanggal 19 Agustus 2018 gempa berikutnya terjadi pada pukul 22.56 Wita berlokasi 75 km Timur Laut Kota Mataram dan dirasakan V - VI MMI di Kota Mataram. Dampak yang dialami Kota Mataram berdasarkan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Kota Mataram Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.14
Data Dampak Gempa Lombok Tahun 2018 di Kota Mataram

No	Data	Jumlah	Nilai Kerusakan dan Kerugian (Rp)
1	2	3	4
1	**Korban**		
	Meninggal Dunia	14 orang	
	Luka-luka	47 orang	
2	**Kerusakan Sektor Permukiman (rumah)**	**13.437 unit**	**497.115.300.000**
	Rusak Berat	2.396 unit	
	Rusak Sedang	2.777 unit	
	Rusak Ringan	8.264 unit	
3	**Kerusakan Sektor Sosial**		**366.870.164.747**
	a. Fasilitas Kesehatan	36 unit	90.371.550.044
	• Rumah Sakit	7 unit	
	• Puskesmas	11 unit	
	• Puskesmas Pembantu	7 unit	
	• Poskesdes	11 unit	
	b. Fasilitas Pendidikan	246 unit	158.860.570.703
	• PAUD/TK/RA	66 unit	
	• SD/MI	92 unit	
	• SMP/MTS	30 unit	
	• SMA/SMAK/SMK/MA	48 unit	
	• SLB	2 unit	
	• Perguruan Tinggi	5 unit	
	• Pondok Pesantren	2 unit	
	• Sarana Olahraga	1 unit	
	c. Fasilitas Keagamaan		117.638.044.000
	• Masjid	190 unit	
	• Musholla	99 unit	
	• Pura	72 unit	
	• Gereja	2 unit	
	• Rumah Ibadah	2 unit	

No	Data	Jumlah	Nilai Kerusakan dan Kerugian (Rp)
1	2	3	4
4	**Kerusakan Sektor Infrastruktur** Air dan Sanitasi (PIPA G1 4INCH 24M)	 1 unit	**24.700.000**
5	**Sektor Ekonomi** • Pasar Tradisional • Pasar Modern • Toko/Swalayan • Toko Percetakan • Kantor Jasa Konsultan • Pariwisata • Koperasi	 6 unit 2 unit 23 unit 1 unit 1 unit 5 unit 5 unit	**21.834.698.360**
6	**Kantor Pemerintahan** • Kota Mataram • Provinsi • Vertikal	 31 unit 27 unit 17 unit	**200.304.008.694**
7	**Sektor Swasta**	**5 unit**	**1.722.480.800**
8	**Fasilitas Keamanan/Ketertiban**	**6 unit**	**1.451.917.000**

Sumber: BPBD Kota Mataram. 2018

Tabel 4.15
Kerusakan Rumah PascaBencana Gempa Lombok Tahun 2018 di Kota Mataram

No	Kecamatan	Kondisi (unit)			Total
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	
1	2	3	4	5	6
1	Ampenan	19	94	1,062	1,175
2	Cakranegara	99	267	1,102	1,468
3	Mataram	78	495	1,411	1,984
4	Sandubaya	1,562	944	1,291	3,797
5	Sekarbela	6	18	246	270
6	Selaparang	632	959	3,152	4,743
Total		**2,396**	**2,777**	**8,264**	**13,437**

Sumber: Surat Keputusan I - VII, BPBD Kota Mataram (Data per 9 Oktober 2018)

Berdasarkan analisis terhadap kerusakan dan kerugian serta dampak pascabencana gempa bumi yang meliputi sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor, diperkirakan total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai **Rp.1.141.427.658.046,00.** Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kota Mataram tersebut diperuntukkan bagi sektor permukiman sebesar Rp.299.053.000.000,00, sektor infrastruktur sebesar Rp.60.000.000, sektor sosial sebesar Rp.389.034.963.398,00, sektor ekonomi produktif sebesar Rp.12.273.599.539,00 dan lintas sektor sebesar Rp.441.006.095.109,00.

Beberapa pokok pikiran yang perlu ditindaklanjuti pascabencana gempa bumi:

1. Masyarakat korban bencana gempa bumi menginginkan pembersihan, perbaikan rumah dan perbaikan infrastruktur publik dengan segera;
2. Pemerintah Kota Mataram dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian/Lembaga menugaskan tim pengkajian kebutuhan pascabencana sehingga hasilnya dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Identifikasi dan inventarisasi dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian/Lembaga;
4. Mempercepat upaya pemulihan penghidupan masyarakat di daerah terdampak bencana dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi NTB, BNPB dan Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
5. Dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan mitigasi kawasan rawan bencana.

4.2.4. Isu Strategis Kota Mataram

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kota Mataram 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, penelaahan isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional serta penelaahan kebijakan pembangunan daerah yang bersifat aktual, problematik, kekhalayakan dan kelayakan serta kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Mataram, maka penetapan isu pembangunan Kota Mataram diklasifikasikan kedalam 5 (lima) Isu strategis yaitu: Isu Kondisifitas Wilayah, Isu Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, Isu Daya Saing Ekonomi, Isu Infrastruktur Perkotaan, Isu Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi; dengan penjabaran sebagai berikut:

I. **Isu Kondusifitas Wilayah,** terdiri dari:

A. **Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan Masyarakat;** meliputi:
- kegiatan siskamling dan sarana poskamling tidak merata/tidak berfungsi maksimal
- Masih adanya kejadian gangguan kamtibmas (penyakit masyarakat dan kriminalitas) yang tidak tertangani
- Masih besarnya jumlah kasus kejahatan yang tidak terlaporkan
- semakin maraknya pedagang liar di perempatan dan perumahan
- Masih terdapat kejadian konflik horizontal/antar warga
- belum maksimalnya penanganan aparat pemerintahan pada taraf pencegahan terhadap konflik
- penyelesaian konflik tidak bersifat berkelanjutan

B. **Kebencanaan;** meliputi:
- Pembangunan yang belum mempertimbangkan potensi bencana
- Masih banyak masyarakat yan tidak mengetahui tata cara mitigasi dan penyelamatan diri bencana yang benar
- Rendahnya kesadaran tentang resiko perubahan iklim dan bencana
- Belum terakomodirnya pengetahuan kebencanaan pendidikan formal
- Rendahnya persentase Kelurahan Tanggap Bencana

C. **Pengembangan Kebudayaan** meliputi:
- nilai-nilai budaya budaya lokal dan bangsa Indonesia sudah mulai luntur dan ditinggalkan
- lemahnya mental masyarakat dalam ketaatan terhadap peraturan
- banyak situs sejarah/budaya yang belum terdokumentasikan dengan baik
- masih ada masyarakat yang tidak familiar dengan tradisi, adat istiadat dan budaya lokal
- kurangnya pengenalan tradisi, budaya lokal dan nilai-nilai bangsa sejak usia dini/sekolah
- kurang terlihatnya identitas dan karakter budaya Kota Mataram dalam pembangunan

II. **Isu Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat,** terdiri dari:

A. **Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan**; meliputi:
- Sistem zonasi belum efektif karena penyebaran sarana dan prasarana sekolah serta guru tenaga pendidik tidak merata
- penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum maksimal sesuai harapan
- Masih rendahnya proporsi sekolah SD/MI dan SMP/MI berakreditasi minimal B

- APK PAUD masih rendah
- Masih ada penduduk buta aksara
- Belum terakomodirnya pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan
- lemahnya pendidikan karakter termasuk pendidikan seks usia dini

B. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; meliputi:

- belum optimalnya kualitas pelayanan puskesmas
- kenyamanan dan kebersihan puskesmas masih kurang
- rendahnya proporsi penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
- Masih ada kasus gizi buruk pada balita
- Masih terdapat penduduk usia lanjut (+60) yang belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan memadai"
- Tingkat kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih (PHBS) masih rendah
- Masih ada perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan/atau tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
- Angka kematian ibu masih tinggi
- Penanganan komplikasi neonatal masih rendah
- Masih tingginya tingkat kejadian (incident rate) DBD
- Tingginya kasus HIV dan AIDS
- Masih ada kasus penyakit menular kusta dan TBC

C. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak; meliputi:

- masih ada kejadian KDRT
- Masih ada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang tidak terlaporkan
- Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif dan Eksekutif
- Masih ada pernikahan di bawah umur
- belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan perempuan dalam bentuk susunan organisasi

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda; meliputi:

- masih banyak kepala lingkungan berkapasitas rendah dan pasif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat serta tidak memiliki program yang jelas
- masih banyak kepala lingkungan yang kurang bersosialisasi kepada warganya sebagai tokoh masyarakat sehingga warga tidak mengenal kepala lingkungannya sendiri
- kurangnya kegiatan bagi pemuda terutama dalam menyalurkan minat dan bakat yang positif yang menstimulasi peran pemuda dalam kegiatan lingkungan/masyarakat
- belum optimalnya wadah kelembagaan pemberdayaan masyarakat

E. **Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat**; meliputi:

- belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- lemahnya basis data dan informasi kemiskinan yang akurat sehingga bantuan tidak merata dan tidak tepat sasaran
- masih tingginya kesenjangan ekonomi
- Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram yang melambat
- Masih rendahnya proporsi peserta jaminan kesehatan dan jaminan sosial
- Masih ada masyarakat miskin yang tidak mengakses alat kontrasepsi
- Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap konsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang

III. **Isu Daya Saing Ekonomi**; terdiri dari:

- rendahnya pengembangan kluster industri berbasis potensi lokal
- masih rendahnya daya saing UMKM terhadap ritel modern
- perlunya kontrol yang lebih optimal terhadap harga bahan2 pokok di pasaran oleh stakeholder terkait secara kontinue/berkelanjutan
- keamanan, kebersihan dan kenyamanan pariwisata kurang memadai
- kurang efektifnya promosi pariwisata
- kurangnya kapasitas SDM pengelola pariwisata
- kebijakan ekonomi belum mendorong produktifitas ekonomi kecil, serinngkali sebatas bantuan yang sering tidak tepat sasaran
- Ketersediaan modal bagi sektor-sektor ekonomi unggulan
- belum optimalnya penataan bagi UMKM/PKL
- belum optimalnya penataan pasar
- Rendahnya pertumbuhan ekspor
- Masih rendahnya nilai tambah perikanan tangkap
- angka pengangguran masih tinggi
- minimnya difersifikasi lapangan pekerjaan
- daya saing pencari kerja yang relatif rendah, terutama tenaga kerja lokal dibandingkan pendatang
- keterbatasan akses informasi bursa kerja
- masih ada masyarakat mendapat upah di bawah UMR/UMK
- masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja

IV. **Isu Infrastruktur Perkotaan**; terdiri dari:

- TPA masih bergantung pada daerah lain
- kurang optmimalnya kinerja pengelolaan persampahan lingkungan

- Belum optimalnya fungsi Bank Sampah
- bongkar pasang jalan akibat perbaikan kabel
- pemeliharaan sarana prasarana rambu, marka dan penerangan jalan belum maksimal
- penyalahgunaan bahu dan badan jalan untuk parkir liar dan PKL
- Penyalahgunaan trotoar untuk parkir liar dan PKL
- tidak ada transportasi massal
- Belum tertatanya dekorasi dan ornament kota
- Masih tingginya luas kawasan permukiman kumuh
- Masih ada RTLH
- belum berjalannya rekayasa lalu lintas terutama untuk mengatasi kemacetan akibat antar jemput anak sekolah
- Belum maksimalnya fungsi terminal angkutan darat (Mandalika)
- sistem drainase Kota Mataram yang tidak terintegrasi dan belum tertata dengan baik belum dapat menanggulangi permasalahan banjir musiman (saat musim hujan)
- Belum adanya kolam retensi berfungsi untuk menyimpan dan menampung air sementara dari saluran pembuangan untuk menanggulangi permasalahan banjir.
- kurangnya RTH
- ketaatan terhadap aturan RTRW masih rendah
- Masih rendahnya persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan
- Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Masih ada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan"
- Belum ada pengelolaan limbah B3 yang baik
- Belum adanya pengelolaan limbah domestik secara terpadu

V. **Isu Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;** terdiri dari:

- Masih ada anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya belum tercatat
- Masih ada anak 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran"
- partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal
- profesionalitas dan prinsip 5S pelayanan publik belum memadai
- kebersihan tempat pelayanan masih perlu ditingkatkan
- pengelolaan pelayanan pengaduan pelayanan belum memadai
- masih rendahnya kapasitas dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas
- masih ada praktik KKN menggunakan kenalan atau orang dalam
- belum optimalnya keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat
- belum meratanya akses dan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi infomasi
- infrastruktur dan sarana prasarana informasi publik yang disediakan pemerintah belum memadai

- Kurangnya daya tampung Kantor Walikota Mataram dan kantor pemerintahan lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (pembangunan Kantor Walikota dan kantor pemerintahan yang representatif)
- masih rendahnya ketersediaan data yang akurat dan update
- Masih rendahnya kemandirian daerah

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi daerah merupakan pernyataan yang menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

5.1. VISI

Mengacu pada Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disampaikan pada Pilkada serentak yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Mataram yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah:

"TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA"

Dalam Visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:

1. **Kota Mataram,** adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.
2. **Maju,** ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.
3. **Religius,** diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.

4. **Berbudaya,** diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai Kota Mataram tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang menjabarkan Visi Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu:

"Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025".

Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025 dimaksudkan untuk percepatan dan pemantapan pembangunan dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana prasarana sebagai pusat pemerintahan di NTB serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Sehingga, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Berdasarkan gambaran Misi dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih, kemudian ditelaah dan diselaraskan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan kemudian diterjemahkan menjadi **5 (lima) Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021**, yaitu:

Misi 1, Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.

Misi 2, Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.

Misi 3, Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.

Misi 4, Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Misi 5, Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	
MISI I : MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI										
	I.1 Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	**Indeks Keamanan Manusia**	**Kategori**	**NA**	**NA**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**
	I.1.1 Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	Nilai	253,87	256,25	252,08	247	242	237	232
		Indeks Toleransi	Nilai	4,05	4,05	3,78	3,8	3,9	4	4,2
	I.1.2 Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	indeks	101,7	101,7	123,2	96	72	77	77
MISI II : MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH YANG BERDAYA SAING										
	II.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Nilai**	**76,37**	**77,2**	**77,84**	**78,28**	**78,72**	**79,16**	**79,60**
	II. 1.1 Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,28	15,5	15,51	15,58	15,66	15,73	15,8
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,05	9,25	9,32	9,39	9,46	9,53	9,6
	II.1.2 Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	70,70	70,98	71,23	71,48	71,73	71,98
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Nilai	0.627	0.627	0.631	0.640	0.643	0.647	0.650
	II.1.3 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)	Nilai	NA	61	62	63	64	65	65

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	
	perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	NA	0,452	0,427	0,402	0,377	0,352	0,327
		Kategori penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	NA	530	600	700	700	700	700
MISI III : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA										
	III.1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah dan Penurunan Angka Pengangguran	**Persentase Penduduk Miskin (Head Count Index)**	**persen**	**10,45**	**9,8**	**9,55**	**9,05**	**8,55**	**8,05**	**7,55**
		Pertumbuhan Ekonomi	**persen**	**7,99**	**8,06**	**8,07**	**8,17**	**8,20**	**8,27**	**8,35**
	III.1.1 Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Nilai	1,53	1,69	1,73	1,66	1,58	1,51	1,43
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Nilai	0,38	0,43	0,47	0,42	0,37	0,32	0,27
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	11,50	11,41	10,05	9,73	9,50	9,30	9,00
		Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	Nilai	3	3	3	3-4	3-4	3-4	3-4
	III.1.2 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	PDRB per Kapita	Rupiah	24.635.969	24.635.969	26.632.769	28.267.632	30.004.992	31.898.783	33.947.459
		Laju Inflasi	persen	3,25	2,47	3,59	3,5	3,5	3,5	3,5
		Indeks Gini	nilai	0,371	0,357	0,394	0,374	0,354	0,334	0,314
	III.1.3 Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	persen	92,5	93,83	94,65	95,35	95,54	95,73	95,93
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	7,5	6,17	5,35	4,65	4,46	4,27	4,07

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	
MISI IV : MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN										
	IV.1 Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	**Indeks Kota Layak Huni**	**persen**	**n/a**	**60**	**61,6**	**61,6**	**63**	**65**	**67**
	IV.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	Indeks Kota Layak Huni	persen	n/a	60	61,6	61,6	63	65	67
		Persentase Kesesuaian Pemafaatan Ruang	persen	50	50	50	50	80	80	80
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	55	55	56,99	57	59	62	65
MISI V : MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK *(GOOD GOVERNANCE)*										
	V.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kategori**	**C**	**CC**	**B**	**B**	**BB**	**BB**	**BB**
	V.1.1 Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	CC	B	B	BB	BB	BB
		Nilai AKIP	Nilai	58,72	58,88	63,13	65	70	75	80
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Unit Pelayanan Publik	Kategori	B	B	BB	BB	A-	A	A+
	V.1.2 Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	Rasio Kemandirian Daerah	persen	17,79	20,66	27,17	28	29	30	35

BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk menjamin konsistensi dan implementasi visi, misi dan tujuan serta sasaran maka diperlukan **strategi** dan **arah kebijakan** sehingga dapat di identifikasi tahapan dan berbagai faktor dengan harapan mampu memberikan solusi akan berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam lima tahun kedepan sehingga visi dan misi dapat terwujudkan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi

Strategi merupakan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah langkah yang diperlukan tujuan memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Salah satu alat analisis dalam merumuskan strategi adalah Analisis SWOT (*strengths, weaknessess, opportunities, threats*) sebagai alat identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi sebuah institusi dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan pengembangan kekuatan (*strengths*) dan penjajakan peluang (*opportunities*) serta secara bersamaan melakukan upaya mengatasi kelemahan (*weaknessess*) dan menghadapi ancaman (*threats*). Dengan pemetaan tersebut, dapat teridentifikasi alternative-alternatif strategi sehubungan dengan upaya pengembangan di Kota Mataram. Adapun skema analisi SWOT yang dilakukan sesuai dengan arahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan lampirannya, seperti yang tergambar di bawah ini :

Goal (Sasaran) : _____

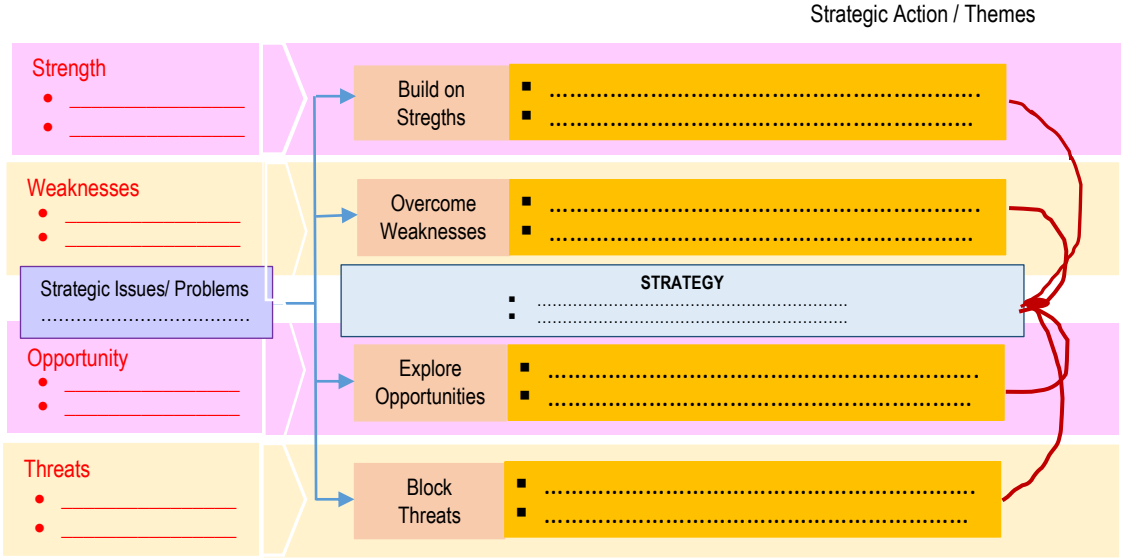

Gambar 1. Strategy Worksheet: SWOT Formulation

Analisis SWOT dilakukan menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram tahun 2016-2021 dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah, seperti yang tersaji sebagai berikut:

1. Sasaran : Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif

STRENGTHS 1. Peran tokoh agama dan masyarakat masih kuat di masyarakat 2. Tersedianya aparat di perangkat keamanan yang terkoordinasi dengan baik	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Meningkatkan peran tokoh-tokoh masyarakat dalam mengelola tantribmas 2. Meningkatkan koordinasi dan peran masyarakat dalam menyususn program pembangunan
WEAKNESSES 1. Partisipasi aktif masyarakat masih rendah 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak politik 3. penanganan dan penyelesaian konflik yang tidak komprehensif	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Meningkatkan program rekonsiliasi konflik hingga ke taraf rehabilitasi social untuk menghindari konflik berulang 2. Edukasi hukum dan politik kepada masyarakat

ISU STRATEGIS : 1. kegiatan siskamling dan sarana poskamling tidak merata/ tidak berfungsi 2. Masih adanya kejadian gangguan kamtibmas (penyakit masyarakat dan kriminalitas) yang tidak tertangani 3. Masih besarnya jumlah kasus kejahatan yang tidak terlaporkan 4. semakin maraknya pedagang liar di perempatan dan perumahan 5. Masih terdapat kejadian konflik horizontal/antar warga 6. belum maksimalnya penanganan aparat pemerintahan pada taraf pencegahan 7. penyelesaian konflik tidak bersifat berkelanjutan 8. nilai-nilai budaya lokal dan budaya bangsa yang mulai ditinggalkan	**STRATEGIES :** 1. Edukasi, advokasi dan Sosialisasi 2. Optimalisasi peran lembaga adat, lembaga kepemudaan dan forum koordinasi 3. Pengembangan Standar Operasional Prosedur penanganan tantribum dan konflik sosial (koordinasi terpadu antar stakeholder) 4. Pemetaan potensi konflik dan gangguan keamanan 5. Pengembangan momentum dalam peningkatan kohesi sosial 6. Optimalisasi penegakan hukum
OPPORTUNITIES 1. Sudah terbentuknya Forum Muspida dan Forum Koordinasi lainnya 2. Adanya dukungan pemerintah terhadap kegiatan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan
THREATS 1. Peredaran Narkoba pada kalangan pelajar 2. Peredaran miras illegal yang seringkali menjadi pemicu gangguan keamanan dan kerukunan 3. Lokasi Kota Mataram yang dekat dengan pusat-pusat hiburan (Senggigi) 4. Kesenjangan sosial masyarakat	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Operasi gabungan pemberantasan penyakit masyarakat 2. Pendekatan sosial masyarakat dalam aspek pemerintah

2. Sasaran : Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana

STRENGTHS 1. Kota Mataram telah memiliki perangkat daerah yang menagani kebencanaan, yaitu : Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam kebakaran 2. Tersedianya kajian mitigasi bencana dari lembaga Internasional	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Peningkatan Koordinasi antar perangkat daerah penanganan bencana 2. Penyusunan dokumen RAD mitigasi bencana
WEAKNESSES 1. Rendahnya Persentase Kelurahan memiliki kelompok tanggap bencana 2. Pemukiman padat penduduk yang sulit dilakukan evakuasi 3. Minimnya sarpras kebencanaan yang memadai 4. Rendahnya pemetaan dalam penanganan rehab dan rekonstruksi serta recovery wilayah	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Peningkatan personil dan sarpras kebencanaan yang memadai 2. Edukasi kesadaran bencana bagi masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi
ISU STRATEGIS : 1. Pembangunan yang belum mempertimbangkan potensi bencana 2. Masih banyak masyarakat yan tidak mengetahui tata cara mitigasi dan penyelamatan diri bencana yang benar 3. Rendahnya kesadaran tentang resiko perubahan iklim dan bencana 4. Rendahnya persentase Kelurahan Tanggap Bencana	**STRATEGIES :** 1. Optimalisasi pemanfaatan dokumen-dokumen mitigasi kebencanaan 2. Pengembangan Standar Operasional Prosedur mitigasi bencana terpadu 3. Edukasi, advokasi dan Sosialisasi mitigasi kebencanaan 4. Peningkatan Sarpras mitigasi bencana yang sesuai standar

	5. Pengembangan konsep Kelurahan Tanggap Bencana 6. Pengembangan konsep Sekolah Tanggap Bencana 7. Peningkatan kapasitas kelembagaan kebencanaan
OPPORTUNITIES 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan media sosial yang baik	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Memanfaatkan teknologi informasi yang ada sebagai media edukasi dan informasi kebencanaan yang dapat diakses masyarakat luas
THREATS 1. Fenomena Perubahan Iklim yang tidak menentu	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Pengembangan wawasan lingkungan yang komprehensif 2. Pembangunan yang berkelanjutan

3. Sasaran : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah

STRENGTHS 1. Kota Mataram memiliki keragaman etnis, budaya , karakteristik dan kemajemukan penduduk yang tinggi sehingga memiliki kekayaan dan keragaman budaya. 2. Tradisi dan kearipan lokal yang masih populer di masyarakat terakulturasi dengan ritual-ritual keagamaan 3. Keunikan dan kekhasan hasil karya budaya lokal di Kota Mataram 4. Tingginya keyakinan dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal. 5. Nilai – nilai luhur budaya yang beragam sebagai alat pemersatu dan penjaring modernisasi.	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. pembentukan lembaga adat Forum antar lembaga adat. 2. Melaksanakan ritual tradisi dan kerarifan budaya lokal. 3. Mengaktualisasikan hasil karya seni dan budaya dalam segala bidang.
WEAKNESSES 1. Seni, budaya dan kearifan lokal kurang familiar di kalangan pelajar dan pemuda 2. Pengakuan dan inventarisasi terhadap karya-karya budaya lokal belum maksimal 3. Belum tercerminnya identitas dan ciri khas budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan 4. Belum tersedianya sarana dan prsarana tempat berekspresi dan aktualisasi seni budaya. 5. Belum optimalnya pembinaaan dan penghargaan yang berkelanjutan terhadap komunitas seni dan budaya. 6. Belum terencananya kawasan seni dan budaya secara sistemik di Kota Mataram 7. Kurangnya interaksi antar masyarakat terhadap seni dan budaya, lebih tertarik berinterkasi melalui Sosial media	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Pengenalan seni,budaya dan kearifan lokal kepada pelajar dan pemuda 2. Melakukan inventarisasi karya-karya budaya 3. Menyiapkan sarana dan prasarana tempat berekpresi komunitas seni dan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat Kota Mataram. 4. Melakukan pembinaan dan penghargaan atas pelaku seni dan budaya. 5. Membuat Road map kawasan seni dan budaya di kota Mataram
ISU STRATEGIS : 1. banyak situs sejarah/budaya yang belum terdokumentasikan dengan baik 2. masih ada masyarakat yang tidak familiar dengan tradisi, adat istiadat dan budaya lokal 3. nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sudah mulai luntur dan ditinggalkan 4. lemahnya mental masyarakat dalam ketaatan terhadap peraturan	**STRATEGIES :** 1. Identifikasi dan inventarisasi warisan budaya, adat dan tradisi lokal serta nilai kebangsaan 2. Edukasi, advokasi dan Sosialisasi mengenai pelestarian kebudayaan daerah dan bangsa khususnya kepada pelajar dan pemuda 3. Optimalisasi peran lembaga adat/krama adat di tiap lingkungan untuk pelestarian budaya 4. Pengembangan Sarpras penunjang aktualisasi karya budaya

5. kurangnya pengenalan tradisi, budaya lokal dan nilai-nilai bangsa sejak usia dini/sekolah 6. kurang terlihatnya identitas dan karakter budaya Kota Mataram dalam pembangunan	5. Pemberian apresiasi terhadap pelestari kebudayaan lokal 6. Membangun branding budaya Kota Mataram
OPPORTUNITIES 1. Dukungan kebijakan pusat terkait pengembangan dan pemajuan kebudayaan 2. Peran media dalam mengekspose budaya lokal masyarakat 3. Kota Mataram sebagai pusat kegiata seni dan budaya Nasional 4. Kota Mataram sebagai pintu masuk tujuan wisata nasional	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Koordinasi intensif lintas pemangku kepentingan 2. Media mengexpos seni dan budaya Kota Mataram 3. Promosi seni dan budaya melalui pagelaran-pagelaran Budaya. 4. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk even-even nasional dan internasional
THREATS 1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membuka kesempatan masuknya pengaruh budaya luar yang menggerus kearifan lokal daerah 2. Banyaknya pendatang yang membawa cara hidup yang tidak selaras dengan tradisi dan budaya lokal daerah 3. Belum melembaganya secara operasional keberadaan Lembaga Adat	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Penguatan pendidikan muatan lokal dan kegiatan imtaq di sekolah 2. Terbentuknya Krama Adat yang diakui oleh masyarakat. 3. Melakukan pengenalan Nilai-nilai luhur tradisi dan budaya kepada masyarakat. 4. Legalitas Lembaga adat dan Komunitas Seni.

4. Sasaran : Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

STRENGTHS 1. Keunggulan SDM, Sarana Prasarana dan tata kelola sekolah 2. Aksesibilitas mudah 3. Antusiasme masyarakat dalam pendidikan 4. Keragaman faktor pendukung pendidikan	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Pengembangan sekolah unggulan tematik dan berkeadilan 2. Pengaturan lokasi sekolah yang representative 3. Peningkatan peran aktif masyarakat dan kolaborasi guru, orang tua dan murid 4. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan
WEAKNESSES 1. Kualitas sekolah belum merata 2. sarana dan prasarana pendidikan belum merata 3. minat sebagian masyarakat masih lemah 4. belum optimalnya pengawasan mutu pendidikan	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. tata kelola penyebaran guru 2. identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan 3. penguatan pemahaman pentingnya pendidikan 4. efektifitas pola pengawasan mutu pendidikan
ISU STRATEGIS : 1. Sistem zonasi belum efektif karena penyebaran sarana dan prasarana sekolah serta guru tenega pendidik tidak merata 2. penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan 3. Masih rendahnya proporsi sekolah SD/MI dan SMP/MI berakreditasi minimal B 4. APK PAUD masih rendah 5. Masih ada penduduk buta aksara 6. Belum terakomodirnya pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan 7. lemahnya pendidikan karakter termasuk pendidikan seks usia dini	**STRATEGIES :** 1. Peningkatan kapasitas penyelenggara pendidikan (guru dan manajemen sekolah) 2. Pengembangan sistem rotasi penyelenggara pendidikan yang berkelanjutan 3. Optimalisasi implementasi sistem akreditasi sekolah 4. Pengembangan role model tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi 5. Peningkatan kapasitas dan peran pengawas pendidikan 6. Re-orientasi kurikulum berbasis pendidikan karakter

OPPORTUNITIES 1. Keberpihakan pemerintah untuk memajuan kualitas pendidikan 2. Akses kemudahan layanan informasi pendidikan 3. Kerjasama pengembangan pendidikan dengan lembaga swasta 4. Kebutuhan Sekolah Model/Terpadu	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Kepastian regulasi 2. Pengembangan model jaringan komunikasi khusus bagi pelajar 3. Pembentukan Forum Komunikasi Pendidikan 4. Pengembangan Sekolah Model/Terpadu
THREATS 1. Pengaruh globalisasi (internet) terhadap pendidikan 2. Penyebaran narkoba di kalangan pelajar 3. Moratorium pengangkatan Guru/tenega kependidikan 4. Pola perhatian orang tua kepada anak	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Penguatan pengawasan akses internet bagi anak/pelajar (promosi internet sehat) 2. Pengawasan efektif peredaran narkoba di kalangan pelajar 3. Penegasan terhadap formasi guru/tenaga kependidikan 4. Pengembangan model komunikasi efektif antara orang tua dan murid

5. Sasaran : Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas

STRENGTHS 1. Ketersediaan jumlah fanyankes yang memadai dan telah terakreditasi 2. Ketersediaan SDM Kesehatan 3. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi 4. Telah terbangunnya sistem informasi kesehatan di fasyankes 5. Adanya peran aktif organisasi profesi tenaga kerja	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Meningkatkan peran aktif seluruh fasyankes untuk mendukung program-program kesehatan 2. Pemerataan tenaga kerja di semua fasyankes 3. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat untuk hidup sehat 4. Membuat sistem informasi kesehatan yang terintegrasi 5. Melibatkan organisasi profesi kesehatan dalam mendukung program-program kesehatan
WEAKNESSES 1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan belum maksimal 2. Kompetensi tenaga kesehatan belum optimal 3. Belum tercapainya universal coverage 4. Sarana dan prasarana belum optimal 5. Tata kelola administrasi keuangan puskesmas belum menerapkan PPK-BLUD 6. PHBS di masyarakat belum optimal 7. Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dan swasta 8. Belum maksimalnya sistem transportasi public yang menjangkau langsung ke fasyankes	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 2. Pengembangan kompetensi tenaga kesehatan melalui diklat, seminar, sekolah dll 3. Mendaftarkan masyarakat miskin yang belum memiliki JKN 4. Peningkatan ketersediaan sarpras 5. Membentuk puskesmas dengan PPK-BLUD 6. Frekuensi penyuluhan dan sosialisasi program kesehatan ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat 7. Mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab dalam kesehatan untuk pengawasan dan pembinaan seluruh fasyankes
ISU STRATEGIS : 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan puskesmas 2. Kurang kenyamanan dan kebersihan puskesmas 3. Rendahnya proporsi penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan 4. Masih ada kasus gizi buruk pada balita 5. Masih terdapat penduduk usia lanjut (+60) yang belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan memadai" 6. Tingkat kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih (PHBS) masih rendah	**STRATEGIES :** 1. Optimalisasi implementasi SPM di semua unit fasyankes 2. Optimalisasi implementasi SOP 3. Edukasi, advokasi dan Sosialisasi PHBS dan Jaminan Kesehatan Mandiri kepada masyarakat 4. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi 5. Peningkatan status akreditasi puskesmas

7. Masih ada perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan/atau tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 8. Angka kematian ibu masih tinggi 9. Penanganan komplikasi neonatal masih rendah 10. Masih tingginya tingkat kejadian (incident rate) DBD 11. Tingginya kasus HIV dan AIDS 12. Masih ada kasus penyakit menular kusta dan TBC	6. Membangun komitmen dan kerjasama dengan fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan 7. Perencanaan peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe C 8. Optimalisasi pengawasan pelayanan kesehatan
OPPORTUNITIES 1. adanya Sistem JKN 2. Kebijakan Nasional tentang PIS-PK (Germas) 3. Pesatnya perkembangan IPTEK dalam bidang kesehatan 4. Adanya Permenkes tentang SPM bidang Kesehatan 5. Adanya peraturan pemerintah tentan kewajiban Akreditasi Fasyankes	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Mendaftarkan seluruh masyarakat sebagai peserta JKN 2. Mengoptimalkan program PIS-PK di seluruh Fasyankes dengan melibatkan masyarakat 3. Membuat sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi 4. Penyususnan program/kegiatan dengan anggaran mengacu pada pencapaian target SPM 5. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui Akreditasi
THREATS 1. Masih ada pemukiman Pakumis 2. Mobilisasi penduduk yang tinggi 3. Banyaknya kawasan wisata yang potensial sebagai penyebaran penyakit menular 4. Adanya sistem rujukan berjenjang	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Penataan kawasan pemukiman pakumis 2. Mengoptimalkan peran Dikes dan litas sektor dalam pengendalian resiko penyakit 3. Mengoptimalkan peran seluruh stakeholder dalam mupaya pengendalian dampak resiko penyakit yang ditimbulkan dari kawasan wisata 4. Mengoptimalkan kesiapan fasyankes sebagai pelaksana sistem rujukan berjenjang

6. Sasaran : Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak

STRENGTHS 1. Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Perlindungan Anak sudah ada daritingkat Kepres sampai dengan Perwal 2. Fasilitas pendidikan lengkap dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi 3. Tingkat Pendidikan hamper merata baik laki-laki maupun perempuan	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Pembuatan awig-awig lingkungan 2. Meningkatkan volume Beasiswa berprestasi 3. Mendorong keterlibatan perempuan dalam semua aspek kegiatan kemasyarakatan 4. Penguatan kelembagaan PUG di semua perangkat daerah 5. Penguatan Forum Anak tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan dalam rangka pengembangan Kota Layak Anak 6. Penguatan fungsi P2TP2A dengan memberdayakan stgas perlindungan 7. Meningkatkan dukungan pemerintah dalam pengadaaan sarpras kepemudaan dan olahraga

WEAKNESSES 1. kurangnya pemahaman serta minimnya fasilitas ramah anak dan keterlibatan laki laki perlindungan perempuan anak dan kesetaraan gender 2. masih minimnya kelembagaan yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan 3. kurang sosialisasi dan pemberdayaan tentang peran perempuan dalam pembangunan dan politik 4. kurangnya perlindungan dan kepedulian dalam keluarga dan masyarakat atas kegiatan remaja dan kesejahteraan anak 5. kurangnya sarana-prasarana yang mendukung kegiatan pembauran dan pemberdayaan masyarakat dan pemuda terutama di tingkat lingkungan 6. lemahnya SDM kepala lingkungan sebagai pengampu pemberdayaan masyarakat di lingkungan 7. banyak lembaga pemberdayaan masyarakat yang tidak aktif	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender 2. mendorong dan meningkatkan serta mengutamakan keterlibatan perempuan dalam dunia politik 3. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perempuan 4. Mengadakan acara yang melibatkan masyarakat luas guna membangun dan mengembangkan kebersamaan 5. Membuat persyaratan dan kriteria kepala lingkungan 6. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan kemasyarakatan 7. Menambah SDM tekhnis pada P2TP2A 8. Memberdayakan Satgas Perlindungan Peremopuan dan anak di Kelurahan 9. Mengadakan Diklat untuk meningkatkan kemampuan Manajerial dan jiwa kewirausahaan pemuda/masyarakat sehingga memiliki kemampuan daya saing 10. Meningkatkan kerjasama wirausahawan muda 11. Meningkatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
ISU STRATEGIS : 1. Masih ada kejadian KDRT 2. Masih ada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang tidak terlaporkan 3. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif dan Eksekutif 4. Masih ada pernikahan di bawah umur 5. belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan perempuan dalam bentuk susunan organisasi 6. kurangnya kegiatan bagi pemuda terutama dalam menyalurkan minat dan bakat yang positif serta menstimulasi peran pemuda dalam kegiatan lingkungan/masyarakat 7. masih banyak kepala lingkungan yang kurang bersosialisasi kepada warganya sebagai tokoh masyarakat sehingga warga tidak mengenal kepala lingkungannya sendiri 8. masih banyak kepala lingkungan pasif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dan tidak memiliki program yang jelas 9. belum optimalnya wadah kelembagaan pemberdayaan masyarakat	**STRATEGIES :** 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya; 2. Mengembangkan kurikulum pendidikan seks pada anak usia dini; 3. Kebijakan pendewasaan usia perkawinan; 4. Advokasi, konseling, perawatan medis dan psikologis terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; 5. Mendorong kebijakan afirmatif bagi perempuan untuk menduduki posisi kelembagaan pada level eksekutif dan legislatif; 6. Memberikan pendidikan politik bagi perempuan; 7. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk ruang kreasi kegiatan bagi anak-anak muda; 8. Memfasilitasi kegiatan rembuk lingkungan secara rutin dan berkelanjutan. 9. Penguatan kelembagaan perempuan dan masyarakat dari aspek struktural dan kultural. 10. Memberikan dukungan terhadap pelembagaan sistim pembangunan partisipatif
OPPORTUNITIES 1. SDM untuk DIKLAT tersedia 2. Partai-partai politik tidak membatasi keterlibatan perempuan 3. Sponsor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah banyak 4. Banyaknya peminat untuk menduduki jabatan kepala lingkungan sehingga persaingan pemilihan kepala lingkungan lebih ketat	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Membangun kerjasama dengan dunia kependidikan 2. Membangun kerjasama dengan partai politik 3. Membangun kerjasama dengan media 4. Melakukan penjajakan terhadap calon kepala lingkungan 5. Peraturan adat lingkungan 6. Pendampingan korban KDRT 7. Kebijakann Penyediaan Anggaran

5. Awig-awig masyarakat kelurahan tentang pencegahan KDRT dan Pernikahan usia dini 6. Kerjasama dengan jejaring dan lintas sektor untuk melaksanakan pelayanan tekhnis T2TP2A 7. Komitmen pemerintah terhadap kepemudaan 8. Kesadaran dan Dukungan masyarakat tentang generasi muda dengan ikut memberikan pembinaan dan pengembangan melalui olahraga yang menjadi unggulan daerah	
THREATS 1. Kemajuan Teknologi yang tidak terbendung sehingga sulit mengontrol pengaruh negative terhadap prilaku masyarakat 2. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan rendah 3. Masih adanya persepi di masyarakat terutama TOGA dan TOMA yang kurang mendukung isu Kesetaraan Gender 4. Permasalahan Pemuda yang semakiin menghawatirkan diantaranya pengganggguran dan putus sekolah yang akan berpotensi pada kegiatan yang bersifat destruktif serta penyalahgunaan narkoba 5. Semakin rendahnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda di daerah	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Meningkatkan perhatian orang tua terhadap anak-anak, perhatian pemuka agama terhadap ummat, perhatian tokoh masyarakat terhadap masyarakatnya, dan terutama perhatian dan penyaringan informasi negative dari pemerintah atau pihak-pihak berwenang 2. Menggelorakan/menggerakkan/menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan gotong royong di tingkat lingkungan 3. Mengoptimalkan SDm yang ada 4. Kerjasama dengan jejaring 5. Koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan 6. Koordinasi dengan TOGA dan TOMA

7. Sasaran : Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat

STRENGTHS 1. Tersedianya Potensi Kesejahateraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari LKS, pekerja sosial masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, dan dunia usaha; unsur pekerja profesional dalam pendampingan program penanganan PMKS 2. Tersedianya aplikasi berbasis android yaitu SEPADAN untuk mempermudah verifikasi dan validasi data kemiskinan 3. Adanya dukungan regulasi daerah tentang penanggulangan kemiskinan (Perda No. 6 tahun 2012), anjal dan gepeng dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 4. Adanya sinergitas program pemberdayaan lintas sektor dalam intervensi penanggulaangan PMKS	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Memaksimal PSKS secara profesional dan menyeluruh dalam bentuk peningkatan SDM-nya dari unsur masyarakat mapun dari unsur profesional dengan mengikuti TOT (training of trainer) 2. Menyusun roadmap implementasi dan pengembagan aplikasi SEPADAN untuk semakin mempermudah verifikasi, validasi, dan intervensi program penanggulangan kemiskinan. 3. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam rangka efektivitas program penanggulangan kemiskinan. 4. Mendorong efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan lintas sektoral untuk penanggulangan PMKS.
WEAKNESSES 1. Masih lemahnya pendataan terhadap PMKS secara akurat 2. Masih rendahnya penyadang disabilitas dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitas 3. masih ada indikasi KKN dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin 4. lemahnya mentalitas masyarakat untuk keluar dari status miskin 5. sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum terpenuhi secara optimal	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Memperkuat basis data terpadu kemiskinan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang sudah ada untuk verivikasi dan validasi data kemiskinan. 2. Memaksimalkan fungsi pekerja sosial profesional untuk melakukan pendampingan program terhadap PMKS secara berkelanjutan. 3. Memaksimalkan regulasi daerah yang sudah ada untuk meningkatkan pelayanan sosial terhadap lansia

6. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum berjalan seperti yang diharapkan. 7. Peran serta pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) belum optimal 8. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menjadi salah satu masalah yang dihadapi Kota Mataram 9. Dalam bidang ketahanan pangan, permasalahan yang adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya memperbaiki sistem budidaya tanaman, penanganan pasca panen, pengolahan pangan dan penanganan distribusi; serta belum optimalnya diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal	4. Membentuk forum CSR untuk mempercapat penanganan PMKS 5. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) untuk rumah tangga miskin 6. Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk memaksimalkan lahan pertanian yang terbatas.
ISU STRATEGIS : 1. belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang MAsalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. masih tingginya kesenjangan ekonomi 3. lemahnya basis data dan informasi kemiskinan yang akurat sehingga bantuan tidak meratadan tidak tepat sasaran 4. Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram yang melambat 5. Masih rendahnya proporsi peserta jaminan kesehatan dan jaminan social ketenagakerjaan 6. Masih ada masyarakat miskin yang tidak mengakses alat kontrasepsi 7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan dengan gizi seimbang	**STRATEGIES :** 1. Meningkatkan kemampuan literasi teknologi informasi bagi tenaga fasilitator dan verifikator kelurahan guna mengoptimalkan perangkat aplikasi verifikasi dan validasi data kemiskinan. 2. Pelatihan TOT (training of trainer) secara berkesimabungan kepada tenaga PSKS untuk memaksimalkan penanganan PMKS. 3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi kemiskinan berbasis android oleh lintas sektor untuk mengintervensi program-program kemiskinan. 4. Meningkatkan sinergitas program-program kemiskinan lintas sektor. 5. Mengoptimalkan peran kader posyandu dan kader KB untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan pendampingan KIA khususnya kepada rumah tangga miskin. 6. Mengoptimalkan cakupan desiminasi informasi GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 7. Meningkatkan literasi gizi masyarakat 8. Melakukan pengawasan dan advokasi terhadap implementasi hubungan industrial.
OPPORTUNITIES 1. Kebijakan Global (PBB) terakit dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs untuk meniadakan kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuknya 2. Adanya dukungan regulasi nasional terkait dengan penanggulangan kemiskinan (Perpres No. 15 Tahun 2010, Perpres No. 166 Tahun 2015, Permendagri No. 42 Tahun 2010) 3. MOU Provinsi NTB dengan Kabupaten/Kota terkait dengan program induksi kemiskinan 4. Tersedianya dukungan system Informasi dan Teknologi dalam rangka verifikasi dan validasi data PMKS (SLRT, SIKS-NG)	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Mengintegrasikan target-target SDGs/TPB ke dalam dokumen perencanaan daerah 2. Memaksimalkan peran lintas sektor untuk menyusun program dan kegitan yang mendukung pencapaian target TPB/SDgs 3. Menyusun regulasi daerah untuk mendukung regulasi nasional terkait dengan penanggulangan kemiskinan 4. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD)-Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dearah (SKPKD) 5. Mensinergikan program-program SKPD untuk mendukung pencapaian program induksi kemiskinan. 6. Memaksimalkan implementasi system atau aplikasi yang sudah ada untuk memverifikasi dan memvalidasi data PMKS melalui peningkatan SDM fasilitator dan verifikator

THREATS 1. Arus migrasi dari luar ke Kota Mataram yang berpotensi menambah PMKS 2. Kurangnya pasokan bahan pangan penting dari daerah penyangga yang bisa berdampak terhadap terjadinya kerawan pangan pada rumah tangga miskin.	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Memaksimal peran dinas instansi terkait untuk melakukan pendataan dan pengawasan terhadap PMKS. 2. Memaksimalkan program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga

8. Sasaran : Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

STRENGTHS 1. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional dan nasional 2. Dukungan APBD dalam penguatan ekonomi rakyat; 3. Dukungan regulasi; 4. Keberadaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 5. Potensi ekonomi dengan keunikan kawasan pantai sepanjang 9 km	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Diperlukannya master plan dalam upaya pengembangan sektor perdagangan dan jasa 2. Mensinergikan sasaran dan kinerja program/kegiatan terkait pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat; 3. Mengoptimalkan implementasi dan penegakan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota; 4. Mengoptimalkan peran dan fungsi PIHPS dan TPID 5. Memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengoptimalkan potensi kawasan pantai
WEAKNESSES 1. Masih rendahnya kemampuan wirausaha masyarakat 2. Masih rendahnya daya saing produk UMKM 3. Kota Mataram belum memiliki identitas (branding) kepariwisataan yang memiliki nilai jual yang baik 4. Belum terjalinnya pola kemitraan dalam upaya pengembangan usaha 5. belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL)	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha melalui pelatihan yang sistematis dan tepat sasaran; 2. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi pelaku usaha; 3. Melakukan perumusan *branding* terhadap arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata; 4. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha melalui pola kemitraan antar lembaga ataupun antar daerah; 5. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antar stakeholder terkait dalam upaya pengendalian dan pengawasan PKL
ISU STRATEGIS : 1. rendahnya pengembangan kluster industri berbasis potensi lokal 2. masih rendahnya daya saing UMKM terhadap ritel modern 3. perlunya kontrol yang lebih optimal terhadap harga bahan2 pokok di pasaran oleh stakeholder terkait secara continue/berkelanjutan 4. keamanan, kebersihan dan kenyamanan pariwisata kurang memadai 5. kurang efektifnya promosi pariwisata 6. kurangnya kapasitas SDM pengelola pariwisata 7. kebijakan ekonomi belum mendorong produktifitas ekonomi kecil, baru sebatas bantuan yang sering tidak tepat sasaran 8. Ketersediaan modal bagi sektor-sektor ekonomi unggulan 9. belum optimalnya penataan bagi UMKM/PKL 10. Rendahnya pertumbuhan ekspor 11. Masih rendahnya nilai tambah perikanan tangkap	**STRATEGIES :** 1. Menyusun rencana induk pengembangan kawasan terintegrasi berbasis keungulan lokal; 2. Memfasilitasi pelaku UMKM masuk dalam rantai distribusi perusahaan ritel modern berbasis e-commerce; 3. Fasilitasi akses produk UMKM terhadap bantuan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), atau dan Badan Standardisasi Nasional (BSN); 4. Mendorong terbangunnya kerjasama dengan daerah-daerah penyangga untuk menjamin ketersedian (supply) dan kestabilan harga bahan pokok penting dalam jangka panjang; 5. Membangun kemitran dan jejaring usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan 6. Peningkatan SDM pelaku usaha pengolahan hasil perikanan

	7. Mengkolaborasikan peran akademisi, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah untuk mendisain model pelatihan manajemen pariwisata berkelanjutan. 8. Meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
OPPORTUNITIES 1. Penetapan Kota Mataram sebagai Kota Wisata; 2. Posisi Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan salah satu kab/kota yang ada di dalam 10 Kawasan Prioritas Pengembangan Wisata Pesona Lombok Sumbawa; 3. Dukungan CSR dalam pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur 4. Keberadaan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI)	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata dalam konsep wisata kota ; 2. Mengoptimalkan daya dukung SDM dan sarana prasarana penunjang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; 3. Mengoptimalkan peran serta CSR dalam mendukung program pembangunan ekonomi; 4. Mengoptimalkan keberadaan APKLI dalam rangka mendukung implementasi Perda/Perwal PKL
THREATS 1. Makin maraknya ekspansi toko swalayan (modern) di berbagai kawasan kota 2. Makin maraknya aplikasi e-commerse / belanja online yang menjual sebagian besar produk impor 3. Banyaknya produk unggulan daerah yang direplikasi dan diakui sebagai produk daerah lain.	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Membatasi ekspansi toko swalayan (modern) dengan perijinan yang ketat; 2. Membangun kemitraan antara sektor ekonomi formal (toko swalayan) dengan sektor informal (PKL) 3. Membangun kemitraan dengan aplikasi / plat form e-comerse untuk memasarkan produk unggulan daerah 4. Mengusulkan produk unggulan daerah memperoleh HAKI/Hak paten

9. Sasaran : Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif

STRENGTHS 1. Bonus demografi 2. Adanya program pendidikan, pelatihan & pemberdayaan Calon Tenaga Kerja 3. Terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk mengakselerasi perluasan kesempatan kerja	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Menyusun kebijkan bidang ketenagakerjaan terintegrasi atau three in one policy (pelatihan, sertifikasi dan penempatan) 2. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pendidikan, pelatihan, & pemberdayaan calon tenaga kerja 3. Deregulasi peraturan daerah yang menghambat investasi pada sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja
WEAKNESSES 1. Kurikulum pendidikan kejuruan atau akademisi yang belum memenuhi ekspektasi dunia kerja (mismatching) 2. Informasi Bursa Kerja Yang Terbatas 3. Kualifikasi Pencari Kerja Yang terbatas 4. Masih tingginya angka pengangguran 5. Masih adanya permasalahan antara tenaga kerja dengan penyedia kerja	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Memaksimalkan program magang kerja bagi siswa kejuruan maupun akademi untuk mempersiapkan calon tenaga kerja memasuki dunia kerja 2. Pengembangan website informasi bursa kerja 3. Optimalisasi pelaksanaan job fair 4. Optimalisasi kerja tim perselisihan hubungan industry dan tim deteksi dini pencegahan dan penanganan permasalahan hubungan industrial dalam rangka pengawasan penyeleseaan kasus ketenagakerjaan

ISU STRATEGIS : 1. Angka pengangguran masih tinggi 2. Minimnya difersifikasi lapangan pekerjaan 3. Daya saing pencari kerja yang relatif rendah 4. Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dibandingkan pendatang 5. Keterbatasan akses informasi bursa kerja 6. Masih ada masyarakat mendapat upah di bawah UMR/UMK 7. Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja	**STRATEGIES :** 1. Membangun sistem e-recruitment (seleksi-elektronik) berbasis android atau website; 2. Menyusun roadmap pengembangan potensi unggulan ekonomi kreatif daerah untuk mendorong diversifikasi lapangan pekerjaan; 3. Menyusun kebijakan bidang keternagakerjaan terintegrasi terkait dengan pelatihan, sertifikasi dan penempatan; 4. Mengoptimalkan progam magang kerja ke luar daerah, atau ke luar negeri bagi lulusan kejuruan, akademi maupun perguruan tinggi. 5. Memaksimalkan peran fasilitasi dan advokasi terhadap sengketa atau perselihan hubungan industrial; 6. Mengembangkan informasi bursa kerja berbasis android atau website yang terintegrasi dengan pasar kerja
OPPORTUNITIES 1. Berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Terbentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Be Kraf) Nasional 3. Dukungan regulasi nasional terkait dengan pengupahan 4. Kebijakan Online Single Submission (OSS) untuk mendorong masuknya investasi	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Pengembangan Website Informasi bursa Kerja 2. Mengkolaborasikan peran Triple Helix ABG (Akademisi, Bisnis & Government) untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif daerah dalam rangka diversifikasi lapangan kerja 3. Melakukan penyesuaian UMK (upah minum kota) untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi. 4. Meningkatkan SDM lembaga atau badan penanaman modal daerah dalam memfasilitasi kemudahan berinvestasi untuk meningkatan perluasan kesempatan kerja
THREATS 1. Pesatnya arus migrasi yang berpotensi menambah jumlah tenaga kerja dari luar daerah yang lebih professional dan kompeten 2. Adanya regulasi nasional tentang ketenagakerjaan yaitu perpres No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. 3. Adanya penerapan MRA (mutual recognition arrangement) dalam MEA (masayarakat ekonomi ASEAN) terkait dengan standarisasi kualifikasi pendidikan, professional dan pengalaman 4. Daya tampung BLK Provinsi NTB masih terbatas untuk mengakomodir meningkatnya kebutuhan akan pendidikan & pelatihan kerja	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Penyusunan regulasi daerah terkait dengan ketenagakerjaan yang dapat menutupi gap antara kualitas tenaga kerja local dengan tenaga kerja luar daerah dan tenaga kerja asing 2. Menyusun roadmap kebijakan bidang ketenagakerjaan terintegrasi (three in one policy) yaitu terkait dengan pelatihan, sertifikasi dan penempatan. 3. Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja local.

10. Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai

STRENGTHS 1. Telah adanya peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) yang mengatur tentang pengelolaan sistem transportasi di Kota Mataram 2. Secara kebutuhan, rasio pemasangan fasilitas/sarpras transportasi telah memadai 3. Fasilitas, sarana dan prasarana perangkat daerah sudah memadai	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Mengikuti regulasi yang ada dan melaksanakan penegakan aturan.
WEAKNESSES 1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM teknis bidang infrastruktur 2. Lemahnya penegakan aturan terkait pemanfaatan ruang dan penataan bangunan 3. Lemahnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 4. Kurangnya penegakan aturan terhadap PKL yang berjualan di fasilitas kota (trotoar taman kota dsb). 5. Belum optimalnya pengelolaan limbah perkotaan 6. Lemahnya manajemen pengelolaan persampahan 7. Kurangnya koordinasi pemasangan utilitas perkotaan (PDAM, Listrik dsb) yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur kota terbangun. 8. Kurangnya ketersediaaan data RTLH dan kebutuhan rumah 9. Belum adanya dokumen/rencana drainase perkotaan yang integrative dan komprehensif 10. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM teknis bidang transportasi 11. Rendahnya kualitas sarpras lalu lintas perkotaan (perlengkapan jalan) 12. Rendahya kualitas angkutan public perkotaan 13. Lemahnya manajemen pengelolaan layanan perparkiran	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Fokus terhadap peningkatan kualitas perlengkapan jalan 2. Meningkatkan kualitas angkutan public dengan memperbaiki kualitas operator dari sisi kelembagaan. 3. Memperkuat kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat tentang penyelenggaraan angkutan umum di Kota Mataram 4. Meningkatkan kemampuan manajerial dan kapasitas unit pengelola layanan perparkiran 5. Meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan operasional layanan perparkiran (juru parkir) 6. Menyiapkan SDM bidang infrastruktur sesuai dengan kebutuhan 7. Mengoptimalkan pelaksanaan penataan bangunan dan penegakan aturan penataan ruang 8. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 9. Melakukan penegakan aturan terhadap PKL dan menyiapkan lahan/tempat pengganti bila memungkinan dengan bekerjasama dengan asosiasi. 10. Menyipakan infastruktur pengelolaan limbah skala kota dan komunal khususnya pada kawasan PAKUMIS dan menyiapkan aturan bagi masayarakt untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan limbah rumah tangga. 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemasangan utilitas perkotaan 12. Memperkuat basis data RTLH dan kebutuhan rumah guna meningkatkan kualitas pembangunan sektor perumahan. 13. Membuat perencanaan sistem drainase perkotaan yang integrative dan komprehensif
ISU STRATEGIS : 1. TPA masih bergantung pada daerah lain 2. kurang optmimalnya kinerja pengelolaan persampahan lingkungan 3. Belum optimalnya fungsi Bank Sampah 4. bongkar pasang jalan akibat perbaikan kabel 5. pemeliharaan sarana prasarana rambu, marka dan penerangan jalan belum maksimal 6. penyalahgunaan bahu dan badan jalan untuk parkir liar dan PKL 7. Penyalahgunaan trotoar untuk parkir liar dan PKL	**STRATEGIES :** 1. Optimalisasi sistem informasi pelayanan sarana dan prasarana perkotaan (Smart City) 2. Peningkatan penegakan hukum bagi pelanggaran pemafaatan sarpras perkotaan dan fasilitas umum 3. Membangun regulasi pemanfaatan sarpras dan fasilitas umum perkotaan yang terintegrasi 4. Penyusunan perencanaan pengembangan sarpras dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi 5. Penguatan data dasar kebutuhan infrastruktur perkotaan

8. tidak ada transportasi massal 9. Masih tingginya luas kawasan permukiman kumuh 10. Masih ada RTLH 11. belum berjalannya rekayasa lalu lintas terutama untuk mengatasi kemacetan akibat antar jemput anak sekolah 12. Sistem drainase Kota Mataram yang tidak terintegrasi dan belum tertata dengan baik belum dapat menanggulangi permasalahan banjir musiman (saat musim hujan) 13. kurangnya RTH 14. ketaatan terhadap aturan RTRW masih rendah 15. Masih rendahnya persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan 16. Masih ada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan" 17. Belum ada pengelolaan limbah B3 yang baik	6. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur perkotaan (biar keren kata Budi) 7. Mendorong kerjasama dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur strategis perkotaan 8. Peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman
OPPORTUNITIES 1. Peluang pembiayaan cukup banyak dari pemerintah pusat/non-APBD mengingat posisi kota mataram sebagai pendukung pariwisata pulau Lombok 2. Tingginya Tuntutan masyarakat akan penyediaan angkutan umum 3. Sektor infrastruktur menjadi prioritas nasional	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Mengoptimalkan pembiayan non-APBD 2. Menyiapkan strategi-strategi penyelenggaran angkutan umum yang mampu melayani kebutuhan masyarakat 3. Menyiapkan proyek-proyek strategis infrastruktur kota dan mengoptimalkan pembiayan non-APBD (anggaran pusat/provinsi, Swasta/CSR dan lembaga/donatur asing)
THREATS 1. Meningkatnya jumlah perjalanan masyarakat yang sangat bergantung kepada kendaraaan pribadi – kemacetan 2. Meningkatnya jumlah angkutan online – menyebabkan persaingan tidak sehat dengan angkutan konvensional 3. Terbatasnya sumber air bersih perkotaan dan semakin meningkatnya kebutuhan air bersih perkotaan – sangat bergantung dari ketersediaan air dari daerah lain	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Mengontrol pola perjalanan masyarakat dengan menyediakan moda alternative yang layak dan memadai 2. Menyiapkan dan meningkatkan kualitas perlengkapan jalan yang menggunakan *smart technology* yang mampu mengantisipasi perjalanan secara lebih efisien.

11. Sasaran : Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik

STRENGTHS 1. Kualitas SDM memadai 2. Tipologi wilayah yang homogen 3. Jangkauan Pelayanan tidak terlalu luas 4. Kewenangan /otonomi daerah yang sudah kita miliki	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Penguatan kapasitas yang berkelanjutan 2. Pemerataan pembangunan di semua wilayah 3. Peningkatan konektifitas di semua aspek 4. Memperkuat regulasi yang diikuti dengan reward dan *punishment* yang tegas
WEAKNESSES 1. Kompetensi petugas pelayanan publik yang masih rendah 2. Integritas petugas pelayanan masih rendah 3. Implementasi aturan yang ada belum dilakukan dengan maksimal 4. Evaluasi kinerja pelayanan publik belum optimal	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Peningkatan kapasitas Petugas Pelayanan Publik melalui diklat 2. Membuat pakta integritas dan memperkuat pengawasan internal 3. Peningkatan kualitas evaluasi melalui evaluasi secara berkala 4. Menyusun rencana tindak lanjut

5. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pelayanan publik belum dilaksanakan 6. Anggaran yang terbatas 7. Antar OPD masih menunjukkan ego sektoral	5. Mencari sumber anggaran alternatif 6. Perlu dilakukan pemerataan penghasilan aparatur
ISU STRATEGIS : 1. Masih ada anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya belum tercatat 2. Masih ada anak 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran 3. partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal 4. profesionalitasdan prinsip 3S pelayanan publik belum memadai 5. kebersihan tempat pelayanan masih perlu ditingkatkan 6. pengelolaan pelayanan pengaduan pelayanan belum memadai 7. masih rendahnya kapasitas dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas 8. masih ada praktik KKN menggunakan kenalan atau orang dalam 9. belum optimalnya keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat 10. belum meratanya akses dan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi infomasi 11. infrastruktur dan sarana prasarana informasi publik yang disediakan pemerintah belum memadai	**STRATEGIES :** 1. Optimalisasi implementasi standar pelayanan 2. Optimalisasi SOP pelayanan pengadaan 3. Penguatan pengawasan internal 4. Edukasi, advokasi dan Sosialisasi keterbukaan informasi publik 5. Peningkatan kapasitas aparatur 6. Peyusunan Sistem IKI 7. Pemberian tunjangan berbasis kinerja
OPPORTUNITIES 1. Tingkat literasi masyarakat relatif tinggi 2. Jaringan antar wilayah terkoneksi 3. Menempatkan Kota Mataram dalam posisi sebagai metropolitas Mataram Raya 4. Heterogenitas Penduduk Kota Mataram	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) *1.* Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan inovasi pembangunan daerah berbasis IT menuju *smart city* 2. Mengintensifkan kerja sama antar daerah di wilayah perbatasan 3. Menarik pengusaha untuk berinvestasi dengan jalan mempermudah perizinan dan promosi daerah
THREATS 1. Rawan Bencana Alam 2. Penyalahgunaan arus informasi 3. Degradasi moral dan sosial 4. Migrasi penduduk dari daerah lain	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Mitigasi bencana 2. Memperkuat proteksi terhadap arus informasi 3. Memperkuat pendidikan moral di lembaga formal dan non formal 4. Memperketat pengawasan penduduk pendatang

12. Sasaran : Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah

STRENGTHS 1. Kota Mataram sebagai pusat jasa 2. Penerapan sistem pajak daerah on-line	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Pengembangan sistem pendapatan Kota Mataram berbasis IT 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Peningkatan SDM

WEAKNESSES 1. Masih rendahnya rasio Pajak terhadap PDRB 2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak 3. Adanya peraturan BPJS tentang rujukan berjenjang 4. Penerimaan pajak/retribusi parker masih rendah 5. Target retribusi pasar tidak tercapai	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak 2. Penerapan reward and punishment (contoh tax amnesty) 3. Mengembangkan puskesmas menjadi Rumah Sakit tipe C atau D
ISU STRATEGIS : 1. Kemandirian daerah masih rendah	**STRATEGIES :** 1. Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah secara komprehensif 2. Pemutakhiran data wajib pajak 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan pajak dan retribusi daerah 4. Inovasi sistem pemungutan pajak berbasis IT
OPPORTUNITIES 1. Adanya peluang pengembangan puskesmas menjadi Rumah Sakit tipe C atau D 2. Kota Mataram sebagai penyangga pariwisata dan MICE 3. Potensi pengelolaan pasar dan puskesmas menjadi BLUD	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Peningkatan Fasilitas, SDM, sarana dan prasarana 2. Penyediaan sarana pengawasan berbasis IT 3. Pembentukan BLUD
THREATS 1. Kota Mataram termasuk daerah rawan bencana 2. Adanya pergeseran pola konsumsi konvensional kea rah yang lebih modern (swalayan, belanja online) 3. Banyaknya RS swasta yang bekerjasama dengan BPJS	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Manajemen bencana 2. Penyesuaian dan peningkatan kapabilitas daerah 3. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar rujukan BPJS

13. Sasaran : Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah

STRENGTHS 1. Kota Mataram sebagai pusat jasa 2. Penerapan sistem pajak daerah on-line	**Build on Strengths** (pengembangan berdasarkan kekuatan) : 1. Pengembangan sistem pendapatan Kota Mataram berbasis IT 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Peningkatan SDM
WEAKNESSES 1. Masih rendahnya rasio Pajak terhadap PDRB 2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak 3. Adanya peraturan BPJS tentang rujukan berjenjang 4. Penerimaan pajak/retribusi parker masih rendah 5. Target retribusi pasar tidak tercapai	**Overcome Weaknesses** (mengatasi kelemahan) : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak 2. Penerapan reward and punishment (contoh tax amnesty) 3. Mengembangkan puskesmas menjadi Rumah Sakit tipe C atau D
ISU STRATEGIS : 1. Kemandirian daerah masih rendah	**STRATEGIES :** 1. Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah secara komprehensif 2. Pemutakhiran data wajib pajak 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan pajak dan retribusi daerah 4. Inovasi sistem pemungutan pajak berbasis IT

OPPORTUNITIES 1. Adanya peluang pengembangan puskesmas menjadi Rumah Sakit tipe C atau D 2. Kota Mataram sebagai penyangga pariwisata dan MICE 3. Potensi pengelolaan pasar dan puskesmas menjadi BLU	**Explore Opportunities** (menjajaki peluang) 1. Peningkatan Fasilitas, SDM, sarana dan prasarana 2. Penyediaan sarana pengawasan berbasis IT 3. Pembentukan BLUD
THREATS 1. Kota Mataram termasuk daerah rawan bencana 2. Adanya pergeseran pola konsumsi konvensional kea rah yang lebih modern (swalayan, belanja online) 3. Banyaknya RS swasta yang bekerjasama dengan BPJS	**Block Threats** (menghadapi tantangan) 1. Manajemen bencana 2. Penyesuaian dan peningkatan kapabilitas daerah 3. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar rujukan BPJS

Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan fokus tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan arah kebijakan tersebut kemudian dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu untuk pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

Adapun tahapan fokus arah pembangunan Kota Mataram tahun 2016-2021 dapat sebagai berikut:

Tabel 6.1
Fokus Kebijakan Tahunan Kota Mataram 2016-2021

Arah Kebijakan					
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Memacu Pembangunan SDM, Ekonomi Rakyat dan Infrastruktur Perkotaan untuk Mengurangi Kemiskinan Guna Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif melaui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Peningkatan SDM dan Sarana Prasarana Perkotaan dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Investasi dan Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan	Mempercepat Pembangunan SDM dan Infrastruktur untuk Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreatifitas dalam rangka Penurunan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial	Mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca bencana melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan pemulihan infrastruktur layanan publik	Menuntaskan pencapaian target kinerja pembangunan Kota Mataram Tahun 2021 yang Akuntabel demi Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya
Sudah dilaksanakan			**Akan dilaksanakan**		

6.1. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan terpilihnya strategi dan arah kebijakan, maka kemudian pemerintah Kota Mataram menentukan program prioritas berupa program-program pembangunan yang menggambarkan keterpaduan antara sasaran pembangunan dengan strategi yang dipilih. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menetapkan tema bagi urusan dan program pembangunan yang bersifat strategis dan memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah maka dibuatlah prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagaimana dibawah ini:

Tabel 6.2
Prioritas Pembangunan Kota Mataram 2016-2021

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Strategik)	Isu Strategis Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (*outcome*)
1	Pemantapan Stabilitas dan Kondusifitas Kewilayahan	Masih adanya kejadian gangguan kamtibmas (penyakit masyarakat dan kriminalitas) yang tidak tertangani	kegiatan siskamling dan penanganan aparat	Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)
		Masih terdapat kejadian konflik horizontal/antar warga horizontal/antar warga	Pemetaan potensi konflik dan optimalisasi kohesi sosial	Indeks Kota Toleran
		Rendahnya kesadaran tentang resiko perubahan iklim dan bencana	Pengembangan konsep Kelurahan Tanggap Bencana	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)
2	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Penyebaran kualitas sarana dan prasarana sekolah serta guru tenaga pendidik tidak merata	Optimalisasi implementasi sistem akreditasi sekolah	Angka Rata-rata lama sekolah
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan berkualitas	Tingkat kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih (PHBS) masih rendah	Edukasi, advokasi dan Sosialisasi PHBS dan Jaminan Kesehatan Mandiri kepada masyarakat	Angka Harapan Hidup
		Rendahnya proporsi penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan		Angka Kesakitan
		Belum Optimalnya pelayanan Pelayanan kesehatan bagi Ibu dan anak	Optimalisasi implementasi SPM di semua unit fasyankes	persentase pemenuhan indikator SPM

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Strategik)	Isu Strategis Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (*outcome*)
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan	belum optimalnya wadah kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Memberikan dukungan terhadap pelembagaan sistim pembangunan partisipatif	Indeks Pembangunan Kepemudaan
		kurangnya kegiatan bagi pemuda terutama dalam menyalurkan minat dan bakat yang positif serta menstimulasi peran pemuda dalam kegiatan lingkungan/masyarakat	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk ruang kreasi kegiatan bagi anak-anak muda	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
		masih ada kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak	Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya	Penilaian Kota Layak Anak
		belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan perempuan dalam bentuk susunan organisasi	Penguatan kelembagaan perempuan dan masyarakat dari aspek struktural dan kultural	Indeks Pembangunan Gender
5	Percepatan Pengurangan Angka Kemiskinan	belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pelatihan TOT (training of trainer) secara berkesimabungan kepada tenaga PSKS untuk memaksimalkan penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
		masih tingginya kesenjangan ekonomi	Meningkatkan sinergitas program-program kemiskinan lintas sektor	Persentase Keluarga Pra Sejahtera
		lemahnya basis data dan informasi kemiskinan yang akurat sehingga bantuan tidak merata dan tidak tepat sasaran	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi kemiskinan berbasis android oleh lintas sektor untuk mengintervensi program-program kemiskinan	Persentase Hibah/ Bantuan Sosial yang tepat sasaran
		Masih ada masyarakat miskin yang tidak mengakses alat kontrasepsi	Mengoptimalkan peran kader posyandu dan kader KB untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan pendampingan KIA khususnya kepada rumah tangga miskin	Total Fertility Rate (TFR)
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang	Mengoptimalkan cakupan desiminasi informasi GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Skor Pola Pangan Harapan
6	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan	rendahnya pengembangan kluster industri berbasis potensi lokal	Menyusun rencana induk pengembangan kawasan terintegrasi berbasis keungulan lokal	Persentase pertumbuhan IKM
		perlunya kontrol yang lebih optimal terhadap harga bahan2 pokok di pasaran oleh stakeholder terkait secara continue /berkelanjutan	Mendorong terbangunnya kerjasama dengan daerah-daerah penyangga untuk menjamin ketersedian (supply) dan kestabilan harga bahan pokok penting dalam jangka panjang	Persentase Komoditas Strategis Yang Terinformasikan

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Strategik)	Isu Strategis Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (*outcome*)
		kurang efektifnya pengelolaan pariwisata	Mengkolaborasikan peran akademisi, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah untuk mendisain model pelatihan manajemen pariwisata berkelanjutan.	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan
		Ketersediaan modal bagi sektor-sektor ekonomi unggulan	Meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah	Persentase pertumbuhan Wira Usaha Baru
		rendahnya daya saing UMKM terhadap ritel modern	Memfasilitasi pelaku UMKM masuk dalam rantai distribusi perusahaan ritel modern berbasis e-commerce	
7	Peningkatan Kualitas Keahlian Tenaga Kerja dan Iklim Berwirausaha	Angka pengangguran masih tinggi	Menyusun roadmap pengembangan potensi unggulan ekonomi kreatif daerah untuk mendorong diversifikasi lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Daya saing pencari kerja yang relatif rendah	Menyusun kebijakan bidang keternagakerjaan terintegrasi terkait dengan pelatihan, sertifikasi dan penempatan	persentase penempatan tenaga kerja
8	Pemantapan Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Perkotaan	Rendahnya nilai kelayakhunian Kota	Penguatan data dasar kebutuhan infrastruktur perkotaan	Indeks Kota Layak Huni
		Lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran pemafaatan sarpras perkotaan dan fasilitas umum	Membangun regulasi pemanfaatan sarpras dan fasilitas umum perkotaan yang terintegrasi	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
9	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masih rendahnya kapasitas dan disiplin aparatur dalam menjalankan	Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Individu berbasis aplikasi	Nilai AKIP
		masih rendahnya ketersediaan data yang akurat dan update	Optimalisasi implementasi standar pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat
		infrastruktur dan sarana prasarana informasi publik yang disediakan pemerintah belum memadai	Edukasi, advokasi dan Sosialisasi keterbukaan informasi publik	Prosentase OPD yang sudah menerapkan e-Government
10	Peningkatan Kemandirian Daerah	Masih rendahnya kemandirian daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan pajak dan retribusi daerah	Rasio Kemandirian Daerah

Program prioritas pembangunan daerah menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas jangka menengah yang bersifat operasional yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Arsitektur kinerja RPJMD antar sasaran pembangunan daerah dengan program operasional dapat terlihat dari skema berikut:

Tabel. 6.3

Program Pembangunan Daerah yang DIsertai Pagu Indikatif Kota Mataram

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Misi I: Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan, Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun dan Damai									
	Tujuan I: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal				**Indeks Keamanan Manusia**	**Kategori**	**N/A**	**4**		
	Sasaran 1.1: Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif				**Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)**	**Nilai**	**253,87**	**232**		
					Indeks Kota Toleran	**Nilai**	**NA**	**4,2**		
		Optimalisasi penegakan hukum	Pengembangan Standar Operasional Prosedur penanganan tantribum dan konflik sosial (koordinasi terpadu antar stakeholder)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Satpol PP yang tersertifikasi	%	75	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase lingkungan yang aman tertib bersih indah dan mandiri	%	80	95	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase tertanganinya kasus-kasus pelanggaran Perda	%	80	90	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Persentase konflik sosial ditindaklanjuti	%	N/A	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan se Kota Mataram
		Edukasi, advokasi dan Sosialisasi	Pemetaan potensi konflik dan gangguan keamanan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Potensi Konflik ditindaklanjuti	%	97,94	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengembang-an momentum dalam peningkatan kohesi sosial	Optimalisasi peran lembaga adat, lembaga kepemudaan dan forum koordinasi	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kejadian Konflik yang tertangani	%	98,29	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase penduduk menggunakan hak pilih pada pemilu tingkat daerah	%	98,48	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sasaran 1.2: Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana				**IRBI**	**indeks**	**101,7**	**80,32**		
		Edukasi, advokasi dan Sosialisasi mitigasi kebencanaan	Pengembangan konsep Kelurahan Tanggap Bencana	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	%	n/a	50	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Porsentase Kelurahan rawan kebakaran	%	8	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran
		Peningkatan kapasitas kelembagaan kebencanaan	Pengembangan Standar Operasional Prosedur mitigasi bencana terpadu	Program Peningkatan Kesiagaan Penanganan Kebakaran	Respontime	menit	n/a	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran
				Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana tertangani	Persen	100	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Pemulihan Pasca Bencana Alam	Persentase pemulihan pasca kejadian bencana sesuai jadwal rehab rekon	Persen	100	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Misi II: Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Derdaya Saing									
	Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial				**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Nilai**	**76,37**	**79,60**		
	Sasaran 2.1: Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif				**Harapan Lama Sekolah (HLS)**	**Tahun**	**15,28**	**15,8**		
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	**Tahun**	**9,05**	**9,6**		
		Optimalisasi pencapaian angka partisipasi sekolah dan angka kelulusan	Peningkatan kapasitas penyelenggara pendidikan (sarana prasarana, guru dan manajemen sekolah) dan pemberian bantuan siswa miskin	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase ruang belajar PAUD dalam kondisi baik	%	100	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase angka kelulusan, dan angka melanjutkan	%	100	100		
					Persentase operasional sekolah tingkat PAUD yang berjalan baik	%	100	100		
				Pendidikan Non Formal	Persentase ruang belajar TK dan SKB dalam kondisi baik	%	0	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	% Ruang belajar dalam kondisi baik	%	78,3	80	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
					Persentase siswa tidak mampu yang mendapat pendidikan dasar	%	0	100		
					Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	%	98	99		
					Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD	nilai	74,82	75		
					Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	nilai	61,38	65		
					Angka Melanjutkan SD	%	93,31	95		
			Pemerataan kapasitas dan kualitas dan peran guru dan tenaga kependidikan	Program Pendidikan Non Formal	% peserta ujian paket A dan atau B yang mendapat ijazah	%	93	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV, % Guru tersertifikasi	%	93,37	98	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
		Optimalisasi implementasi sistem akreditasi sekolah	Pemenuhan kategor akreditasi minimal B bagi seluruh sekolah	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B	%	89,27	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Sekolah (Dana BOS)	Persentase sekolah tingkat pendidikan dasar yang mendapat dana BOS	%	100	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran 2.2: Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas				**Angka Harapan Hidup (AHH)**	**Tahun**	**70,43**	**71,98**		
					Indeks Pembangunan kesehatan Masyarakat	**Nilai**	**NA**	**0,65**		
		Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan sarpras, akreditasi, dan SDM kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	%	100%	100%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan
					% Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif	%	100%	100%		
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas/UPT dengan kondisi gedung baik	puskesmas	11	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pustu dengan Kondisi Gedung Baik	pustu	10	17		
					Jumlah Poskesdes dengan Kondisi Baik	poskesdes	9	23		
				Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	% Tenaga Kesehatan Memiliki Surat Izin Praktek (SIP)	%	0	100%		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar Pasien Masyarakat Miskin	%	100%	100%		
					Puskesmas yang terakreditasi	puskesmas	6	11		
				Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan	Jumlah sarana penunjang pelayanan kesehatan	sarana	1	2		
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	% Puskesmas yang melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100%	100%		
				Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan	% ketersediaan Obat Generik	%	100%	100%		
				Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan	% ketersedian alat kesehatan bagi Puskesmas dan jaringannya	%	40%	70%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pengaduan ketersediaan tempat tidur	%	NA	0%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	RSUD Kota Mataram
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Cakupan dokter umum terhadap pemenuhan pelayanan medis	%	100%	100%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	RSUD Kota Mataram
					Cakupan dokter Spesialis terhadap pemenuhan pelayanan medis	%	100%	100%		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Respon time pelayanan Emergency call 119	menit	NA	15 menit		
					Indeks Kepuasan Pelayanan Homecare		NA	12		
					Persentase Pengaduan yang diselesaikan	%	90%	100%		
					Rata-rata waktu antri pendaftaran	jam	2 - 4 jam	2 jam		
					waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan (SPM Farmasi)	 menit menit	 39,36 50,29	 30 60		
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rasio perawat terhadap tempat tidur	Perawat per Bed	1 perawat/ 7 bed	1 perawat/ 3 bed	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	RSUD Kota Mataram
					Cakupan Tenaga dan Pelayanan Instalasi Penunjang sesuai standar	%	NA	100%		
					(WU) Persentase SDM yang mendapat pelatihan kompetensi pelayanan	%	70%	100%		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Cakupan pemenuhan administrasi Rumah Sakit terhadap standar akreditasi sarana dan prasarana umum Rumah Sakit terhadap standar akreditasi	%	NA	85%		
					Cakupan pemenuhan standar SDM Rumah Sakit terhadap standar akreditasi	%	95%	100%		
			Intervensi kasus gizi buruk dan kematian ibu	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	% Balita gizi buruk yang ditangani	%	100%	100%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95%	100%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
				Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Cakupan Pelayanan Nifas	%	89%	100%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan Kesehatan Ibu Bersalin	%	89%	100%		
					Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	85%	95%		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja	%	11	11		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi essensial terpadu	%	11	11		
					Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	95%	100%		
					Cakupan kunjungan neonatal lengkap	%	95%	100%		
					Cakupan pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	60%	85%		
					Cakupan pelayanan anak balita	%	67%	100%		
		Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat secara Mandiri	Edukasi, advokasi dan Sosialisasi PHBS dan Jaminan Kesehatan Mandiri kepada masyarakat	Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	53%	100%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	% Persentase PHBS pada tatanan Rumah tangga	%	40%	60%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	0%	100%		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100%	100%		
					Cakupan Posyandu Aktif	%	40%	50%		
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	% masyarakat yang mengakses jamban keluarga	%	80%	90%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan
					% masyarakat yang mengakses air bersih	%	80%	90%		
					% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja	%	100%	100%		
					% Puskesmas yg melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga	%	100%	100%		
		Pengendalian penyakit melalui pencegahan beban ganda penyakit dalam waktu bersamaan	Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	% TPM yang diperiksa dan dibina	%	70%	80%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Program Pengendalian Penyakit	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	90%	95%		
					Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	NA	100%		
					Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	NA	100%		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penderita diare yang ditangani	%	NA	100%		
					Cakupan balita pnemonia yang ditangani	%	100%	100%		
					Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100%	100%		
					% Calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya	%	100%	100%		
					% Penderita DBD yang ditangani	%	100%	100%	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	NA	100%		
					Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	NA	100%		
					Cakupan kpelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	NA	100%		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	%	NA	100%		
	Sasaran 2.3: Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak				**Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)**	**Nilai**	**NA**	**65**		
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	**Nilai**	**NA**	**0,327**		
					Kategori penilaian Kota Layak Anak (KLA)	**Nilai**	**NA**	**700**		
		Memberikan dukungan terhadap pelembagaan sistim pembangunan partisipatif	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk ruang kreasi kegiatan bagi anak-anak muda;	Program Pendidikan Non Formal	Presentase peserta ujian paket A dan atau B yang mendapat ijasah	%	100	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Per Tahun	Orang	25705	34372	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	Persentase bahan pustaka yang terpelihara	%	100	100		
				Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang Memiliki Dokumen AD/ART	%	N/A	86	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif di OKP	%	N/A	1,11		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda yang aktif dan mandiri	%	N/A	70%		
				Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.	Persentase pelatih yang memiliki sertifikat atau lisensi pelatih	%	N/A	100		
				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Perolehan Prestasi Olahraga unggulan	Medali emas, perak dan perunggu	N/A	emas : 35 Perak : 40 Perunggu :15		
			Penguatan kelembagaan PUG	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan	Persentase jumlah OPD yang memiliki komitmen kesepahaman tentang PUG	%	NA	44,4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	% Perangkat Daerah yang memenuhi 7 prasyarat PUG	%	NA	44,4		
					% OPD yang melaksanakan PPRG	%	NA	100		
				Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	kali	1 kali	12 kali		
			Memfasilitasi kegiatan rembuk lingkungan secara rutin dan berkelanjutan.	Program peningkatan dan pengembangan manjemen pembangunan partisipatif	persentase kelurahan yang terseleksi	%	N/A	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan se Kota Mataram
				Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	IKM Kecamatan	%	N/A	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase pelayanan adm. Kependudukan tepat waktu	%	N/A	100		
				Program Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berkinerja baik	%	N/A	100		
				Program Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang tertib administrasi	%	N/A	100		
					Persentase UMKM terverifikasi	%	N/A	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan se Kota Mataram
					Persentase capaian PBB	%	N/A	100		
					Persentase kegiatan keagamaan yang terfasiitasi	%	N/A	100		
					Persentase karang taruna aktif	%	N/A	100		
					Persentase kader PKK aktif	%	N/A	100		
					Persentase pelayanan terhadap kelembagaan masyarakat	%	N/A	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase keterwakilan unsur masyarakat pada MPBM (Unsur Tokoh Agama, , Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Kader)	%	N/A	100		
		Memberikan edukasi kepada masyarakat utk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya;	Advokasi, konseling, perawatan medis dan psikologis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan khusus	%	NA	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah Data kekerasan terpilah gender	dokumen	1(laporan Dinas)	2 (lapo ran simphony dan Dinas)	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Cakupan pembinaan kelompok Perempuan kepala keluarga (Pekka) dan Korban KDRT rawan ekonomi	%	0	6		
					Persentase Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang aktif	%	0	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemenuhan kriteria Kota Layak Anak	Optimalisasi peran lembaga pemeritah dan forum anak	Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA)	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang pro aktif dalam pengembangan KLA	%	3,57	100		
					Persentse Forum Anak yang aktif	%	0	100		
	MISI III : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
	Tujuan I: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah dan Penurunan Angka Pengangguran				**Persentase Penduduk Miskin (Head Count Index)**	**%**	**10,45**	**7,55**		
					Pertumbuhan Ekonomi	**%**	**7,99**	**8,35**		
	Sasaran 3.1: Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat				Indeks Kedalaman Kemiskinan	**Nilai**	**1,53**	**1,43**		
					Indeks Keparahan Kemiskinan	**Nilai**	**0,38**	**0,27**		
					Persentase Keluarga Pra Sejahtera	**%**	**11,50**	**9,00**		
					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	**Nilai**	**3**	**3-4**		
		Meningkatkan sinergitas program-program kemiskinan lintas sektor	Pemberdayaan PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan penanganan	%	0,25 %	70,17 %	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	Dinas Sosial

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PRSE yang mendapatkan penanganan	%	0,49 %	0,82 %	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	Dinas Sosial
					Persentase informasi program penanganan PMKS	%	100	100		
					Persentase penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana alam/ sosial sesuai SOP	%	100	100		
				Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang ditangani	%	2,35%	4,20%		
				Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Persentase PMKS lanjut usia (lansia) yang ditangani	%	1,12%	4,85%		
				Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika	Persentase penanganan penyandang disabilitas dan korban NAPZA	%	N/A	17,09	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	Dinas Sosial
				Program Jaminan Sosial Keluarga	Persentase verifikasi data PBI JKN	%	N/A	100		
			Pelatihan TOT (training of trainer) secara berkesimabungan kepada tenaga PSKS untuk memaksimalkan penanganan PMKS.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mengalami perubahan prilaku	%	2,61	4,79		
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan kasus yang ditangani oleh LK3	%	N/A	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase LKS yang memenuhi standar layanan	%	N/A	100		
					Persentase pemberdayaan bagi Karang Taruna dan PSM	%	31,85	41,40		
				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase satuan petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana	%	100	100		
			Optimalisasi program-program penanganan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase lingkungan rawan konflik yang aktif menjalankan program keserasian sosial	%	N/A	100		
				Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase janda pahlawan, veteran dan janda veteran yang mendapatkan santunan	%	N/A	58,33	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	Dinas Sosial
					Persentase CSR yang tersalurkan untuk PMKS	%	N/A	100		
					Persentase penyaluran bantuan sosial bagi penerima PKH	%	100	100		
			Mengoptimalkan peran kader posyandu dan kader KB untuk	Program Keluarga Berencana (KB)	Tingkat kepesertaan ber KB	%	76,71	78,92	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			memberikan edukasi, sosialisasi dan pendampingan KIA khususnya kepada rumah tangga miskin.		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	0,15	0,05	dan Keluarga Berencana	Keluarga Berencana
				Program Kependudukan	Angka Kelahiran remaja usia 15-19 thn	%	0,2	30,0		
					Rata-Rata Usia Kawin pertama Perempuan	tahun	21,01	63,7		
				Program Pembangunan Keluarga	Cakupan poktan yang diberdayakan disetiap Kelurahan	%	1	30,0		
			Optimalisasi pemanfaatan aplikasi kemiskinan berbasis android oleh lintas sektor utk mengintervensi program-program kemiskinan.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	% proposal yang diproses	%	0	97,00	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Menjamin kecukupan bahan pangan	Pengendalian komoditas pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	145,35	175,00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
					Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	%	10	20		
					Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Akses Pangan	%	100	100		
					Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penanganan Rawan Pangan	%	100	100		
				Program Peningkatan diversifikasi/ Penganeka ragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	%	83	98		
					Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pangn	%	100	100		
			Peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan hasil olahannya	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	Produktivitas tanaman pangan per hektar (kw/ha)	Kw/Ha	Padi=65,75 Kw/Ha	75,00 Kw/Ha	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Pertanian
							Kedelai = 12.5 Kw/Ha	10.00 Kw/Ha		
							Jagung = -	63.00 Kw/Ha		
					Persentase Luasan hortikultura	%	25%	16%	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Pertanian
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah olahan	jenis	5	26	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Pertanian
				Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase kelompok tani kelas madya keatas	%	25	25		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan kelompok tani terlayani sarana dan prasana pertanian	%	32	96		
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	62	80	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan produksi peternakan	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penurunan kasus penyakit hewan ternak	%	20	10	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Pertanian
				Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi Ternak	Persen	Ternak besar = 2.473	Ternak besar 2.625		
							Ternak kecil = 3.241	Ternak kecil 3.500		
							Unggas = 117.918	Unggas 135.500		
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan PAD RPH dan Pasar Hewan	%	20	100		
			Peningkatan konsumsi ikan	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	% kualitas pengolahan hasil perikanan	%			Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Masyarakat pesisir yang terlatih	orang	30	60		
	Sasaran 3.1: Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan				**PDRB per Kapita**	**PDRB per Kapita**	**Rupiah**	**33.947.459**		
					Laju Inflasi	**Laju Inflasi**	**persen**	**3,5**		
					Indeks Gini	**Indeks Gini**	**nilai**	**0,314**		
		Peningkatan Volume Industri	Mendorong pertumbuhan UKM baru	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	% Pertumbuhan UKM	%	33	90	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mendorong pertumbuhan wira usaha baru	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah wira usaha baru	WUB	2792	3100	Menengah	Kecil dan Menengah
					Jumlah produk UKM yang terstandar	ukm	30	80		
			Mendorong pertumbuhan IKM baru	Pengembangan Industri Kecil Menengah	% pertumbuhan IKM	%	3,78	5,39	Urusan Pilihan Perindustrian	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah produk IKM yang bersertifikat	produk	100	120		
			Peningkatan kapasitas produksi	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menggunakan IT	%	60	80		
		Meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah	Penguatan kelembagaan koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	unit	397	507	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah Koperasi berkualitas	unit	79	127		
			Memfasilitasi pelaku UMKM masuk dalam rantai distribusi perusahaan ritel modern berbasis e-commerce;	Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	% pemberian bansos kelompok ekonomi tepat sasaran	%	80	100	Pilihan Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Meningkatkan potensi ekonomi lokal dan iklim investasi yang kondusif	Promosi potensi investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investasi	PMA; PMDN	50 PMA ; 35 PMDN	100 PMA ; 40 PMDN	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penguatan Iklim Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Investor Aktif	%	35%	65%	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Penanaman Modal	Target Investasi	Miliar Rupiah	0	1.500 miliar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	
			Mengkolaborasikan peran akademisi, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah untuk mendisain model pelatihan manajemen pariwisata berkelanjutan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	8	48	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Persenatase pelaku ekonomi kreatif yang aktif di kepariwisataan	%	5	30		
			Menyusun rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi berbasis keungulan lokal;	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar pelayanan	%	100	100		
					Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang memenuhi standar pelayanan	%	6,5	6,5		
					Persentase destinasi wisata dalam Kondisi Baik	%	100	100	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pelestarian Budaya dalam rangka peningkatan Daya Tarik Wisata melalui Edukasi, advokasi, Sosialisasi dan	Optimalisasi peran lembaga adat/krama adat di tiap lingkungan untuk pelestarian budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	% Siswa duta budaya yang aktif	%	0	35	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	Dinas Pendidikan
			Identifikasi, inventarisasi, dan apresiasi warisan budaya, adat dan tradisi lokal serta nilai	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya lokal yang terinventarisasi	%	0	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	Dinas Pendidikan

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		apresiasi mengenai pelestarian kebudayaan daerah dan bangsa khususnya kepada pelajar dan pemuda	kebangsaan		% sanggar seni yang menerima aspresiasi	%	0	35	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	Dinas Pendidikan
		Membangun kemitraan dan jejaring usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan	Peningkatan SDM pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan	% peningkatan produksi perikanan budidaya	%	n/a	5	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengembangan perikanan tangkap	% peningkatan produksi perikanan tangkap	%	n/a	5		
		Optimalisasi sektor perdagangan	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	% pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	%	42,72	47,95	Urusan Pilihan Perdagangan	Dinas Perdagangan
					% pasar dalam kondisi baik atau layak	%	52,63	100		
				Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	% PKL yang meningkat usaha perdagangannya	%	30	55		
					Jumlah TDU yang diterbitkan	TDU	30	30		
			Peningkatan tertib niaga	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah jenis produk unggulan yang menjadi komoditas ekspor		3	4		
				Program Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Laju harga barang pokok dan penting (%)	%	4,39	3,03		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	Persentase Pencapaian PAD Pasar	%	98,86	99	Urusan Pilihan Perdagangan	Dinas Perdagangan
				Program Pengamanan Perdagangan Menuju Tertib Ukur	% Alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	100	100		
					% Realisasi PAD Kemetrologian yang dicapai	%	0	100		
	Sasaran 3.2: Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif				**Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)**	**%**	**92,5**	**95,93**		
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**%**	**7,5**	**4,07**		
		Perlindungan dan Jaminan Keselamatan Kerja.	Memaksimalkan peran fasilitasi dan advokasi terhadap sengketa atau perselihan hubungan industrial	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	%	0	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Menyusun kebijakan bidang keternagakerjaan terintegrasi terkait dengan pelatihan, sertifikasi dan penempatan	Program Penempatan Calon Transmigrasi	Persentase calon transmigrasi yang dibina	%	100	100	Urusan Pilihan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
		Perluasan kesempatan kerja	Pemberian pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja	%	-	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Mengembangkan informasi bursa kerja berbasis android atau website yang terintegrasi dengan pasar kerja dan JOB FAIR	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Lowongan kerja yang tersedia		0	1250		
					Persentase lulusan pelatihan tenaga kerja mandiri	%	0	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mengoptimalkan progam magang kerja ke luar daerah, atau ke luar negeri bagi lulusan kejuruan, akademi maupun perguruan tinggi.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri	Persentase CTKI/CTKW yang dikirm	%	0	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Menyusun roadmap pengembangan potensi unggulan ekonomi kreatif daerah untuk mendorong diversifikasi lapangan pekerjaan;	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Pelaku Pariwisata binaan	%			Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata	%	6,5			
	MISI IV : MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN									
	Tujuan I: Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas				**Indeks Kota Layak Huni**	**%**	**n/a**	**67**		
	Sasaran 4.1: Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai				**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang**	**%**	**n/a**	**67**		
					Indeks Kota Layak Huni	**%**	**50**	**80**		
					Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	**persen**	**55**	**65**		
		Meningkatkan kualitas tata kelola ruang, layanan infrastruktur perkotaan dan kualitas	Pengembangan akses konektifitas wilayah	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan yang berfungsi sesuai umur teknis	%	86,32	86,25	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara	%	14	24		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		lingkungan hidup serta akses cakupan terhadap layanan air minum, sanitasi layak dan rumah layak		Peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase cakupan pelayanan angkutan umum	%	0,23	0,48	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Program Manajemen dan rekayasa lalu lintas	Peningkatan level pelayanan jalan	Level	Level C (0,45)	Level B (0.28)		
				Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase Penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas dan angkutan	Pelang-garan	13.424	-5		
				Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Peningkatan rasio kendaraan uji	%	58	68		
				Program Peningkatan pelayanan perparkiran	Persentase tingkat kepatuhan dan ketertiban pelayanan parkir	%	50	64		
			Pengembangan infrastruktur pengendali banjir	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase kondisi baik	%	80	95	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengendalian Banjir	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	%	60	75		
			Pemenuhan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang layak	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase KK MBR yang terlayani air minum	%	56,79	71,91	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase KK MBR yang memiliki akses pengolahan air limbah	%	42,69	44,32		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Skala Kota	Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	80	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak (Pengembangan pemukiman vertical, Rehab dan Pembangunan RTLH))	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	NA	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pengembangan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau	Program Pembangunan/ Rehabilitasi bangunan publik	Jumlah Landmark yang terbangun	unit	0	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Yang Tertata	ha	N/A	100		
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik (Target Nasional 20%)	%	N/A	100		
			Peningkatan kinerja pengelolaan sampah perkotaan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	87	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan berbasis lingkungan	Persentase sampah yang tertangani	%	N/A	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan se Kota Mataram
			Peningkatan Kualitas Air dan Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	N/A	IKA: 37,20 dan IKU:83,20	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan memiliki izin pengelolaan limbah cair (IPLC)	%	0	100		
				Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian kasus pengaduan LH	%	0	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan penegakan hukum bagi pelanggaran pemafaatan sarpras perkotaan dan fasilitas umum	Membangun regulasi pemanfaatan sarpras dan fasilitas umum perkotaan yang terintegrasi	Program Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Publilk	Persentase Bangunan Yang Memenuhi Standar Bangunan Gedung	Persen			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Percepatan penyususnan RDTR dan fasilitasi upaya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang memiliki IMB	%	0	0,55		
	MISI V : MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)									
	Tujuan I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kategori**	**C**	**BB**		
	Sasaran 5.1: Tercapainya				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kategori**	**C**	**BB**		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik				**Nilai AKIP**	**Nilai**	**58,72**	**80**		
					Opini BPK	**Predikat**	**WTP**	**WTP**		
					Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan dan Penilaian Ombudsman	**Kategori**	**B**	**A+**		
		Optimalisasi pelayanan publik	Penguatan SOP pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Pendaftaran dan Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP-el	%	100	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase Tingkat akurasi/keabsahan data dokumen administarsi kependudukan	%	100	100		
				Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	%	100	100		
					Cakupan kepemilikan akta perkawinan dan perceraian	%	100	100		
					Cakupan kepemilikan dokumen perubahan status anak, kewarganegaraan dan akta kematian	%	100	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Optimalisasi sistem informasi pelayanan sarana dan prasarana perkotaan (Smart City)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Prosentase Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	n/a	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase OPD yang memiliki Sistem Informasi pemerintahan yang terintegrasi	%	n/a	46	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	%	Level I	level II/ kategori kurang/Limited/Penerapan angka Kerja Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Indeks Teknologi	%	Level I	level II/ kategori kurang/ Limited/ Penerapan angka Kerja Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	
					Indeks Penanggulangan Pemulihan	level	Level I	level II/ kategori kurang/Limited/Penerapan angka Kerja Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Indeks Tata Kelola Keamanan Informasi	level	Level I	level II/ kategori kurang/ Limited/ Penerapan angka Kerja Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	
					Indeks Kerangka Kerja Keamanan Infomasi	level	Level I	level II/ kategori kurang/Limited/Penerapan angka Kerja Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	
					Indeks Pengelolan Risiko Keamanan Infomasi	level	Level I	level II/ kategori kurang/ Limited/ Penerapan angka Kerja Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	
			Pengembangan Kawasan Pemerintahan	Program Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Publik	Persentase Bangunan Yang Memenuhi Standar Bangunan Gedung	%	69	84	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penguatan SOP kearsipan	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase arsip yang terestorasi	%	0	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan	Jumlah Arsiparis yang bersertifikat.	orang	25	38		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengembangan Kawasan Pemerintahan	Program Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Publik	Persentase Bangunan Pemerintahan Yang Memenuhi Standar Bangunan Gedung Negara	%	69,23	80	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
					Jumlah Landmark yang terbangun	Unit	0	6	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
				Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik	Persentase indikator pelayanan Kecamatan berkriteria baik (nilai 80)	%	0	0	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan
				Program Peningkatan Capaian Kinerja	Persentase OPD dengan Nilai LPPD Tinggi	%	100	100	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
					Persentase laporan kinerja yang dapat diselesaikan tepat waktu	%	100	100		
				Program pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase kelurahan dengan kriteria cepat berkembang	%	n/a	20		
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase Perda yang sesuai dengan perundang-undangan (tidak dibatalkan)	%	100	100		
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Persentase Jumlah Hibah yang tepat sasaran	%	100	1		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai SAKIP Setda	Nilai/ Kategori	30,39	80	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks/ Kategori	700	825		
				Program Penataan Daerah, Organisasi, dan Ketatalaksanaan serta PAN	Persentase OPD yang berdasarkan analisis kelembagaan telah sesuai standar Right Sizeing	%	15,38	23,076923		
					Persentase jabatan dengan analisis beban kerja	%	13,89	18		
					Persentase jabatan dengan uraian jabatan	%	13,89	18		
				Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Lokal	Persentase BUMD yang akuntabel	%	n/a	100		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-procurement	%	100	100		
				Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang menggunakan SSH dalam penyusunan anggaran	%	100	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase OPD yang menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran	%	100	100		
					Persentase Laporan realisasi fisik OPD tepat waktu	%	100	100	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
				Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang outputnya selesai	%	100	100		
				Program Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana rumah tangga kepala daerah	Indeks	100	100		
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan DPRD	dokumen		6	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD
					Jumlah dokumen pandangan umum dan pendapatan di akhir fraksi	dokumen		12	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD
					Persentase usulan perda inisiatif yang terfasilitasi naskah akademik	%		100	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD
					Persentase rapat paripurna yang terdokumentasi	%		100	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase anggota dewan yang mendapat peningkatan kapasitas	%		100	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD
					Persentase produk hukum tersosialisasi	%		90		
					Indeks kepuasan kunjungan kerja	%		80		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana sekretariat daerah	Indeks	100	100	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD
				Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah	Indeks	100	100		
			Optimalisasi SOP pelayanan pengadaan	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase liputan kegiatan KDH & WKDH yang menjadi bahan publikasi	%	100	100		
			Pengembangan Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Program penelitian dan pengembangan SDA, Sarana/Prasarana dan Wilayah	Persentase hasil kelitbangan yang di manfaatkan	%	n/a	100	Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Program penelitian dan pengembangan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase hasil kelitbangan yang di manfaatkan	%	n/a	100		
				Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	n/a	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Penunjang Kelitbangan	Persentase Hasil Kajian yang memenuhi standar mutu	%	n/a	100	Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Penguatan SOP Perijinan	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan	Persentase Pengaduan terselesaikan	%	92	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase penyelesaian izin Pembangunan Sarana Prasarana Perkotaan sesuai SOP	%	82	91		
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian izin Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai SOP	%	82	91	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pengembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Kesehatan rujukan	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	(WU) Persentase inovasi pelayanan yang berjalan baik	%	100	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	RSUD Kota Mataram
					Rata-rata waktu antri pendaftaran	jam	2-4	2-4		
					Respon time pelayanan Emergency call 119	menit		15		
					Indeks Kepuasan Pelayanan Homecare	rata-rata	3	4		
					Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan racikan	menit	39.36;50.26	30;60	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	RSUD Kota Mataram

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pengaduan ketersediaan tempat tidur	%	90	0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	RSUD Kota Mataram
			Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Melancarkan pelaksanaan tugas dinas	%	n/a	98	Semua Urusan	Seluruh OPD
					Terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar, tertib, dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan	rekening				
					Tercukupinya kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran	%	100	100		
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya koordinasi dan informasi	Unit	n/a	0		
					Terpenuhinya kebutuha operasional (sarana dan prasarana) aparatur dalam menunjang tugas pokok dan fungsi	%	100	100		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	%	n/a	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Satpol PP yang tersertifikasi	%	80	100		
					Prosentase jumlah aparatur yang terdidika dan terlatih diklat teknis	%	19	42	Semua Urusan	Seluruh OPD
					Persentase kejadian kamtibmas yang ditindak langsung di tempat atau lokasi penertiban	%				
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Edukasi, advokasi dan Sosialisasi keterbukaan informasi public yang akurat dan aktual	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rasio Update Data Sektoral di masing-masing OPD	%	n/a	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penguatan pengawasan internal	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang diaudit/bina APIP	%	18,50	18,50	Penunjang Urusan Pengawasan	Inspektorat Daerah
					Persentase obrik yang mempunyai hasil pemeriksaan internal	%	17	20		
					Persentase OPD yang hasil revieu laporan keuangannya telah sesuai SAP	%	100	100		
					Persentase OPD yang hasil revieu sakipnya mendapat nilai B	%	64	83		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase obrik yang diaudit oleh pemeriksa eksternal	%	19,5	19,5		
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase unsur Maturitas SPIP yang harus dipenuhi	%	100	100	Penunjang Urusan Pengawasan	Inspektorat Daerah
					Persentase elemen kapabilitas APIP yang harus dipenuhi	%	100	100		
					Persentase APIP pada Inspektorat Kota Mataram yang Memiliki standar Kompotensi	%	74,10	100		
				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Regulasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan pada inspektorat Kota Mataram	Kegiatan	4	4		
			Perencanaan berbasis kinerja	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan ketepatan waktu dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah	%	50	80	Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase program dan kegiatan dalam RKPD yang tertuang dalam APBD	%	75	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase konsistensi target indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Ekonomi	%	70	100	Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase konsistensi target indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya	%	70	100		
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi target indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	%	70	100		
			Evaluasi kinerja pembangunan	Program Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase urusan pemerintahan yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	91	100		
				Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase Perangkat Daerah koordinasi Bidang Ekonomi yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	NA	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase Perangkat Daerah koordinasi Bidang Sosial Budaya yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	NA	100	Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Perangkat Daerah koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	NA	100		
			Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen SDM aparatur secara paralel dengan penerapan koordinasi, harmonisasi dan pencegahan korupsi dalam kerangka perwujudan kepemerintahan yang baik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	Nilai rata-rata seluruh PD	62,99	80	Semua Urusan	Seluruh OPD
					Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja	%		100		
					Persentase sampah per lingkungan tertangani	%		100		
					% perangkat daerah mengisi dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan	%		100		
					% capaian kinerja yang dapat ditingkatkan	%		100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					% ASN yang terbina dan memahami materi pelatihan	%		100		
					% Pelaksanaan Tender tepat waktu	%		100		
					% implementasi SSH dalam penyusunan RKA perangkat daerah	%		100		
			Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen dengan meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis, peningkatan kualitas proses komunikasi publik perencanaan, peningkatan ketersediaan data, dan optimalisasi pengendalian dan evaluasi	Proram Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Ketepapatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan di Semua OPD	%	n/a	100	Semua Urusan	Seluruh OPD
		Peningkatan kapasitas aparatur	Pemberian tunjangan berbasis kinerja	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	Penunjang Urusan Keuangan	Badan Keuangan Daerah
			Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Individu berbasis aplikasi		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan	%	100	100	Penunjang Urusan Keuangan	Badan Keuangan Daerah

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					% ASN yang terbina dan memahami materi pelatihan	%	0	100	Penunjang Urusan Keuangan	Badan Keuangan Daerah
					% Pelaksanaan Tender tepat waktu	%	0	100		
					% implementasi SSH dalam penyusunan RKA perangkat daerah	%	0	100		
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Usulan Sertifikat yang Dilimpahkan ke BPN	%	0	43,38		
					Persentase OPD yang telah melakukan rekonsiliasi BMD tepat waktu	%	100	100		
					Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Aset Daerah	%	0	100		
					Persentase BMD yang Sudah diinventarisasi atau Up date BMD	%	90	90		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tapat Waktu	%	100	100	Penunjang Urusan Keuangan	Badan Keuangan Daerah
					Persentase OPD yang telah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu	%	100	100		
			Pendidikan dan pelatihan kedinasan dan kompertesi pegawai	Program Pendidikan Kedinasan	% pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	%	56%	71%	Penunjang Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	%	90%	90%		
					% pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	%	1,8%	2,3%		
					%Persentase PNS yang memiliki Pendidikan S1, S2 dan S3	%	61%	66%		
			Penempatan dan promosi pegawai sesuai kompetensi	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jabatan Stuktural	%	65,0%	90,0%		
					Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Sesuai Formasi	%	84,0%	89,0%		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan kepegawaian prima	Program Mutasi dan Pembinaan Pegawai	Persentase Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	%	96%	97%	Penunjang Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
					Persentase Tata Usaha Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	96%	97%		
	Sasaran 5.2: Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah				**Rasio Kemandirian Daerah**	**%**	**17,79**	**35**		
		Intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan pajak dan retribusi daerah	Pemutakhiran data wajib pajak	Program Pengendalian Pendapatan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi dan Pelaporan PAD	%	100	100	Penunjang Urusan Keuangan	Badan Keuangan Daerah
					Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang Ditndaklanjuti sesuai SOP	%	100	100		
					Persentase Unit Kerja Penghasil PAD yang Mencapai Target PAD	%	25	86		
					Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	%	100	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Inovasi sistem pemungutan pajak berbasis IT	Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data	Persentase Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Daerah	%	0	100	Penunjang Urusan Keuangan	Badan Keuangan Daerah
					Persentase Penetapan Pajak Daerah yang Dilaksanakan sesuai SOP	%	100	100		
					Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis IT	%	100	100		
				Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penagihan Pajak Daerah yang Ditindaklanjuti sesuai SOP	%	100	100		
					Persentase Pelayanan permohonan wajib pajak daerah yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	100	100		
					Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100		

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah secara komprehensif	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	Persentase Pencapaian PAD Pasar	%	98,86	99	Urusan Pilihan Perdagangan	Dinas Perdagangan
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah target pendapatan RS	%	80	85	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	RSUD Kota Mataram
					Cost Recovery Ratio (CRR)	%	80	82		

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

7.1. PROGRAM MENDESAK

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 berada pada tahun ketiga pelaksanaan. Dengan adanya Kondisi Darurat dan Luar Biasa yang ditimbulkan oleh adanya Gempa Bumi yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian di berbagai sektor pembangunan, maka dirasakan perlu adanya program prioritas dan mendesak dalam rangka **REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI PASCA BENCANA.** Program prioritas ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi perlu secara sosial, ekonomi dan infrastruktur Kota Mataram sebagai yang terdampak oleh bencana alam agar Kota Mataram dapat melanjutkan pembangunan.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan kegiatan (termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan), pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi kegiatan (termasuk pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah), hingga pengalihan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana

lainnya yang sah. Jitu Pasna dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi di Kota Mataram dengan pendekatan sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh tim terpadu. Hasil Jitu Pasna dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram yang merupakan daerah terdampak serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Adapun pembagian wewenang prioritas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana berdasarkan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Kota Mataram Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7.1
Strategi dan Pembagian Wewenang Prioritas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana

STRATEGI		TANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN
REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI PASCABENCANA	**Sektor Permukiman**		
	Pendataan Dampak Bencana	Tim Penilai Verifikasi Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Kota Mataram	2018
	Verifikasi tingkat kerusakan		
	Laporan verifikasi dampak bencana		
	Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 250 unit beserta fasilitas sanitasi dan air	BNPB (DSP)	2018
	Sewa Lahan lokasi Huntara	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2018
	Sosialisasi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan cara pembangunannya	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2018
	Pemberian bantuan stimulan	BNPB (DSP) dan kementerian/ Lembaga	2018
	Pembangunan rumah	Kelompok Masyarakat	2018-2019
	Sektor Sosial		
	a. Pemulihan Layanan Fasilitas Kesehatan		
	- Rehabilitasi RSUD Kota Mataram	RSUD Kota Mataram	2018
	- Rehabilitasi **Puskesmas, Poskesdes, dan Pustu**	Dinas Kesehatan Kota Mataram	2018
	- Pemulihan Psikososial	RSUD dan Dinas Kesehatan Kota Mataram	2018 - 2019
	b. Pemulihan Layanan Fasilitas Pendidikan		
	- Rehabilitasi PAUD/TK, SD, SMP Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram	2018 - 2019
	- Rehabilitasi SMA, SMK, dan SLB Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	2018 - 2019
	- Perguruan Tinggi	Kementerian Ristek Dikti dan Badan Usaha Perguruan Tinggi	2018 – 2019
	- Rehabilitasi RA, MI, MTs, MA	Kementerian Agama	2018 – 2019
	- Rehabilitasi Pondok Pesantren	Masyarakat	2018 – 2019
	- Rehabilitasi Sarana Olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB	2018 – 2019

STRATEGI		TANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN
	- Bantuan peralatan sekolah	Kementerian/ Lembaga dan Dinas Pendidikan	2018 – 2019
	- Inisiasi sekolah siaga bencana	BPBD	2018 – 2019
	- Trauma Healing	Dinas Pendidikan Kota Mataram	2018 – 2019
	c. Fasilitas Keagamaan		
	- Masjid - Musholla - Pura - Gereja - Rumah Ibadah	Kementerian / Lembaga dan Masyarakat	2018 – 2019
	Pemulihan Sektor Infrastruktur		
	Pemulihan jaringan perpipaan akses Air bersih	Dunia Usaha (PDAM Giri Menang)	2018
	Pemulihan Sektor Ekonomi		
	- Rehabilitasi Pasar Tradisional	Dinas Perdagangan	2018 - 2019
	- Rehabilitasi Pasar Modern, Toko/Swalayan, Toko Percetakan, Kantor Jasa Konsultan, Koperasi dll	Kementerian Perdagangan (Bantuan)	2018 - 2019
	- Rehabilitasi Pariwisata	Kementerian Pariwisata dan Dunia Usaha (Hotel)	2018 - 2019
	- Pemberian subsidi bagi pemenuhan bahan pokok dan barang penting bagi pengungsi	Dinas Sosial	2018
	- Peningkatan kapasitas bisnis koperasi	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	2018 - 2019
	- Peningkatan produksi dan pemasaran produk IKM melalui bimbingan teknis produksi dan	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	2018 - 2019
	- Pengembangan usaha UMKM	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	2018 - 2019
	Pemulihan Lintas Sektor		
	Rehabilitasi Kantor Pemerintahan		
	- KOTA MATARAM	OPD Kota Mataram terkait	2018 - 2019
	- PROVINSI	Pemda Provinsi NTB	2018 - 2019
	- VERTIKAL	Kementerian / Lembaga	2018 - 2019
	- Fasilitasi kemudahan dalam proses pengurusan surat berharga dan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil	2018
	- Penghapusan denda pajak daerah	BKD	
	- Sosialisasi pengurangan risiko bencana	BPBD	2018 - 2019
	- Pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana	BPBD	2018 - 2019
	Rehabilitasi Sektor Swasta	Dunia Usaha	2018 - 2019
	Rehabilitasi Fasilitas Keamanan/ Ketertiban	Kementerian / Lembaga	2018 - 2019

Total perkiraan kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempabumi di Kota Mataram sebesar Rp.1.141.427.658.046,00, dengan komposisi pendanaan dari APBD Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp.6.010.754.906,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.11.420.207.215,00; APBD Provinsi NTB tahun 2019 sebesar Rp 480.782.189.610,00; Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2018 sebesar Rp.17.326.591.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp. 194.157.316.500,00; DSP tahun 2018 sebesar Rp.296.314.729.730,00. Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2019 sebesar Rp.27.850.637.938,00; Masyarakat tahun 2018/2019 sebesar Rp. 98.265.084.216,00; dan Dunia usaha tahun 2018/2019 sebesar Rp.9.300.146.932,00.

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kota Mataram untuk setiap sektor diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi per sektor

No	Sektor	Kebutuhan Pendanaan (Rp)
1	Sektor Pemukiman	299.053.000.000
2	Sektor Infrastruktur	60.000.000
3	Sektor Sosial	389.034.963.398
4	Sektor Ekonomi Produktif	12.273.599.539
5	Lintas Sektor	441.006.095.109
	Total	**1.141.427.658.046**

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Harmonisasi dan sinergi antara prioritas pembangunan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 dilakukan menyesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Uraian tentang hubungan antara urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dalam menjawab kinerja pembangunan yang ditargetkan menjadi jabaran pada bagian ini. Selain itu juga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Setelah program prioritas diketahui, kemudian ditentukan

alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Mataram berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program *(outcome)* di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Mataram, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Mataram Tahun 2016-2021 hanya yang bersumber dari APBD Kota Mataram. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel. 7.3

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Mataram Tahun 2016-2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					**161.239.311.816**		**154.449.967.175**		**222.494.502.728**		**233.307.279.746**		**255.741.742.238**		**272.316.782.607**		**1.299.549.586.309**	
1.01	**Pendidikan**					**63.760.848.271**		**52.508.201.164**		**70.372.872.506**		**83.367.140.433**		**88.371.557.498**		**94.126.637.123**		**452.507.256.995**	
1.01 - 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase ruang belajar PAUD dalam kondisi baik	%	80	80	0	80	0	80	479.596.200	80,41	130.800.000	80,74	150.420.000	81	172.983.000	81	933.799.200	Dinas Pendidikan
		Persentase angka kelulusan, dan angka melanjutkan	%	100	100	418.817.480	100	670.214.800	100	893.174.000	100	910.916.875	100	1.047.554.406	100	1.204.687.567	100	5.145.365.128	
		Persentase operasional sekolah tingkat PAUD yang berjalan baik	%	0	0	59.072.555	82,43	173.625.039	76,16	228.505.246	85	374.400.000	85	430.560.000	85	495.144.000	85	1.761.306.840	
1.01 - xx	Pendidikan Non Formal	Persentase ruang belajar TK dan SKB dalam kondisi baik	%	0	0	-	0	-	0	-	90	2.270.500.000	95	2.611.075.000	100	3.002.736.250	100	7.884.311.250	
1.01 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	% Ruang belajar dalam kondisi baik	%	78,3	78,3	16.651.046.979	78,52	6.572.346.750	74,56	14.933.325.246	75	21.364.654.000	78	24.569.352.100	80	28.254.754.915	80	112.345.479.990	
		Persentase siswa tidak mampu yang mendapat pendidikan dasar	%	0	0	0	100	260.211.500	100	424.288.100	100	483.978.800	100	556.575.620	100	640.061.963	100	2.365.115.983	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD	%	74,82	74,82	6.778.288.060	74,92	3.713.667.349	72,81	4.011.058.600	75	5.591.936.490	75	6.430.726.964	75	7.395.336.008	75	33.921.013.471	
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	%	61,38	61,38		63,42		54,27		60		63	0	65	0	65	0	
		Angka Melanjutkan SD	%	93,31	93,31		94,31		89,99		92		93		95		95	0	
1.01 - 18	Program Pendidikan Non Formal	% peserta ujian paket A dan atau B yang mendapat ijazah	%	100	100	45.351.750	100	483.609.729	100	194.392.956	100	691.698.750	100	795.453.563	100	914.771.597	100	3.125.278.344	Dinas Pendidikan
1.01 - 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV, % Guru tersertifikasi	%	93,37	93,37	0	93,61	818.559.550	94,35	1.234.355.100	95	1.419.040.000	98	1.631.896.000	98	1.876.680.400	98	6.980.531.050	
1.01 - 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B	%	89,27	89,27	83.300.000	89,76	90.995.000	91,71	105.570.000	93	124.855.518	95	143.583.846	100	165.121.423	100	713.425.786	
1.01 - 23	Program Sekolah (Dana BOS)	Persentase sekolah tingkat pendidikan dasar yang mendapat dana BOS	%	100	100	39.724.971.447	100	39.724.971.447	100	47.868.607.058	100	50.004.360.000	100	50.004.360.000	100	50.004.360.000	100	277.331.629.952	
1.02	**Kesehatan**					**77.455.634.503**		**47.159.430.000**		**54.837.436.917**		**51.690.846.088**		**54.206.479.000**		**55.865.479.000**		**341.215.305.508**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	%	100	100	7.822.062.900	100	8.917.337.030	100	16.398.667.817	100	10.783.268.060	100	7.827.426.000	100	7.827.426.000	100	59.576.187.807	Dinas Kesehatan
		% Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif	%	100	100		100		100		100		100		100		100	0	
1.02 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	% Persentase PHBS pada tatanan Rumah tangga	%	40	40	449.163.000	40	2.165.260.700	45	2.549.404.000	50	2.987.275.000	55	4.104.325.000	60	4.128.325.000	50	16.383.752.700	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	0	0		85		90		95		100		100		100	0	
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100		100		100		100		100		100		100	0	
		Cakupan Posyandu Aktif	%	40	40		40		45		45		50		50		50	0	
1.02 - 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	% Balita gizi buruk yang ditangani	%	100	100	398.299.000	100	501.300.000	100	324.702.500	100	904.717.500	100	908.765.000	100	958.765.000	100	3.996.549.000	Dinas Kesehatan
1.02 - 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	% masyarakat yang mengakses jamban keluarga	%	80	80	1.542.901.600	85	1.666.357.500	86	1.012.861.117	87	883.448.669	88	500.000.000	90	550.000.000	90	6.155.568.886	Dinas Kesehatan
		% masyarakat yang mengakses air bersih	%	80	80		85		86		87		88		90		90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.02 - 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas/ UPT dengan kondisi gedung baik	Unit	11	11	31.369.072.000	11	3.911.300.000	11	2.283.000.000	11	3.275.200.000	11	3.000.000.000	11	5.400.000.000	11	49.238.572.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pustu dengan Kondisi Gedung Baik	Unit	10	10		12		14		11		17		17		17	0	
		Jumlah Poskesdes dengan Kondisi Baik	unit	9	9		13		17		14		19		23		23	0	
1.02 - 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	% TPM yang diperiksa dan dibina	%	70%	70%	55.635.000	72%	143.737.500	74%	178.675.000	76%	91.380.000	78%	100.000.000	80%	125.000.000	80	694.427.500	Dinas Kesehatan
1.02 - 35	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Cakupan dokter umum terhadap pemenuhan pelayanan medis	%	0		0	81,01	0	88,07	0	91,14	0	92,40	0	92,40	0	92,40	0	RSUD Kota Mataram

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Cakupan dokter Spesialis terhadap pemenuhan pelayanan medis	%	100	100		100		100		100		100		100		100		RSUD Kota Mataram
		Respon time pelayanan Emergency call 119	menit						30 menit		25 menit		20 menit		15 menit		15 menit		
		(WU) Persentase inovasi pelayanan yang berjalan baik	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Jumlah target pendapatan RS	%	80													85		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Homecare	indeks						3		6		10		12		12		
		Persentase pengaduan ketersediaan tempat tidur	%						50%		30%		30%		0%		0		
		Persentase Pengaduan yang diselesaikan	%	90	90		90		100%		100%		100%		100%		1		
		Cost Recovery Ratio (CRR)	%	80%	80%		80%		82%		82%		82%		82%		0,82		
		Rata-rata waktu antri pendaftaran	jam	2 - 4 jam	2 - 4 jam		4 - 6 jam		4 - 6 jam		2 jam		2 jam		2 jam		2 jam		
		waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi	menit	4,8 menit	39,36 menit		46,01 menit		30 menit		30 menit		30 menit		30 menit		30 menit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		b. Racikan (SPM Farmasi)	menit	50,29	50,29		46,43		60		60		60		60		60		RSUD Kota Mataram
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rasio perawat terhadap tempat tidur	Perawat per Bed	1 perawat/ 8 bed (rawat inap)	1 perawat/ 7 bed (rawat inap)		1 perawat/ 6 bed (rawat inap)		1 perawat/ 5 bed (rawat inap)		1 perawat/ 4 bed (rawat inap)		1 perawat/ 3 bed (rawat inap)		1 perawat/ 3 bed (rawat inap)		1 perawat/ 3 bed (rawat inap)		RSUD Kota Mataram
		Cakupan Tenaga dan Pelayanan Instalasi Penunjang sesuai standar	%	90			90		100		100		100		100		100		
		(WU) Persentase SDM yang mendapat pelatihan kompetensi pelayanan	%	50	70		80		85		90		90		100		100		
		Cakupan pemenuhan administrasi serta Rumah Sakit terhadap standar akreditasi sarana dan prasarana umum Rumah Sakit terhadap standar akreditasi	%	0	0				80		82		83		85		85		
		Cakupan pemenuhan standar SDM Rumah Sakit terhadap standar akreditasi	%	95%	95		100		100		100		100		100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.02 - 37	Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan	% ketersediaan Obat Generik	%	1	1	12.386.882.500	1	3.147.441.300	1	6.048.970.033	1	8.334.064.331	1	9.375.000.000	1	7.375.000.000	100	46.667.358.164	
		% ketersedian alat kesehatan bagi Puskesmas dan jaringannya	%	0	0,4		0,4		0,4		0,5		0,6		0,7		70	0	Dinas Kesehatan
1.02 - 38	Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	101,25	101,25	0	101,65	0	97	0	98	2.124.279.500	99	2.250.000.000	100	2.350.000.000	100	6.724.279.500	
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	85	85	0	85	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	
		Cakupan Kesehatan Ibu Bersalin	%	91,59	91,59	0	89,06	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	85	85	0	90	0	90	0	91	0	93	0	95	0	95	0	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi essensial terpadu	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	95,18	95,18	0	93,07	0	90	0	93	0	96	0	100	0	100	0	
		cakupan kunjungan neonatal lengkap	%	97	97	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	100	0	
		cakupan pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	60	60	0	65	0	70	0	75	0	80	0	85	0	85	0	Dinas Kesehatan
		cakupan pelayanan anak balita	%	67	67	0	69	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	
		cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	53,62	53,62	0	35	0	50	0	75	0	85	0	100	0	100	0	
1.02 - 39	Program Pengendalian Penyakit	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	90%	90%	1.971.948.000	90%	3.246.936.470	95%	2.961.748.950	95%	2.752.831.348	95%	2.950.000.000	95%	3.200.000.000	100	17.083.464.768	
		cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	0	0%		0%		0%		80%		90%		100%		100	0	
		cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	0	0%		0%		0%		95%		97%		100%		100	0	Dinas Kesehatan
		Penderita diare yang ditangani	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		95	0	
		Cakupan balita pnemonia yang ditangani	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	
		% Calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	
		% Penderita DBD yang ditangani	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	0	0%		0%		0%		70%		85%		100%		100	0	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	0	0%		0%		0%		100%		100%		100%		100	0	
		Cakupan kpelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	0	0%		0%		0%		100%		100%		100%		100	0	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	%	0	0%		53%		75%		90%		90%		100%		100	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.02 - 40	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	% Tenaga Kesehatan Memiliki Surat Izin Praktek (SIP)	%	0	0	0	100%	153.065.000	100%	229.222.500	100%	305.525.000	100%	350.000.000	100%	360.000.000	100	1.397.812.500	Dinas Kesehatan
1.02 - 41	Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar Pasien Masyarakat Miskin	%	100%	100%	2.353.437.500	100%	8.019.735.500	100%	6.635.935.000	100%	3.186.305.000	100%	3.228.600.000	100%	3.428.600.000	100%	26.852.613.000	Dinas Kesehatan
		Puskesmas yang terakreditasi	unit	6	6		5		11		11		11		11		11	0	
1.02 - 42	Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan	Jumlah sarana penunjang pelayanan kesehatan	unit	1	1	64.451.000	1	286.959.000	2	714.250.000	2	562.551.680	2	1.112.363.000	2	1.162.363.000	2	3.902.937.680	Dinas Kesehatan
1.02 - 43	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	% Puskesmas yang melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100%	100%	19.041.782.003	100%	15.000.000.000	100%	15.500.000.000	100%	15.500.000.000	100%	18.500.000.000	100%	19.000.000.000	100	102.541.782.003	Dinas Kesehatan
1.03	**Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**					**4.828.387.400**		**20.049.052.500**		**34.922.914.000**		**26.363.613.000**		**31.550.000.000**		**37.860.000.000**		**155.573.966.900**	
1.03 - 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan yang berfungsi sesuai umur teknis	%	86%	86%	113.410.114.400	75%	53.980.672.700	82%	37.154.839.000	84%	26.912.217.000	85%	32.500.000.000	86%	40.000.000.000	86%	303.957.843.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03 - 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase kondisi baik	%	80	80	6.326.644.000	84	3.732.136.000	88	5.599.536.000	90	7.085.620.000	92	8.500.000.000	95	10.500.000.000	95%	41.743.936.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 - 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara	%	14%	14%	14.309.019.300	16%	24.580.050.800	18%	14.959.756.000	20%	3.969.030.000	22%	4.700.000.000	24%	5.600.000.000	24	68.117.856.100	
1.03 - 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	62%	62%	13.067.129.250	62%	8.329.096.234	70%	11.222.052.942	75%	13.400.851.000	70%	16.000.000.000	80%	19.200.000.000	80	81.219.129.426	
1.03 - 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase KK MBR yang terlayani air minum	%	56,79	56,79	4.728.893.000	63,36	5.165.938.000	70,13	10.730.558.000	70,70	4.963.516.000	71,30	5.900.000.000	71,91	7.000.000.000	71,91	38.488.905.000	
		Persentase KK MBR yang memiliki akses pengolahan air limbah	%	42,69	42,69	4.728.893.000	42,79	5.165.938.000	42,84	10.730.558.000	43,12	4.963.516.000	43,72	5.900.000.000	44,32	7.000.000.000	44,32	38.488.905.000	
1.03 - 28	Program Pengendalian Banjir	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	%	60	60	2.777.585.000	63	9.594.807.603	65	8.031.317.558	67	11.108.218.800	70	13.300.000.000	75	15.950.000.000	75	60.761.928.961	
1.03 - 32	Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	80%	80%	94.788.500	85	99.833.500	90	148.661.000	90	174.246.000	95	210.000.000	100	255.000.000	100	982.529.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03 - 41	Program Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Publik	Persentase Bangunan Yang Memenuhi Standar Bangunan Gedung	%	2	0	4.828.387.400	2	18.353.906.100	5	34.179.434.000	8	25.071.410.000	10	30.000.000.000	13	36.000.000.000	13	148.433.137.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 - 43	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang memiliki IMB	%	44%	0	0	44%	1.695.146.400	46%	743.480.000	49%	1.292.203.000	51%	1.550.000.000	55%	1.860.000.000	55%	7.140.829.400	
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**					**6.355.906.442**		**23.565.633.461**		**50.461.872.500**		**62.499.476.800**		**66.698.376.800**		**66.698.376.800**		**276.279.642.803**	
1.04 - 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	NA	N/A		98	2.762.156.000	98	10.646.009.000	99	7.253.548.800	99	7.253.548.800	100	7.253.548.800	100	35.168.811.400	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04 - 21	Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Yang Tertata	%	N/A	N/A	0	25	12.047.700.000	33	4.176.875.000	71	26.376.600.000	86	26.376.600.000	100	26.376.600.000	100	95.354.375.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04 - 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang terpelihara	%	N/A	N/A	0	23	1.975.450.000	24	3.232.250.000	24	712.800.000	24	712.800.000	24	712.800.000	24	7.346.100.000	
1.05	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**					**7.160.187.700**		**8.457.102.550**		**7.768.918.050**		**6.397.110.750**		**11.047.009.940**		**13.301.289.684**		**54.131.618.674**	
1.05 - xx	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Satpol PP yang tersertifikasi	%	75%	75%	163.980.000	80%	335.171.000	85%	407.180.000	90%	170.150.000	95%	480.000.000	100%	500.000.000	100	2.056.481.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase lingkungan yang aman tertib bersih indah dan mandiri	%	80%	80%	123.300.000	85%	223.520.000	85%	100.200.000	90%	1.506.556.000	90%	1.942.000.000	95%	2.192.000.000	95	6.087.576.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Potensi Konflik ditindaklanjuti	%	97.94%	97.94%	2,194,250,000	98.87%	2,194,565,000	95.87%	2,175,990,000	100%	753,710,000	100%	1,065,535,790	100%	1,172,089,369	100%	9.556.140.159	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kejadian Konflik yang tertangani	%	98.29%	98.29%	3,324,600,000	97.99%	3,852,250,000	98.12%	3,457,525,000	100%	2,784,162,500	100%	3,062,578,750	100%	3,399,415,375	100%	19.880.531.625	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penduduk menggunakan hak pilih pada pemilu tingkat daerah	%	98.48%	98.48%	63,320,000	90.21%	95,275,000	97.66%	379,820,000	100%	431,812,500	100%	474,993,750	100%	522,493,125	100%	1,967,714,375	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 24	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase tertanganinya kasus-kasus pelanggaran Perda	%	80%	80%	71,195,000	80%	292,225,000	85%	182,275,000	85%	80,000,000	90%	460,000,000	90%	500,000,000	90%	1,585,695,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	Persen	0	0	293,342,300	0	97,550,000	0	449,705,666	12%	1,362,595,000	24%	1,766,984,250	50%	1,835,114,000	50%	5,805,291,216	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 - 33	Program Peningkatan Kesiagaan Penanganan Kebakaran	Respone Time	menit	n/a	n/a	53.561.000	n/a	34.569.000	21 menit	25.466.250	19 menit	158.414.100	17 menit	315.945.000	15 menit	347.539.500	15 menit	935.494.850	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05 - 34	Program Peningkatan Pencegahan Bahaya	Persentase Kelurahan rawan	%	8%	8%	954.108.200	8%	981.331.800	8%	439.885.300	6%	512.305.650	4%	3.245.956.650	2%	4.667.752.315	2%	10.801.339.915	Dinas Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kebakaran	kebakaran																	
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana tertangani	Persen	100%	100%	102,750,000	100%	260,280,000	100%	206,030,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	1,019,060,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pemulihan Pasca Bencana Alam	Persentase pemulihan pasca kejadian bencana sesuai jadwal rehab rekon	Persen	100	100%	n/a	100%	46,650,000	100%	70,000,000	100%	66,565,000	100%	399,390,000	100%	798,780,000	100%	1,381,385,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	**Sosial**					**1.678.347.500**		**2.710.547.500**		**4.130.488.755**		**2.989.092.675**		**3.868.319.000**		**4.465.000.000**		**19.841.795.430**	
1.06 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan penanganan	%	18	25%	249.585.000	48,77 %	476.920.000	46,75 %	1.032.889.755	50,55 %	505.000.000	60,16 %	850.000.000	70,17 %	980.000.000	70,17 %	4.094.394.755	Dinas Sosial
1.06 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PRSE yang mendapatkan penanganan	%	49	0.49	47.640.000	0.49	54.430.000	0.49	54.430.000	0.49	60.000.000	0.65	75.000.000	0.81	100.000.000	0.81	391.500.000	Dinas Sosial
		Persentase informasi program penanganan PMKS	%	100	100	138.740.000	100	130.090.000	100	341.475.000	100	384.150.000	100	448.315.000	100	505.000.000	100	1.947.770.000	Dinas Sosial
		Persentase penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana alam/ sosial sesuai SOP	%	100	100	79.925.000	100	99.800.000	100	298.150.000	100	108.950.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	936.825.000	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.06 - 17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang ditangani	%	239	2,35%	596.075.000	3,13%	683.400.000	2,52%	722.631.500	3,57%	746.792.920	3,67%	847.955.000	4,20%	950.000.000	46,44	4.546.854.420	Dinas Sosial
1.06 - 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase PMKS lanjut usia (lansia) yang ditangani	%	1,12%	1,12%	88.010.000	1,87%	217.760.000	2,43%	140.755.000	3,73%	95.850.000	4,48%	150.000.000	4,85%	170.000.000	4.85	862.375.000	Dinas Sosial
1.06 - 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mengalami perubahan prilaku	%	2,61	2,61	177.975.000	3,92	316.797.500	3,48	270.540.000	3,48	239.540.000	4,35	287.500.000	4,79	315.000.000	4.79	1.607.352.500	Dinas Sosial
1.06 - 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan kasus yang ditangani oleh LK3	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	100%	18.600.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	88.600.000	Dinas Sosial
		Persentase LKS yang memenuhi standar layanan	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	100%	32.000.000	100%	55.000.000	100%	65.000.000	100%	152.000.000	
		Persentase pemberdayaan bagi Karang Taruna dan PSM	%	31,85	31,85	11.380.000	38,22	219.537.500	27,39	719.000.000	27,39	150.000.000	35,03	200.000.000	41,40	250.000.000	41,40	1.549.917.500	
1.06 - 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase satuan petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana	%	100	100	9.462.500	100	16.767.500	100	16.767.500	100	23.500.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	131.497.500	Dinas Sosial
1.06 - 24	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase janda pahlawan, veteran dan janda veteran yang mendapatkan santunan	%	N/A	N/A	0	41,67	122.425.000	35	126.925.000	35	100.550.000	50,00	124.795.000	58,33	150.000.000	58,33	624.695.000	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase CSR yang tersalurkan untuk PMKS	%	N/A	N/A	0	N/A	36.975.000	N/A	50.000.000	100	39.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	220.975.000	
		Persentase penyaluran bantuan sosial bagi penerima PKH	%	100	100	279.555.000	100	218.220.000	100	177.925.000	100	152.850.000	100	179.300.000	100	200.000.000	100	1.207.850.000	
1.06 - 25	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase lingkungan rawan konflik yang aktif menjalankan program keserasian sosial	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	100	40.594.755	100	50.000.000	100	65.000.000	100	155.594.755	Dinas Sosial
1.06 - 26	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika	Persentase penanganan penyandang disabilitas dan korban NAPZA	%	10,26	N/A	0	10,26	117.425.000	10,26	179.000.000	15,64	220.575.000	15,81	265.000.000	17,09	300.000.000	69,06	1.082.000.000	Dinas Sosial
1.06 - 28	Program Jaminan Sosial Keluarga	Persentase verifikasi data PBI JKN	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	100	71.140.000	100	80.454.000	100	90.000.000	100	241.594.000	Dinas Sosial
2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**					**11.031.112.098**		**38.759.695.756**		**38.916.076.441**		**26.318.664.311**		**218.609.687.642**		**37.249.329.102**		**370.884.565.350**	
2.01	**Tenaga Kerja**					**0**		**1.362.968.000**		**965.474.190**		**1.062.442.500**		**1.344.480.000**		**1.391.397.750**		**6.126.762.440**	
2.01 - 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	%	100	0	0	100	634.822.500	100	538.612.500	100	400.957.500	100	538.612.500	100	538.612.500	100	2.651.617.500	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.01 - 19	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja	%	100	0	0	100	316.912.500	100	336.690	100	234.960.000	100	336.690.000	100	336.690.000	100	1.225.589.190	Dinas Tenaga Kerja
2.01 - 20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Lowongan kerja yang tersedia		1.250	0	0	1250	116.538.000	1250	114.150.000	1250	114.150.000	1250	125.565.000	1250	138.121.500	100	608.524.500	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase lulusan pelatihan tenaga kerja mandiri	%	100	0	0	100	261.480.000	100	275.850.000	100	275.850.000	100	303.435.000	100	333.778.500	100	1.450.393.500	
2.01 - 21	Program Peningkatan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri	Persentase CTKI/CTKW yang dikirm	%	100	0	0	100	33.215.000	100	36.525.000	100	36.525.000	100	40.177.500	100	44.195.250	100	190.637.750	Dinas Tenaga Kerja
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**0**		**2.211.934.000**		**2.636.173.500**		**2.412.504.750**		**3.362.992.725**		**3.710.390.498**		**14.333.995.473**	
2.02 - xx	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan	Persentase jumlah OPD yang memiliki komitmen kesepahaman tentang PUG	%	22	NA	0	NA	45.580.000	NA	50.138.000	22	55.151.800	33	60.666.980	44	66.733.678	44	278.270.458	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 - 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	% Perangkat Daerah yang memenuhi 7 prasyarat PUG	%	28,39	NA	0	28,39	163.145.000	28,39	179.459.500	22,22	197.405.450	33,33	217.145.995	44,44	238.860.595	100 %	996.016.540	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		% OPD yang melaksanakan PPRG	%	22,22	NA	0	22,22	375.515.000	66,67	511.932.000	84,44	276.390.000	88,89	304.029.000	100	334.431.900	100	1.802.297.900	
2.02 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan	Cakupan layanan perlindungan khusus	%	100 %	0	0	100 %	152.717.000	100 %	371.557.000	100 %	370.575.000	100 %	876.870.000	100 %	975.655.500	100 %	2.747.374.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Perlindungan Perempuan	Jumlah Data kekerasan terpilah gender	dokumen	1(laporan Dinas)	0	0	1(laporan Dinas)	0	1 (laporan Dinas)	24.185.000	2 (laporan simphony dan Dinas)	26.365.000	2 (laporan simphony dan Dinas)	29.001.500	2 (laporan simphony dan Dinas)	31.901.650	2 (laporan simphony dan Dinas)	111.453.150	dan Perlindungan Anak
		Cakupan pembinaan kelompok Perempuan kepala keluarga (Pekka) dan Korban KDRT rawan ekonomi	%	6	0	0	6	152.717.000	6	371.557.000	6	370.575.000	6	407.632.500	6	448.395.750	6	1.750.877.250	
		Persentase Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang aktif	%	1	1	0	7	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	
2.02 - 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	frekuensi	1 kali	1 kali	0	1 kali	38.595.000	2 kali	91.320.000	12 kali	100.000.000	12 kali	350.000.000	12 kali	385.000.000	12 kali	964.915.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 - 20	Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA)	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang pro aktif dalam pengembangan KLA	%	3,57	3,57	0	14,29	1.183.665.000	100	881.225.000	100	756.992.500	100	832.691.750	100	915.960.925	100	4.570.535.175	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Forum Anak yang aktif	%	1,75	1,75	0	1,75	100.000.000	57 Forum Anak	154.800.000	57 Forum Anak	259.050.000	57 Forum Anak	284.955.000	57 Forum Anak	313.450.500	57 Forum Anak		
2.03	**Pangan**					**475.063.000**		**653.030.650**		**337.298.550**		**366.357.500**		**461.150.000**		**515.000.000**		**2.807.899.700**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.03 - 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein serta Penguatan Cadangan Pangan	%	145,35	145,35	26.250.000	132,76	26.250.000	146,56	21.120.500	155	25.000.000	160	30.000.000	175	35.000.000	175	163.620.500	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	%	10	10	160.248.000	10	287.211.900	10	161.215.000	10	170.000.000	15	190.000.000	20	200.000.000	20	1.168.674.900	
		Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Akses Pangan	%	100	100	25.500.000	100	35.500.000	100	57.200.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	313.200.000	
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Penanganan Rawan Pangan	%	0	100	28.515.000	100	42.556.000	100	38.488.000	100	44.400.000	100	55.000.000	100	75.000.000	100	283.959.000	
2.03 - xx	Peningkatan diversifikasi/ Penganekaragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	skor	83	83	26.650.000	90	13.350.250	90	14.350.000	94	20.350.000	96	30.000.000	98	35.000.000	98	139.700.250	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pangan	%	100%	100%	207.900.000	100%	248.162.500	100%	44.925.050	100%	46.607.500	100%	91.150.000	100%	100.000.000	100%	738.745.050	Dinas Ketahanan Pangan
2.04	**Pertanahan**					**0**		**86.200.000**		**403.650.000**		**453.650.000**		**0**		**0**		**943.500.000**	
2.04 - 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah fasus fasum lahan permukiman	buah	N/A	N/A	0	10	86.200.000	10	403.650.000	10	453.650.000	10	0	10	0	10	943.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.05	**Lingkungan Hidup**					**0**		**0**		**692.207.000**		**808.817.000**		**1.200.000.000**		**1.600.000.000**		**4.301.024.000**	
2.05 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	87	87%	0	86%	0	100	692.207.000	100	808.817.000	100	1.200.000.000	100	1.600.000.000	100	4.301.024.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	n/a		0		0	IKA: 36,68 dan IKU:8 3,06	0	IKA: 37,00 dan IKU:8 3,10	0	IKA: 37,10 dan IKU:8 3,15	0	IKA: 37,20 dan IKU:8 3,20	0	IKA: 37,20 dan IKU:83 ,20	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan memiliki izin pengelolaan limbah cair (IPLC)	%	0		0	5,12	0	5,03	0	6	0	7	0	8	0	8	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 19	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian kasus pengaduan LH	%	0	n/a	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**579.715.720**		**579.715.720**		**579.715.720**		**579.715.720**		**579.715.720**		**579.715.720**		**3.478.294.320**	
2.06 - 15	Pendaftaran dan Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP-el	%		100%	140.125.720	100%	140.125.720	100%	140.125.720	100%	140.125.720	100%	140.125.720	100%	140.125.720	100%	840.754.320	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.06 - xx	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase Tingkat akurasi/ keabsahan data dokumen administarsi kependudukan	%		100%	293.750.000	100%	293.750.000	100%	293.750.000	100%	293.750.000	100%	293.750.000	100%	293.750.000	100%	1.762.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 - xx	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	%		100%	145.840.000	100%	145.840.000	100%	145.840.000	100%	145.840.000	100%	145.840.000	100%	145.840.000	100%	875.040.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan akta perkawinan dan perceraian	%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	0	
		Cakupan kepemilikan dokumen perubahan status anak, kewarganegaraan dan akta kematian	%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	0	
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**1.130.533.150**		**15.918.010.250**		**17.389.180.265**		**3.559.188.960**		**187.813.045.056**		**3.033.129.741**		**228.843.087.422**	
2.07 - 22	Program peningkatan dan pengembangan manjemen pembangunan partisipatif	Persentase kelurahan yang terseleksi	%	0	100	78.948.750	100	125.191.250	40	91.520.000	100	74.410.000	100	81.344.750	100	88.972.975	100	540.387.725	Kecamatan se Kota Mataram
2.07 - 23	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	IKM Kecamatan	Nilai IKM	0	100	34.637.500	100	534.392.500	100	324.080.000	100	371.545.000	100	484.102.500	100	525.962.750	100	2.274.720.250	Kecamatan se Kota Mataram
		Persentase indikator pelayanan Kecamatan berkriteria baik (nilai 80)	%	0															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.07 - 25	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase pelayanan adm. Kependudukan tepat waktu	%	0	100	92.255.500	100	465.598.000	40	181.800.000	100	257.682.500	100	265.856.000	100	293.743.725	100	1.556.935.725	Kecamatan se Kota Mataram
2.07 - 26	Program Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyaraka tan yang berkinerja baik	%	0	100	304.331.400	100	5.553.370.000	100	13.538.891.500	0	1.009.373.000	0	1.043.679.500	0	1.114.996.650	0	22.564.642.050	Kecamatan se Kota Mataram
		Persentase Kelurahan yang tertib administrasi	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase UMKM terverifikasi	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase capaian PBB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Persentase kegiatan keagamaan yang terfasiitasi	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	80	0	100	0	100	0	
		Persentase karang taruna aktif	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	80	0	100	0	100	0	
		Persentase kader PKK aktif	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	80	0	100	0	100	0	Kecamatan se Kota Mataram
		Persentase pelayanan terhadap kelembagaan masyarakat	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	80	0	100	0	100	0	
		Persentase keterwakilan unsur masyarakat pada MPBM	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	80	0	100	0	100	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.07 - 29	Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Persentase konflik sosial ditindaklanjuti	%	0	100	254.575.000	100	308.102.500	100	425.465.000	100	374.440.960	100	185.408.261.056	100	426.620.266	100	187.197.464.782	Kecamatan se Kota Mataram
2.07 - 31	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan berbasis lingkungan	Persentase sampah yang tertangani	%	0	100	365.785.000	100	8.931.356.000	100	2.827.423.765	100	1.471.737.500	100	529.801.250	100	582.833.375	100	14.708.936.890	Kecamatan se Kota Mataram
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**4.069.225.249**		**4.283.394.998**		**4.508.836.842**		**4.995.941.100**		**5.245.738.155**		**5.508.025.062**		**28.611.161.406**	
2.08 - 15	Program Keluarga Berencana (KB)	Tingkat kepesertaan ber KB	%		76,71	2.648.111.316	77,13	2.787.485.596	77,54	2.934.195.365	77,95	3.251.186.000	78,38	3.413.745.300	78,92	3.584.432.565		21.707.782.843	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%		0,15		0,13		0,11		0,09		0,07		0,05			0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 - xx	Program Kependudukan	Angka Kelahiran remaja usia 15-19 thn	%		0,2	728.388.585	0,08	766.724.826	0,16	807.078.765	0,14	894.270.100	0,12	938.983.605	0,1	985.932.785	0,1	5.970.935.263	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Rata-Rata Usia Kawin pertama Perempuan	tahun		21,01		21,29		21,59		21,89		22,19		22,49		63,7	0	
2.08 - xx	Program Pembangunan Keluarga	Cakupan poktan yang diberdayakan disetiap Kelurahan	%		1	692.725.348	1	729.184.576	1	767.562.712	1	850.485.000	1	893.009.250	1	937.659.712	30,0	5.678.587.349	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	**Perhubungan**					**3.973.652.978**		**4.668.256.976**		**3.830.373.810**		**6.027.784.742**		**6.786.646.150**		**7.465.311.041**		**32.752.025.697**	
2.09 - 17	Pogram peningkatan	Prosentase cakupan	%	23%	23%	689.126.828	23%	1.017.069.476	23%	741.954.410	33%	283.267.500	43%	333.676.500	48%	367.044.425	48	3.432.139.139	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	pelayanan angkutan	pelayanan angkutan umum																	
2.09 - 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase Penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas dan angkutan	%	13,424 Pelanggaran		1.454.690.250	-3%	502.795.500	-17%	463.243.400	-3%	754.855.000	-5%	913.731.500	-5%	1.005.104.650	-5%	5.094.420.300	Dinas Perhubungan
2.09 - 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Peningkatan rasio kendaraan uji	%	58%	58%	1.072.897.200	58%	1.192.108.000	62%	525.702.000	62%	806.170.000	66%	1.042.472.204	68%	1.146.719.425	68	5.786.068.829	Dinas Perhubungan
2.09 - 21	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase tingkat kepatuhan dan ketertiban pelayanan parkir	%	50%	50%	756.938.700	50%	339.961.500	50%	554.498.000	56%	802.448.000	61%	925.147.300	64%	1.017.662.030	64	4.396.655.530	Dinas Perhubungan
2.09 - 22	Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Peningkatan level pelayanan jalan	level	Level C (0,45)	Level C (0,45)	0	Level B (0,44)	1.616.322.500	Level B (0,43)	1.544.976.000	Level B (0,43)	3.381.044.242	Level B (0.33)	3.571.618.646	Level B (0.28)	3.928.780.511	Level B (0.28)	14.042.741.899	Dinas Perhubungan
2.10	**Komunikasi dan Informatika**					**0**		**4.746.318.414**		**4.317.385.204**		**3.308.067.500**		**7.900.000.000**		**8.350.000.000**		**28.621.771.118**	
2.10 - 24	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Prosentase Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	n/a	n/a	n/a	100%	2,018,475,000	100%	1,933,587,704	100%	1,712,222,500	100%	3,680,000,000	100%	3,700,000,000	100%	13,044,285,204	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 - xx	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase OPD yang memiliki Sistem Informasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	n/a	n/a	0	22%	2,727,843,414	38%	2,383,797,500	51%	1,595,845,000	44%	3,865,000,000	46%	3,900,000,000	46%	14,472,485,914	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.11	**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**					**1.485.464.700**		**1.621.335.466**		**1.385.260.000**		**1.578.116.750**		**1.793.191.200**		**2.000.021.267**		**9.863.389.383**	
2.11 - 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	% Pertumbuhan UKM	%	33	33	247.670.000	44	183.450.000	66	241.455.000	70	178.464.750	80	248.574.000	90	295.942.347	90	1.392.556.097	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah wira usaha baru	wub	2.792	2792		3158		1235		2000		3000		3100		3100		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah produk UKM yang terstandar	UKM	30	30		40		60		65		75		80		85		
2.11 - 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	unit	397	397	898.800.000	417	1.115.359.755	438	867.605.000	460	1.106.572.000	483	1.217.229.200	507	1.338.952.120	530	6.544.518.075	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah Koperasi berkualitas	unit	79	79		87		96		105		116		127		127		
2.12	**Penanaman Modal**					**2.287.537.000**		**2.471.030.000**		**2.216.102.000**		**2.488.835.500**		**2.743.719.250**		**3.021.489.850**		**15.228.713.600**	
2.12 - 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investasi	PMA; PMDN	15 PMDN; 50 PMA	50 PMDN; 35 PMA	216.620.000	60 PMDN; 30 PMA	303.000.000	70 PMDN ; 30 PMA	247.350.000	80 PMDN ; 35 PMA	272.085.000	90 PMDN ; 35 PMA	299.293.500	100 PMDN ; 40 PMA	329.222.850	100 PMDN; 40 PMA	1.667.571.350	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 - 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Investor Aktif	%	33	35	126.867.000	40	118.350.000	50	135.132.000	55	148.645.000	60	169.509.000	65	179.860.000	65	878.363.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 - 18	Program Penanaman Modal	Target Investasi	Miliar Rupiah	100	875	0	970	0	1080	0	1250	51.125.000	1500	56.237.500	1500	61.861.000	7175	169.223.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.12 - 20	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan	Persentase Pengaduan terselesaikan	%	91	92	501.970.000	93	548.750.000	94	418.425.000	95	460.267.500	96	506.294.250	97	556.923.000	97	2.992.629.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 - 21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase penyelesaian izin Pembangunan Sarana Prasarana Perkotaan sesuai SOP	%	82	82	831.550.000	86	745.130.000	90	702.567.000	90	772.823.000	91	850.106.000	91	945.116.000	91	4.847.292.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 - 22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian izin Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai SOP	%	82	86	610.530.000	86	755.800.000	90	712.628.000	90	783.890.000	91	862.279.000	91	948.507.000	91	4.673.634.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**					**0**		**675.214.000**		**535.733.000**		**579.330.000**		**637.263.000**		**700.989.300**		**3.128.529.300**	
2.13 - 15	Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang Memiliki Dokumen AD/ART	%				61%	25.745.000	67%	42.317.500	73%	47.550.000	80%	52.305.000	86%	57.535.500	86%	225.453.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 - 16	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif di OKP	%					286.570.000	0,90%	270.845.000	0,97%	286.107.500	1,03%	314.718.250	1,11%	346.190.075	1,11%	1.504.430.825	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 - 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda yang aktif dan mandiri	%		Na.		56,6%	30.000.000	60%	28.320.500	63,3%	29.352.500	66,6%	32.287.750	70%	35.516.525		155.477.275	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13 - 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.	Persentase pelatih yang memiliki sertifikat atau lisensi pelatih	%		Na.		Na.		Na.		33,33 33	32.320.000	66,66 67	35.552.000	100	39.107.200		106.979.200	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 - 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Perolehan Prestasi Olahraga unggulan	Medali emas, perak dan perung gu		Na.		emas ; 5 Perak: 6 Perunggu; 1	332.899.000	emas ; 6/7 Perak: 7/9 Perun ggu ; 2/5	194.250.000	emas ; 7 Perak: 8 Perun ggu ; 3	184.000.000	emas ; 8 Perak: 9 Perun ggu ; 4	202.400.000	emas ; 9 Perak: 10 Perun ggu ; 5	222.640.000	emas: 35; perak 40; perun ggu 15	1.136.189.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.14	**Statistik**					**0**		**118.050.000**		**151.165.000**		**178.900.000**		**375.735.000**		**390.595.250**		**1.214.445.250**	
2.14 - 15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rasio Update Data Sektoral di masing-masing OPD	%	0	0	0	100	118.050.000	100	151.165.000	100	178.900.000	100	375.735.000	100	390.595.250	100	1.214.445.250	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.15	**Persandian**					**0**		**0**		**0**		**0**		**700.000.000**		**750.000.000**		**1.450.000.000**	
2.15 - 16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	level	level I									level I	700.000.000	level II	750.000.000	level II	1.450.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Teknologi	level	level I									level I		level II		level II		
		Indeks Penanggulangan Pemulihan	level	level I									level I		level II		level II		
		Indeks Tata Kelola Keamanan Informasi	level	level I									level I		level II		level II		
		Indeks Kerangka Kerja Keamanan Infomasi	level	level I									level I		level II		level II		
		Indeks Pengelolan Risiko Keamanan Infomasi	level	level I									level I		level II		level II		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.16	**Kebudayaan**					**0**		**2.005.734.630**		**2.159.753.560**		**1.794.491.230**		**2.280.901.230**		**2.453.142.480**		**10.694.023.130**	
2.16 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	% Siswa duta budaya yang aktif	%	32,65	-	-	33	585.941.000	32	651.174.000	32	237.850.000	35	660.657.750	35	759.756.413	100	2.895.379.163	Dinas Pendidikan
2.16 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya lokal yang terinventarisasi	94	0	0	0	94	160.843.400	94	146.050.000	94	190.365.000	98	218.919.750	100	251.757.713	100	967.935.863	Dinas Pendidikan
		% sanggar seni yang menerima aspresiasi	%	0	0	0	30	1.258.950.230	30	1.362.529.560	35	1.366.276.230	35	1.401.323.730	35	1.441.628.355	35		
2.17	**Perpustakaan**			**0**		**686.460.000**		**896.845.000**		**687.369.465**		**438.098.465**		**481.908.311**		**530.099.142**		**3.720.780.383**	
2.17 - 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Per Tahun	Orang	25705	25705	686.460.000	31595	896.845.000	32227	687.369.465	33000	260.069.465	33660	286.076.411	34372	314.684.052	34372	3.131.504.393	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.17 - 16	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	Persentase bahan pustaka yang terpelihara	%	100		0		0		0	100	178.029.000	100	195.831.900	100	215.415.090	100	589.275.990	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18	**Arsip**					**412.685.550**		**745.052.650**		**629.235.177**		**682.363.694**		**148.940.000**		**758.047.063**		**3.376.324.134**	
2.18 - 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase arsip yang terestorasi	%	0		325.657.700		553.252.650		558.785.177	32 orang	614.663.694		74.470.000		676.130.063		2.802.959.284	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18 - 19	Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan	Jumlah Arsiparis yang bersertifikat.	orang	25	25	87.027.850	25	191.800.000	29	70.450.000	32	67.700.000	35	74.470.000	38	81.917.000	38	573.364.850	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	**Urusan Wajib Pilihan**					**30.319.702.286**		**28.078.218.021**		**27.264.100.994**		**30.247.470.700**		**34.008.138.445**		**33.977.935.154**		**183.895.565.600**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.01	**Kelautan dan Perikanan**					**0**		**2.180.593.000**		**2.238.250.000**		**2.346.811.000**		**2.474.311.000**		**2.474.311.000**		**11.714.276.000**	
3.01 - 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Masyarakat pesisir yang terlatih	orang	30		0	30	25.420.000	30	68.250.000	30	48.795.000	30	48.795.000	60	48.795.000	60	240.055.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 - 20	Program pengembangan budidaya perikanan	% peningkatan produksi perikanan budidaya	%	0		0		1.487.533.000		1.465.000.000	98%	1.720.516.000	98%	1.720.516.000	98%	1.720.516.000	98%	8.114.081.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 - 21	Program pengembangan perikanan tangkap	% peningkatan produksi perikanan tangkap	%	0		0		667.640.000		705.000.000	95%	577.500.000	95%	705.000.000	95%	705.000.000	95%	3.360.140.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	% kualitas pengolahan hasil perikanan	%																Dinas Kelautan dan Perikanan
3.02	**Pariwisata**					**1.187.900.000**		**5.147.598.000**		**2.513.987.400**		**3.224.437.500**		**3.925.100.000**		**4.415.000.000**		**20.414.022.900**	
3.02 - 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	8	8	1.187.900.000	8	2.122.750.000	8	1.721.750.000	8	2.063.000.000	8	2.450.100.000	8	2.850.000.000	48	12.395.500.000	Dinas Pariwisata
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yg aktif di kepariwisataan	%	5	5		5		5		5		5		5		30		
3.02 - 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar pelayanan	%	100	100	0	100	2.776.048.000	100	664.724.900	100	845.575.000	100	1.100.000.000	100	1.165.000.000	100	6.551.347.900	Dinas Pariwisata
		Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang	%	6,5	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		memenuhi standar pelayanan																	
		Persentase destinasi wisata dalam Kondisi Baik	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata
3.02 - 17	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Pelaku Pariwisata binaan	%	2	2	0	2	248.800.000	2	127.512.500	2	315.862.500	2	375.000.000	2	400.000.000	2	1.467.175.000	Dinas Pariwisata
		Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata	%	6,5	6,5		6,5		6,5		6,5		6,5		6,5		6,5		
3.03	**Pertanian**					**8.421.508.722**		**3.892.562.310**		**3.232.299.110**		**5.262.468.000**		**7.340.562.000**		**5.790.000.000**		**33.939.400.142**	
3.03 - xx	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	Produktivitas tanaman pangan per hektar (kw/ha)				4.793.743.011		1.667.855.000		1.210.213.110		1.993.629.000		1.517.000.000		1.655.000.000	600	12.837.440.121	Dinas Pertanian
		- Padi	Kw/Ha	65,75 Kw/Ha	65,75 Kw/Ha		61,54 Kw/Ha		65,00 Kw/Ha		70,00 Kw/Ha		72,00 Kw/Ha		75,00 Kw/Ha				
		- Kedelai	Kw/Ha	12.5 Kw/Ha	12.5 Kw/Ha		8,70 Kw/Ha		8.70 Kw/Ha		9.00 Kw/Ha		9.50 Kw/Ha		10.00 Kw/Ha				
		- Jagung		-	-		59.91 Kw/Ha		60,00 Kw/Ha		61,00 Kw/Ha		62.00 Kw/Ha		63.00 Kw/Ha				
		Persentase Luasan hortikultura	%	25%	25%		23%		22%		20%		17%		16%				
3.03 - 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	jumlah olahan	jenis	5	5	204.183.011	10	748.914.700	15	310.263.000	20	173.125.000	22	250.000.000	26	300.000.000	80	1.986.485.711	Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.03 - 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Persentase kelompok tani kelas madya keatas	%	25%	25%	500.000.000	25%	382.358.110	25%	446.700.000	25%	380.670.000	25%	1.570.000.000	25%	600.000.000	25%	3.879.728.110	Dinas Pertanian
3.03 - 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase kasus kematian hewan ternak	%	20%	20%	243.944.700	20%	179.005.000	18%	200.950.000	15%	1.765.802.000	10%	533.000.000	10%	570.000.000	90%	3.492.701.700	Dinas Pertanian
3.03 - 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Ternak				169.195.000		259.550.000		401.160.000		240.180.000		966.500.000		1.090.000.000		3.126.585.000	Dinas Pertanian
		- Ternak besar	ekor	2473	2473		2478		2541		2575		2600		2625		12819		
		- Ternak kecil	ekor	3241	3241		3349		3918		3000		3250		3500		17017		
		- Unggas	ekor	117918	117918		189729		134151		134500		135000		135500		728880		
3.03 - 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase Peningkatan PAD RPH dan Pasar Hewan	%	20	20%	2.337.743.000	20%	235.500.000	20%	378.763.000	20%	100.000.000	20%	825.000.000	20%	875.000.000	100	4.752.006.000	Dinas Pertanian
3.03 - 26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan kelompok tani terlayani sarana dan prasana pertanian	%	32	32	172.700.000	40	419.379.500	48	284.250.000	64	609.062.000	80	1.679.062.000	96	700.000.000	1125 klp	3.864.453.500	Dinas Pertanian
3.06	**Perdagangan**					**20.141.448.864**		**16.309.189.000**		**18.625.364.484**		**18.603.099.200**		**19.371.444.945**		**20.307.231.604**		**113.357.778.097**	
3.06 - 15	Program Pengamanan perdagangan Menuju Tertib Ukur	% Realisasi PAD Kemetrologian yang dicapai	%	0		0		0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Perdagangan
		Jumlah Alat UTTP yang ditera/Tera Ulang	Unit	10.500	11500	1.534.296.638	12840	763.129.774	12840	520.074.700	12840	386.946.150	12840	395.062.670	12840	434.568.937	12840	4.034.078.869	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.06 - 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah jenis produk unggulan yang menjadi komoditas ekspor	jenis	3	3	375.850.000	4	238.260.000	4	145.300.000	4	362.780.000	4	119.214.000	4	399.058.000	4	1.640.462.000	Dinas Perdagangan
3.06 - 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	% pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	%	42,72	42,72	5.817.135.613	41,59	5.345.105.613	42,67	6.346.402.175	44,11	6.346.402.175	46,63	6.346.402.175	47,95	6.346.402.175	47.95	36.547.849.926	Dinas Perdagangan
		% pasar dalam kondisi baik atau layak	%	52,63	52,63	5.817.135.613	63,16	5.345.105.613	73,68	6.346.402.175	78,95	6.346.402.175	89,47	6.346.402.175	100	6.346.402.175	100	36.547.849.926	
3.06 - 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	% PKL yang meningkat usaha perdagangan-nya	%	30	30	1.644.600.000	33	875.000.000	37	949.847.434	42	670.135.000	47	994.014.500	55	1.093.415.950	55	6.227.012.884	Dinas Perdagangan
		Jumlah TDU yang diterbitkan	TDU	30	30		30		30		30		30		30		180		
3.06 - 20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	Jumlah Realisasi PAD Pasar yang dicapai	%	98,86	98,86	4.952.431.000	92,65	3.742.588.000	98,23	4.317.338.000	99	4.180.948.800	99	4.682.388.425	99	5.150.627.267	99	27.026.321.492	Dinas Perdagangan
3.06 - 21	Program Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Persentase laju harga barang pokok	%	94	94	0	95	0	96.25	0	96.75	309.484.900	97.50	487.961.000	98	536.757.100	98	1.334.203.000	Dinas Perdagangan
3.07	**Perindustrian**					**568.844.700**		**548.275.711**		**654.200.000**		**810.655.000**		**896.720.500**		**991.392.550**		**4.470.088.461**	
3.07 - 16	Pengembangan Industri Kecil Menengah	% pertumbuhan IKM	%	3,78	3,78	229.850.000	3,99	225.750.000	4,69	378.000.000	4,89	517.575.000	5,13	569.332.500	5,39	626.265.750	5.39	2.546.773.250	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah produk IKM yang bersertifikat	produk	120	120		120		100		100		100		100		100	0	
3.07 - 17	Program peningkatan kemampuan	Jumlah IKM yang menggunakan teknologi	%	60	60	338.994.700	60	322.525.711	70	276.200.000	70	293.080.000	80	327.388.000	80	365.126.800	80	1.923.315.211	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	teknologi industri	Industri																	
3.08	**Transmigrasi**					**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
3.08 - 18	Program Penempatan Calon Transmigrasi	Persentase calon transmigrasi yang dibina	%	0		0	20	0	40	0	60	0	80	0	100	0	100	0	Dinas Tenaga Kerja
4	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**					**18.297.432.824**		**63.640.292.196**		**73.711.207.613**		**74.515.069.086**		**78.296.087.086**		**77.849.870.236**		**386.309.959.041**	
4.01	**Administrasi Pemerintahan**					**7.156.975.374**		**42.048.707.849**		**42.099.837.000**		**44.140.188.000**		**44.636.590.250**		**45.398.893.275**		**225.481.191.748**	
4.01 - 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase usulan perda inisiatif yang terfasilitasi naskah akademik	%			0	100	30.745.168.091	100	32.583.225.000	100	32.583.225.000	100	32.583.225.000	100	32.583.225.000	100	161.078.068.091	Sekretariat DPRD
		Persentase rapat paripurna yang terdokumentasi	%			0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase anggota dewan yang mendapat peningkatan kapasitas	%			0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase produk hukum tersosialisasi	%			0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	
		Indeks kepuasan kunjungan kerja	%			0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.01 - 17	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan kunjungan kerja luar daerah	%	80	80	0	80	0	90	0	90	0	100	0	100	0	100	0	Bagian Humas dan Protokol
4.01 - 19	Program Peningkatan Capaian Kinerja	Persentase OPD dengan Nilai LPPD Tinggi	%	100	100	154.070.000	100	165.670.000	100	167.720.000	100	238.150.000	100	245.000.000	100	250.000.000	100	1.220.610.000	Bagian Tata Pemerintahan
		Persentase Laporan Kinerja Yang Dapat Diselesaikan Tepat Waktu	%	100	100	0	100	1.913.169.450	100	199.825.000	100	0	100	0	100	0	100	2.112.994.450	
4.01 - 20	Program pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase kelurahan dengan kriteria cepat berkembang	%	n/a	n/a	n/a	20	76.550.000	20	202.500.000	20	153.627.500	20	168.000.000	20	168.000.000	100	768.677.500	Bagian Tata Pemerintahan
4.01 - xx	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana rumah tangga kepala daerah	Indeks	100	100	2.661.441.825	100	3.147.000.000	100	2.838.590.000	100	2.784.400.000	100	2.800.000.000	100	3.000.000.000		17.231.431.825	Sekretariat Daerah
4.01 - 22	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah	Indeks	100	100	42.500.000	100	918.079.000	100	757.360.000	100	644.960.000	100	710.000.000	100	780.000.000	100	3.852.899.000	Bagian Humas dan Protokol
4.01 - 23	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Persentase Jumlah Hibah yang tepat sasaran	%	100%	100%	266.300.000	100%	390.300.000	100%	390.300.000	100%	438.000.000	100%	459.900.000	100%	482.895.000	100%	2.427.695.000	Bagian Bina Kesejahtera-an Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.01 - 26	Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase Perda yang sesuai dengan perundang-undangan (tidak dibatalkan)	%	100	100	1.211.138.000	100	1.560.638.000	100	1.644.378.000	100	1.394.378.000	100	1.533.815.000	100	1.667.197.000		9.011.544.000	Sekretariat Daerah
4.01 - 27	Program Penataan Ketatalaksanaan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	%	50	50	0	60	110.220.700	70	431.145.000	75	0	80	0	85	0	85	541.365.700	Bagian Organisasi
4.01 - 28	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun standar pelayanan	%	50	50	0	50	641.883.600	60	169.394.000	70	174.595.000	80	192.054.500	90	213.259.950	90	1.391.187.050	Bagian Organisasi
4.01 - 29	Program Penataan Daerah, Organisasi, dan Ketatalaksanaan serta PAN	Persentase OPD yang berdasarkan analisis kelembagaan telah sesuai standar Right Sizeing	%	15,38	15,38	899.822.549	15,38	291.085.000	15,38	207.350.000	15,38	866.730.000	15,38	870.000.000	23,08	880.000.000	100	4.014.987.549	Bagian Organisasi
		Persentase jabatan dengan analisis beban kerja	%	13,89	13,89	29.125.000	14,72	75.553.000	14,72	90.433.000	20	53.000.000	18	53.000.000	18	53.000.000	90	354.111.000	
		Persentase jabatan dengan uraian jabatan	%	13,89	13,89	107.255.000	14,72	127.069.500	14,72	125.523.000	20	350.000.000	18	350.000.000	18	350.000.000	100	1.409.847.500	
4.01 - 35	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang outputnya selesai	%	100%	100%	0	100%	0	100%	166.575.000	100%	286.150.000	100%	286.150.000	100%	286.150.000	100%	1.025.025.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.01 - 36	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan barang/ jasa pemerintah (PBJP) melalui e-procurement	%	100 %	100 %	1.253.948.000	100 %	1.037.125.000	100 %	1.528.350.000	100 %	2.026.365.000	100 %	2.229.001.500	100 %	2.451.901.650	100 %	10.526.691.150	Bagian Layanan Pengadaan
4.01 - 37	Program Pembinaan Administrasi Pertanahan	Persentase Tanah Bersertifikat	%	20	20	0	17	219.021.508	14	0	10	0	0	0	0	0	0	219.021.508	Bagian Tata Pemerintahan
4.01 - 38	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang menggunakan SSH dalam penyusunan anggaran	%	100%	100%	225.100.000	100%	256.950.000	100%	229.650.000	100%	399.450.000	100%	339.450.000	100%	339.450.000	100%	1.790.050.000	Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama
		Persentase OPD yang menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	538.795.000	100%	538.795.000	100%	538.795.000	100%	1.616.385.000	
		Persentase Laporan realisasi fisik OPD tepat waktu	%	100%	100%	306.275.000	100%	373.225.000	100%	367.519.000	100%	509.995.000	100%	509.995.000	100%	509.995.000	100%	2.577.004.000	
4.01 - 41	Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Lokal	Persentase BUMD yang akuntabel	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	698.367.500	100%	768.204.250	100%	845.024.675	100%	2.311.596.425	Bagian Perekono-mian
	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-procurement	%	100	100	1.365.148.000	100	1.471.162.500	100	2.074.800.000	100%	2.026.365.000	100%	2.330.319.750	100%	2.563.351.725	100%	11.831.146.975	Bagian Layanan Pengadaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase liputan kegiatan KDH & WKDH yang menjadi bahan publikasi	%	100	100	209.660.000	100	162.620.000	100	235.880.000	100%	235.340.000	100%	260.000.000	100%	290.000.000	100%	1.393.500.000	Sekretariat Daerah
4.02	**Pengawasan**					**1.311.823.650**		**2.687.830.598**		**2.338.543.998**		**1.733.460.000**		**1.927.103.750**		**2.119.814.125**		**12.118.576.121**	
4.02 - 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang diaudit/bina APIP	%	0	18,50	501.332.850	18,50	1.509.880.598	18,50	702.744.998	18,50	195.695.000	18,50	235.562.250	18,50	259.118.475	18,50	3.404.334.171	Inspektorat Daerah
		Persentase obrik yang mempunyai hasil pemeriksaan internal	%	0	17	0	17	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	
		Persentase OPD yang hasil revieu laporan keuangannya telah sesuai SAP	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase OPD yang hasil revieu sakipnya mendapat nilai B	%	0	64	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	83	0	
		Persentase obrik yang diaudit oleh pemeriksa eksternal	%	0	19,5	0	19,5	0	19,5	0	19,5	0	19,5	0	19,5	0	19,5	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.02 - 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase unsur Maturitas SPIP yang harus dipenuhi	%	0	100	702.268.800	100	1.119.120.000	100	1.604.544.000	100	1.527.650.000	100	1.680.415.000	100	1.848.456.500	100	8.482.454.300	Inspektorat Daerah
		Persentase elemen kapabilitas APIP yang harus dipenuhi	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase APIP pada Inspektorat Kota Mataram yang Memiliki standar Kompotensi	%	0	74,10	0	77,77	0	92,59	0	95,00	0	100	0	100	0	100	0	
4.02 - 17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Regulasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan pada inspektorat Kota Mataram	regulasi	0	4	108.222.000	3	58.830.000	2	31.255.000	3	10.115.000	3	11.126.500	4	12.239.150	4	231.787.650	Inspektorat Daerah
4.03	**Perencanaan**					**2.907.360.500**		**6.391.725.349**		**9.517.934.540**		**8.024.333.410**		**8.070.683.410**		**8.070.683.410**		**42.982.720.619**	
4.03 - 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	%	50%		1.743.357.500		2.390.714.000	50%	3.895.866.800	60%	3.134.062.410	70%	3.134.062.410	80%	3.134.062.410	80%	17.432.125.530	Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
		Persentase program dan kegiatan dalam RKPD yang tertuang dalam APBD	%	75%					75%		90%		95%		100%		100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.03 - 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi target indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Ekonomi	%	70%		334.078.000		325.900.000	70%	829.600.000	80%	391.550.000	100%	391.550.000	100%	391.550.000	100%	2.664.228.000	Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase konsistensi target indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya	%	70%				1.077.721.349	70%	512.675.000	80%	207.200.000	100%	207.200.000	100%	207.200.000	100%	2.211.996.349	Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi target indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	%	70%		72.375.000		1.312.775.000	70%	1.116.375.000	80%	1.088.050.000	100%	1.088.050.000	100%	1.088.050.000	100%	5.765.675.000	Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 26	Program Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	91%		69.150.000	91	435.207.500	95	791.921.740	95	453.650.000	98	500.000.000	100	500.000.000	100	2.749.929.240	Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.03 - 27	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi	SKPD koordinasi Bidang Ekonomi yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	NA	0	306.200.000	0	414.200.000	85	612.944.000	85	1.500.494.000	95	1.500.494.000	100	1.500.494.000	100	5.834.826.000	Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 28	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	SKPD koordinasi bidang Sosial Budaya yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	NA		313.050.000		0	85	960.802.000	85	786.077.000	95	786.077.000	100	786.077.000	100	3.632.083.000	Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 29	Program Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase urusan pemerintahan yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	NA		69.150.000	0,91	435.207.500	95%	797.750.000	95%	463.250.000	98%	463.250.000	100%	463.250.000	100%	2.691.857.500	Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.04	**Keuangan**					**3.492.139.800**		**3.827.164.900**		**12.359.246.325**		**12.359.246.325**		**12.359.246.325**		**12.359.246.325**		**56.756.290.000**	
4.04 - 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	%	65	70	3.492.139.800	75	3.827.164.900	77	3.492.139.800	79	3.492.139.800	82	3.492.139.800	85	3.492.139.800	85	21.287.863.900	Badan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang telah menyusun Anggaran Satuan Kerja tepat waktu	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		% ASN yang terbina dan memahami materi pelatihan	%	0		0		0		0	100	0		0		0		0	
		% Pelaksanaan Tender tepat waktu	%	0		0		0		0	100	0		0		0		0	
		% implementasi SSH dalam penyusunan RKA perangkat daerah	%	0		0		0		0	100	0		0		0		0	
4.04 - 16	Program Pengendalian Pendapatan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi dan Pelaporan PAD	%	100	100	0	100		100	8.867.106.525	100	8.867.106.525	100	8.867.106.525	100	8.867.106.525	100	35.468.426.100	
		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang Ditndaklanjuti sesuai SOP	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Unit Kerja Penghasil PAD yang Mencapai Target PAD	%	25	25	0	50	0	64	0	71	0	79	0	86	0	86	0	Badan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
4.04 - 17	Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data	Persentase Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Daerah	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Penetapan Pajak Daerah yang Dilaksanakan sesuai SOP	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis IT	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100%	0	100	0	100	0	
4.04 - 18	Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penagihan Pajak Daerah yang Ditindaklanjuti sesuai SOP	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Pelayanan permohonan wajib pajak daerah yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Badan Keuangan Daerah
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti tepat waktu	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Badan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.04 - 19	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Usulan Sertifikat yang Dilimpahkan ke BPN	%	0	34,17	0	35,,31	0	37,21	0	39,09	0	41,14	0	43,38	0	43,38	0	Badan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang telah melakukan rekonsiliasi BMD tepat waktu	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Aset Daerah	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase BMD yg Sudah diinventarisasi atau Up date BMD	%	90	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	
4.04 - 20	Program Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Berbasis Akrual	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Badan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tapat Waktu	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Badan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase OPD yang telah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
4.05	**Kepegawaian**					**3.429.133.500**		**6.597.601.000**		**4.952.700.750**		**6.830.516.351**		**8.287.565.851**		**7.189.845.851**		**37.287.363.303**	
4.05 - 15	Program Pendidikan Kedinasan	% pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	%	56%	56%	774.620.000	59%	2.696.050.000	62%	1.118.308.000	65%	1.482.913.000	68%	3.707.320.000	71%	2.732.050.000	71%	12.511.261.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
4.05 - 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	%	90%	90%	0	90%	0	90%	61.821.000	90%	2.845.960.000	90%	620.000.000	90%	620.000.000	90%	4.147.781.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		% pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	%	2%	2%	286.781.000	2%	910.382.500	2%	1.280.796.750	2%	1.207.905.851	2%	1.329.958.351	2%	1.329.958.351	2%	6.345.782.803	
		%Persentase PNS yang memiliki Pendidikan S1, S2 dan S3	%	61%	61%	560.075.000	62%	817.575.000	63%	345.975.000	64%	230.500.000	65%	238.875.000	66%	238.875.000	66%	2.431.875.000	
4.05 - 32	Program Mutasi dan Pembinaan Pegawai	Persentase Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	%	96%	96%	188.765.000	96%	315.050.000	96%	192.600.000	96%	175.000.000	97%	315.050.000	97	192.600.000	9700 %	1.379.065.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase Tata Usaha Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	96%	96%	422.725.000	96%	282.832.000	96%	270.425.000	96%	136.850.000	97%	177.100.000	97	177.100.000	9700 %	1.467.032.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.05 - xx	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jabatan Stuktural	%	65%	65%	811.655.000	70%	1.176.734.000	75%	955.050.000	80%	521.537.500	85%	1.171.537.500	90%	1.171.537.500	90%	5.808.051.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Sesuai Formasi	%	84%	84%	384.512.500	85%	398.977.500	86%	727.725.000	87%	229.850.000	88%	727.725.000	89%	727.725.000	89%	3.196.515.000	
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**					**-**		**2.087.262.500**		**2.442.945.000**		**1.427.325.000**		**3.014.897.500**		**2.711.387.250**		**11.683.817.250**	
4.07 - 16	Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	100	-	-	100	809.800.000	100	1.392.275.000	100	466.375.000	100	1.707.852.500	100	1.273.637.750	100	5.649.940.250	Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 - xx	Program penelitian dan pengembangan SDA, Sarana/ Prasarana dan Wilayah	Persentase hasil kelitbangan yang di manfaatkan	%	100	-	-	100	771.337.500	100	616.675.000	100	489.700.000	100	663.670.000	100	730.037.000	100	3.271.419.500	Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 - xx	Program penelitian dan pengembangan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase hasil kelitbangan yang di manfaatkan	%	100	-	-	100	506.125.000	100	248.200.000	100	288.350.000	100	442.185.000	100	486.403.500	100	1.971.263.500	Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 - xx	Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Penunjang Kelitbangan	Persentase Hasil Kajian yang memenuhi standar mutu	%	NA	-	-	0	0	100	185.795.000	100	182.900.000	100	201.190.000	100	221.309.000	100	791.194.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Total Program Bekinerja						**220.887.559.024**		**284.928.173.148**		**362.385.887.776**		**364.388.483.843**		**586.655.655.411**		**421.393.917.098**		**2.240.639.676.300**	
	Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD					**171.853.938.466**		**271.183.372.058**		**143.360.262.283**		**105.914.111.147**		**106.297.384.486**		**106.426.334.586**		**905.035.403.027**	
1.04 - 1	Program Pelayanan Administrasi	Melancarkan pelaksanaan tugas dinas	%	98	N/A	95.915.807.650	96	120.278.021.771	97	92.026.314.727	97	71.279.835.053	97	71.279.835.053	98	71.279.835.053	98	522.059.649.308	Seluruh Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar, tertib, dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan	rekening	0	0	0												0	
		Tercukupinya kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		100	0	
1.04 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya koordinasi dan informasi	unit	0	N/A	0	1	1.687.386.500	1	1.488.844.000	1	1.283.188.661	0	1.488.844.000	0	1.488.844.000	0	7.437.107.161	Seluruh Perangkat Daerah
		Terpenuhinya kebutuha operasional (sarana dan prasarana) aparatur dalam menunjang tugas pokok dan fungsi	%	100	100	0	100	425.000.000	100	182.700.000	100	172.382.000	100	350.000.000	100	478.950.100	100	1.609.032.100	
1.04 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	%	0	N/A	2.425.306.999	100	3.401.460.000	100	1.203.555.000	100	548.090.000	100	548.090.000	100	548.090.000	100	8.674.591.999	Seluruh Perangkat Daerah
1.05 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Satpol PP yang tersertifikasi	%	80	80	1.441.340.250	90	2.826.183.600	90	2.348.142.750	100	1.606.261.080	100	1.606.261.080	100	1.606.261.080	100	11.434.449.840	Seluruh Perangkat Daerah
		Prosentase jumlah aparatur yang terdidika dan terlatih diklat teknis	%	19%	19%		19%		25%		31%		36%		42%		42%	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase kejadian kamtibmas yang ditindak langsung di tempat atau lokasi penertiban	%	0		0		0		0	90	0		0		0		0	
1.04 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja	%	0		2.161.479.482	100	3.298.165.715	100	2.094.615.982	100	1.712.335.996	100	1.712.335.996	100	1.712.335.996	100	12.691.269.167	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai LAKIP	Nilai rata-rata seluruh PD	62,99													80		
		Persentase sampah per lingkungan tertangani	%	0		0		0		0	100	0		0		0		0	
		% perangkat daerah mengisi dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan	%	0		0		0		0	100	0		0		0		0	
		% capaian kinerja yang dapat ditingkatkan	%	0		0		0		0	100	0		0		0		0	Seluruh Perangkat Daerah
		% ASN yang terbina dan memahami materi pelatihan	%	0		0		0		0	100	0		0		0		0	
		% Pelaksanaan Tender tepat waktu	%	0		0		0		0	100	0		0		0		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		% implementasi SSH dalam penyusunan RKA perangkat daerah	%	0		0		0		0	100	0		0		0		0	
2.09 - 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya koordinasi dan informasi	%	N/A	N/A	69.586.871.585	N/A	138.847.991.972	65,6	43.592.042.324	67,00	27.238.308.931	68,00	27.238.308.931	69,00	27.238.308.931	69,00	333.741.832.675	Seluruh Perangkat Daerah
2.09 - 05	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan operasional (sarana dan prasarana) aparatur dalam menunjang tugas pokok dan fungsi	%	N/A	N/A	323.132.500	N/A	419.162.500	65,6	424.047.500	67,00	410.000.000	68,00	410.000.000	69,00	410.000.000	69,00	2.396.342.500	Seluruh Perangkat Daerah
2.09 - 7	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Ketepapatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan di Semua OPD	%	N/A	N/A	0	N/A	0	100	0	100	1.663.709.426	100	1.663.709.426	100	1.663.709.426	100	4.991.128.278	Seluruh Perangkat Daerah
Total Seluruh Program						**558.259.345.040**		**671.143.312.643**		**609.057.515.659**		**547.959.127.229**		**784.888.459.497**		**638.307.604.534**		**3.809.615.364.603**	

BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diambil dari indikator sasaran strategis RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagamaimana Tabel berikut:

Tabel 1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Mataram

No	Indikator	Target Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Keamanan Manusia	NA	3	3	3	4	4
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,2	77,84	78,28	78,72	79,16	79,60
3	Persentase Penduduk Miskin (Head Count Index)	9,8	9,55	9,05	8,55	8,05	7,55
4	Pertumbuhan Ekonomi	8,06	8,07	8,17	8,20	8,27	8,35
5	Indeks Kota Layak Huni	60	61,6	61,6	63	65	67
6	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	BB	BB	BB
7	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	256,25	252,08	247	242	237	232
8	Indeks Toleransi	4,05	3,78	3,8	3,9	4	4,2
9	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	101,7	123,2	96	72	77	77
10	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,5	15,51	15,58	15,66	15,73	15,8
11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,25	9,32	9,39	9,46	9,53	9,6
12	Indeks Pembangunan Kesehatan	0.627	0.631	0.640	0.643	0.647	0.650

No	Indikator	Target Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Masyarakat						
13	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,70	70,98	71,23	71,48	71,73	71,98
14	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)	61	62	63	64	65	65
15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,452	0,427	0,402	0,377	0,352	0,327
16	Kategori penilaian Kota Layak Anak (KLA)	530	600	700	700	700	700
17	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,69	1,73	1,66	1,58	1,51	1,43
18	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,43	0,47	0,42	0,37	0,32	0,27
19	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	11,41	10,05	9,73	9,50	9,30	9,00
20	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	3	3	3	3	3	3
21	PDRB per Kapita	24.635.969	26.632.769	28.267.632	30.004.992	31.898.783	33.947.459
22	Laju Inflasi	2,47	3,59	3,5	3,5	3,5	3,5
23	Indeks Gini	0,357	0,394	0,374	0,354	0,334	0,314
24	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93,83	94,65	95,35	95,54	95,73	95,93
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,17	5,35	4,65	4,46	4,27	4,07
26	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	50	50	50	80	80	80
27	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	55	56,99	57	59	62	65
28	Nilai SAKIP	58,88	63,13	65	70	75	80
29	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Nilai Unit Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB	B	BB	BB	A-	A	A+
31	Rasio Kemandirian Daerah	20,66	27,17	28	29	30	35

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Mataram sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada Kota Mataram yang disajikan ke dalam aspek dan bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah seperti yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8-2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram Tahun 2016-2021

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,99	8.06	8.07	6.48	7.26	7.89	8.05	8.05	BAPPEDA	BKD, DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Disperinkop UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja
2.	Pendapatan Per Kapita (Rp./kapita)	24.672.769	25.832.769	26.632.769	27.808.568	29.261.876	30.999.058	32.898.088	32.898.088		
3.	Indeks Gini	0,371	0,357	0,394	0,374	0,354	0,334	0,314	0,314		
4.	Laju Inflasi (%)	3,25	2,47	3,59	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	BAPPEDA	Dinas Perdaganga, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Bag. Ekonomi
5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,5	6,17	5,35	4,65	6.35	6.02	5.71	5.71	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Pariwisata, Disperinkop UKM
6.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92,5	93,83	94,65	95,35	93.65	93.98	94.29	94.29		
7.	Angka Kemiskinan (%)	10,45	9,8	9,55	9,05	9.46	9.06	8.66	8.66	BAPPEDA	Dinsos, Disperinkop UKM, DPPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian,
8.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,53	1,69	1,73	1,66	1,58	1,51	1,43	1,43	BAPPEDA	
9.	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,38	0,43	0,47	0,42	0,37	0,32	0,27	0,27	Bappeda	

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
10.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	12	11,41	10,05	9,73	9,50	9,30	9,00	9,00	DPPKB	
11.	Angka Indeks Pembangunan Manusia	76,37	77,2	77,84	78,28	78,72	79,16	79,60	79,60	Bappeda	Disdikbud, Dikes
12.	Angka Harapan Lama Sekolah	15,28	15,5	15,51	15,58	15,66	15,73	15,8	15,8	Dinas Pendidikan	
13.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,05	9,25	9,32	9,39	9,46	9,53	9,6	9,6		
14.	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,43	70,70	70,98	71,23	71,48	71,73	71,98	71,98	Dikes	
15.	Prevelensi Balita Gizi Buruk (%)	2,54	2,49	2,45	2,34	2,33	2,21	2,2	2,2		
16.	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	3	3	3	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas PU
17.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	82.13	86.13	88.13	90.13	92.13	94.13	96.13	96.13		
18.	Nilai SAKIP	58,72	58,88	63,13	65	70	75	80	80	Bappeda, Inspektorat, SETDA	Semua Prangkat Daerah
19.	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	SETDA	INSPEKTORAT
20.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD	Semua Prangkat Daerah
21.	Rasio Kemandirian Daerah	17,79	20,66	27,17	24,67%	24,50%	25,50%	26,50%	26,50%	BKD	Dinas Perdagangan, RSUD
II. ASPEK PELAYANAN UMUM											
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
	Pendidikan										
21	APS PAUD	21.92	21.92	22.92	23.92	24.92	25.00	25.00	21.92	Dinas	

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
22.	APK PAUD	55,64	55,64	56,14	56,64	57,14	57,64	58,14	55,64	Pendidikan	
23	APM PAUD	36,75	36,75	37,25	37,65	38,25	38,65	39,25	39,25		
24.	APS Pendidikan Dasar dan Setara	91.14	91.14	92.14	92.14	100	100	100	100		
25.	APK Pendidikan Dasar dan Setara	100.59	100.59	104.02	107.14	110.35	116.67	117.08	117.08		
26	APM Pendidikan Dasar dan Setara	91,76	91,76	93,15	102,27	102,27	102,27	102,27	102,27		
27	APS SMP dan Setara	78.73	78.73	78.73	79.00	100	100	100	100		
28	APK SMP dan Setara	108.59	108.59	104.02	107.14	110.35	113.67	117.08	117.08		
29	APM SMP dan Setara	100,32	100,32	84,08	92,55	95,00	95,00	95,00	95,00		
30	Angka Kelulusan Sekolah Dasar	100	100	100	100	100	100	100	100		
31	Angka Kelulusan SMP	99,33	99,33	99,92	94,03	100	100	100	100		
32	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD	74,82	74,82	74,92	72,81	75,00	75,00	75,00	75,00		
33	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	61,38	61,38	63,42	54,27	60,00	60,00	60,00	60,00	Dinas Pendidikan	
34	Angka Melanjutkan SD	93,31	93,31	85,59	89,88	95,00	95,00	95,00	95,00		
	Kesehatan										
35	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0	0.627	0.631	0.640	0.643	0.647	0.650	0.650	Dikes	
36	Prevalensi balita gizi buruk	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
37	Prevalensi balita stunting	-	-	37,8	33,19	30	25	20	20		
38	Angka Kematian Ibu (AKI)	142	142	142	130	130	120	120	120		
39	Angka Kematian Bayi (AKB)	6	6	6	5	5	5	4	4		
40	Persentase Penyakit menular yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100		

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
41	Persentase Penyakit Tidak menular yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100		
42	MDR (rasio kejadian kematian <48 jam per 1000 pasien)	24,46	24,71	22,35	19,35	16,35	13,35	10,35	10,35	RSUD	
43	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100		
44	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%			
45	Persentase Kemandirian Rumah Sakit	1,13	1,04	1,12	1,03	0,64	0,70	0,65			
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
46	Persentase jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	56,56	65	70	75	82	85	90	90	DPUPR	
47	Persentase luas kawasan genangan	-	-	-	-	20%	19%	18%			
48	Lamanya genangan	-	-	-	-	180 menit	170 menit	160 menit	160 menit		Dinas LH
49	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	96,0%	96,0%	97,0%	98,0%	98,5%	99,0%	99,5%	99,5%		Dinas Pertanian
50	Cakupan layanan air minum	68	68	72	76	80	90	100	100		Dikes
51	Persentase bangunan yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	0	0	2	5	8	10	13	13		BAPPEDA, Dinas Perkim, DPMPTSP
52	Nilai kinerja penataaan ruang	0	0	2,01	2,01	2,5	2,51	2,51	2,51		BAPPEDA, Dinas Perkim, DPMPTSP
53	Cakupan akses pengolahan air limbah	88	88	90	92	95	100	100	100		Dinas LH
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
54	Persentase luas permukiman yang tertata	90.43%	90.43%	94.59%	96.60%	98.46%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinas Perkim	BAPPEDA
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
55.	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang tertangani	75	75	80	85	90	90	95	95	Sat. POL PP	Badan Kesbangpol, Kecamatan
56.	Indeks Kota Toleran	4,05	4,05	3,78	4,41	4,91	4,94	5,54	5,54	Badan Kesbangpol	Sat. POL PP, Dinas Sosial
57.	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (kelurahan)	50 kelurahan	50 kelurahan	50 kelurahan	50 kelurahan	50 kelurahan	50 kelurahan	50 kelurahan	50 kelurahan	Dinas Pemadam Kebakaran	BPBD, Dinas Sosial
58.	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	149,2	101,7	123,2	96	72	77	77	77		
	Sosial										
59.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	2,36	2,36	2,50	2,79	2,99	3,23	3,52	3,52	Dinas Sosial	BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran
60.	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	38,80 %	38,80 %	40,66 %	42,22 %	53,31 %	57,78 %	63,23 %	63,23 %		
	LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
	Tenaga Kerja										
61.	Persentase Pencari Kerja Yang Terlath	0	0	1,42	2,96	4,38	5,81	7,23	7,23	Dinas Tenaga Kerja	
62.	Persentase penerapan aturan ketenaga kerjaan oleh perusahaan	0	0	77,12	84,95	90,00	95,00	100,00	100,00		
63.	persentase penempatan tenaga kerja	0	0	10,3	16,35	22,57	28,79	35,02	35,02		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
64.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.30	92.40	92.50	92.60	92.70	97.80	97.85	97.85	DPPPA	
65.	Nilai Kota Layak Anak (KLA)	inisiasi	inisiasi	500-600	500-600	600-700	600-700	600-700	600-700		
66.	Cakupan Layanan Kasus Perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Ketahanan Pangan										
67.	Persentase Pencapaian SPM Ketahanan Pangan	91,19	91,19	90,39	92,36	94,14	95,85	99,00	99,00	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan
	Lingkungan Hidup										
68.	Nilai IKPLHD (informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)	54	54	55	56	57	58	59	59	Dinas LH	
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
69.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan dukcapil	2,47	2,47	3,59	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Dukcapil	
70.	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat										
71.	Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan	Badan Kesbangpol
72.	persentase masyarakat yang memperoleh layanan fasilitas pemberdayaan masyarakat oleh kecamatan	Na	Na	Na	50%	75%	85%	100%	100%		
73.	Persentase lingkungan bersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Dinas LH
74.	IKM Kecamatan	na	na	na	93	80	80	80	80		

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
75.	Rasio Akseptor KB MKJP	50%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%	DPPKB	
76.	Laju pertumbuhan Penduduk (%)	3%	3%	2.70%	2.60%	2.50%	2.40%	2.30%	2.30%		
	Perhubungan										
77.	Prosentase penggunaan moda angkutan umum	7%	7%	7%	8%	8%	9%	9%	9%	Dishub	
78.	Rasio waktu perjalanan	1,80	1,80	1,80	1,80	1,75	1,75	1,65	1,65		
	Komunikasi dan Informatika										
79.	Prosentase aplikasi kegiatan pemerintahan yang handal (memenuhi standar SPBE)	-	-	-	-	-	100	100	100	Diskominfo	
80.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik	-	-	50	55	60	95	100	100		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
81.	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	9,62	9,62	10	15	18	20	25	25	Disperinkop UKM	
	Penanaman Modal										
82.	Nilai IKM Pelayanan Perijinan	76	76	78	82	82	84	84	84	DPMPTSP	
	Kepemudaan dan Olahraga										
83.	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	NA	NA	61%	67%	73%	80%	86%	86%	Dispora	Dinas Pendidikan, Kecamatan
84.	Jumlah Medali Perolehan Prestasi Olahraga	-	-	emas ; 5 Perak :6 Perunggu ; 1	emas ; 6/7 Perak :7/9 Perunggu ; 2/5	emas ; 7 Perak :8 Perunggu ; 3	emas ; 8 Perak :9 Perunggu ; 4	emas ; 9 Perak :10 Perunggu ; 5	emas ; 9 Perak :10 Perunggu ; 5		
	Statistik										

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
85.	Prosentase ketersediaan Dokumen statistik sektoral	-	-	100	100	100	100	100	100	Diskominfo	
	Persandian										
86.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	Level I	Level II	Level II	Diskominfo	
	Kebudayaan										
87.	Persentase sanggar seni yang menerima aspresiasi	0	0	30	30	35	35	35	35	Dinas Pendidikan	
	Perpustakaan										
88.	Persentase Kunjungan Perpustakaan per tahun	7,71	7,71	9,66	3,10	3,53	4,03	4,61	4,61	Dispus Arsip	
	Kearsipan										
89.	Persentase SDM Kearsipan yang berkompeten	0	0	0	38,46	37,04	44,44	55,56	55,56	Dispus Arsip	
90	kecepatan mendapatkan arsip	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	1 menit	1 menit	1 menit	1 menit		
91	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	41,03	41,03	43,59	46,15	48,72	51,28	53,85	53,85		
	LAYANAN URUSAN PILIHAN										
	Kelautan dan Perikanan										
92.	Konsumsi ikan perkapita (ton)	0	0	31	34	35	36	36	36	Dinas Perikanan	
	Pariwisata										
93.	Jumlah Kunjungan wisatawan	623.835	623.835	714.291	671.434	762.125	823.095	888.942	888.942	Dinas Pariwisata	
94.	Rata-rata lama tinggal Wisatawan	2,5 Hari	2,5 Hari	2,5 Hari	2,5 Hari	2,5 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari		
95.	PDRB Sektor Pariwisata	182.690 Milyar	182.690 Milyar	199.269 Miliyar	204.909 Milyar	213.925 Miliyar	228.472 Miliyar	245.608 miliyar	1.274,83 Triliyun		

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
	Pertanian										
96.	Jumlah produksi pertanian									Dinas Pertanian	
	- Padi	37.040 ton	37.040 ton	31.476 ton	32.000 ton	30.000 ton	27.000 ton	25.000 ton	25.000 ton		Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR
	- Kedelai	441 ton	441 ton	171 ton	429 ton	430 ton	435 ton	450 ton	450 ton		
	- Jagung	-	-	231 ton	311 ton	315 ton	320 ton	325 ton	325 ton		
	- Sayuran (ton)	1.254	1.254	1.208	1.389	1.392	1.400	1.400	1.400		
	- Buah2-an (ton)	1.090	1.090	1.094	1.688	1.690	1.700	1.700	1.700		
97.	Jumlah produksi daging	1.247 ton	1.247 ton	1.393 ton	1.342 ton	2.000 ton	2.200 ton	2.500 ton	2.500 ton		Dinas Ketahanan Pangan
98.	Persentase volume produksi pertanian yang diolah	10%	10%	12%	13%	15%	17%	20%	20%		Dinas Ketahanan Pangan
	Perdagangan										
99.	Laju Pertumbuhan PDRB kategori usaha Perdagangan	8.68	8.68	9.22	9.76	10.30	10.84	11.38	11.38	Dinas Perdagangan	
100.	Persentase usaha sektor perdagangan yang tertib niaga	83	83	85	87	91	93	96	96		
	Perindustrian										
101.	Persentase peningkatan volume usaha industri	4,63	4,63	1,87	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	Disperinkop UKM	
102.	Persentase PDRB Sektor Industri	6,82	6,82	7,30	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3		
	Transmigrasi										
103.	Persentase pengiriman transmigran ke daerah transmigrasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja	

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
	PENUNJANG URUSAN										
	Perencanaan Pembangunan										
104.	Nilai aspek perencanaan pada Evaluasi SAKIP	-	-	19,71	20,34	22,00	24,00	26,00	26,00	Bappeda	
105.	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Keuangan										
106.	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	67,87	-	67,87	65,50	70	75	85	85	BKD	
107	Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
108.	Persentase Daya Serap APBD	93,30%	93,30%	92,37%	93,00%	100%	100%	100%	100%		
109.	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat	34,17%	34,17%	35,51%	37,03%	38,73%	40,61%	42,84%	42,84%		
110	Persentase Barang Milik Daerah yg Terinventarisir Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%		
111	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	28,47%	28,47%	16,44%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	64,91%		
112	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	20,65%	20,65%	27,17%	24,67%	24,50%	25,50%	26,50%	148,99%		
	Kepegawaian serta pendidikan pelatihan										
113	Persentase Pejabat Struktural yang mendapat peningkatan kompetensi	56%	56%	59%	62%	65%	68%	71%	71%	BKPSDM	
114.	Persentase Pejabatan Fungsional yang mendapat peningkatan kompetensi	3%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	8%		

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
115.	Nilai Indeks Profeisionalitas ASN	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%		
116	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	0	0	0	0	70%	75%	80%	80%		
	Penelitian dan Pengembangan										
117.	Porsentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	-	-	63	70	68	73	73	73	Balitbang	
	Pengawasan										
118.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	87%	89%	93%	90%	91%	92%	92%	92%	Inspektorat	
119.	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan	74%	79%	82%	84%	87%	93%	93%	93%		
120	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD yang mendapat nilai baik (minimal B)	76%	70%	61%	65%	80%	85%	90%	90%		
121	Persentase Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP seluruh Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
122	Level Kapabilitas APIP	1	2	3 dengan Catatan	3	3	3,05	3,1	3,1		
123	Level Maturitas SPIP	1	1	3	3	3	3	3	3		
	Administrasi Pemerintaham										
124	persentase program-program DPRD yang terfasilitasi	80%	100	100	100	100	100	100	100	Setwan	
125	Persentase OPD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tercapai	n/a	100	100	100	100	100	100	100	SETDA	
126.	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana rumah tangga kepala daerah	n/a	100	100	100	100	100	100	100		

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
127.	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana sekretariat daerah	n/a	100	100	100	100	100	100	100		
128.	Indeks kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah	n/a	100	100	100	100	100	100	100		
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
129.	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	253.87	256.25	252.08	247.08	242.08	237.08	232.08	232.08	POL-PP	Kecamatan/ Kelurahan
130.	Indeks Keamanan Manusia	NA	NA	3	3	3	4	4	4	Bappeda	Pol PP, Badan Kesbangpol, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran
131.	Indeks Toleransi	4,05	4,05	3,78	3,8	3,9	4	4,2	4,2	Bappeda	Pol PP, Badan Kesbangpol, Dinas Sosial
132.	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	101,7	101,7	123,2	96	72	77	77	77	BPBD	Dinas Pemadam Kebakaran
133.	Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan dan Penilaian Ombudsman	B	B	BB	BB	A-	A	A+	A+	Bagian Organisasi	Dinas Dukcapil, DPMPTSP, RSUD
134.	Indeks Kota Layak Huni	n/a	60	61,6	61,6	63	65	67	67	Bappeda	Dinas PUPR, Perkim, LH
135.	Target penilaian maturitas SPIP (level)	-	persiapan	persiapan	persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	
136.	Target penilaian kapabilitas APIP (level)	-	persiapan	persiapan	persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	
137.	Kunjungan wisatawan (orang)	284.902	512.725	597.725	682.725	767.725	852.725	937.725	937,725	Dinas Pariwisata	

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
138.	Prosentase aplikasi kegiatan pemerintahan yang handal (memenuhi standar SPBE)	-	-	-	-	-	100	100	100	Diskominfo	
139.	Cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar Ombudsman (%)	69,2	69,2	69,2	100	100	100	100	100	SETDA	
140.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	76.16	76.16	78.27	79.02	79.77	80.52	81.27	81.27	SETDA	DPMPTSP, Dukcapil, Diskominfo, RSUD, Dikes
141.	Realisasi Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	PMA : $7.696.170 PMDN : 972,08 juta	PMA : $ 285.043 PMDN : 150 milyar	PMA : $ 285.043 PMDN : 850 milyar	PMA : $ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : $ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : $ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : $ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : $9.046.430 PMDN : 3 trilyun	DPMPTSP	SETDA

BAB 9
PENUTUP

Perubahan kebijakan nasional, masukan dan rekomendasi kajian RTRW dan KLHS serta adanya kondisi darurat dan luar biasa pascabencana menjadi landasan utama dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota Mataram, merupakan pelaksanaan tahap ketiga dan awal tahap keempat arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 dengan tetap mempertahankan tema utama "**TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA"** yang dibingkai dalam semangat *"Melanjutkan Kepemimpinan*" yang tetap terbuka terhadap perubahan untuk penyempurnaan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1, antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru;
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang kemudian akan disesuaikan dengan RPJMD yang baru.

Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016 – 2021 ini menjadi pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman untuk menyusun RKPD pada tahun RPJMD yang tersisa serta hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Sehubungan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1) Pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Mataram
2) Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kota Mataram dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Mataram serta masyarakat dan dunia usaha agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya sehingga arah kebijakan setiap tahunnya dalam lima tahunan dapat dicapai;
3) Agar terjadi kesinambungan dan konsistensi dalam penyusunan kebijakan daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021;
4) Penjabaran lebih lanjut atas Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 ini untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram;
5) Penyusunan RKPD Kota Mataram dilakukan melalui proses Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai MPBM Kelurahan, MPBM Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan MPBM Tingkat Kota Mataram;
6) RKPD Kota Mataram menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan pendekatan pencapaian kinerja berorientasi hasil (*outcomes*);
7) Dalam hubungannya dengan penganggaran daerah, RKPD Kota Mataram merupakan dasar dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
8) Renja yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
9) Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.
10) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021 secara efektif berlaku sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2019, 2020 dan 2021

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun sebagai wujud komitmen dalam memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Kota Mataram, keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Mataram tahun 2016 - 2021 sangat bergantung dari peran seluruh pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya. Masyarakat Kota Mataram perlu diberikan ruang agar dapat berperan dalam pelaksanaan pembangunan RPJMD Kota Mataram tahun 2016 - 2021. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud penguatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Dengan dukungan berbagai pihak, khususnya warga masyarakat Kota Mataram maka keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas yang akumulasinya adalah "***Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya***".

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

PEMERINTAH KOTA MATARAM

JL. PEJANGGIK NO.16 MATARAM
NUSA TENGGARA BARAT